

R. P. SOEROSO

DOKUMEN-DOKUMEN TERBATAS TENTANG DIRINYA

DISUSUN OLEH : DRS. ANHAR GONGGONG



**Direktorat
Kebudayaan**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984**

970.0152
ANSA
r

MILIK DEPARTEMEN P & K
TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

R.P. SOEROSO

DOKUMEN - DOKUMEN TERBATAS TENTANG DIRINYA

Disusun Oleh :

DRS. ANHAR GONGGONG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

Penyunting

1. **Sutrisno Kutoyo**
2. **Drs. M. Soenyata Kartadarmadja**

Gambar kulit oleh :

M. S. Karta.

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi Tokoh dan Pahlawan Nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian Tokoh dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Juni 1983

**Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional**

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DOKUMEN-DOKUMEN TENTANG DIRI R.P. SUROSO	5
BAB III CATATAN ATAS BAHAN-BAHAN DO- KUMEN TENTANG DIRI RADEN PANJI SUROSO	170
BAB IV PENUTUP	174
LAMPIRAN-LAMPIRAN	177

BAB I

PENDAHULUAN

Harga seorang pejuang bangsa sebenarnya tidak selalu ditentukan oleh pendapat masyarakat luas; sebab kebenaran juga tidak selalu bersumber dari mereka. Tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa penentu akan harga kepejuangan yang dimaksud pasti akan didasarkan atas penilaian dari apa yang disebut: masyarakat umum. Juga harga yang diberikan oleh masyarakat umum tidaklah selalu dapat diterima sepenuhnya oleh tokoh yang bersangkutan, tokoh yang telah diberikan sekian banyak penghargaan.

Akan tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa adanya penghargaan, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat umum, tentulah disebabkan oleh karena tokoh yang bersangkutan telah melakukan pelbagai kegiatan yang telah memberikan "maknanya yang besar" terhadap orang lain, tidak hanya untuk dirinya. Yang bersangkutan bahkan "mungkin" telah dinilai memberikan seperangkat kegiatan yang membuahakan makna besar bagi bangsanya. Pemberian makna yang demikian oleh tokoh yang bersangkutan, mungkin sekali tidak pernah dipikirkannya akan memperoleh penghargaan dari masyarakatnya.

Demikianlah halnya dengan seorang tokoh yang pada kesempatan ini dicoba kumpulkan dokumen-dokumen tentang pelbagai hal dari diri dan kegiatan-kegiatannya selama berkarya buat bangsanya; baik ketika bangsanya masih berada di dalam belenggu penjajahan maupun setelah bangsanya berhasil melepaskan diri dari belenggu itu. Tokoh ini, RADEN PANDJI SOEROSO, melalui pelbagai kegiatannya dan dengan ukuran-ukurannya sendiri, tidak dapat disangkal adalah salah seorang tokoh bertingkat nasional, karena buah-buah kegiatannya sedi-

kit banyak telah menjadi bagian dari kelangsungan hidup bangsanya. Beliau adalah salah seorang *tokoh nasional*, yang sebenarnya *cukup patut* untuk memperoleh gelar — sebagai mana yang diberikan kepada rekan-rekan seangkatannya yang lain — *pahlawan nasional*.

Sebagaimana diketahui R.P. Suroso telah wafat pada tanggal 16 Mei 1981 di Jakarta. Dalam perjalanan hidupnya, beliau termasuk di antara orang-orang yang termasuk kategori "perintis kemerdekaan". Di dalam mengabdikan diri kepada bangsa dan negerinya beliau telah berjuang untuk melepaskan belenggu penjajahan asing, baik Belanda maupun Jepang. Di dalam periode Pegerakan Nasional, sampai datangnya pendudukan Jepang pada tahun 1942, beliau menjadi anggota *volksraad* dan keanggotaannya itu telah didudukinya sejak tahun 1924. Di samping itu, beliau telah melakukan kegiatan di pelbagai bidang, seperti untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada pegawai negeri. Karena itu beliau termasuk pendiri organisasi kepegawaian pada waktu itu, yaitu yang bernama: *Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri* (P.V.P.N) dan organisasi ini selalu berada di bawah pimpinannya. Ia juga pernah menjadi anggota dari Sarekat Islam dan kemudian pindah ke Parindra dan setelah kemerdekaan Parindra dibentuk kembali dan beliau adalah ketuanya. Tetapi tidak itu saja; beliau sejak awal adanya pergerakan nasional pada tahun 1908, yaitu dengan lahirnya Budi Utomo, beliau telah menjadi anggotanya. Juga pernah menjadi Ketua Pengurus Besar *Burgerlijke Openbare Werken* (BOW). di samping itu, pada tahun 1917, beliau adalah anggota *Gemeente Raad* Probolinggo. Demikianlah seterusnya, beliau tidak pernah sepi dari kegiatan-kegiatan untuk melepaskan bangsa dan negaranya dari belenggu penjajahan. Di dalam *Volksraad* beliau bertemu ide dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya yang terkemuka, seperti M. Husni Thamrin, tokoh Betawi yang disegani baik oleh lawan maupun oleh kawan, dengan Iskandar Dinata, Kusumo Utoyo dan lain-lain. Pertemuan mereka akhirnya berhasil membentuk suatu fraksi di dalam *Volksraad* dan ini terkenal dengan *Fraksi Nasional*.

Mereka yang bersedia menerima keanggotaannya di dalam lembaga-lembaga pemerintahan kolonial pada waktu itu, termasuk keanggotaan Volksraad, adalah orang-orang pergerakan yang dikategorikan dengan golongan Kooperator, yaitu orang pergerakan yang bersedia berkooperasi dengan pemerintah Belanda pada waktu itu. Mereka yang termasuk di dalam golongan ini, jadi termasuk R.P. Suroso, oleh Ali Sastroamidjojo disebut sebagai "golongan nasionalis kanan".¹

Tetapi walaupun demikian, mereka yang termasuk di dalam kelompok nasionalis kanan ini tetap merupakan orang-orang yang telah berjuang dengan caranya sendiri, karena itu akan tetap mempunyai tempatnya yang tersendiri di dalam sejarah pergerakan nasional bangsa dan negara kita. Tujuan mereka adalah tetap sama dengan golongan *radikal*, atau yang disebut golongan "kiri", yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hal ini secara jelas nampak di dalam anggaran dasar dari Fraksi Nasional di mana R.P. Suroso sebagai anggotanya. Di dalamnya kita mengetahui adanya tujuan seperti berikut:

Ayat 1 : Fraksi Nasional dalam Volksraad bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.

Ayat 2 : Mereka mencoba mencapai tujuan ini dengan:

- a. menggalakkan perubahan-perubahan politik;
- b. menuntut penghapusan segala perbedaan politik, ekonomi dan intelektual yang merupakan akibat antithese kolonial;
- c. menggunakan semua ikhtiar yang dipandang syah untuk maksud tersebut.²

1. Lihat Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tinggak Diperjalananku*", Kinta, Jakarta, 1974, hal. 95.

2. M.H. Thamrin, "Fraksi Nasional Dalam Volksraad", di dalam A. Zainoel Ihsan & Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemaren Di Hari Esok*, Jayasakti, Jakarta, 1981, hal. 250.

Demikianlah, secara jelas, para nasionalis kanan di dalam Fraksi Nasional telah menunjukkan sikap dan tujuannya secara jelas, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, juga dalam waktu yang secepatnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, R.P. Suroso tetap menjadi pejuang melalui pelbagai jabatan yang dipercayakan kepadanya. Beliau adalah Gubernur Jawa Tengah, Anggota KNIP-Pusat dan termasuk sebagai anggota Badan Pengurus Pusat lembaga kenegaraan tersebut, semuanya terjadi pada awal kemerdekaan (1945). Kemudian pada tahun 1946 beliau diangkat sebagai Komisaris Tinggi untuk daerah Solo dan Yogyakarta. Ketika Belanda melakukan penyerangan ke Yogyakarta dalam rangka usaha untuk merebut ibukota Republik itu pada tahun 1948, pemimpin-pemimpin Negara ditangkapi penjajah, termasuk Sukarno-Hatta dan beberapa orang lainnya, dibentuklah suatu pemerintahan yang bersifat darurat dengan pimpinan pemerintahan diserahkan kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara dengan kedudukan pusatnya di Sumatera. Dalam rangka itu R.P. Suroso telah diangkat pula sebagai salah seorang anggota pemerintahan Darurat yang berkedudukan di Jawa; ini terjadi pada tahun 1948–1949. Pada tahun 1950 beliau menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mewakili Parindra. Tetapi pekerjaan ini tidak lama didudukinya, karena pada tahun itu juga beliau diangkat sebagai Menteri Perburuhan di dalam Kabinet waktu itu. Sejak itu sampai tahun 1956, beliau telah menduduki jabatan Menteri, seperti Menteri Urusan Pegawai, kemudian Menteri Sosial (dua kali) dan kemudian Menteri PUTL, merangkap Menteri Dalam Negeri ad intrim. Setelah lepas dari pekerjaan-pekerjaan eksekutif tinggi itu, maka beliau pun tetap aktif dalam pelbagai bidang, terutama sekali di bidang perkoperasian Pegawai Negeri. Beliau telah aktif menjadi pimpinan tertinggi (ketua Umum) dari Induk Koperasi Pegawai Negeri sampai tahun 1981. Karena jasa-jasanya di dalam mengembangkan perkoperasian pegawai negeri ini, oleh Presiden Su-

harto beliau telah dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Pelbagai penghargaan yang diberikan kepada beliau, baik yang diberikan pemerintah maupun oleh masyarakat umum, jelas merupakan pertanda akan harga dari kepejuangannya yang telah ditampakkannya selama hayatnya. Itu semua, secara singkat dapat dikatakan sebagai pertanda dari "ketokohnya", *tokoh nasional*.

BAB II

DOKUMEN-DOKUMEN TENTANG DIRI R.P. SUROSO

Pada bab ini diberikan dokumen-dokumen yang berhasil diperoleh dari pelbagai sumber; baik yang berasal dari catatan beliau sendiri maupun dari kalangan keluarganya. Juga kami peroleh dari pelbagai surat kabar dan majalah. Selanjutnya dari beberapa buah buku yang telah ditulis oleh beberapa pengarang, baik yang telah mengenal dengan beliau maupun tidak. Beberapa catatan ini berasal dari orang-orang yang telah mengenal beliau, karena pernah bersama di dalam arena perjuangan pada periode Pergerakan Nasional maupun dari periode Revolusi fisik.

Dokumen-dokumen itu sedapat mungkin diberikan dalam bentuk "aslinya"; atau kalau tidak akan disalin berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam penelitian "ilmiah", sehingga dapat diperoleh sebagaimana yang terdapat pada sumber aslinya.

Khusus catatan riwayat hidup beliau terdapat tiga catatan yang cukup lengkap, yang menurut sumber yang kami peroleh adalah berasal dari catatan yang diketik oleh beliau sendiri. Catatan pertama adalah tertanggal 12 April 1975 dengan disertai nama beliau, tetapi tanpa tanda tangan. Tetapi, sebagaimana yang kami katakan di atas, catatan ini merupakan tulisan ketikan dari beliau sendiri. Judul catatan itu ialah: *Singkatan Riwayat Hidup Raden Pandji Suroso*.¹ Catatan kedua berjudul: *Riwayat Hidup Raden Pandji Suroso* dan catatan ini nampaknya juga bersumber dari catatan yang pertama, tetapi catatan ini kemudian disalin dan diketahui oleh salah seorang anaknya, yaitu R.P. Soengeng; catatan ini tak bertanggal, hanya disertai kata "diketahui" dan di bawah kata itu langsung tanda

1. Lihat halaman 5-21

tangan anaknya tersebut dan di bawah tanda tangan itu disertai dengan nama terangnya; R.P. Soegeng.² Catatan ketiga berjudul: *Catatan Singkat Riwayat Hidup Raden Pandji Soe-roso*; catatan ini juga merupakan salinan dari yang pertama karena nama beliau juga telah dicantumkan dan di atasnya terdapat singkatan (ttt), terletak di sebelah kanan.

Sedang nama penyalin (yang menurun) terletak di sebelah kiri, yaitu *Soebagio* yang disertai dengan tanda tangan. Salinan catatan ini bertanggal Jakarta, 14 Juli 1981, tetapi tanpa nama instansi tempat penyalin bekerja.³

Perlu pula disebutkan di sini bahwa catatan-catatan itu adalah merupakan *foto copy* yang kami peroleh dari Departemen Sosial, Badan Pembina Pahlawan Pusat. Adapun dokumen dokumen lainnya kami peroleh dari beberapa surat kabar, majalah dan buku-buku dari beberapa penulis.

SINGKATAN RIWAYAT HIDUP RADEN PANDJI SUROSO

1. Nama : Raden Pandji Suroso
2. Lahir : Tanggal 3 Nopember 1893 di Sidoardjo Surabaya Jawa Timur
3. Bangsa : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pendidikan : Sekolah Dasar Klas I dan Kweekschool 6 tahun di Probolinggo (Jawa Timur)
6. Kawin : Kawin
7. Anak : 8 orang anak; 4 Laki-laki dan 4 Perempuan
8. Jabatan/dan kegiatan dalam masyarakat.
 - a. Dalam tahun 1908 menjadi anggota Budi Utomo masih menjadi murid Kweekschool. Waktu itu Budi Utomo masih belum mempunyai tujuan Politik.

2. Lihat halaman 22-26

3. Lihat halaman 27-48.

- b. Dalam tahun 1912 menjadi anggota Serikat Islam (S.I).
- c. Dalam tahun 1912 duduk di kelas 6 Kweekschool dan ujian kurang 1 bulan, dikeluarkan dari Sekolah tersebut, karena memimpin pemogokan murid seluruh Sekolah yang tidak puas dengan beleid Direktur Sekolah tersebut seorang Belanda yang menghina Bangsa Indonesia.
- d. Ke Surabaya belajar Jurnalistik.
- e. Dalam tahun 1915 menjadi Presiden S.I. di Probolinggo dan Krasakan. Pada waktu itu saya berusia \pm 21 tahun sekalipun saya muda itu toh dapat juga memimpin rakyat di daerah itu yang penduduknya termasuk suku Madura. Hal itu karena saya mendapat kepercayaan mereka.
Saya bersama anggota pengurus S.I. menitik beratkan pada Gerakan Nasional dan Perbaikan Ekonomi rakyat. Pengurus S.I. dalam kota Probolinggo mendirikan dua buah toko untuk kebutuhan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Tiap hari penuh pembeli. Tetapi tidak lama sejak itu toko-toko Cina menurunkan harga barang-barangnya lebih murah dari harga barang-barang dari toko S.I. dan karenanya pembeli berjubel di toko Cina. Akhirnya toko S.I. tidak dapat tertahan dan terpaksa ditutup. Lalu toko-toko Cina kembali menaikkan harga barang-barangnya. Terdengar khabar untuk biaya saingan orang-orang Cina mempunyai dana cukup kuat yang dilangsungkan hingga sekarang dan golongan Cina dapat menguasai seluruh perdagangan kita.
Perang Dunia I Politis dan Ekonomis dapat dibilang tidak mempengaruhi Negara kita, mungkin karena Negeri Belanda pada waktu itu tetap netral. Diangkat menjadi Mantri Boekhouder Kantor Irigasi di Probolinggo.
- f. Dalam tahun 1916 dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai B.O.W. seluruh Indonesia.
Dalam tahun 1917 dipilih menjadi anggota Gemeenteraad Probolinggo. Dalam kedudukan itu lalu membela nasib

pemilik warung-warung di pinggir jalan supaya tidak dibongkar dan berhasil.

Di dalam daerah Gemeente yang hanya mengenal penduduk bangsa Belanda, maka kepentingan penduduk pribumi tidak diperhatikan, malah mereka lalu terjepit.

Saya sebagai anggota Dewan Gemeente terus menerus membela kepentingan pribumi. Penerangan Listrik, Air Minum, jalan-jalan kampung dan sebagainya yang besar artinya bagi orang kecil memerlukan perjuangan yang tangguh.

- g. Dalam tahun 1918 menjadi Commisaris Centraal Besuur S.I. Kira-kira antara tahun 1917 dan 1918 Dr. F. Douwesdekker keliling Jawa untuk Indische Pusat datang dirumah minta saya memegang Ketua I.P. daerah Probolinggo, tetapi saya tolak karena saya masih menjabat Ketua S.I.
- h. Dalam tahun 1919 pindah ke Mojokerto (Jawa Timur) tetap menjadi Ketua P.B. V.I.P. B.O.W. Berhenti menjadi Mantri Boekhouder Irigasi. Menjadi Presiden S.I. Kabupaten Mojokerto dan tetap menjabat Com. C.B.S.I.
- i. Dalam tahun 1921 menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Mojokerto. Memimpin pemogokan pegawai Pabrik Gula yang jumlahnya 12 buah milik orang Belanda dan menghasilkan perbaikan nasib mereka itu. Pemogokan itu sebagai penjajahan kekuatan lawan.
Selama tahun 1912 sampai dengan 1923 berusaha memperbaiki nasib kaum tani. Dalam Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang saya berhasil sehingga peraturan mengenai desa mengenai pembagian tanah pertanian kepada orang tani menjadi lebih mantap dan orang-orang tani dapat menghadapi Pabrik-pabrik Gula yang menyewa tanah menjadi kuat. Sistim Komunal bezit met Afwisselede andelen menjadi Komunal bezit met vaste andelen jadi bagian tani adalah tetap, tidak ganti berganti. Harga

sewa tanah sawah untuk tanaman tebu pabrik gula menjadi naik. Pemeliharaan tanah sawah karena menjadi bagian petani tetap, tidak ganti berganti menjadi giat dan menambah hasil tanaman.

- j. Dalam tahun 1922 dipilih menjadi Ketua Vakcentraal ke III yaitu Persatuan Vakbonden Hindia (P.V.H.)

Dalam bulan Mei 1923 V.S.T.P. (Perserikatan Pegawai Sepur dan Tram) mengadakan pemogokan dengan alasan karena Sdr. Semaun, Ketua VSTP ditangkap. Sebagai Ketua Vakcentraal P.V.H. Saya berusaha memenangkan pemogokan itu, tetapi tidak berhasil karena saya dilarang keluar kota yang saya tempati, sehingga saya tidak dapat menghubungi. Lain-lain Perserikatan Pegawai/Buruh dan Pemerintah Belanda berhubung dengan alasan V.S.T.P. mengadakan pemogokan itu atas dasar politik lalu bertindak juga atas dasar Politis, menambah artikel 161 bis dan ter dari menambah artikel 161 bis dan ter dari Strafwetboek untuk dapat menangkapi pengurus V.S.T.P. dan oleh karena itu pemogokan hancur.

Pengalaman yang amat pait itu tentulah menjadi pelajaran untuk bertindak berhati-hati dengan perhitungan yang se-tepat mungkin. Gerakan buruh yang menghebat menjadi pemogokan untuk mendapatkan perbaikan nasib lalu di-verpolitik, sehingga lawan mudah mendapatkan alasan memukul dengan alasan yang sesungguhnya bukan pada tempatnya dan pemogokan itu tidak dapat simpatik masyarakat karena pemogokan oleh Pengurus VSTP di verpolitik yaitu karena Semaun ditangkap.

Dalam tahun 1922 – 1925 memimpin Surat Kabar Harian Kemajuan Hindia di Surabaya. Ditutupnya penerbitan sesudah 4 tahun karena pendapatan tidak dapat menutup pengeluaran disebabkan uang langganan masuknya hanya $\pm 50\%$, sedang pendapatan dari Iklan pedagang-pedagang Pribumi amat sedikit sekali. Pada samping itu pedagang-pedagang pribumi (umumnya Cina dan Eropa

tidak mau memasang iklan dalam Harian dari Bangsa pribumi).

Dalam tahun 1924 diangkat menjadi anggota Volksraad. Pada pidato saya yang pertama kali di muka Sidang Volksraad Tahun 1924 saya mengkritik beleid Pemerintah Hindia Belanda dan menolak maksud Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Pajak Landrente di Sumatera Barat. Hasil pidato saya itu ialah Gubernur General Fock marah kepada saya dan tidak mau mengundang saya untuk perkenalan, tetapi berhasil pajak Landrente tidak jadi dimasukkan ke Sumatera Barat. Berhubung dengan itu di Padang diadakan Rapat Umum dengan mengambil keputusan antara lain saya diberi gelar "Datuk" dan disampaikan kepada saya dengan telegram. Untuk memperkenalkan betapa sikap dan kegiatan para anggota Volksraad berasal dari kaum perjuangan baik kiranya saya uraikan sedikit disini.

Sejak dalam Volksraad dalam tahun 1927 dibentuk sebuah fraksi *dengan tujuan mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia*. Dengan sebagai anggota-anggotanya R.A.A. Kusuma Oetoyo, M.H. Thamrin, R.P. Suroso, Soangkupon, Otto Iskandar Dinata, Sukardjo Wirjopranto, Dr. Rasjid dan Wiwoho dengan diketuai oleh M.H. Thamrin, maka Volksraad menarik perhatian dari kaum terpelajar.

Tiap-tiap masa Sidang dengan susunan anggota baru membawa mutasi anggota, karena ada anggota tidak lagi menjadi anggota Volksraad. Para anggota yang berhenti dalam masa Sidang ialah antara lain: Mr. Moh. Yamin, Datuk Kayo, Idi, Mr. Tadjudin Nur. Pada masa Sidang tahun 1941 Sdr. M.H. Thamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941 dan diganti oleh Sdr. R.P. Suroso dari Ketua Fraksi hingga tahun 1942. Tahun Jepang masuk waktu terakhir itu anggota fraksi Nasional adalah R.A.A. Kusumo Utoyo, Otto Iskandardinata, Soangkupon, Dr. Ra-

sjid, Sukardjo Wirjopranoto, Wiwoho, Mochtar Prabunegoro, Ir. Moh. Noor dan R.P. Suroso sebagai Ketua Fraksi.

Tugas anggota Fraksi Nasional tidak dibatasi. Mereka bebas untuk berbicara mengenai Politik, Ekonomi, Sosial, soal-soal Local dan sebagainya.

Pidato-pidato mereka tidak saja dihadapkan Pemerintah Belanda tetapi juga untuk penyuluhan masyarakat. Pidato-pidato mereka itu dapat perhatian besar dari kalangan intelektual. Jika orang bilang Fraksi Nasional menjadi populer kiranya tidak keliru. Untuk mengambil keputusan penting harus atas dasar keputusan rapat Fraksi. Sekalipun Fraksi Nasional bertujuan Indonesia merdeka penuh, Fraksi itu toh memberi kebebasan kepada anggotanya untuk mengambil sikap terhadap petisi Sutarjo, yang moderat. Anggota Fraksi Nasional yang menolak petisi Sutardjo, karena berpendapat petisi itu menghambat perjuangan kemerdekaan. Buku yang berisi pidato-pidato anggota Fraksi Nasional yang diucapkan dalam bahasa Indonesia amat laku dijual. Rupanya Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai anggapan bahwa para anggota Fraksi Nasional mempunyai pengaruh cukup besar, maka karena itu pada waktu tentara Jepang telah ada di Semenanjung Malaka (sekarang Malaysia) Dr. Idenburg dan Mr. Sastromuljono diutus Gubernur Jenderal Tjarda untuk mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Fraksi Nasional ada di Jogjakarta. Pada pertemuan dari pihak Fraksi-fraksi yang sempat hadir Sdr. R. P. Suroso, Otto Iskandardinata, Wiwoho dan Sukardjo Wirjopranoto.

Pada pertemuan itu Dr. Idenburg mengajak Saudara-saudara tersebut untuk mengadakan suatu pertemuan bersama yang berisi rakyat Indonesia bersama-sama Belanda menghadapi Jepang. Perundingan dari pagi hingga malam tidak dapat menghasilkan sesuatu yang diharap-

kan oleh Dr. Idenburg, sehingga Mr. Sastromuljono menjadi jengkel dan membentak dengan kata-kata dalam bahasa Belanda terhadap anggota Fraksi; De heren moeten maar zeggen ya of nee (Tuan-tuan bilang saja ya atau tidak). Hasilnya bubar perundingan tidak membawa hasil yang diharapkan oleh pihak Belanda. Dr. Idenburg dipandang orang sebagai diplomat yang ulung, maka karena itu anggota-anggota Fraksi bersikap hati-hati sekali, sehingga Dr. Idenburg gagal dengan misinya.

Tidak lama lagi Jepang masuk Indonesia tanpa perlawanan Belanda, tentara Belanda menyerah. Beberapa hari sebelum Jepang mendarat di Jawa, Residen Surabaya minta datang saya dikantornya. Saya datang juga dan dimintai kesediaannya saya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk menghadapi Jepang.

Saya secara diplomatik menjawab baik.

Dalam tahun 1929 dipilih menjadi Ketua Vaksentraal ke IV yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (P.V.P.N.) dan dalam tahun 1938 merangkap menjadi Ketua Vaksentraal. Buruh Partikelir, yang bubar sebelum Perang Dunia ke II, karena tidak dapat menahan tekanan kaum majikan.

Pada waktu berunding dengan Salaris-Commissie Damme Wakil Vakcentraal PVPN dan Vakbonden-Vakbonden. Pegawai Negeri Anggota PVPN meninggalkan rapat karena usul PVPN supaya peraturan gaji Pegawai Negeri tidak dibeda-bedakan tinggi rendahnya beralasan Belanda totok, Belanda Peranakan dan Bumiputera, tetapi hanya satu jenis untuk semua, oleh Salaris Comisi ditolak.

Sementara itu PVPN berusaha mendapatkan hak-hak kedudukan sebagai Pegawai untuk supaya tidak mudah mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah atau pejabat-pejabat yang bersangkutan. Varsentraal PVPN telah dapat bekerjasama dengan NVV (Nederland Vak Vekbond). Dan menjadi anggota IVV (Internasional

Vakverbond) pernah diundang ke Kongres IVV di London dan di Wina hanya dapat kirim utusan seorang ke Wina karena tidak mempunyai biaya cukup.

Dalam tahun 1922 sampai dengan 1925 memimpin Surat Kabar Harian KEMAJUAN HINDIA di Surabaya. Dalam tahun 1932 berhenti menjadi Presiden S.I. Mojokerto karena Organisasi itu bubar. Lalu masuk menjadi anggota P.B.I. (Persatuan Bangsa Indonesia) pimpinan Dr. Soetomo di Surabaya.

Dalam tahun 1935 terjadi fusi dari Budi Utomo, P.B.I. Sumatera Bond dan lain-lain menjaui satu Partai yaitu Partai Indonesia Raya (PARINDRA). Saya menjadi Ketua Parindra cabang Mojokerto dan duduk dalam Dewan Pimpinan/Pengurus Besar bagian Politik dan Ekonomi bersama Sdr. M.H. Thamrin, R.A.A. Kusumo Oetoyo dan Sukardjo Wirjopranoto.

- p. Dalam tahun 1936 sampai dengan Jepang masuk terpilih berkali-kali menjadi anggota Regentschapraad Mojokerto.
 - q. Dalam tahun 1937 sampai dengan Jepang masuk menjadi anggota Propinsi Jawa Timur.
 - r. Dalam tahun 1938 terpilih menjadi Loco-burgermeester Gemeente Mojokerto.
9. Pada waktu Jepang masuk, masih tetap menjadi Ketua Perhimpunan Pegawai BOW, Ketua Vaksentraal PVPN dan masih tetap menjadi anggota Regentschpraad Mojokerto, Propinsi Jawa Timur dan Volksraad. Pada waktu Jepang mendarat di Jawa bulan Maret 1942, dalam Keresidenan Surabaya selama ± 10 hari tidak ada Pemerintahan bala tentara Jepang mungkin masih sibuk untuk kepentingan perangnya sedang pejabat Pemerintah Hindia Belanda tidak berani menjalankan tugasnya mungkin di lain-lain daerah juga begitu. Heran saya bahwa dalam keadaan begitu tidak ada gangguan keamanan.

Mungkin waktu itu seluruh penduduk berada dalam keadaan ragu-ragu dan menunggu sehingga tidak ada yang sadar dan berpikiran untuk menjalankan sesuatu.

10. Pada waktu penjajahan Jepang:

Selama penjajahan Jepang semua Partai Politik dan Organisasi lain-lain dibekukan.

a. Oleh Empat Serangkai saya diminta tetap bekerja di daerah dan ditunjuk:

1. Sebagai Ketua Putera Daerah Malang (Jawa Timur) dan
2. Duduk dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta.

Yang membawa keheranan saya bahwa selama saya menjadi Ketua PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) mendapat kepercayaan dari Sutjokan Malang Jenderal Tanaka mengenai kedudukan Pegawai Pamong Pradja seluruhnya yang berarti baik buruknya mereka itu terserah kepada saya. Dan selama itu tidak seorangpun pegawai Pamong Praja yang mengalami sesuatu kesulitan dari pihak Jepang khususnya Ken Pei Tai.

b. Menjadi Ketua Hokokai gantinya Putera di Malang.

c. Menjadi anggota Tjo Sangi-in di Jakarta.

d. Dalam bulan Pebruari 1943 Bung Karno datang di Malang atas nama Empat Serangkai minta saya supaya suka menjadi Sutjokan Kedu yang diangkat oleh Pemerintah Jepang untuk dapat menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia dapat menjalankan Pemerintahan. Permintaan itu saya terima dan selama memegang jabatan Sutjokan saya mengambil kesempatan tiap-tiap waktu mengumpulkan Lurah-lurah Desa dari Kabupaten-kabupaten untuk membesarkan semangat kebangsaan mereka itu dan memimpin dinas-dinas Pemerintahan Pertanian dan Pendidikan dan Pekerjaan Pamong Praja. Tiap ada pengumuman pengumpulan beras atau padi untuk bala tentara Jepang daerah saya dan daerah Sutjokan Bojonegoro Bapak Suryo dan

Daerah Jakarta Sdr. Sutardjo termasuk yang amat jelek. Memang tidak kami adakan pengumpulan padi. Pada suatu tempo di Jawa Tengah diadakan Konperensi Para Sutjokan dari Jawa Tengah di Semarang dipimpin oleh Sutjokan Semarang.

Pada waktu saya ajukan soal-soal mengenai Pemerintahan Pamong Praja tetapi tidak mendapat jawaban apa-apa. Menurut keterangan seorang pegawai Jepang yang mengikuti saya pergi ke Konperensi menerangkan bahwa sesungguhnya Sutjokan-Sutjokan Jepang itu tidak mengerti apa-apa tentang Pemerintahan. Hal tersebut di atas saya laporkan kepada Bung Karno.

- e. Menjadi wakil Ketua Dokuritsu Jumbi Tio Sakai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sedang yang menjadi Ketuanya Sdr. Dr. Radjiman.

11. Sesudah Proklamasi Republik Indonesia:

- a. Oleh Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah merangkap Residen Kedu,

Pada waktu itu saya mendengar khabar bahwa Sekutu menetapkan mengenai Indonesia dejure dipegang Sekutu dan de facto diserahkan kepada Jepang. Dalam keadaan semacam itu siapa saja Bangsa Indonesia sebagai pemegang kekuasaan di pusat maupun di daerah harus berani mengabaikan keputusan Sekutu itu. Saya merasa gembira sekali bahwa mental para Republikein Indonesia bersikap yang sedemikian itu.

Memang tidak mudah tetapi harus kita jalankan. Sebagaimana saya alami sebagai Gubernur Jawa Tengah dimana Jakarta belum kedatangan Inggris, Jawa Tengah telah didatangi sebagai Wakil Sekutu seorang Perwira Angkatan Udara Inggris Wing Komando Tull yang mengurus keamanan orang-orang Belanda dan lain-lain. Ia tidak saja beroperasi di Semarang tetapi meluas sampai ke Jogja, Solo dan sebagainya. Dimana ada Kamp tahanan Belanda. Untuk menghadapi Perwira tersebut

harus berani dan bijaksana. Di samping itu ada seorang Belanda mengaku Kepala P.M.I. Belanda datang menjumpai seorang pejabat Jepang untuk mengatur P.M.I. di daerah Magelang dengan mengumpulkan orang-orang bekas Knil ± 400 orang untuk menjadi perawat. Rupanya sekalipun Jepang disertai kekuasaan de Vacto karena sudah kehilangan semangat karena kekalahan Jepang tidak berani menolak permintaan orang Belanda itu. Untunglah saya dapat mengetahui dengan segera dan 400 orang perawat bekas Knil itu saya bubarkan sedang Belandanya yang menjadi pemimpin meninggalkan Magelang dengan segera. Di samping itu perang syaraf oleh Sekutu dilancarkan di Jawa Tengah dan yang harus melayani perang syaraf itu saya sebagai Gubernur siang malam senantiasa ada tilpun yang menerangkan bahwa tentara Sekutu sudah masuk di daerah sana atau di daerah sini. Selain itu macam-macam ancaman tentang kemungkinan penyerbuan Sekutu. Dapat dikatakan bahwa saya selaku Gubernur Jawa Tengah hampir tidak bisa tidur setiap malam.

Untung benar bahwa rakyat Kedu membantu saya dalam menjalankan kewajiban yang sangat berat itu. Rupa-rupa kejadian tiap-tiap hari yang sulit dan berbahaya, saya bersama-sama rakyat dapat mengatasinya. Pada samping itu saya masih mondar-mandir ke Jakarta untuk menyelesaikan rencana Undang-Undang Dasar dan lain-lain.

Pada suatu hari ada pegawai Staf Wing Komando Tull dari Semarang datang ke Magelang menjumpai saya untuk minta tolong supaya saya mengoreksi pidato Wing Komando Tull yang akan dibaca dimuka Radio di Solo pada esok siang-nya. Dalam pidato itu terdapat soal-soal politik yang saya koreksi, dan saya kasih tahu bahwa W.K. Tull tugasnya mengurus tawanan Belanda. Esok harinya saya sengaja mendengarkan pidato Radio W.K. Tull dan ternyata kalimat-kalimat yang saya coreksi tidak dibaca olehnya. Dengan tindakan ini yaitu memenuhi anjuran saya rupanya T. Tull sebagai wakil Sekutu mengakui Republik Indonesia de Jure dan De Facto.

Menjadi anggota K.N.I. Pusat sejak dibentuknya atas permintaan delegasi dari Solo dalam tengah-tengahnya saya menjalankan konsolidasi Pemerintahan Jawa Tengah dipindah dalam bulan Oktober 1945 menjadi Komisaris Tinggi untuk Solo dan Jogjakarta sebagai wakil Pemerintah R.I. dan berkedudukan di Solo. Jabatan baru ini tidak kurang beratnya dari pada waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Tiap-tiap malam juga hampir tidak dapat tidur karena menerima laporan orang-orang bule. Rupanya ada golongan satu sama lain saling culik menculik sampai-sampai Ibu Sunan juga diculik.

Tentang jalannya Pemerintahan Daerah Kasunan, Mangkunegaran, Kasultanan dan Paku Alaman pada waktu itu KNI Daerah menjalankan Pemerintah Legislatif maupun Excecutif, hal mana bukanlah berada pada tempat yang sewajarnya. Maka karena itu di antara KNI Daerah Surakarta yang diketuai oleh Sdr. Kusumodiningrat dan Sri Sunan ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII saya usahakan untuk membagi tugas yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatif sedangkan Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan Excecutif. Kedua pihak menerima pembagian tugas itu. Tetapi sayang beberapa hari kemudian saya menerima surat dari para penasehat Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro, bahwa yang akan menjalankan Pemerintahan Excecutif ialah para Patih dari kedua raja itu. Pendirian itu ditolak oleh KNI Daerah dan dari Daerah lalu membentuk Presidium untuk Excecutif. Diri saya ditunjuk sebagai ketua presidium. Berhubung dengan itu Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro tetap non Aktip dan hingga sekarang.

Di Jogjakarta usaha saya dengan mengadakan pertemuan diantara KNI Daerah yang diketuai oleh Sdr. Moh. Saleh dan Sri Sultan ke IX dan Sri Paku Alam ke XI berhasil baik, yaitu pembagian tugas dapat diatur sewajarnya yaitu KNI daerah menjalankan Legislatif sedangkan Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan Excecutif dan dapat langsung sebagai kepala Daerah yang turun temurun menurut Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948. Rencana U.U. No. 22/1948 saya yang membuatnya.

Salah satu kejadian selama saya berada di Magelang sebagai Gubernur R.I. yang pertama yang tidak dapat saya dan rakyat Magelang dan sekitarnya melupakannya ialah insiden menaikan Bendera Merah Putih kita oleh para Pemuda dengan pimpinan Patih Judadibrata dari Kantor Gubernur. Pada waktu itu Jepang oleh Sekutu masih diberi kekuasaan De Facto dan masih melarang mengibarkan Sang Merah Putih menurut kemauan rakyat Indonesia. Rakyat sebelumnya sudah berkumpul begitu banyak di Gunung Tidar karena telah mendengar akan terjadinya pengibaran Bendera kita itu bertambah detik bertambah banyak yang datang, tetapi Jepang masih menghalang-halangi maksud itu sehingga keadaan menjadi panas sampai siang hari rakyat berduyun-duyun dari sekitar kota Jogja karena terjadi tembakan dari pihak Jepang hingga dua pemuda kita jatuh menjadi korban. Rakyat menjadi marah sekali dan akan menyerang Jepang tetapi Jepang segera masuk dalam markas besarnya. Saya menerima laporan itu segera saya datang dan memberi nasehat kepada rakyat supaya tenang dan tidak menyerbu markas besar Ken Petai yang siap dengan senjata lengkap yang dapat membuat korban besar di kalangan rakyat dan saya terangkan bahwa saya terus pergi ke Jenderal Tanaka untuk menghukum Ken Pe Tai yang bertindak kejam itu dan Jenderal Tanaka waktu itu sanggup memenuhi permintaan saya.

Di tengah-tengah kesibukan kerja menerima khabar dari Gubernur Jawa Tengah bahwa seorang Jenderal Inggris akan datang ke Solo untuk melihat keadaan tahanan orang Belanda. Tetapi yang datang bukan seorang Jenderal tetapi Wing Komando Tull yang telah saya kenal waktu saya menjabat Gubernur Jawa Tengah.

Oleh karena saya mendengar bahwa Sekutu akan mengirim tentara pendudukan ke Solo saya tanya kepadanya apakah maksud itu akan dilaksanakan sesungguhnya hal itu tidak perlu (saya katakan). Wing Komando Tull menerangkan hal itu tergantung kepada keadaan tahanan Belanda. Ternyata tidak ada

tentara pendudukan di Solo berbeda dengan janji W.K. Tull waktu saya menjabat Gubernur Jawa Tengah yang berjanji tidak akan kirim tentara pendudukan ke Magelang. Tetapi nyatanya setelah saya pindah ke Solo dikirim juga sehingga menimbulkan pertempuran antara tentara Sekutu dengan tentara Nasional kita. Pada waktu sebelum pertengahan Tahun 1946 karena saya merasa amat capik tenaga dan fikiran, maka saya minta Presiden Sukarno supaya saya dipindah keluar daerah Solo dan dikabulkan dipindahkan menjadi Gubernur Jawa Timur sedang Gubernur Jawa Timur Sdr. Surjo dipindah ke Solo tetapi beliau di Solo tidak dapat menjalankan pemerintahan karena Komandan T.N.I. Jenderal Sutarto mengadakan Pemerintahan Militer.

Sdr. Surejo lalu kembali ke Jawa Timur menjumpai saya dan menerangkan apa yang telah terjadi di Solo. Saya jawab saya tidak berkeberatan kembali ke Solo dan kesemuanya akan saya laporkan kepada Presiden. Lalu saya kembali ke Solo dan ada di Solo mendengar bahwa semalamnya Sdr. St. Syahrir Perdana Menteri diculik orang. Atas seruan Presiden Sdr. Syahrir dilepaskan oleh penculik. Jabatan Komisaris tinggi dihapus dan saya ditempatkan di Departemen sebagai Gubernur diperbantukan. Di Solo jabatan Komisaris Tinggi diganti jabatan *Residen*. Pada Departemen Dalam Negeri saya diserahi memimpin urusan Minoritas dan menjadi Kepala Bagian Urusan Pemerintah Daerah pada permulaan tahun 1948. Diangkat menjadi Panitia gaji Pegawai Negeri juga merangkap kepala urusan pegawai. Diangkat menjadi penasehat St. Syahrir dalam perundingan antara Wk. Republik Indonesia dan Wk. Pemerintah Belanda Th. Schmer Horn. Diminta oleh Wk. Presiden Bung Hatta untuk membuat Rencana Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, Propinsi, Kabupaten dan Kota. Rencana Undang-Undang itu diterima oleh B.P. KNI Pusat menjadi U.U. No. 22/1948 saya akui bahwa U.U. itu belum sempurna tetapi telah dapat menciptakan sila-silanya tata kerja Pemerintahan Daerah yang pada waktu itu masih dalam keadaan dipe-

ngaruhi oleh pertikaian antara R.I. dan Sekutu (Belanda). Sekira tanggal 26 Juli 1947 saya diminta oleh Menteri Dalam Negeri pergi ke kota Malang (Jawa Timur) untuk membuat rukun kembali Panglima T.N.I. Sudjaki dengan Residen Malang Mr. Sunarko.

Saya datang dengan Kereta Api dari Jogja ke Blitar sekira pukul 7 malam dan bermalam di Blitar, lalu pada pagi harinya tanggal 27 Juli 1947 jam 5 pagi saya berangkat ke Malang dengan Kereta Api. Saya kira saya sampai di kota Malang paling lambat jam 9 pagi, tetapi ternyata pada perjalanan ke Malang Kereta Api sering berhenti karena terlibat pesawat pemburu Belanda mengintai, sehingga baru jam 4 siang dapat mendekati Stasiun Kota Lama. Tetapi sekonyong-konyong Kereta Api berada di tengah sawah dan tidak jauh dari Stasiun lalu berhenti.

Masinis dan pembantunya turun lari, para penumpang melihatnya dan juga melihat pesawat pemburu Belanda berputar-putar diatas kita maka semua penumpang ikut turun menyembunyikan diri di sedapat-dapatnya di tengah sawah. Saya sendiri dan beberapa orang penumpang tidak ikut turun dari kereta api. Dan ternyata dua pesawat pemburu Belanda menyerang kita tetapi yang ditembaki bukan kereta penumpang tetapi lapangan dikanan kiri Kereta Api. Sesudah serangan itu saya dan beberapa orang yang tinggal dalam Kereta penumpang cepat-cepat keluar dan menuju ke Stasiun. Betapa nasib penumpang yang ada di tengah sawah saya tidak tahu.

Dengan jalan kaki sekira jam 5 lebih (sore) saya menuju masuk kota untuk datang di rumah Residen. Sementara itu dentuman senjata dari pihak Belanda yang akan menyerbu kota Malang dari jurusan Utara (Singosari) bertambah detik bertambah dekat.

Sekira jam 7 malam saya datang dirumah Residen, tetapi rumahnya kelihatan sudah terbakar. Residen Mr. Sunarko dikeluarkan pergi ke luar kota. Lalu saya mencari Panglima Su-

djaki, tetapi mendapat khabar yang sudah ke luar kota. Sementara itu tentara Belanda telah mendekati kota. Bersama-sama orang banyak yang akan mengungsi ke arah Selatan saya ikut menuju ke Selatan tetapi lalu masuk di rumah Klinik Dr. Su-rodjo. Saya tinggal disitu sampai pagi hari. Pada malam harinya saya melihat api asal dari bumi hangus yang membuat rasa prihatin saya. Pada pagi harinya sekitar pukul 9 saya terpaksa dengan berjalan kaki meninggalkan kota Malang menuju ke Kepanjen, lalu saya terus pada sore harinya naik kereta api dari Kepanjen ke Blitar. Di Kereta Api saya dapat tempat di Kereta Barang duduk bersama-sama pengungsi-pengungsi yang dulunya dari Surabaya lalu meninggalkan Malang.

Mereka itu masih bisa bersendau gurau dengan tertawa terbahak-bahak. Antara lain berkata: Nah sekarang kita kembali lagi ke Surabaya melalui Blitar. Kata-kata itu didengar oleh lain-lainnya dengan tertawa ramai sekali.

Jadi rupanya mereka itu tidak berputus asa.

Saya datang di Blitar pada malam hari dan esok harinya saya terus kembali ke Jogjakarta dan melaporkan apa yang telah saya alami dan hasilnya.

Selanjutnya saya merencanakan Undang-Undang Pembentukan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Demikian juga tentang hak medebewind dan otonomi Pemerintahan Daerah. Semuanya setelah diterima B.P. KNIP dan menjadi Undang-Undang.

Selama clash ke-II saya ikut menjalankan pemerintahan gerilya dan diangkat menjadi anggota Pemerintahan Darurat R.R.I. di Jawa untuk urusan dalam negeri bersama-sama Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri P.M.N. Kasimo dan Menteri Agama K.H. Mashur untuk memimpin pemerintahan gerilya.

Hal-hal yang penting yang saya jalankan sebagai Pimpinan Urusan Dalam Negeri antara lain mengangkat Sdr. Milono, pensiun Residen Pati yang juga ikut gerilya sebagai Residen Pati

lagi berhubung pada waktu itu Residen Pati kembali masuk ke kota ikut Belanda.

Karena Gubernur Jawa Barat Sdr. Sewaka ditangkap Belanda lalu Sdr. Ir. Okar saya angkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Demikian juga serta Gubernur Jawa Timur Dr. Murdjani juga ditangkap Belanda, saya angkat menjadi gantinya sebagai Gubernur Jawa Timur Sdr. Samadikun.

Untuk bahan makan T.N.I. Tentara Pelajar dan sebagainya saya adakan rapat-rapat dengan para Lurah dimana kami bertempat sementara untuk supaya para petani suka menyerahkan 10% dari hasil tanaman padinya dan mereka sama memenuhi.

Kami bergerilya dari tanggal 18 Desember 1948 hingga akhir Juni 1949. Pada akhirnya Clash ke II dan lalu masuk kota Yogyakarta. Daerah gerilya yang penting yaitu dari Tawangmangu ke timur sampai Ngrambe, Madiun, tidak bisa terus ke timur karena di Ngrambe sudah dihadang tentara Belanda.

Hubungan ke daerah-daerah ke Jawa Timur dan Jawa Barat dilaksanakan dengan kurier Tentara.

Pada waktu perundingan antara Mr. Roem dan Van Rooyen di New York saya menerima dari Jakarta salinan rapat pemimpin-pemimpin perkebunan Belanda Jawa Barat dan Sumatera Selatan bersama-sama Wakil Jenderal Spoor. Di rapat itu sebagai Wakil Perkebunan Belanda itu sama mengeluh karena Tentara Belanda yang menjaga kebun-kebun sama ditarik, karena itu mereka merasa sangat kuatir. Wakil Jenderal Spoor menjawab bahwa tindakan menarik tentara itu perlu karena waktu tentara Belanda masuk ke pedalaman tidak kelihatan tentara R.I. tetapi tahu-tahu semua tentara R.I. muncul di mana-mana.

Pada waktu saya membaca itu merasa sayang sekali bahwa Mr. Roem tidak mengetahui bahwa kedudukan tentara kita kuat. Jika tahu tentunya bersikap lebih keras menghadapi

Van Rooyen dan dapat menghasilkan perundingan yang lebih menguntungkan bagi Republik kita.

Dalam akhir bulan Juni 1949 sehabis Clash ke II masuk kota Yogyakarta, kembali menjabat Menteri Dalam Negeri untuk Urusan Pemerintahan Daerah dan menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Di dalam kota Yogyakarta tinggal mondok di rumah saudara saya dan saya sekeluarga makan dari dapur umum. Rumah saya di Solo, waktu Belanda masuk kota, terus rumah saya dirampok dan keluarga saya diusir keluar, hingga hidupnya amat sengsara selama saya gerilya. Oleh Pemerintah diserahkan membuat rencana U.U. Pokok Pemerintahan Daerah yang diterima baik oleh B.P. KNIP dan menjadi U.U. Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948 sebagai tersebut diatas. Selanjutnya seperti tersebut di atas merencanakan U.U. Pembentukan Propinsi-Propinsi, Kota-kota dan Kabupaten-Kabupaten seluruh Jawa dan diterima oleh B.P. KNIP menjadi Undang-Undang.

Tetapi saya belum dapat bekerja karena sakit bronsbhitis amat keras sehingga dalam perjalanan pulang dari gerilya saya memakai tandu. Syukur alhamdulillah dalam tempo ± 1 bulan dapat sembuh kembali dan bekerja. Waktu di rumah sakit Presiden dan Wakil Presiden sama-sama datang melihat keadaan saya. Sekalipun saya masih sakit dalam R.S. dapat merasakan kegembiraan hati saya bahwa pada waktu itu delegasi Indonesia berangkat ke Negeri Belanda untuk penyerahan Kemerdekaan Indonesia pada Republik kita.

Dalam bulan Desember 1949 Partai Indonesia Raya (PARINDRA) dihidupkan kembali dan saya dipilih menjadi Ketua Partai.

Sekalipun hidup kembalinya PARINDRA terlambat masih dapat sambutan baik dari daerah-daerah dimana kaum Parindrigen memang menunggu-nunggu hidup kembalinya

PARINDRA. Mereka itu baik yang berada di Jawa maupun di luar Jawa segera mendirikan CABANG PARINDRA.

Anggota PARINDRA pada umumnya orang-orang terpelajar, oleh karena PARINDRA mengutamakan orang-orang yang cakap, jujur dan suka membela kepentingan rakyat.

PARINDRA sengaja tidak mengadakan massa oleh karena bertujuan pada Pemilihan Umum untuk anggota-anggota Lembaga Perwakilan Rakyat diadakan sistim memilih orang, calon dari Partai-partai Politik yang ikut Pemilihan Umum, bukannya memilih gambar partai seperti misalnya pada pemilihan umum di Inggris.

Pada Pemilihan Umum tahun 1955 ternyata masih dijalankan sistim lama yaitu memilih gambar. Dengan begitu PARINDRA kalah dari pemilihan, karena tidak mempunyai massa anggota.

Dalam tahun 1954 mendirikan Yayasan untuk kemajuan kesehatan anak-anak, terutama yang menderitakit paru-paru. Saya membangun gedung-gedung untuk rumah sakit tersebut di atas tanah seluas 44 Ha di desa Cilandak Selatan dari tahun 1954 hingga tahun 1958. Selesai bangunan-bangunan itu saya lalu berusaha mendapatkan kredit untuk membeli alat-alat Rumah Sakit yang diperlukan, tetapi tidak berhasil. Lalu saya serahkan kepada Departemen Kesehatan dipakai untuk Rumah Sakit Pemerintah. Yayasan yang saya Ketuai mula-mula bernama "Ibu Sukarno" lalu pada lahirnya Orde Baru diganti nama "YAYASAN FATMAWATI" dan Ketua tetap saya.

Dalam tahun 1967 Departemen Kesehatan mengajak Yayasan Fatmawati bekerja sama untuk pimpinan R.S. Fatmawati sesuai dengan prinsip Pemerintah yaitu partisipasi rakyat sebesar mungkin untuk usaha kesehatan. Untuk kerjasama itu lalu diadakan "PIAGAM KERJA SAMA" antara Departemen Kesehatan dan Yayasan. Pengawasan sehari-hari diserahkan kepada Dewan Direksi terdiri dari 2 orang wakil Departemen Kesehatan dan 2 orang wakil Yayasan. Diusahakan Rumah Sakit Fatmawati dapat dibeheer seluruhnya oleh Yayasan.

Dalam bulan Januari 1950 saya diminta Menteri Dalam Negeri supaya pergi ke Solo bersama-sama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri untuk menjumpai Sri Sunan Pakubuwono ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII untuk menjelaskan maksud Pemerintah membentuk daerah istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan dan Mangkunegaran, seperti halnya Yogyakarta menurut U.U. No. 22/1948, Sri Sunan dan Mangkunegoro menjadi Kepala Daerah ke I dan ke II.

Fihak Sri Sunan tidak berkeberatan tetapi fihak Sri Mangkunegoro minta tetap bisa masing-masing berdiri sendiri. Sesudahnya berunding saya terangkan dapat juga tetap berpisah tetapi dasarnya pemerintahan daerah menurut U.U. Pemerintahan Daerah No. 22/1948 harus. Tetapi Penasehat dari Sunan dan Mangkunegoro minta berapa kekuasaan seff bestuur dulu masih dapat diteruskan misalnya pengangkatan Wedana. Saya terangkan bahwa tugas-tugas Kepala Daerah telah ditetapkan dalam U.U. No. 22/1948 tersebut di atas.

Apa yang diminta para Penasehat itu diluar ketentuan U.U. tersebut. Kedua Penasehat yang bersangkutan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu pembicaraan tidak kami lanjutkan dan kami kembali pulang dan melaporkan hasil pembicaraan pada Menteri Dalam Negeri.

Karena hasil pembicaraan kami dengan kedua Raja tersebut maksud membentuk Propinsi Daerah Istimewa Surakarta tidak dilanjutkan.

Dalam tahun 1950 menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lalu non aktif karena diangkat menjadi Menteri.

Dalam bulan September 1950 sampai dengan Maret 1956 berturut-turut menjabat Menteri dari Negara Kesatuan R.I. yaitu:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Moh. Nasir,
2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman,
3. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo,

4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo,
 5. Menteri Sosial dari Kabinet Ali Sastroamidjojo,
 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harahap,
- 6a. Merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim selama 1 tahun.

Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuhan dari Menteri Perburuhan Wilopo pemogokan Buruh Perkebunan Belanda yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu belum dapat diselesaikan.

Dalam tempo \pm 7 hari permogokan itu dapat saya selesaikan dengan baik, (mendapat kenaikan upah dan tambahan jatah pangan) para karyawan terus bekerja lagi.

Untuk kepentingan penyelesaian secara damai pada masa selanjutnya saya bentuk sebuah Panitia Penyelesaian Perselisihan Pekerja (P-4) di Pusat dan di daerah-daerah dan hingga sekarang berfungsi memuaskan.

Pada waktu saya memegang Kementerian Sosial untuk melancarkan datangnya orang-orang transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa maka saya mengambil percobaan untuk membuka hutan secara mekanis bagi para transmigran. Sebagai pangkal kerja saya ambil satu tempat di Metro untuk tempat Pimpinan dari Bagian Dinas Transmigrasi. Tempat itu karena sekitarnya terdapat banyak binatang gajah, maka tempat itu saya beri nama kota Gajah yang sekarang menjadi ramai. Di tempat itu saya tempatkan sebuah bengkel service dan reparasi tractor-tractor yang dipakai untuk membuka hutan. Rupanya usaha saya itu diketahui oleh rakyat di Jawa yang memang ingin pindah ke luar Jawa. Maka karena itu transmigran spontan jumlahnya banyak sekali dengan biaya sendiri. Dengan begitu biaya mekanisme pembukaan hutan dapat respon berupa tidak mengeluarkan biaya transmigran dari Jawa keluar Jawa.

Dalam bulan Maret 1956 saya dipilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia.

Badan ini diganti namanya menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) pada tahun 1960. Dan saya tetap menjadi Ketua hingga sekarang.

Dalam bulan September 1959 dipilih menjadi Ketua Umum dari Dewan Koperasi Indonesia, hingga dibubarkan oleh Menteri Koperasi Ahmadi pada bulan Maret 1961.

Menteri Ahmadi mendirikan Centraal Kooperasi dimana KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia) dan diketuai sendiri.

Karena Koperasi ditujukan sebagai alat politik maka Koperasi menjadi mundur sekali, sehingga pada lahirnya ORDE BARU gerakan koperasi telah menjadi lumpuh tidak ada gaya apa-apa.

Dalam bulan Agustus 1958 diangkat oleh Presiden R.I. menjadi Anggota Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia hingga sekarang dan seterusnya saya ditunjuk juga menjadi Wakil Ketua.

Dalam tahun 1961 oleh Presiden R.I. diangkat menjadi Ketua merangkap Anggota dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi daerah dengan tugas menyusun Rencana U.U. Pokok tentang Pemerintahan Daerah, meninjau kembali perimbangan keuangan dan menyusun rancangan Pemerintahan Desa yang berhak otonomi. Tugas selesai dalam tahun 1962.

Dalam bulan Maret 1966 sampai dengan Maret 1973 diangkat menjadi Anggota MPRS sebagai Wakil Gerakan Koperasi.

Dalam bulan Mei 1966 dipilih menjadi Ketua I Gerakan Koperasi Indonesia.

Dalam bulan Juli 1973 dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.

Telah bertahun-tahun saya menjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam Kelurahan Menteng (Jakarta Raya).

Jabatan-jabatan ini adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang terendah yang menarik bagi saya karena saya dapat berbuat amal bakti karena Allah.

Menerima tanda penghargaan (Bintang/Lencana) dari Pemerintah R.I. :

1. BINTANG MAHA PUTERA ADHI PRADANA
2. BINTANG GERILYA
3. BINTANG PERINTIS KEMERDEKAAN R.I.
4. LENCANA SATYA KARYA KL. I
5. LENCANA KEMERDEKAAN
6. LENCANA PEMBANGUNAN

Jakarta, 12 April 1975

(R.P. Suroso)

RIWAYAT HIDUP RADEN PANDJI SOEROSO

1. Nama : Raden Pandji Soeroso
2. Lahir/tempat : Tanggal 3 Nopember 1895 di Porong Karesidenan Surabaya Jawa Timur
3. Bangsa : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pendidikan : Sekolah Rakyat Kl. I dan Kweekaschool 6 tahun di Probolonggi (Jawa Timur)
6. Kawin : Kawin
7. Anak : 8 orang 4 laki-laki dan 4 wanita
8. Jabatan/Functie dalam masyarakat:
 - a. Dalam tahun 1908 menjadi anggota Budi Utomo, masih menjadi murid Kweekschool. Waktu itu Budi Utomo masih belum mempunyai tujuan Politik.
 - b. Dalam tahun 1912 menjadi Anggota Serikat Islam (S.I.)
 - c. Duduk di Kl. 6 Kweekschool dan ujian penghabisan kurang 1 bulan, dikeluarkan dari Sekolah tersebut, karena memimpin pemogokan murid-murid seluruh sekolah

yang tidak puas dengan beleid Direktur Sekolah tersebut (Tahun 1912).

- d. Ke Surabaya belajar Jurnalistik.
- e. Dalam tahun 1915 menjadi Presiden S.I. di Probolinggo.
- f. Dalam tahun 1916 dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai B.O.W. seluruh Indonesia.
- g. Dalam tahun 1918 menjadi Commisaris Centr. Bestuur S.I.
- h. Dalam tahun 1919 pindah ke Mojokerto (Jawa Timur), tetap menjadi Ketua P.B. P.I.P. B.O.W. menjadi Presiden S.I. Kabupaten Mojokerto dan tetap menjabat Comisaris C.B.S.I.
- i. Dalam tahun 1921 dipilih menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Kabupaten Mojokerto. Memimpin pemogokan pegawai pabrik gula dan menghasilkan perbaikan nasib mereka itu.
- j. Dalam tahun 1922 dipilih menjadi Ketua Vakcentraal ke III yaitu Persatuan Vakbonden Hindia.
Dalam bulan Mei 1923 V.S.T.P. (Perserikatan Pegawai Sepur dan Tram mengadakan pemogokan dengan alasan karena Sdr. Semaun Ketua VSTP ditangkap. Sebagai Ketua Vakcentraal P.V.H. saya berusaha memenangkan pemogokan itu, tetapi tidak berhasil, karena saya dilarang keluar kota yang saya tempati, sehingga saya tidak dapat menghubungi lain-lain Perserikatan pegawai/buruh dan Pemerintah Belanda berhubung dengan alasan V.S.T.P. mengadakan pemogokan itu lalu bertindak atas dasar Politis. Menambah artikel 161 bis dan ter dari strafwetboek untuk dapat menangkapi pengurus V.S.T.P. dan oleh karena itu pemogokan hancur.
- k. Dalam tahun 1929 dipilih menjadi Ketua Vakcentral ke IV yaitu Persatuan Vakbonden akcentr. Buruh Partikelir, yang bubar sebelum perang Dunia ke II karena tidak dapat menahan tekanan-tekanan kaum majikan.
- l. Dalam tahun 1922–1924 memimpin surat kabar Harian KEMAJUAN-HINDIA di Surabaya.

- m. Berhenti menjadi Presiden S.I. Mojokerto, karena organisasi itu bubar. Lalu dipilih Ketua Cabang PARINDRA Mojokerto dan duduk dalam D.P. PARINDRA bagian Politik.
 - n. Dalam tahun 1917 terpilih menjadi Anggota Gementeraad Probolinggo.
 - o. Dalam tahun 1924 diangkat menjadi Anggota Volkstaad di Jakarta dan dari tahun 1927 sampai dengan Jepang masuk terpilih terus menerus menjadi anggota Volkskraad.
 - p. Dalam tahun 1936 sampai dengan Jepang masuk terpilih berkali-kali menjadi Anggota Regentshappraad Mojokerto.
 - q. Dalam tahun 1937 sampai dengan Jepang masuk menjadi anggota Propinsi Jawa Timur.
 - r. Dalam tahun 1938 terpilih menjadi anggota Loco - burgermeester Gemente Mojokerto.
9. Pada waktu Jepang masuk masih tetap menjadi Ketua Perhimpunan Pegawai BOW Ketua Vakcentraal P.V.P.N. dan tetap menjadi Anggota Regentchappraad Mojokerto, Propinsi Jawa Timur dan Volkskraad.
- Dalam Volkskraad menjadi anggota fraksi Nasional yang bertujuan: Los van Nederland, dan sesudah M.H. Thamrin meninggal mengganti beliau menjadi Ketua Fraksi tersebut hingga Jepang masuk.

10. Pada waktu penjajahan Jepang:

Selama penjajahan Jepang semua partai politik dan organisasi lain-lain dibekukan.

- a. Oleh Empat Serangkai saya diminta tetap bekerja di daerah dan ditunjuk sebagai Ketua PUTERA daerah Malang (Jawa Timur) dan duduk dalam pusat Barisan Pelopor di Jakarta.
- b. Menjadi Ketua Hokokai gantinya Putera di Malang.
- c. Menjadi Anggota Tjo Sangi-in di Jakarta.
- d. Dalam bulan Pebruari 1945 dengan persetujuan Empat Serangkai oleh Pemerintah Jepang diangkat menjadi So-tjokan Kedu di Magelang.

- e. Menjadi Wakil Ketua Dokoritsu Zumbi Tio Sakai (Panitia Persiapan Kemerdekaan) sedang yang menjadi Ketua Dr. Radjiman.
11. **Sesudah Proklamasi Republik Indonesia:**
- a. Oleh Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah merangkap Residen Kedu.
 - b. Menjadi Anggota K.N.I. Pusat sejak dibentuknya.
 - c. Dalam bulan Oktober 1945 dipindah menjadi Komisaris Tinggi untuk Solo dan Jogjakarta, sebagai wakil Pemerintah R.I. dan berkedudukan di Solo.
 - d. Dalam tahun 1946 Jabatan Komisaris Tinggi dihapuskan, lalu ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri untuk bagian Urusan Minoritet dan menjadi Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah pada permulaan tahun 1948.
 - e. Menjadi Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri.
 - f. Tetap menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri merangkap menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.
12. a. Selama Clash ke II diangkat menjadi Anggota Pemerintahan Darurat R.I. di Jawa untuk URUSAN DALAM NEGERI bersama-sama Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri P.M.R. Kasimo dan Menteri Agama K.H. Masjkur untuk memimpin Pemerintahan gerilya.
- b. Dalam akhir bulan Juni 1949 sehabis Clash II masuk kota Jogjakarta, kembali menjabat Gubernur diperbantukan Menteri Dalam Negeri untuk urusan Pemerintahan Daerah dan menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.
 - c. Oleh Pemerintah disertai membuat rencana UU Pokok Pemerintahan Daerah yang diterima baik oleh B.P. KNIP menjadi Undang-Undang.

13. Dalam bulan Desember 1949 menjadi Ketua Dewan Partai PARINDRA hingga PARINDRA membubarkan diri tahun 1959.
14. Dalam tahun 1950 menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lalu non aktif karena diangkat menjadi Menteri. Dalam bulan September 1950 sampai dengan bulan Maret 1956 berturut-turut menjabat:
 - Menteri Perburuahan dari Kabinet Moh. Nasir.
 - Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Sukiman.
 - Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo.
 - Menteri Sosial Pegawai dari Kabinet Wilopo.
 - Menteri Sosial Pegawai dari Kabinet Ali Sastroamidjojo, SH.
 - Menteri Pekerjaan Umum Pegawai dari Kabinet Burhanuddin Harahap.
 - Menteri Dalam Negeri ad interim.
15. Dalam bulan Maret 1956 dipilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia. Badan ini kemudian diganti menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) seluruh Indonesia (dan tetap diketuai beliau hingga tahun 1981).
16. Dalam bulan September 1959 dipilih menjadi Ketua I (UMUM) dari dewan Koperasi Indonesia (D.K.I.) hingga dibubarkan oleh Menteri Koperasi Achmadi.
17. Dalam bulan Agustus 1958 diangkat oleh Presiden R.I. menjadi Anggota Badan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia.
18. Dalam tahun 1961 diangkat oleh Presiden menjadi Ketua merangkap anggota dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan tugas menyusun rancangan UU Pokok tentang Pemerintahan Daerah, meninjau kembali perimbangan keuangan dan menyusun

rancangan pemerintahan desa yang berhak otonomi. Tugas selesai dalam tahun 1962.

19. Dalam bulan Maret 1966 diangkat menjadi Anggota M.P.R.S. (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sebagai wakil dari gerakan Koperasi.
20. Dalam bulan Mei 1966 dipilih menjadi Ketua I dari Gerkopin.

Sedikit untuk perhatian.

- I. Semasa Pemerintahan peralihan Jepang ke Republik Indonesia, dan waktu saya mulai menjabat Gubernur Jawa Tengah merangkap Residen Kedu, berhasil membubarkan cabang P.M.I. Belanda yang secara diam-diam dengan penguasa Jepang didirikannya dalam kota Magelang dengan ± 400 orang juru rawat bekas serdadu Knil, yang pada hakekatnya adalah kamuplase dari persiapan kekuatan bersenjata untuk menyerang Republik.
- II. Pada masa menjabat Komisaris Tinggi Surakarta dan Jogjakarta telah berusaha menertibkan pemerintahan daerah Surakarta dan Jogjakarta. Pada waktu itu KNI daerah menjalankan pemerintahan Legislatip maupun Executip, hal mana bukanlah berada pada tempat yang sewajarnya. Maka karena itu di antara KNI daerah Surakarta, yang diketuai oleh Sdr. Kusumodiningrat dan Sri Sunan ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII saya usahakan untuk membagi tugas yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatip. Sedang Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan Executip, kedua pihak menerima pembagian tugas itu. Tetapi sayang beberapa hari kemudian saya menerima surat dari para penasehat Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro, bahwa yang akan menjalankan Pemerintahan executip ialah para patih dari kedua raja itu. Pendirian ini ditolak oleh KNI Daerah dan KNI Daerah lalu membentuk sebuah Presidium untuk executip. Berhubung dengan itu Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro tetap aktif dan hingga sekarang.

Di Jogjakarta usaha saya dengan mengadakan pertemuan diantara KNI DAERAH yang diketuai oleh Sdr. Moh. Saleh dan Sri Sultan ke IX dan Sri Paku Alam ke XI berhasil baik, yaitu pembagian tugas dapat diatur menurut sewajarnya yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatif sedang Sri Sultan dari Sri Paku Alam menjalankan executif dan dapat langsung sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang turun temurun menurut UU Pokok Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1948.

- III. Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuhan dalam bulan September 1950 SARBUPRI sedang mengadakan pemogokan menuntut kenaikan upah dan perbaikan jatah pangan. Diikuti oleh 700.000 orang buruh perkebunan. Dalam tempo \pm 1 minggu pemogokan itu dapat saya selesaikan dengan baik, buruh mendapat kenaikan upah dan perbaikan jatah pangan.

Untuk kepentingan penyelesaian secara damai pada masa selanjutnya saya bentuk Panitia Penyelesaian Perseelisihan Pekerja (P-4) di Pusat dan di daerah-daerah, yang hingga sekarang masih berfungsi.

- IV. Menerima bintang-bintang dari Pemerintah antara lain:
1. Bintang Mahaputra Adhi Pradana Kl. II
 2. Bintang Gerilya
 3. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
 4. Satya Lencana Karya Satya Kl. I
 5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I
 6. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II
 7. Satya Lencana Pembangunan.

Pada tahun 1979 Bapak Presiden Suharto dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Diketahui :
R.P. Soengeng.

CATATAN-CATATAN SINGKAT RIWAYAT HIDUP RADEN PANDJI SOEROSO

1. Nama : *Raden Pandji Soeroso – Tjondronegoro*
2. Lahir : Tanggal 3 Nopember 1895 di Sidoarjo - Porong Jawa Timur
3. Bangsa : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pendidikan : Sekolah Dasar, Sekolah Dasar No. 1 (eerste Volkschool) dan Kweekschool 6 tahun di Probolinggi (Jawa Timur)
6. Kawin : Kawin dengan R.A. Soekarsinah
7. Anak : 8 orang, 4 laki-laki dan 4 wanita
8. *Jabatan dan kegiatan dalam masyarakat :*
 - a. Dalam tahun 1908 menjadi anggota Budi Utomo, masih menjadi murid Kweekschool. Waktu itu Budi Utomo masih belum mempunyai tujuan Politik.
 - b. Dalam tahun 1912 menjadi anggota Serikat Islam (S.I.)
 - c. Dalam tahun 1912 duduk di kelas 6 Kweekschool dan ujian penghabisan kurang satu bulan, dikeluarkan dari sekolah tersebut karena memimpin pemogokan murid-murid seluruh sekolah yang tidak puas dengan beleid Direktur Sekolah tersebut, seorang Belanda yang menghina Bangsa Indonesia.
 - d. Ke Surabaya belajar Jurnalistik.
 - e. Dalam tahun 1916 menjadi Presiden S.I. di Probolinggi dan Krasakan. Pada waktu itu saya berusia kurang lebih 21 tahun. Sekalipun saya semuda itu toch dapat juga memimpin rakyat di daerah itu yang penduduknya termasuk suku Madura. Hal itu karena saya bersama anggota Pengurus S.I. menitik beratkan pada gerakan Nasional dan perbaikan ekonomi rakyat. Pengurus S.I. dalam kota Probolinggo mendirikan dua buah toko untuk kebutuhan rakyat sehari-hari de-

ngan harga murah. Tiap hari penuh pembeli, tetapi tidak lama sejak itu toko-toko Cina menurunkan harga-harga barang tokonya lebih rendah lagi dari harga toko S.I., dan karenanya pembeli berjubel-jubel ke toko-toko Cina. Toko S.I. tidak dapat bertahan, terpaksa ditutup. Lalu toko-toko Cina menaikkan kembali harga-harga barang tokonya. Ternyata, bahwa untuk biaya saingan, orang-orang Cina mempunyai dana cukup kuat, yang dilangsungkan hingga sekarang, sehingga golongan Cina dapat menguasai seluruh perdagangan kita. *Perang Dunia I, Politis dan Ekonomis dapat dikatakan tidak mempengaruhi Negara kita, mungkin karena Negeri Belanda pada waktu itu tetap netral.*

Diangkat menjadi Mantri Boekhouder Kantor Irigasi di Probolinggo.

- f. Dalam tahun 1916 dipilih menjadi *Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai B.O.W. seluruh Indonesia*. Pada tahun 1917 dipilih menjadi *anggota Gemeenteraad Probolinggo*. Dalam kedudukan itu saya membela nasib pemilik warung-warung dipinggir jalan supaya tidak dibongkar, dan berhasil. Didalam daerah Gemeente yang hanya mengenal penduduk bangsa Belanda, kepentingan pribumi tidak diperhatikan, malahan mereka menjadi terjepit. Saya sebagai anggota Dewan Gemeente terus menerus membela kepentingan pribumi, untuk penerangan listrik, air minum, jalan-jalan kampung dan sebagainya yang sangat besar artinya bagi orang kecil, ini memerlukan perjuangan yang tangguh.
- g. Pada tahun 1918 menjadi *Commissaris Central Bestuur S.I.* kira-kira antara tahun 1917 dan 1918. *Dr. F. Douwes Dekker* keliling Jawa untuk *Indiesche Partij*, datang di rumah minta saya memegang *Ketua I.P.* daerah Probolinggo, tetapi saya tolak karena saya masih menjabat *Ketua S.I.*
- h. Pada tahun 1919 pindah ke Mojokerto (Jawa Timur) tetap menjadi *Ketua PB. V.I.P.B.O.W.*

Berhenti menjadi Mantri Boekhouder Irigasi. Menjadi Presiden S.I., Kabupaten Mojokerto dan tetap menjabat Com. CB. S.I.

- i. Pada tahun 1921 *menjadi Ketua Personil Pabrik Bond* (Fabrieks Bond) daerah Mojokerto. Saya *memimpin pemogokan* Pegawai Pabrik Gula yang jumlahnya 12 buah, semua milik orang Belanda, yang menghasilkan perbaikan nasib mereka itu. Pemogokan ini sebagai *Penjajagan kekuatan lawan*.

Selama tahun 1921–1923 saya *berusaha memperbaiki nasib kaum tani*. Dalam Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang saya berhasil, sehingga peraturan mengenai desa, mengenai pembagian tanah pertanian kepada orang tani menjadi mantap sehingga orang tani dapat menghadapi pabrik-pabrik gula yang menyewa tanah dan menjadi kuat. Sistem Komunal bezit met *vaste gandelen*. Jadi bagian tani adalah tetap, tidak ganti berganti, menjadi giat dan menambah hasil tanaman.

- j. Pada tahun 1922 *dipilih menjadi Ketua Vakcentraal yang ke III* yaitu *Persatuan Vakbonden Hindia (P.V.H.)*, dalam bulan Mei 1923 *V.S.T.P. (Perserikatan Pegawai Sepur dan Tram)* mengadakan pemogokan dengan alasan karena *Saudara Semaun, Ketua V.S.T.P. ditangkap*. Sebagai Ketua Vakcentraal P.V.H., saya berusaha memenangkan pemogokan itu, tetapi tidak berhasil, karena saya dilarang keluar kota yang saya tempati, sehingga saya tidak dapat menghubungi lain-lain perserikatan pegawai/buruh dan Pemerintah Belanda sehubungan dengan alasan V.S.T.P. mengadakan pemogokan itu, lalu atas dasar politis, Pemerintah Hindia Belanda menambah artikel 161 bis dan ter dari Strafwetboek untuk dapat menangkapi Pengurus V.S.T.P. dan oleh karena itu pemogokan menjadi hancur. Pengalaman yang amat pahit itu, tentulah menjadi pelajaran untuk bertindak berhati-hati dengan perhitungan yang setepat mungkin. Gerakan buruh yang menghebat menjadi pemogokan untuk

mendapatkan perbaikan nasib, lalu di-verpolitik, sehingga lawan mudah mendapatkan alasan memukul dengan alasan yang sesungguhnya bukan pada tempatnya, sehingga pemogokan itu tidak mendapatkan simpati dari rakyat. Karena pemogokan oleh Pengurus V.S.T.P. di verpolitik, alasan karena Semaun ditangkap. Pada tahun 1922 – 1924, saya memimpin surat kabar harian *Kemajuan Hindia* di Surabaya. Ditutupnya penerbitan setelah 2 tahun, karena pendapatan yang tidak dapat menutup pengeluaran disebabkan uang langganan masuknya hanya $\pm 50\%$, sedang pendapatan dari iklan pedagang-pedagang pribumi amat sedikit sekali, dan pedagang-pedagang non pribumi (umumnya Cina dan Bangsa Eropa) tidak mau memasang iklan dalam harian dari bangsa Indonesia pribumi.

Pada tahun 1924 diangkat menjadi anggota Volksraad dan pada pidato saya yang pertama kali dimuka Sidang Volksraad 1924 tersebut saya mengkritik beleid Pemerintah Hindia Belanda dan menolak maksud Pemerintah mengadakan pajak Landrente di Sumatera Barat. Hasil pidato saya itu, mengakibatkan Gubernur General Fock marah kepada saya dan tak mau mengundang saya untuk perkenalan, tetapi akhirnya usaha saya berhasil dan *pajak landrente tidak jadi dimasukkan ke Sumatera Barat*. Berhubung dengan itu di Padang diadakan Rapat Umum dengan mengambil keputusan antara lain, bahwa saya diberi Gelar "Datuk" yang disampaikan kepada saya dengan telegram. Untuk memperkenalkan betapa sikap dan kegiatan para anggota Volksraad berasal dari kaum perjuangan baik kiranya saya uraikan sedikit disini.

Sejak dalam Volksraad pada tahun 1927 dibentuk sebuah Fraksi dengan tujuan *mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia* dengan sebagai anggota-anggotanya adalah:

1. R.A.A. Koesoemo Oetoyo

2. M.H. Thamrin
3. R.P. Soeroso
4. Soangkupon
5. Otto Iskandardinata
6. Sukardjo Wirjopranoto
7. Dr. Rasjid
8. Wiwoho.

Dengan diketuai oleh M.H. Thamrin, maka Volksraad menarik perhatian dari kaum terpelajar. Tiap-tiap masa Sidang dilakukan dengan susunan anggauta baru, selalu membawa mutasi dari anggauta, karena ada yang tidak lagi menjadi anggauta Volksraad. Para anggauta yang berhenti pada masa-masa Sidang ialah antara lain:

Mr. Moh. Yamin, Datuk Kayo, Idi, Mr. Tadjudin Nur.

Pada masa Sidang tahun 1941, Saudara M.H. Thamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941 dan diganti oleh R.P. Soeroso sebagai Ketua Fraksi hingga tahun 1942, yaitu tahun dimana Jepang masuk. Waktu terakhir itu anggauta Fraksi Nasional adalah: R.A.A. Koesoemo Oetoyo, Otto Iskandardinata, Soangkupon, Dr. Rasjid, Sukardjo Wirjopranoto, Wiwoho, Muchtar Prabunegoro, Ir. Moh. Noer dan R.P. Soeroso sebagai Ketua Fraksi.

Tugas anggauta Fransi Nasional tidak dibatasi, mereka bebas berbicara mengenai politik, ekonomi, sosial, soal-soal lokal dan sebagainya.

Pidato mereka tidak saja dihadapkan pada Pemerintah Belanda, tetapi juga untuk penyuluhan masyarakat. Pidato-pidato mereka itu dapat perhatian besar dari kalangan Intelektuil. Jika orang mengatakan, bahwa Fraksi Nasional menjadi populer, kiranya tidak keliru. Untuk mengambil keputusan penting harus atas dasar keputusan rapat Fraksi. Sekalipun Fraksi Nasional bertujuan Indonesia Merdeka Penuh, Fraksi itu toch memberikan kebebasan kepada anggautanya untuk mengambil sikap terhadap petisi Sutardjo,

yang moderat. Anggota Fraksi Nasional menolak petisi Sutardjo karena berpendapat, bahwa petisi itu menghambat perjuangan kemerdekaan. Buku yang berisi pidato-pidato anggota Fraksi Nasional yang diucapkan dalam bahasa Indonesia amat laku dijual. Rupanya Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai anggapan, bahwa para Anggota Fraksi Nasional mempunyai pengaruh cukup besar. Karena itu pada waktu tentara Jepang telah menguasai Semenanjung Malaka (Sekarang Malaysia), *Dr. Idenburg dan Mr. Sastromuljono diutus Gubernur Jenderal Tjarda untuk mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Fraksi Nasional yang ada di Jogjakarta. Pada pertemuan dari pihak Fraksi yang sempat datang hadir, yaitu R.P. Soeroso, Otto Iskandardinata, Wiwoho dan Sukardjo Wirjopranoto.*

Pada pertemuan itu, Dr. Idenburg mengajak untuk mengadakan suatu pengumuman bersama, yang berisi mengajak rakyat Indonesia bersama-sama Belanda menghadapi Jepang. Perundingan dari pagi hingga malam tidak dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh Dr. Idenburg, sehingga Mr. Sastromuljono menjadi jengkel dan membentak dengan kata-kata dalam bahasa Belanda terhadap anggota-anggota Fraksi: "De heren moeten maar zeggen: Ya of nee" (Tuan-tuan bilang saja, ya atau tidak). *Hasilnya bubar*, perundingan tidak membawa hasil yang diharapkan oleh pihak Belanda. Dr. Idenburg dipandang orang sebagai diplomat ulung, maka karenanya anggota-anggota Fraksi bersikap hati-hati sekali, *sehingga Dr. Idenburg gagal dengan misinya.*

Tidak lama lagi Jepang masuk Indonesia tanpa perlawanan Belanda, tentara Belanda menyerah. Beberapa hari sebelum Jepang mendarat di Jawa. Residen Surabaya meminta saya datang di kantornya. Saya datang juga dan dimintai kesediaan saya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi Jepang. Secara diplomatik, saya hanya menjawab baik (goed).

Pada tahun 1929, saya dipilih menjadi Ketua Vakcentraal yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (P.V.P.N.) merupakan Vakcontraal ke IV dan dalam tahun 1938 merangkap menjadi Ketua Vakcentraal Buruh Pertikelir, yang bubar sebelum perang Dunia ke Dua, karena tidak dapat menahan tekanan kaum majikan. Pada waktu berunding dengan Salaris Commisaris Damme, Wakil-wakil Vakcentraal P.N.P.N. dan Vakbonden Pegawai Negeri, para anggauta P.V.P.N. meninggalkan rapat karena usul P.V.P.N. supaya peraturan gaji Pegawai Negeri tidak dibeda-bedakan tinggi rendahnya dengan beralasan Belanda totok, Belanda Peranakan dan Bumi Putera, tetapi hanya satu jeni untuk semua. Oleh Salaris Commissie ditolak usul tersebut.

Sementara itu P.V.P.N. berusaha mendapatkan hak-hak kedudukan sebagai Pegawai untuk supaya tidak mudah mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah atau pejabat-pejabat yang bersangkutan. Vakcentraal P.V.P.N. telah dapat bekerja sama dengan N.V.V. karena telah menjadi anggauta I.V.V. (International Vak Verbond), di London dan Wenen (Wina). Hanya dapat mengirimkan uusan seorang ke Wenen karena tidak mempunyai biaya yang cukup.

Padatahun 1922–1924 saya memimpin Surat Khabar Harian "Kemajuan Hindia.. di Surabaya. Pada tahun 1932 berhenti menjadi Presiden S.I. di Mojokerto, karena organisasi itu bubar. Lalu masuk menjadi anggauta P.B.I. (Persatuan Bangsa Indonesia) Pimpinan Dr. Soetomo di Surabaya. Dalam tahun 1935 terjadi fusi dari Budi Utomo, P.B.I., Sumatera Bond, dan lain-lain untuk menjadi satu partai yaitu Partai Indonesia Raya (PARINDRA).

Saya menjadi Ketua Parindra cabang Mojokerto dan duduk dalam Dewan Pimpinan Pengurus Bagian Politik dan Ekonomi. Bersama-sama Saudara M.H. Thamrin, R.A.A. Koesoemo Oetoyo dan Sukardjo Wirjopranoto.

- p. Pada tahun 1936 sampai dengan Jepang masuk, terpilih berkali-kali menjadi anggota Regentchapraad Mojokerto.
 - q. Pada tahun 1937 sampai dengan Jepang masuk juga menjadi anggota Dewan Propinsi Jawa Timur.
 - r. Pada tahun 1938 terpilih menjadi "Loco-burgermeester Gemmente Mojokerto".
9. Pada waktu Jepang masuk, masih berkedudukan sebagai Ketua Perhimpunan Pegawai B.O.W., Ketua Vakcentraal P.V.P.N. dan masih tetap menjadi anggota Regentschap-raad Mojokerto, Propinsi Jawa Timur dan Volksraad.

Pada waktu Jepang mendarat di Jawa bulan Maret 1942, dalam Karesidenan Surabaya selama ± 10 hari tidak ada Pemerintahan bala tentara Jepang, mungkin karena masih sibuk untuk kepentingan perangnya, sedang pejabat-pejabat Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi berani menjalankan tugasnya, mungkin di lain-lain daerah juga begitu dan yang mengherankan saya, bahwa dalam keadaan begitu tidak terdapat gangguan keamanan, disebabkan mungkin waktu itu seluruh penduduk berada dalam keadaan ragu-ragu dan menunggu, sehingga tidak ada yang sadar dan berpikiran untuk menjalankan sesuatu.

10. Pada waktu penjajahan Jepang :

Selama penjajahan Jepang, semua partai politik dan organisasi lain dibekukan.

- a. Oleh Empat Serangkai saya diminta tetap bekerja di daerah dan ditunjuk:

- 1. Sebagai Ketua PUTERA daerah Malang (Jawa Timur) dan
- 2. Duduk dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta.

Yang semuanya keheranan saya, bahwa selama menjadi Ketua PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) saya mendapat ke-

percayaan dari Sucikan Malang, yaitu Jenderal Tanaka mengenai kedudukan pegawai Pamong Praja seluruhnya, yang berarti, bahwa baik buruknya keadaan mereka itu terserah kepada saya dan juga menjadi tanggung jawab saya. Dan selama itu tidak seorangpun pegawai Pamong Praja yang mengalami sesuatu kesulitan dari pihak Jepang, khususnya Kem Pe Tai.

- b. Menjadi *Ketua Hokokai, sebagai gantinya PUTERA di Malang.*
- c. Menjadi *anggota Cuo Sangi-in di Jakarta.*
- d. Dalam bulan *Pebruari 1943 Bung Karno datang di Malang* atas nama Empat Serangkai, minta pada saya supaya bersedia menjadi *Sucokan daerah Kedu* yang diangkat oleh Pemerintah Jepang dengan maksud untuk dapat menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia dapat menjalankan pemerintahan. Permintaan ini saya terima dan selama memegang jabatan Syucokan, saya mengambil kesempatan tiap-tiap waktu untuk mengumpulkan Lurah-lurah Desa dari Kabupaten-kabupaten, untuk membesarkan semangat kebangsaan mereka itu dan memimpin dinas-dinas pemerintahan, pertanian, pendidikan dan pekerjaan Pamong Praja. Tiap ada pengumuman pengumpulan beras atau padi untuk bala tentara Jepang maka daerah saya, daerah Syucokan Bojonegoro, Saudara Soerjo dan daerah Jakarta, Saudara Sutardjo, termasuk yang amat jelek. Memang sengaja tidak kami adakan pengumpulan padi. Pada suatu waktu di Jawa Tengah diadakan rapat para Syucokan daerah Jawa Tengah di Semarang dipimpin Syucokan Semarang. Pada waktu itu saya ajukan mengenai soal-soal Pemerintahan Pamong Praja, tetapi tidak mendapatkan jawaban apa-apa.

Menurut keterangan seorang pegawai Jepang yang mengikuti saya ke rapat, diterangkan, bahwa sebenarnya Syucokan-Syucokan Jepang itu tidak mengerti apa-apa tentang masalah Pemerintahan. Hal ini saya laporkan kepada Bung Karno.

- e. Diangkat menjadi Wakil Ketua Dokuritsu Jumbi Tio Sakai (Panitia Persiapan Kemerdekaan), sedangkan yang menjadi Ketua adalah saudara Dr. Radjiman.

11. *Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.*

- a. Masih menjabat Residen Daerah Kedu lalu oleh Presiden R.I. saya diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah (merupakan yang pertama di samping tetap menjabat Residen Kedu).

Pada waktu itu disampaikan berita, bahwa pihak Sekutu menetapkan mengenai Indonesia bahwa "de jure" dipegang pihak Sekutu dan "de facto" diserahkan pada pihak Jepang. Sehingga dalam keadaan semacam itu siapa pun bangsa Indonesia sebagai pemegang kekuasaan baik di pusat maupun di daerah harus berani mengabaikan keputusan pihak Sekutu tersebut. Saya sangat gembira, bahwa mental para Republikein Indonesia telah bersikap yang sedemikian itu. Hal itu memang tidak mudah, tetapi harus berani kita jalankan.

Sebagaimana yang telah saya alami sebagai Gubernur Jawa Tengah, bahwa sewaktu Jakarta belum kedatangan pihak Inggris, di Jawa Tengah telah kedatangan wakil dari pihak Sekutu ialah seorang Perwira Angkatan Udara Inggris bernama Wing Commander Tull, yang bermaksud untuk mengurus keamanan orang-orang Belanda. Ia tidak hanya beroperasi di Semarang, tetapi meluas sampai ke Jogja, Solo dan lain-lain tempat dimana terdapat kamp-kamp tahanan Belanda (internings kampen). Untuk menghadapi Perwira tersebut harus berani disamping bijaksana. Di samping itu ikut serta seorang Belanda yang mengaku dari Palang Merah Internasional. (mengaku Kpala Red Cross Belanda) dan memenuhi seorang Pejabat pihak Jepang dengan maksud untuk mengatur PMI di daerah Magelang, lalu mengumpulkan orang-orang bekas KNIL sebanyak ± 400 orang untuk dijadikan perawat. Rupanya sekalipun pihak Jepang disertai kekuasaan "de facto" tetapi

karena sudah kehilangan semangat berhubung kekalahannya, pihak Jepang tidak berani menolak permintaan orang Belanda tersebut.

Untunglah dapat saya ketahui maksud dan tujuan orang Belanda tersebut, lalu dengan segera ke-400 orang bekas KNIL yang akan menjadi perawat tersebut saya instruksikan untuk dibubarkan, dan orang Belanda yang menjadi pemimpin itu untuk meninggalkan Magelang dengan segera.

Di samping itu perang syaraf oleh pihak Sekutu dilancarkan ke daerah Jawa Tengah dan yang harus menghadapi perang syaraf itu adalah saya sebagai Gubernur. Siang dan malam selalu mendapat telepon yang menerangkan bahwa tentara Sekutu sudah masuk di daerah sana atau daerah sini. Selain itu juga bermacam-macam ancaman tentang kemungkinan penyerbuan pihak Sekutu. Dapat dikatakan bahwa saya sebagai Gubernur Jawa Tengah hampir tidak bisa tidur setiap malam.

Untung benar, bahwa Rakyat daerah Kedu sangat membantu saya dalam menjalankan kewajiban yang berat itu, sehingga setiap kejadian yang sulit dan berbahaya dapat saya atasi bersama-sama rakyat.

Di samping itu saya masih juga mondar-mandir ke Jakarta untuk ikut serta menyelesaikan rencana U.U.D. 45 dan lain-lain. Pada suatu hari datang seorang pegawai staf Wing Cdr. Tull ke Magelang dari Semarang untuk menemui saya dengan maksud agar saya bersedia mengoreksi pidato W. Cdr. Tull yang akan dibacakan dimuka radio di Solo pada esok hari, sore. Dalam pidato yang saya baca itu terdapat soal-soal politik yang *saya coreti* dan saya beri tahu bahwa Tull bertugas hanya mengurus tahanan Belanda saja lain tidak. Keesokan harinya saya sengaja mendengarkan pidato Tull dan ternyata kalimat-kalimat yang saya coreti tidak dibaca olehnya. *Dengan tindakan ini, yaitu memenuhi anjuran saya Tull sebagai wakil pihak Sekutu mengakui Republik Indonesia "de jure" dan "de facto"*.

Saya juga menjadi anggota K.N.I. Pusat sejak dibentuknya dan atas permintaan delegasi dari Solo dalam saya sedang tengah-tengahnya menjalankan konsolidasi Pemerintahan Jawa Tengah, saya ditetapkan dan dipindahkan dalam bulan Oktober 1945 menjabat sebagai Komisaris Tinggi RI untuk daerah kerajaan Surakarta dan Jogjakarta (kedua vorsten landen), sebagai wakil Pemerintah RI dan berkedudukan di Solo. Jabatan baru ini tidak kurang beratnya dari pada waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Antara lain bahwa hampir tiap malam tidak dapat tidur karena selalu menerima laporan kejadian penculikan yang berlatar politik. Rupanya ada golongan-golongan yang satu sama lain saling culik menculik.

Tentang jalannya pemerintahan di daerah Kasunanan, Mangkunegaran, Kasultanan dan Pakualaman pada waktu itu ditetapkan K.N.I. Daerah menjalankan pemerintahan legislatif maupun executif hal mana adalah tidak pada tempat sewajarnya.

Karena itu antara K.N.I. Daerah Surakarta yang diketuai oleh Sdr. Kusumodiningrat dan Sri Sunan XII dan Sri Mangkunegoro VIII saya usahakan untuk membagi tugas, yaitu K.N.I. Daerah menjalankan legislatif, dan Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro menjalankan executif. Kedua pihak menerima pembagian tugas itu, tetapi amat sayang beberapa hari kemudian saya menerima surat dari para penasehat baik dari Sri Sunan maupun Sri Mangkunegoro bahwa yang akan menjalankan pemerintahan executif ialah para Patih dari kedua raja tersebut. Pendirian itu ditolak oleh K.N.I. Daerah dan pihak K.N.I. Daerah lalu membentuk sebuah Presidium untuk sebagai badan executif. Diri saya ditunjuknya sebagai Ketua dari Presidium tersebut. Berhubung dengan itu maka Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro menjadi non aktif hingga sekarang. *Di Daerah Jogjakarta* usaha saya mengadakan pertemuan di antara K.N.I. Daerah yang diketuai oleh Sdr. Moh. Saleh dan Sri Sultan IX dan Sri Paku Alam IX berhasil baik dengan pembagian tugas yang dapat diatur sewajarnya, KNI Daerah menjalankan legis-

latif sedang Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan executive dan dapat langsung sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Turun temurun sesuai U.U. Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948, RUU No. 22/1948 tersebut saya yang menyusun).

Di tengah-tengah kesibukan bekerja, diterima berita dari Gubernur Jawa Tengah bahwa ada seorang Jenderal Inggris yang akan datang di Solo untuk melihat keadaan tahanan orang Belanda. Ternyata yang datang bukanlah seorang Jenderal, melainkan Wing Cdr. Tull yang telah saya kenal sewaktu saya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah yang lalu. Oleh karena saya mendengar bahwa pihak Sekutu bermaksud akan mengirimkan tentara pendudukan ke Solo, saya tanyakan padanya apakah maksud itu benar akan dilaksanakan, yang saya katakan bahwa sesungguhnya hal itu tidak perlu. Oleh Wing Cdr. Tull diterangkan bahwa hal itu tergantung bagaimana keadaan tahanan Belanda di daerah Solo. Ternyata tidak sampai ada "tentara pendudukan" yang dikirimkan ke Solo, berbeda dengan janjinya sewaktu saya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah dimana Wing Cdr. Tull telah berjanji untuk tidak akan mengirimkan "tentara pendudukan" ke Magelang tetapi dalam kenyataannya setelah saya dipindahkan ke Solo, ia telah mengirimkan juga sehingga menimbulkan pertempuran antara tentara Sekutu dengan Tentara Nasional kita.

Pada waktu sebelum pertengahan tahun 1946, karena saya merasa amat lelah baik tenaga maupun pikiran, maka saya mengajukan kepada Presiden Sukarno agar saya dapat dipindahkan ke daerah lain yang kemudian dikabulkannya dan dipindahkan menjadi *Gubernur Jawa Timur*, sedangkan *Sdr. Soerjo yang menjabat Gubernur Jawa Timur dipindahkan ke Solo, tetapi beliau di Solo tidak dapat menjalankan pemerintahan karena Komandan Tentara yaitu Jenderal Sutarto telah melaksanakan pemerintahan militer*. *Sdr. Soerjo lalu kembali ke Jawa Timur* menjumpai saya dan menerangkan apa yang

terjadi di Solo. Saya lalu menjawab bahwa saya tidak berkeberatan kembali ke Solo, yang kesemuanya akan saya laporkan kepada Presiden. Saya kembali ke Solo dan mendengar bahwa pada malamnya PM St. Sjahrir telah diculik orang. Atas seruan Presiden Soekarno, sdr. St. Sjahrir dilepaskan para penculik. Jabatan Komisaris Tinggi RI dihapus, dan saya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri sebagai Gubernur diperbantukan. Di Solo kedudukan diganti dengan jabatan Residen.

Pada waktu clash ke I pertengahan bulan Juli 1947 sewaktu dalam perjalanan dengan kereta api menuju ke kota Malang dari Jurusan Blitar tepatnya sesudah kota Kepanjen mengalami serangan udara pihak Belanda yang berbarengan dengan diserbunya Kota Malang. Kereta Api yang penuh penumpang mengalami kebakaran, jatuh korban. Selamat dari serangan tersebut, tetapi tidak dapat meneruskan perjalanan ke Malang, bertemu dengan para pejuang yang menyingkir dari kota. Rumah keluarga di kota Malang mengalami kerusakan akibat bumi hangus, yang juga digunakan sebagai salah satu dapur untuk bekal makan para pejuang yang mempertahankan kota. Tidak berhasil untuk dapat menemui isteri lalu kembali ke Jogjakarta.

Pada Kementerian Dalam Negeri saya *diserahi memimpin Urusan Minoritas dan menjadi juga Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah pada permulaan tahun 1948.*

Setelah itu diangkat *menjadi Ketua Gaji Pegawai Negeri, juga merangkap menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.*

Setelah itu diangkat menjadi *Penasehat St. Sjahrir dalam perundingan antara Wakil Republik Indonesia dan Prof. Schermerhorn dari pihak Wakil Belanda.* Diminta oleh Wakil Presiden Bung Hatta untuk *menyusun Rencana Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; Propinsi, Kabupaten dan Kota.* Rencana U.U. tersebut kemudian diterima oleh BP. KNIP Pusat dan menjadi *U.U. No. 22/1948.* Saya akui bahwa U.U. tersebut belum sempurna, tetapi telah dapat menciptakan silah-

silahnya, tata kerja pemerintahan daerah yang pada waktu itu masih dalam keadaan dipengaruhi oleh pertikaian antara RI kita dan Sekutu (Belanda).

Selanjutnya saya mendapat tugas menyusun Undang-Undang Pembentukan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Demikian juga tentang hak Medebewind dan otonomi pemerintahan daerah. Kesemuanya telah dapat diterima oleh BP KNIP menjadi Undang-Undang.

Selama clash ke II saya ikut menjalankan pemerintahan gerilya dan diangkat *menjadi anggauta pemerintahan darurat RI di Jawa untuk Urusan Dalam Negeri*, bersama Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri PMN Kasimo, Menteri Agama K.H. Maskur dan Menteri Dalam Negeri Dr. Soekiman yang selang beberapa waktu kembali masuk kota Jogjakarta. Ikut bersama P.D.R.I. Jawa adalah Sdr. Zzinul Arifin, Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardoyo (Irjen Pertahanan) dan Jenderal TB Simatupang. Rute yang ditempuh adalah Solo, Tawangmangu, Nrambe (sekitar G. Lawu) Karangpandan, Bayat, Cawas, Ngawen, Karangmojo (daerah G. Kidul).

Hal-hal yang penting yang saya jalankan sebagai pimpinan Urusan Dalam Negeri, antara lain *mengangkat Sdr. Milono*, pensiun Residen Pati lagi berhubung pada waktu itu Residen Pati kembali masuk ke kota untuk ikut Belanda.

Karena Gubernur Jawa Barat Sdr. Sewaka ditangkap Belanda lalu Sdr. Ir. Ukar saya angkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Begitu juga Gubernur Jawa Timur Dr. Murdjani ditangkap Belanda, saya angkat menjadi penggantinya Sdr. Samadikun. Untuk kebutuhan bahan makanan TNI, Tentara Pelajar dan sebagainya, saya adakan rapat-rapat dengan para pamong desa dan camat dimana kami bertempat sementara untuk supaya para petani mau menyumbangkan 10% dari hasil tanaman padinya dan mereka bersedia. Kami bergerilya dari tanggal 18

Desember 1948 hingga akhir Juni 1949. Hubungan antar daerah di Jawa dilakukan dengan kurir Tentara.

Pada waktu dilakukan *perundingan antara Mr. Roem dan Van Royen di New York*, saya menerima dari Jakarta salinan *rapat pemimpin-pemimpin perkebunan Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Selatan bersama-sama wakilnya Jenderal Spoor*. Di dalam rapat itu, para wakil Perkebunan Blanda itu mengeluh karena tentara Belanda yang menjaga kebun-kebun ditarik karena itu mereka merasa sangat khawatir, wakil dari Jenderal Spoor menjawab, bahwa tindakan menarik tentara itu perlu karena waktu tentara Belanda masuk ke pedalaman tidak kelihatan tentara Republik Indonesia, tetapi tahu-tahu semua tentara Republik Indonesia muncul di mana-mana.

Pada waktu saya membaca itu merasa amat sayang sekali, bahwa Mr. Roem tidak mengetahuinya, bahwa kedudukan tentara kita kuat. Jika tahu tentunya dapat bersikap lebih keras menghadapi Van Royen dan dapat menghasilkan perundingan yang lebih menguntungkan bagi Republik kita.

Dalam akhir bulan Juni 1949, sehabis clash ke II masuk kota Jogjakarta, Kembali menjabat Gubernur diperbantukan Menteri Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Daerah dan menjadi Kepala Urusan Pegawai. Di dalam kota Jogjakarta tinggal mondok di rumah saudara, saya dan keluarga makan dari dapur umum. Rumahsaya di Solo, waktu Belanda masuk kota, terus mencari saya tidak ketemu, lalu rumah saya dirampok dan keluarga saya diusir keluar hingga hidupnya amat sengsara selama saya bergerilya. Oleh Pemerintah disertai menyusun Rencana Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah yang diterima baik oleh BP. K.N.I.P. dan menjadi Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948 sebagai tersebut di atas. Selanjutnya seperti tersebut di atas menyusun Undang-Undang Pembentukan Propinsi-Propinsi, Kota-kota dan Kabupaten-kabupaten seluruh Jawa dan diterima oleh BP. K.N.i.P menjadi Undang-Undang.

Tetapi saya belum dapat bekerja karena sakit bronchitis yang amat keras sehingga dalam perjalanan pulang dari gerilya saya memakai tandu. Syukur Alhamdulillah dalam tempo ± 1 bulan dapat sembuh kembali dan bekerja. Waktu di Rumah Sakit Presiden dan Wakil Presiden telah datang melihat keadaan saya.

Sekalipun saya masih sakit dalam Rumah Sakit dapat merasakan kegembiraan hati saya, bahwa pada waktu itu delegasi Indonesia berangkat ke Negeri Belanda untuk berunding dengan Belanda (Ronde Tafel Konferensi) untuk penyerahan Kemerdekaan Indonesia pada Republik kita. Dalam *bulan Desember 1949 Partai Indonesia Raya (PARINDRA) dihidupkan kembali dan saya terpilih menjadi Ketua Partai.*

Sekalipun hidup kembalinya PARINDRA terlambat, masih dapat sambutan dari daerah-daerah dimana kaum Parindras-ten memang menunggu-nunggu hidup kembalinya PARINDRA. Mereka itu baik yang berada di Jawa maupun yang berada di luar Jawa segera mendirikan Cabang PARINDRA.

Anggauta PARINDRA pada umumnya terpelajar, oleh karena PARINDRA mengutamakan orang-orang cakap, jujur dan suka membela kepentingan rakyat.

PARINDRA sengaja tidak mengadakan anggauta-anggauta masa oleh karena bertujuan pada Pemilihan Umum, untuk gauta-anggauta Lembaga Perwakilan Rakyat diadakan sistim memilih orang, calon dari Partai-partai politik yang ikut Pemilihan Umum, bukannya memilih gambar partai, seperti misalnya Pemilihan Umum di Inggris.

Pada Pemilihan Umum 1955 ternyata masih dijalankan sistim lama, yaitu memilih gambar. Dengan begitu PARINDRA kalah dari pemilihan, karena tidak mempunyai masa anggauta.

Dalam tahun 1954 mendirikan Yayasan untuk kemajuan kesehatan anak-anak terutama yang menderita sakit paru-paru.

Saya membantun gedung-gedung untuk Rumah Sakit tersebut di atas tanah seluas 44 Ha di desa Cilandak Selatan dari tahun 1954 hingga tahun 1958. Selesai bangunan-bangunan itu saya berusaha mendapatkan kredit untuk membeli alat-alat Rumah Sakit yang diperlukan, tetapi tidak berhasil. Lalu saya serahkan kepada Departemen Kesehatan untuk dipakai sebagai Rumah Sakit Pemerintah.

Yayasan yang saya Ketuai mula-mula bernama "Ibu Sukarno" lalu lahirnya Orde Baru diganti "Yayasan Fatmawati" dan Ketua tetap saya.

Dalam tahun 1967 Departemen Kesehatan mengajak Yayasan Fatmawati bekerja sama untuk pimpinan Rumah Sakit Fatmawati sesuai dengan prinsip Pemerintah yaitu partisipasi rakyat sebesar mungkin untuk usaha kesehatan. Untuk kerja sama itu lalu diadakan "Piagam kerja sama" antara Departemen kesehatan dan Yayasan. Pengawasan sehari-hari diserahkan kepada Dewan Direksi terdiri dari 2 orang wakil Departemen Kesehatan dan 2 orang wakil Yayasan. Diusahakan Rumah Sakit Fatmawati dapat dibeheer seluruhnya oleh Yayasan.

Dalam bulan Januari 1950 saya diminta oleh Menteri Dalam Negeri supaya pergi ke Solo bersama-sama Sekretaris Jenderal. Departemen Dalam Negeri untuk menjumpai Sri Sunan Paku Buwono ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII untuk menjelaskan maksud Pemerintah membentuk Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Kasunanan dan Mangkunegaran, seperti halnya Jogjakarta menurut Undang-Undang No. 22/1948, Sri Sunan dan Mangkunegoro menjadi Kepala Daerah ke I dan ke II.

Pihak Sri Sunan tidak keberatan, tetapi pihak Mangkunegoro minta tetap bisa masing-masing berdiri sendiri. Sesudah berunding saya terangkan, dapat juga tetap berpisah, tetapi dasarnya pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 22/1948. Tetapi penasehat dari Sunan dan Mangkunegoro minta beberapa kekuasaan Zelfbestuur dulu masih dapat

diteruskan, misalnya pengangkatan Wedana, saya terangkan, bahwa tugas-tugas Kepala Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22/1948 tersebut di atas.

Apa yang diminta oleh para penasehat yang bersangkutan itu di luar ketentuan Undang-Undang tersebut. Kedua penasehat tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu pembicaraan tidak kami lanjutkan dan kami kembali pulang melaporkan hasil pembicaraan pada Menteri Dalam Negeri.

Karena hasil pembicaraan kami dengan kedua Raja tersebut maksud membentuk Propinsi Daerah Istimewa Surakarta tidak dilanjutkan.

Dalam tahun 1950 menjadi *Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat, lalu non-aktip* karena diangkat menjadi Menteri.

Dalam bulan *September 1950 sampai dengan 1956* berturut-turut menjadi Menteri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Moh. Nasir.
 2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman.
 3. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo.
 4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo.
 5. Menteri Sosial dari Kabinet Ali Sastroamidjojo.
 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kaibnet Burhanuddin Harahap.
- 6a. Merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim selama 1 tahun.

Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuhan dari Menteri Perburuhan dari Negara Federal Republik Indonesia Saudara Wilopo, pemogokan buruh Perkebunan Belanda yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu belum dapat diselesaikan. Dalam tempo lebih kurang 7 hari dapat saya selesaikan dengan baik, (mendapat kenaikan upah dan tambahan jatah pangan) para karyawan terus bekerja lagi. Untuk kepentingan penyelesaian secara damai pada masa selanjutnya saya bentuk Pa-

nitia Penyelesaian Perselisihan Pekerja (P-4) di pusat dan di daerah dan hingga sekarang berfungsi dengan memuaskan.

Pada waktu saya memegang jabatan Menteri Sosial, untuk melancarkan datangnya orang-orang transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa, maka saya mengadakan percobaan untuk membuka hutan secara mekanis bagi para transmigran. Sebagai pangkal kerja, saya ambil suatu tempat di Desa Metro untuk tempat pimpinan dari bagian Dinas Transmigrasi. Tempat itu karena sekitarnya banyak terdapat binatang gajah, maka tempat itu saya beri nama *KOTA GAJAH* yang sekarang menjadi ramai. Di tempat itu saya tempatkan sebuah bengkel service dan reparasi traktor-tractor yang dipakai untuk membuka hutan. Rupanya usaha saya itu diketahui oleh rakyat di Jawa yang memang ingin pindah ke luar Jawa. Maka karena itu transmigran spontan jumlahnya banyak sekali dengan biaya sendiri. Dengan begitu biaya mekanisasi pembukaan hutan dapat respons yang berupa tidak mengeluarkan biaya transmigran dari Jawa ke luar Jawa.

Dalam bulan Maret 1956 saya dipilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia.

Badan ini diganti namanya menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (I.K.P.N.) pada tahun 1960. Dan saya tetap menjadi Ketuanya. Dalam bulan September 1959 dipilih menjadi *Ketua Umum dari Dewan Koperasi Indonesia*, hingga dibubarkan oleh Menteri Ahmadi pada bulan Maret 1961.

Menteri Ahmadi mendirikan *Centraal Koperasi* dinamai KOKSI (Kesatuan Organisasi Koerasi Indonesia) dan diketuai sendiri.

Pada bulan Oktober 1960 mengunjungi Kongres Perumahan di kota Paris, terus ke kota Lausanne (Swiss) mengunjungi Konggres Koperasi sedunia, lalu terus ke Jerman Barat untuk mengunjungi Konggres Koperasi di Masburg. Dalam bulan Maret 1961 datang di Jerman Timur dan Cekoslowakia da-

lam rangka Gerakan Koperasi untuk meninjau perkembangan Perkoperasian di Negara tersebut.

Karena Koperasi ditujukan sebagai alat politik, maka Koperasi menjadi amat mundur sekali, sehingga pada lahirnya ORDE BARU gerakan Koperasi menjadi lumpuh tidak ada daya apa-apa. Dalam bulan Agustus 1958 diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Anggota Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia hingga sekarang dan seterusnya saya ditunjuk menjadi Wakil Ketua.

Dalam tahun 1961 oleh Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Ketua merangkap anggota Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah, meninjau kembali perimbangan keuangan dan menyusun rancangan Pemerintah Desa yang berhak Otonomi. Tugas selesai dalam tahun 1962.

Dalam bulan Maret 1966 sampai dengan Maret 1973 diangkat menjadi anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sebagai wakil Gerakan Koperasi. Dalam bulan Mei 1966 dipilih menjadi Ketua I Gerakan Koperasi Indonesia.

Dalam bulan Juli 1973 dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.

Telah bertahun-tahun saya menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam wilayah Kelurahan Menteng (RT 003 dan RW 04 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya).

Jabatan-jabatan ini adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang terendah yang menarik bagi saya karena saya dapat berbuat amal bakti karena Allah.

Menerima tanda penghargaan (Bintang/Lencana) dari Pemerintah Republik Indonesia antara lain yaitu:

1. Bintang Mahaputera Adhi Pradana – 14 Agustus 1974
2. Bintang Gerilya
3. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
4. Satya Lencana Karya satya Kl. I
5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I
6. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II
7. Satya Lencana Pembangunan

Pada tahun 1979 dikukuhkan oleh Bapak Presiden Suharto sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Jakarta, 14 Juli 1981

Yang menurun

SOEBAGIO

ttd.

R.P. SOEROSO

Perihal : Bapak R.P. Suroso
almarhum
Lampiran : 1 berkas.

Jakarta, 8 Juni 1981.

Kepada :
yth. Bapak Suharto
Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini pertama-tama perkekanlah kami mengucapkan selamat Ulang Tahun Bapak yang ke 60.

Kami berdoa agar Bapak oleh Tuhan Yang Maha Esa dikurniائي panjang usia dan kebahagiaan beserta kesehatan sehingga Bapak dapat meneruskan cita-citanya untuk kebahagiaan Nusa dan Bangsa Indonesia.

Demikianlah pula kepada keluarga Bapak kami mengucapkan selamat dan bahagia atas ulang tahun Bapak yang ke 60.

Di samping itu perkekankanlah kami yang sejak tahun 1952 terus menerus mendampingi Bapak R.P. Suroso hingga wafatnya tanggal 16 Mei 1981 sudah hampir 30 tahun maka perkenankanlah kami menghaturkan isi hati kami kepada Bapak mengenai perjuangan Bapak R.P. Suroso.

Untuk mempersingkat menjelaskan perjuangan Bapak R.P. Suroso almarhum bersama ini kami haturkan riwayat hidup beliau dan sebuah buku 25 tahun Peringatan Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Seluruh Indonesia, di dalam buku mana Bapak R.P. Suroso dalam kata pengantarnya yang terakhir sebelum wafatnya yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesiaa mohon perhatian kepada Bapak atas perkembangan Koperasi atas dasar U.U.D. 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berarti sampai akhir hayatnya Bapak R.P. Suroso terus menerus memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kami menghaturkan surat ini kepada Bapak atas pesanan terakhir dari beliau dan sesungguhnya pada tanggal 5 Mei 1981 Bapak R.P. Suroso masih berkehendak akan menghadap Bapak di Istana Merdeka atau di Jalan Cendana akan tetapi pada waktu itu beliau merasa masih belum kuat setelah menjalani operasi mata di Rumah Sakit Mata AINI Kuningan Jakarta sebulan yang lalu dan bermaksud akan menunda menghadap Bapak pada tanggal 25 Mei 1981 akan tetapi belum sampai tercapai maksudnya pada tanggal 16 Mei 1981 jam 07.30 WIB beliau telah dipanggil kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Seluruh keluarga yang ditinggalkan menghaturkan banyak banyak terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Bapak R.P. Suroso pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1981 malam jam 21.00 di tempat kediaman Bapak R.P. Suroso jalan Krawang No. 2 Jakarta Pusat.

Kami dengan surat ini menghaturkan kepada Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia yang selalu menaruh perhatian terhadap perjuangan Bapak R.P. Suroso sehingga Bapak selalu menerima Bapak R.P. Suroso jika menghadap Bapak di Istana Negara di Istana Merdeka dan di jalan Cendana. Yang terakhir Bapak menerima Bapak R.P. Suroso bersama dengan Bapak Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo pada tanggal 14 Januari 1981 bersama kami di tempat kediaman Bapak di Jalan Cendana No. 8 Jakarta Pusat.

Adapun Bapak R.P. Suroso dimakamkan di Mojokerto di tempat pemakaman keluarga adalah menjadi keinginan dari Bapak R.P. Suroso sendiri sebelum beliau meninggal karena kata-kata beliau sebagai berikut: "Kalau saya meninggal saya tidak mau ditanam di Kalibaa, sebab disitu saya akan kesepian tetapi di Mojokerto bisa kumpul dengan Ibunya dan lain-lain famili, jadi bisa omong-omongan."

Apa yang dipesankan Bapak tersebut telah disampaikan pada putra ayahnya dan akhirnya terlaksana dimakamkan di Mojokerto dengan upacara negara.

Kami menyampaikan keinginan dari keluarga Bapak R.P. Suroso oleh karena almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga di Mojokerto apakah sekitarnya berhubungan dengan jasa-jasanya Bapak R.P. Suroso almarhum sungguhpun tidak dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata dapat diabadikan jasa-jasanya sebagai

'PAHLAWAN NASIONAL''

Demikianlah yang kami merasa berkewajiban untuk menghaturkan langsung kepada Bapak, oleh karena kami akan merasa berdosa jika hal tersebut tidak kami haturkan kepada Bapak sebagai pendamping Bapak R.P. Suroso sejak tahun 1952 hingga meninggalnya.

Kami mohon maaf, jika kami dalam hal ini Bapak anggap lancang karena kami langsung menghaturkan hal tersebut kepada Bapak. Pada akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami

(R. MARIYUN SUDIROHADIPRODJO)

R. MARIYUN SUDIROHADIPRODJO

Kantor :
IKPN SI
Gondangdia Lama No. 21
Jakarta
Tilp. 349190

Rumah :
Jalan Bangka I/II
Rt. 003/Rw 01
Pela Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Tilp. 791388

BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN RIWAYAT HIDUP BAPAK R.P. SUROSO

Kami mencoba menyusun bahan-bahan sepanjang ingatan kami selama kami mengabdikan Bapak R.P. Suroso sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1952 kami bekerja di Departemen Sosial (dulu Kementerian Sosial) Republik Indonesia di Jakarta sebagai Kepala Bagian Sekretariat dan pada waktu itu Bapak R.P. Suroso menjadi Menteri Sosialnya.
2. Dari sejak saat itu kami mendapat kepercayaan dari Bapak R.P. Suroso untuk mendampingi beliau secara langsung, sehingga kami mengetahui betul perjuangan Bapak R.P. Suroso sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dan sebagai pemimpin masyarakat.
3. Segera setelah menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia yang berkantor di Jalan Nusantara 36 (sekarang Jalan H. Ir. Djuanda 36) Bapak R.P. Suroso memikirkan bahwa Kantor Kementerian Sosial yang pada waktu itu berupa Gedung lama yang menurut istilah beliau seperti Gudang garam perlu segera diperbaiki dan Gedung di Jalan Nusantara 36 tidak cukup untuk menampung para pegawai dari Jakarta dan yang datang dari Yogyakarta, sebab pada waktu itu Kementerian Sosial Republik Indonesia di Yogyakarta harus digabungkan dengan Kementerian Sosial RIS yang ada di Jakarta, setelah RIS hilang menjadi Republik Indonesia.
4. Segera oleh Bapak R.P. Suroso diusahakan tambahnya Kantor untuk memperluas Gedung Kementerian Sosial di Jalan Nusantara 36 dan dibelinya Gedung di Jatipetamburan No. 4 untuk dijadikan Kantor Jawatan Sosial.
5. Kemudian Gedung Jalan Nusantara 36 dirombak dan dijadikan Gedung bertingkat 2 di bagian depannya, sehingga tidak seperti Gudang Garam lagi.

6. Tidak hanya Bapak R.P. Suroso memikirkan perluasan Kantor Kementerian Sosial saja dengan diperluas Gedung lagi di Jalan Jati Petamburan No. 4 tetapi beliau juga memikirkan Perumahan bagi para Pegawainya, maka dibangun rumah-rumah dinas untuk para pegawainya di:
- a. Jelambar 15 rumah
 - b. Setiabudi 10 rumah
 - c. Cipinang 12 rumah
 - d. Kebayoran Baru 4 rumah

Juga Balai-Balai Peristirahatan untuk Pegawai Negeri yang ada di Ciambuluit Bandung diperbaiki dandibangun lagi Balai Peristirahatan Kementerian Sosial di Ciloto Puncak.

7. Pada waktu Jawatan Gedung-gedung Negeri membikin rumah-rumah untuk Pegawai Negeri di Kebayoran Baru, di Pejompongan dan juga di lain-lain Daerah setelah rumah-rumah tersebut ditempati oleh para Pegawai Negeri maka sebagai Menteri Sosial beliau mengusulkan agar rumah-rumah yang dibangun oleh Jawatan Gedung-gedung Negeri dapat diangsur oleh para Pegawai Negeri yang menghuninya dan usul tersebut disampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Bapak Proi. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang pada waktu itu menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia sehingga usulnya dapat dibahas dalam Sidang Kabinet dan akhirnya menjadi Peraturan Pemerintah yang memutuskan bahwa rumah-rumah Negeri tersebut dapat diangsur dalam waktu 5 tahun.
8. Tetapi keputusan Pemerintah tersebut belum dilaksanakan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan kebetulan sekali pada waktu ada perombakan Kabinet Bapak R.P. Suroso menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan pada saat itu Peraturan Pemerintah yang mengatur angsuran pembelian rumah Negeri dijalankan sehingga mulai tahun 1955

para Pegawai Negeri yang menempati rumah-rumah Negeri dapat membeli rumah-rumahnya dengan mengangsur dalam waktu 20 tahun dan dapat melunasi dalam waktu 5 tahun.

9. Hingga beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri dan memimpin Gerakan Koperasi sampai detik terakhir sebelum beliau meninggal pada tanggal 16 Mei 1981, beliau tetap berjuang untuk mendapatkan modal dari Pemerintah melalui Koperasi Pegawai Negeri untuk membangun rumah-rumah bagi Pegawai Negeri dengan jalan jangka panjang melalui Tabungan oleh Pegawai Negeri dan jangka pendek mendapatkan modal agar Pegawai Negeri yang sudah mempunyai tanah atau sudah mempunyai rumah yang kecil bisa diberikan modal untuk membangun rumahnya di atas tanahnya sendiri atau memperbaiki dan memperluas rumahnya yang sudah ada berhubung dengan tambahnya anggota keluarga dengan pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri yang diangsur.
10. Di samping Bapak R.P. Suroso memikirkan prumahannya bagi Pegawai Negeri yang kami sebutkan di atas beliau juga memikirkan keperluan-keperluan lain sebagai Pegawai Negeri beserta anggota keluarganya.
11. Untuk keperluan tersebut maka beliau sejak tahun 1952 mulai menggerakkan pembentukan-pembentukan Koperasi Pegawai Negeri di tiap-tiap Kantor mulai dari Pusat sampai di daerah-daerah. Dan hal tersebut direstui oleh Pemerintah dengan keluarnya Surat Edaran kepada para Menteri dari Perdana Menteri R.I. tanggal 22 Nopember 1954 No. 34146/54 mengenai Pembentukan Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi Pegawai Negeri bisa dapat bahan-bahan pokok dari Y.U.B.M., B.A.T., NIVAS, BPM dan UNILEVER.

12. Di samping itu ada surat Edaran lagi dari Perdana Menteri R.I. kepada para Menteri tanggal 7 April 1955 No. 9190/55 yang membebaskan para Pegawai Negeri untuk keperluan Koperasi Pegawai Negeri.
13. Perjuangan Bapak R.P. Suroso untuk kesejahteraan Pegawai Negeri terus berlangsung hingga dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1969 dan No. 22 tahun 1970 Koperasi Pegawai Negeri mendapat modal dari Potongan Gaji Pegawai Negeri sehingga dengan modal tersebut Gerakan Koperasi Pegawai Negeri dapat berkembang terus. Dan modal dari Keppres tersebut di atas yang berjalan mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 selama 5 tahun Gerakan Koperasi Pegawai Negeri memperoleh modal sekitar Rp. 2¼ milyar, yang hingga kini berputar terus sebagai usaha Simpan Pinjam, Pembangunan Proyek-proyek Daerah untuk keperluan Pegawai Negeri, mendirikan Pabrik Sepeda Turangga yang pada tahun 1974 diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, dan untuk lain-lain keperluan guna kesejahteraan Pegawai Negeri dan modal tersebut tidak berkurang tetapi terus berkembang.
14. Bapak R.P. Suroso juga sejak tahun 1952 pada waktu menjadi Menteri Sosial memikirkan kesehatan masyarakat, maka pada tahun 1952 beliau sebagai Menteri Sosial dan Ketua Yayasan Dana Bantuan telah membeli tanah 44 ha di Cilandak Kebayoran Baru dengan harga yang sangat murah dengan cita-cita diatas tanah tersebut dapat didirikan Rumah Sakit, karena beliau pada waktu itu sudah mulai memikirkan bahwa Jakarta akan menjadi padat dan tanah akan menjadi mahal, maka untuk perluasan Rumah Sakit perlu didirikan agak jauh dari kota, maka dibelinya tanah tersebut.
Atas usaha beliau didirikan Yayasan Ibu Sukarno dan beliau duduk sebagai Penasehatnya, dan atas usaha beliau

bisa dikumpulkan modal pada tahun 1953 sekitar Rp. 28 juta dan di atas tanah yang 44 ha itu dapat didirikan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Ibu Sukarno yang pada tahun 1968 Yayasan Ibu Sukarno menjadi Yayasan Fatmawati yang diketuai oleh Bapak R.P. Suroso dan Rumah Sakit Ibu Sukarno menjadi Rumah Sakit Fatmawati.

Hingga sekarang Yayasan Fatmawati masih terus berdiri dan diketuai oleh Bapak R.P. Suroso sampai meninggalnya beliau tanggal 16 Mei 1981. Dan Rumah Sakit Fatmawati masih terus berkembang hingga sekarang.

15. Perjuangan beliau terakhir ini ialah untuk mendapatkan Keputusan dari Menteri Kesehatan untuk menjadikan Rumah Sakit Fatmawati menjadi Rumah Sakit Swasta bersubsidi dan untuk hal ini masih dalam perjuangan.
16. Rumah Sakit Fatmawati dalam master plane-nya 20 tahun akan menjadi Rumah Sakit besar yang modern untuk dapat menampung 1.000 tempat tidur. Karena tanahnya luas meliputi 44 ha, maka Rumah Sakit Fatmawati bisa menjadi Rumah Sakit yang terbesar di Jakarta mungkin di Seluruh Indonesia. Jadi Bapak R.P. Suroso sudah sejak tahun 1952 melihat jauh mengenai kesehatan masyarakat.
17. Di dalam memperjuangkan nasib para Perintis Kemerdekaan beliau sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan telah berjuang sampai Gedung Pola di Pegangsaan Timur No. 56 menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan yang diresmikan oleh Bapak Presiden Suharto.
18. Malahan pada tanggal 5 Mei 1981 beliau akan menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan tentang usahanya sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan. Akan tetapi karena beliau masih dalam keadaan sakit karena baru saja menjalankan operasi mata di Rumah Sakit mata AINI di Kuningan Jakarta, maka beliau menun-

da untuk menghadap Presiden pada tanggal 25 Mei 1981, akan tetapi pada tanggal 16 Mei 1981 beliau telah meninggal dunia dan pada malamnya jam 21.00 Bapak Presiden dan Ibu Tien Suharto telah datang melayad di tempat kediaman beliau di Jalan Krawang No. 2 Jakarta. Dan sebelumnya pada jam 19.30 Bapak Wakil Presiden dan Ibu Adam Malik juga memerlukan datang melayad.

Demikian yang dapat kami sumbangkan sebagai bahan-bahan untuk penyusunan Riwayat Hidup Bapak R.P. Suroso selama kami mendampingi beliau dari tahun 1952 hingga wafatnya tanggal 16 Mei 1981.

Jakarta, 2 Juni 1981.

(Maryun Sudirohadiprodjo)

PERS RELEASE

Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1980 dalam Rapat Anggota Induk Koperasi Pegawai Negeri yang diselenggarakan di WISMA HASTA Senayan Jakarta yang dihadiri oleh Wakil-wakil dari Gabungan Koperasi Pegawai Negeri dari Propinsi-Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia dan dari pihak Pemerintah hadir Bapak Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri dan dari Direktur Jenderal Koperasi beserta Stafnya Bapak R.P. Suroso Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri menyatakan pengunduran diri dari Ketua Umum IKPN karena sudah memimpin IKPN sejak berdirinya lebih dari 30 tahun.

Pada bulan Nopember 1979 IKPN telah memperingati HUT-nya yang ke 25 di Balai Sidang Senayan Jakarta, di mana Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Tien Suharto hadir. Pada kesempatan tersebut Bapak Presiden telah mengangkat Bapak R.P. Suroso menjadi Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Bapak R.P. Suroso adalah tokoh Nasional yang telah beberapa kali menjabat Menteri sebagai Menteri Perburuhan, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mendapat penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia berupa:

1. Bintang Mahaputera Adhi Pradana,
2. Bintang Gerilya,
3. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Indonesia,
4. Satya Lencana Karya Satya kelas I,
5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan,
6. Satya Lencana Pembangunan.

Kini beliau berusia 87 tahun pada tanggal 3 Nopember 1979 kini telah lanjut usianya tidak memungkinkan lagi beliau bisa aktif lagi menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum IKPN sungguhpun sebagai pejoang beliau tetap gigih dalam

perjuangan untuk memimpin Gerakan Koperasi Pegawai Negeri pada khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya.

Di samping beliau menjadi Ketua Umum IKPN, beliau adalah Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, Ketua Yayasan Fatmawati yang mendirikan Rumah Sakit Fatmawati di Cilandak Jakarta Selatan di atas tanah seluas 44 ha yang pada tahun 1952 beliau yang membelinya pada waktu masih menjadi Menteri dan Ketua Yayasan Dana Bantuan. Tanah 44 ha itu beliau beli dengan harga murah sekali dengan cita-cita didirikan Rumah Sakit. Dan cita-cita itu telah terjadi di atas tanah itu beliau dirikan Rumah Sakit Fatmawati yang kini menjadi Rumah Sakit yang luas di Jakarta Selatan.

Dalam usia yang sudah lanjut beliau tetap memimpin usaha-usaha itu semua. Tetapi beliau telah pula mendidik kader-kadernya untuk dapat menggantikan beliau nanti. Kini dengan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum IKPN atas permintaan dari beberapa anggota IKPN beliau diminta untuk memilih gantinya sebagai Ketua Umum IKPN sebab penggantinya itu diminta oleh para anggota tersebut juga seorang tokoh Nasional. Dan yang tahu hal itu hanya beliau.

Beliau telah mencari-cari dan akhirnya menemukan dan orangnya yaitu Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo seorang Ahli Ekonomi yang terkenal di Indonesia dan dunia Internasional dan pernah beberapa kali menjabat Menteri di Republik Indonesia. Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang kini menjabat Penasehat Ahli Pribadi Bapak Presiden Republik Indonesia menyanggupi untuk menggantikan Bapak R.P. Suroso sebagai Ketua Umum asal dipilih oleh para Anggota IKPN yang kini sedang Rapat di Jakarta. Bapak Presiden telah menyetujui pencalonan Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo untuk menggantikan Bapak R.P. Suroso sebagai Ketua Umum IKPN dan Bapak Presiden mendoakan agar dapat disetujui oleh Rapat Anggota IKPN. Pada pidato pengunduran diri sebagai Ketua Umum IKPN beliau merasa berat untuk me-

ninggalkan Induk Koperasi Pegawai Negeri yang beliau telah pimpin lebih dari 30 tahun.

Pesanan beliau adalah agar penggantinya nanti bisa meneruskan cita-cita beliau dalam mensukseskan UUD-1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila. Koperasi sebagai wahana untuk mencapai Demokrasi Ekonomi berdasarkan kegotongroyongan yang Sosialistis Religieus, bukan sosialistis komunistis tetapi berketuhanan Yang Maha Esa (Beragama). Cita-cita yang mulia sampai kemakmuran bersama tercapai yang adil.

Sungguhpun beliau meninggalkan Organisasi IKPN tetapi beliau tetap sanggup untuk tetap ikut memikirkan kemajuan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri pada khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya. Telah lebih dari 30 tahun dalam pengabdianya pada Gerakan Koperasi mengalami suka dukanya.

Pada periode tahun 1950 hingga 1958 Gerakan Koperasi maju dibawah pembinaan Kabinet Parlementer. Pada waktu itu pada permulaan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri atas inisiatif dari Bapak R.P. Suroso sejak tahun 1952 beliau sebagai Menteri Urusan Pegawai kemudian sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Parlementer merasakan bahwa kehidupan para Pegawai Negeri yang jumlahnya sekitar 1,5 juta beserta keluarganya berjumlah sekitar 7 juta mengalami kesukaran dalam hidupnya karena tidak bisa mencukupi dengan gajinya yang diterima untuk hidup setiap bulannya, maka timbul pemikiran beliau untuk mendirikan Koperasi Pegawai Negeri di tiap-tiap Instansi Pemerintah dari Pusat sampai di Daerah-daerah.

Dengan adanya Koperasi Pegawai Negeri di Instansi-instansi, maka para Pegawai bisa secara gotong royong memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ternyata mendapat sambutan baik dari kalangan Pegawai Negeri dan mulai terbentuk Primer-Primer Koperasi Pegawai Negeri di Instansi-Instansi. Primer-Primer Koperasi itu mulai menggabungkan diri menjadi Pusat

Koperasi di Daerah-daerah Tingkat II dan mendirikan Gabungan di Tingkat Propinsi dan kemudian menggabungkan diri dalam Induk Koperasi di Pusat yang kemudian menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri. Induk Koperasi Pegawai Negeri mendapat perhatian penuh dari Pemerintah pada waktu Kabinet Parlemitter itu.

Malahan IKPN bisa mendapat pinjaman dari Bank Indonesia sekitar Rp. 250 juta dengan tidak pakai bunga untuk pembelian kain batik dan textiel untuk para anggota Koperasi Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri. Uang pinjaman itu tepat pada waktunya bisa kembali dan dengan pinjaman dari Bank Indonesia itu dengan tidak pakai bunga Koperasi Pegawai Negeri bisa mempunyai modal dari hasil penjualan batik dan textiel itu. Para anggota dapat beli barang-barang dengan mengangsur beberapa bulan sehingga dengan sisa hasil usahanya Koperasi Pegawai Negeri bisa mempunyai modal. Dan Pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Pegawai Negeri yang menjadi Pengurus Koperasi untuk mengurus Koperasinya.

Begitulah majunya Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang dipimpin langsung oleh Bapak R.P. Suroso yang mendapat dukungan dari Kabinet Parlemitter pada periode 1952 sampai 1958. Pada waktu itu jumlah anggota perorangan sekitar 1,3 juta.

Tetapi pada waktu mulai berdirinya Kabinet Presidentiil pada tahun 1959, maka Gerakan Koperasi mengalami kemunduran, sebab pada tahun 1960 modal Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang di Bank-Bank dibekukan oleh Pemerintah sehingga modalnya macet.

Di samping itu Gerakan Koperasi dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi yang menjadi Ketua KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia) dan KOKSI ada di bawah pengawasan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis). Hanya Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang dipimpin Bapak R.P.

Suroso tidak diawasi oleh NASAKOM. Pada waktu itu Periode 1959 – 1965 Gerakan Koperasi pada umumnya dan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri betul-betul mendapat kesukaran-kesukaran dan apalagi setelah G 30 S pada tahun 1965 lebih-lebih merosotnya keadaan Gerakan Koperasi keseluruhannya.

Induk Koperasi Pegawai Negeri mencoba tetap bertahan sungguhpun sudah kehabisan modal tetapi dengan penuh kegigihan Bapak R.P. Suroso berjuang untuk dapat plafond kredit dari BRI tetapi bisanya dapat kredit harus pakai jaminan dari para Anggota Pengurus.

Dengan susah payah beberapa Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Gabungan Koperasi Pegawai Negeri bisa mendapat kredit untuk usaha-usahanya tetapi harus tepat pada waktunya mengembalikan. Akhirnya permodalan Koperasi Pegawai Negeri sangat menipis dan untung para anggota Pengurusnya betul-betul mengabdikan dengan tidak menerima imbalan jasa yang sepenuhnya dan boleh dikatakan para anggota Pengurus Gerakan Koperasi Pegawai Negeri bekerja dengan sukarela dan mencukup-cukupkan gajinya sebagai Pegawai Negeri untuk hidup sekeluarga.

Bapak R.P. Suroso merasa bertanggungjawab sebagai Ketua Umum IKPN dan dengan sangat gigih berjuang untuk mencari modal bagi Gerakan Koperasi Pegawai Negeri dan pada tahun 1968 – 1969 beliau menghadap Bapak Presiden Suharto dan mengemukakan penderitaan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang terus memperjuangkan kesejahteraan bagi para anggotanya yang terdiri dari Pegawai Negeri semua.

Pada akhirnya hal tersebut dapat dipahami oleh Bapak Presiden Suharto dan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN, INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU dan INKOPPOL) bisa mendapat bagian dari potongan gaji Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Polisinya.

Pada tahun 1969 keluarlah KEPPRES No. 36 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dengan KEPPRES No. 22 ta-

hun 1970. Mulai saat itu atas perjuangan gigih dari Bapak R.P. Suroso Gerakan Koperasi Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Polisinya mendapat modal dari potongan gaji dari Pegawai Negeri sampai akhir tahun 1974.

Selama 5 tahun Gerakan Koperasi Pegawai Negeri mendapat modal. Tetapi IKPN yang dulu pada tahun 1950–1958 sudah beranggotakan sekitar 1.3 juta hampir meliputi semua Pegawai Negeri di Indonesia sejak Orde Lama hingga kini mendapat kesukaran untuk mengembalikan jumlah anggotanya. Kini jumlah Pegawai Negeri sudah hampir 2 juta tetapi yang menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil hanya 600.000 saja kurang lebih 1/3 dari jumlah Pegawai Negeri. Ini semua karena mereka masih segan masuk karena takut tindakan Pemerintah Orde Lama dulu.

Kini IKPN harus masih bekerja keras untuk menjadikan semua Pegawai Negeri menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri semua. Kini semua Instansi dan para Gubernur Kepala Daerah membantu usaha tersebut untuk mending agar semua Pegawai Negeri menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri.

Pada tahun 1974 pada saat akan dihentikannya KEPRES No. 22/1970 bantuan modal untuk Koperasi Pegawai Negeri dari potongan gaji Pegawai Negeri, dari pihak Direktur Jenderal Koperasi mau mengambil modal dari Koperasi Pegawai Negeri yang berasal dari KEPPRES No. 36/69 dan KEPRES No. 22/1970. Dan ini diperkuat oleh Keputusan Bersama 3 Menteri. Tetapi Bapak R.P. Suroso Ketua Umum IKPN menentang tindakan itu, karena keputusan 3 Menteri itu tidak kuat bukan Peraturan Pemerintah. Dan berkat bantuan Bapak Presiden modal itu tetap pada Koperasi Pegawai Negeri yang dilola oleh IKPN dibawah pimpinan Bapak R.P. Suroso sehingga kini Koperasi Pegawai Negeri masih terus bisa hidup dengan modal yang didapat dari KEPPRES No. 36 tahun 1969 dan KEPPRES No. 22 tahun 1970, yang telah berakhir pada akhir

tahun 1974 dengan keluarnya KEPPRES No. 56 tahun 1974 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975.

Dengan modal yang didapat selama 5 tahun itu dari sebagian dari potongan gaji Pegawai Negeri itu Koperasi Pegawai Negeri bisa memperpanjang hidupnya. Modal itu tidak cukup untuk keperluan kesejahteraan Pegawai Negeri yang jumlahnya sekarang sekitar 2 juta dengan keluarganya sekitar 10 juta jiwa.

Maka IKPN dibawah pimpinan Bapak R.P. Suroso berjoang terus untuk mendapatkan tambahan modal. Dengan modal 105 juta IKPN mencoba pada tahun 1972 untuk membikin Pilot Proyek Pembangunan Perumahan untuk Pegawai Negeri di Jakarta yaitu di atas tanah 5 ha di Desa Bintaro Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dulu masuk daerah Kabupaten Tangerang Jawa Barat.

Di Proyek itu didirikan 188 buah rumah dari tipe 25, 45, 54 dan 70 yaitu type-type ciptaan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) dan Proyek Pembangunan Perumahan IKPN untuk Pegawai Negeri itu dibawah pengawasan dari Direktur Perumahan Rakyat Departemen PUTL yaitu Bapak Ir. Sardjono yang kini menjadi Exper PBB dalam soal Pembangunan Perumahan Rakyat. Di Proyek IKPN Bintaro itu telah dibangun 188 buah rumah yang semuanya terjual habis dengan mengangsur 5 tahun oleh Pegawai Negeri di Jakarta.

Di kompleks itu oleh DKI didirikan sebuah Sekolah Dasar dari modal INPRES. Ada Mushollah yang dibangun oleh IKPN. Dari contoh Proyek Bintaro dari IKPN itu kemudian mulai berdiri PERUMNAS yang ditangani langsung oleh Pemerintah.

Dari Proyek Perumahan Bintaro dari IKPN itu di Daerah timbul Proyek Perumahan Tumbuh yang dilaksanakan oleh Gabungan atau Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Dengan mengalirnya permintaan modal untuk Rumah Tumbuh itu melalui IKPN, maka IKPN membutuhkan modal sekitar Rp. 1 milyar.

Oleh Bapak R.P. Suroso Ketua Umum IKPN pada Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1979 hal tersebut diajukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak R.P. Suroso menghadap langsung pada Bapak Presiden di Istana Merdeka dan diterima baik oleh Bapak Presiden. Kini persoalannya baru ditangani oleh Bapak Menteri Muda Perumahan Rakyat bekerja sama dengan IKPN.

Pada akhir bulan Nopember 1980 ini oleh Bapak Menteri Muda sudah dikirimkan surat kepada Kabinet untuk pendirian suatu Unit Usaha Pembiayaan/Tabungan Perumahan IKPN untuk Pegawai Negeri dengan mendapat modal awal dari Bapak Presiden.

Diharapkan pada tahun 1981 Unit Usaha Pembiayaan/Tabungan Perumahan IKPN itu bisa mulai berdiri dengan mendapatkan modal awal dari Bapak Presiden. Kalau ini bisa terlaksana ini adalah perjuangan Bapak R.P. Suroso.

Bapak R.P. Suroso Ketua Umum IKPN telah pula mendirikan Pabrik Sepeda di Tangerang yang oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Juli 1974 pada Peringatan Hari Koperasi diresmikan dan diberi nama Pabrik Sepeda TURANGGA IKPN.

Mengingat akan kebutuhan rakyat kecil akan alat angkutan sederhana, maka sepeda itu akan memenuhi kebutuhan rakyat kecil termasuk Pegawai Negeri Golongan rendah di daerah-daerah sepeda itu sangat berguna.

Pada tahun 1953 pada waktu beliau menjadi Menteri dalam Kabinet Parlemitter telah mendesak pada Pemerintah agar rumah-rumah dari Jawatan Gedung-gedung Negeri bisa dibeli oleh Pegawai Negeri dalam hal ini beliau bekerja sama dengan Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang pada waktu itu menjadi Menteri Keuangan. Dan usul dari Bapak R.P. Suroso itu terkabul dan mulai tahun 1955 semua rumah-rumah Negeri bisa dibeli secara mengangsur 5 tahun oleh para Pegawai Negeri. Ini sekarang diteruskan oleh

PERUMNAS dengan bekerjasama dengan Bank Tabungan Negara.

Sebagai Ketua Umum IKPN sejak 30 tahun lebih Bapak R.P. Suroso terus gigih berjuang untuk kesejahteraan Pegawai Negeri karena beliau yakin kalau Pegawai Negeri semua sejahtera, maka 2 juta Pegawai Negeri yang sejahtera itu menjadi kader Gerakan Koperasi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 135 juta itu.

Pada saat itulah maka UUD 1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila akan tercapai dan Demokrasi Ekonomi bagi rakyat Indonesia akan datang dengan Koperasi sebagai wahananya yang dengan gotong royong yang Sosialistis religieus akan mencapai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah politiknya Bapak R.P. Suroso. Berpolitik berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila.

Mudah-mudahan Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dapat menerima amalan Bapak R.P. Suroso ini dan dapat meneruskan cita-cita sebagai pengganti beliau jadi Ketua Umum IKPN.

Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang mendapat kepercayaan dari Bapak R.P. Suroso untuk meneruskan cita-citanya sampai tercapai UUD 1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila.

Kita berdoa Tuhan Yang Maha Esa akan merestuinnya.

Jakarta, 16 Desember 1980

Kepala HUMAS IKPN,

(R. Maryun Sudirohadiprodjo).

M.H. THAMRIN
Alih Bahasa: Moh Husein Shadily
FRAKSI NASIONAL DALAM VOLKSRAAD
DE NATIONALE FRACTIE DE VOLKSRAAD

Het was op 27 Januari 1930, dan on dergetekende in Zijn rede bij de Algemene Beschouwingen de oprichting aankondigde van de Nationale Fractie in de Volksraad, bestaande uit een tiental Volksraads leden, t.w. de heren Koesoemo Oetoyo (Midden-Jawa). Dwidjosewojo (Vorstenlanden), Datoek Kajo (Westkust van Sumatera). Mochtar (Palembang), nja Arif (Atjeh), Soangkoepon (Ooskust van Sumatra), Pangeran Ali (Borneo), Soetadi (Midden-Java), Soeroso (Oost Java) en Thamrin (West Java), de laatste op tredende als voorzitter.

Taalkundig gesproken is de benaming van fractie feitelijk minder juist, fractie betekent immers volgens Koenen's woordenboek: "verenigde aanhangers ener staakunidge partij in een vertegenwoordigend lichaam". De aangesloten leden waren geen aanhangers van eenzelfde staatkundige partij, velen waren zelfs geen lid van een politieke vereniging, deels waren zij in de Volksraad gekomen als gevolg van een onvolkomen kiesstelsel, anderdeels weer door het benoemingsrecht van den Gouverneur-Generaal.

OOK is het nog de vraag, of de volksraad voldoet aan het andere criterium, vervat in de toelichting van Koenen, nl. het zijn van een vertegenwoordigend lichaam.

De benaming van fractie voor de tot stand gekomen groepering in de Volksraad is dan ook het gevolg van een geldend gebruik in de Volksraad om elke groepering in dit lichaam als zodanig te kwalificeren.

Het is buiten kijf, dat de Nationale Fractie in de Volksraad als een staatkundige groepering is aan te merken. Ten

*) Diikuti dari A. Zaimoel Ihsan dan Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemaren Di Hari Esok*, Jayasaksi, Jakarta, 1981, hal. 249-253.

overloede wordt zulks bewezen door het tweetal artikelen waaruit haar politieke belijdenis valt af te lezen.

De luiden als volgt :

Artikel 1. De nationale fractie in de Volksraad stelt zich ten doel de zo spoedig mogelijke onafhankelijkheid van Indonesia.

Artikel 2. Zij tracht dit doel te bereiken:

- a. door te ijveren staatkundige hervormingen;
- b. door te streven naar opheffing van alle politieke, economische en intellectuele verschillen, welke het gevolg zijn van de koloniale anithese;
- c. door het aanwenden van alle daarvoor in aanmerking komende wettige middelen.

Ondanks de bondige formulering van doel en middelen van de fractie en de heterogene samenstelling van haar leden-groep deze zijn immers vertegenwoordigers van onderscheidene delen van Indonesia heeft de ervaring gedurende het tien-jarig bestaan der fractie aangetoond, dat de fractie zowel in haar uitingen als in haar stemmingen een homogene groep is. Hoewel formele sancties tegen indisciplinaire handelingen der leden niet bestaan, is het desondanks nimmer voorgekomen, dat maatregelen genomen moesten worden tegen enig lid der fractie. Zij stemde altijd zeer gedisciplineerd behoudens de gerallen, waarbij "vrije stemming" is aangekondigd dan wel overeengekomen. De hechste fundatie van de fractie is te zoeken in het bewustzijn en in de wil der leden van te behoren tot eenzelve natieeenheid van alle Indonesiers zonder enige uitzondering, en van de noodzaak tot het vormen een eenheidsfront tegen de belagers van de Indonesische eenheids-idee.

Gaan wij de factoren na, welke tot de oprichting van de Nationale Fractie hebben geleid, dan wordt het duidelijk, dat die oprichting een logisch gevolg is geweest van de zich voor de oprichting psychologische processen in de Indonesische politieke wereld.

In 1927 werd de Partai Nasional Indonesia door Ir. Soekarno opgericht, welke vereniging in de volgende jaren een nationaal reveil over de gehele linie der Indonesiers tot gevolg heeft gehad. Door de bezielende leiding van Ir. Soekarno werden alle tot dusver versnipperde nationale krachten tot een hechte eenheid aan een gesmeed en over de ganse Indonesische politieke linie werd de will tot concentratie met de dag groter.

In de Indonesische politieke wereld buiten de Volksraad werd de federatie van Indonesche politieke partijen (de PP.KI) tot stand gebracht, waardoor het streven naar eenheid nog sterker tot uiting kwam.

Toch zou de oprichting van een nationale politieke concentratie in de Volksraad nog enige tijd op zich heen laten wachten, indien de Regering in December 1929 niet tot een daad tegenever de Indonesische politieke wereld was overgegaan, waardoor de totstandkoming bespoedigd werd. Het was in December 1929 toen de befaamde politionele huiszoekingen bij alle politieke voormannen van alle partijen over geheel Indonesia plaats vonden. *)

Hadden enkele twijfelaars voordien nog het gevoel, dat de Regering een scheiding maakte tussen "gematigde" en "extreme" nationalistes, de plaats gehad helbende huiszoekingen bewezen zonneklaar dat de gedaachte scheiding en onderscheiding - zo deze al bestonden niet meer waren dan een theoretische, en dat het wantrouwen der Regering tegen de Indonesische politieke beweging zich feitelijk uitstreckte over de gehele linie zonder enig onderschied. Nu ook de "gematigde" over een kam werde geschoren met de "extremes" elementen, was er ook voor de eersten geen aanleiding meer om geen kluer te bekennen.

*) Noot van den Schrijver.

Batavia 50 huiszoekingen, Bandoeng 41 huiszoekingen, Cheribon 24, Pekalongan 42 huiszukingen, Soekaboemi en

Tjajndjur 31 huiszoekingen, Solo 11, Koedoes 6, Djocja 35 huiszoekingen, Padang 2, Medan 25, Semarang 30, Tebing Tinggi aantal onbekend, Pangkalan Brandan 12, Krawang 25, Serang bij alle mensen die aan politieke doen, Garoet 20, Malang onbekend, Blitar idem, Palembang idem, Gresik 6, Buitenzorg 20, Soerabaja geschat 20, Telokbetong aantal onbekend, Banjarmasin 5, (zie Soeloeh Ra'jat Indonesia No. 1, ddo. 1. Januari 1930), Loboek Pakam en Galang bij 2 B(oedi) O(eto-mo) scholen, Tadnjoeng Balai verschillende huiszoekingen, Medan 25, Siantar 8, Pangkalan Brandan 12, Makasar 18, Bindjei 5 en in de omstreken 3 (zie Bat, Nwbl 31 December 1929).

(Handelingen Volksraad: zittingsjaar 1929/'30, blz, 1651).

Pada tanggal 27 Januari 1930 penulis, dalam pidato Pe-
mandangan Umum, memaklumkan terbentuknya Fraksi Na-
sional dalam Volksraad yang terdiri dari sepuluh orang anggo-
ta, yaitu tuan-tuan Koesoemo Oetojo (Jawa Tengah) Dwidjo-
sewojo (Daerah Kesultanan), Datoek Kajo (Sumatra Barat),
Mochtar (Palembang), Nja Arif (Aceh), Soangkoepon (Sumatra
Timur), Pangeran Ali (Kalimantan), Soetadi (Jawa Tengah),
Soeroso (Jawa Timur) dan Thamrin (Jawa Barat); yang ter-
akhir bertindak sebagai Ketua.

Menurut ilmu bahasa, pemberian nama "fraksi" sebenar-
nya kurang tepat, menurut Kamus Koenen, berarti: "gabungan
pengikut suatu partai politik dalam suatu badan perwakilan".
Anggota-anggotanya yang tergabung bukanlah pengikut suatu
partai politik yang sama, banyak di antaranya bukan pula
anggota dari perkumpulan politik, sebagian masuk volksraad
melalui sistem pemilihan yang tidak sempurna, selain daripada
itu, ada juga yang diangkat oleh Gubernur Jenderal.
Masih menjadi pertanyaan pula, apakah Volksraad memenuhi
kriteria lain dalam penjelasan Koenen, yaitu perwujudan dari
badan perwakilan.

Pemberian nama fraksi untuk penggolongan yang diada-
kan dalam Volksraad merupakan kebiasaan yang berlaku da-
lam Volksraad untuk menentukan jenis (qualificeren) setiap
golongan yang terdapat dalam badan itu.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa Fraksi Nasional da-
lam Volksraad merupakan penggolongan politik yang harus
diperhatikan. Apalagi yang demikian telah dibuktikan oleh
dua buah artikel dimana,

Ayat 1 : Fraksi Nasional dalam Volksraad bertujuan untuk
mencapai kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.

Ayat 2 : Mereka mencoba mencapai tujuan ini dengan :

a. menggalakan perubahan-perubahan politik;

- b. menuntut penghapusan segala perbedaan politik, ekonomi dan intelektual yang merupakan akibat antiese kolonial.
- c. menggunakan semua ikhtiar yang dipandang syah untuk maksud tersebut.

Walaupun tujuan dan ikhtiar fraksi dirumuskan secara ringkas dan susunan keanggotaannya yang beraneka ragam (heterogene) karena mereka terdiri dari wakil-wakil berbagai bagian Indonesia pengalaman dalam usianya yang sepuluh tahun menunjukkan bahwa baik dalam ucapan maupun pemberian suara merupakan satu kelompok yang sama (homogene). Walaupun tidak ada sanksi formal terhadap tindakan-tindakan yang tidak tertib (indisiplinair) namun belum pernah terjadi bahwa seorang anggota fraksi ditindak. Mereka selalu sangat tertib memberikan suaranya, kecuali dalam persoalan dimana "sudah diberikan dan disetujui kebebasan pemberian suara". Dasar fraksi yang kokoh itu dapat dicari dalam kesadaran dan kemauan anggota-anggotanya yang merasa tergolong dalam kesatuan bangsa yang sama tanpa terkecuali dari seluruh rakyat Indonesia dan kewajiban untuk membentuk satu front kesatuan (eenheids front) untuk menghadapi lawan cita-cita kesatuan tersebut.

Kalau kita mengikuti faktor-faktor yang mencetuskan pembentukan Fraksi Nasional, maka akan jelas bahwa pembentukannya itu merupakan konsekwensi logis daripada proses psikologis yang terjadi dalam dunia politik Indonesia.

Dalam tahun 1927 Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Ir. Soekarno, dimana dalam tahun-tahun berikutnya menghasilkan kebangkitan nasional segenap lapisan rakyat Indonesia. Dengan kepemimpinan Ir. Soekarno yang berpengaruh semua kekuatan nasional yang hingga saat itu terpecah belah ditempat menjadi satu kesatuan yang kokoh dan semua barisan politik Indonesia didorong untuk berpadu yang kian hari kian bertambah besar.

Di luar kegiatan volksraad, dunia politik Indonesia membentuk federasi partai-partai politik Indonesia (PPP.KI) di mana tujuan kesatuan bertambah kuat didengung-dengungkan.

Pembentukan suatu konsentrasi politik nasional di dalam Volksraad tertunda beberapa waktu, tetapi jikalau Pemerintah tidak mengambil tindakan-tindakan terhadap dunia politik Indonesia dalam bulan Desember 1929, maka pembentukannya akan dipercepat. Dalam tahun 1929 diadakan penggeledahan polisi terhadap semua pemuka-pemuka partai politik di seluruh Indonesia *)

Bila sebelumnya ada orang yang ragu-ragu masih merasakan bahwa Pemerintah membedakan nasionalis "lunak" dan "ekstrim", maka penggeledahan-pengeledahan rumah yang terjadi membuktikan dengan gamblang, bahwa pendapat yang memisahkan dan membedakan walaupun ada merupakan isapan jempol (teori) belaka, dan bahwa kecurigaan Pemerintah terhadap pergerakan politik Indonesia pada hakekatnya meliputi seluruh lapisan tanpa perbedaan apapun. Karena sekarang unsur "lunak" dengan unsur "ekstrim" diperlakukan sama-rata, maka bagi yang pertama tidak ada lagi alasan untuk tidak mengakui warnanya.

*) Catatan penulis :

Pengeledahan rumah dilakukan di: Jakarta 50, Bandung 41, Cirebon 24, Pekalongan 42, Sukabumi dan Cianjur 31, Solo 11, Kudus 6, Jogja 35, Padang 2, Medan 25, Semarang 30, Tebing Tinggi (jumlahnya tidak diketahui), Pangkalan Brandan 12, Krawang 25, Serang (pada semua orang yang melakukan politik), Garut 20, Malang (tidak diketahui), Blitar (idem), Palembang (idem), Gresik 6, Bogor 20, Surabaya diperkirakan 20, Telokbetong (tidak diketahui), Banjarmasin 5, (lihat Soeloeh Ra'jat no. 1, ttg. 1 Januari 1930), Lubuk Pakam dan Galang pada 2 sekolah B(oedi)-O(etomo), Tanjung-

balai beberapa penggeledahan rumah, Medan 25, Siantar 8, Pangkalan Brandan 12, Makasar 18, Binjei 5 dan sekitar 3 (lihat Bat. Nwbl. 31 Desember 1929).

(Pembahasan Volksraad: tahun sidang 1929/'30, hal 1651).

**KETERANGAN DARI :
Mr. A.K. PRINGGODIGDO *)**

2. PERGERAKAN SERIKAT SEKERDJA

Perpisahan perpustakaan pergerakan serikat sekerdja menjadi dua, yaitu dalam gabungan pegawai Negeri dan gabungan partikular, terus berlangsung sesudah berdirinja P.V.P.N. (lihat hal. 104, 105).

Serikat-serikat sekerdja pegawai negeri.

P.V.P.N. (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri) perpusatan serikat sekerdja pegawai Negeri, jang sedjak berdirinja ada dibawah pimpinan R.P. Suroso selalu hidup diluar pengaruh partai-partai politik dan P.V.P.N. sendiri tidak mempunyai tudjuan politik. Dengan djalan jang tenang Pusat ini beraksi untuk memperoleh perbaikan kedudukan para pegawai Negeri, menentang hal-hal jang merugikanja, serta djuga bertindak mengatur terhadap aksi anggotanja (organisasi-organisasi) masing-masing. Suatu hal jang memudahkan pekerdjaan P.V.P.N. ialah ia hanja berhadapan dengan satu madjikan umum (Pemerintah) jang tidak bersikap bermusuhan terhadap P.V.P.N., oleh karena badan ini tidak "berpolitik", dalam arti tidak mengusik-usik hal pendjadjahan.

Dibawah ini kami sadjikan satu ichtisar tentang aksi-aksi jang didjalankan oleh Badan Pusat itu dan oleh sebagian dari anggotanja, sesudah tahun 1930.

Tidak lama sesudah lahirnja P.V.P.N. maka Perserikatan Guru Hindia Belanda (P.G.H.B.) menggabungkan diri dalam P.V.P.N. itu. P.G.H.B. sendiri adalah satu gabungan¹⁾, kemu-

*) Dikutip dari A.K. Pringgodigdo, Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1960, hal. 167-74.

1) Jaitu dari 7 Perkumpulan guru-guru dengan djumlah anggota 15.000, diantaranya ialah jang terbesar perkumpulan Volksonderwijzersbond (V.O.B.) jang mempunyai 103 tjabang dan 9.000 anggota.

dian djuga Perhimpunan Beambte Spoor dan Tram (P.B.S.T.) menggabungkan diri, sehingga djumlah anggota P.V.P.N. mendjadi 13 perkumpulan dengan 29.700 anggota.

Dalam bulan Djuni 1931 P.V.P.N. memutuskan untuk menggabung dalam International Verbond van Vakverenigen (I.V.V.) Konjungtur, jang terus menerus turun, mempengaruhi keuangan Negeri dan menjebabkan Pemerintah mengumumkan niatnja akan mengadakan potongan dari gadji pegawai Negeri, oleh sebab itu dalam tahun ini aksinja jang terpenting ialah menentang kehendak Pemerintah tadi. Untuk dapat berjaga-jaga lebih sempurna manakala terdjadi anggota-anggota serikat sekerdja djatuh luar pekerdjaan maka P.V.P.N. memutuskan akan mengadakan fonds-pengangguran.

Anggota P.V.P.N. jang terbesar, jaotu P.G.H.B. (kaum guru) bulan Desember 1931 mengadakan rapat-protes, jang disertai djuga oleh perkumpulan-perkumpulan politik Budi Utomo, Pasundan, sarekat Sumatra, Sarekat Ambon, Kaum Betawi, Persatuan Selebes. Jang dibitjarakan ialah maksud rantjangan Pemerintah hendak mengadakan penghematan besar-besaran dilapangan pengadjaran, jang tentu akan berakibat tidak sadja guru-guru banjak kehilangan pekerdjaannja tetapi djuga menghambat kemadjuan rakjat.

P.P.P.H. (pegawai pegadaian) jang djuga bergabung dalam P.V.P.N. mengadakan aksi menentang niat Pemerintah untuk memperhatikan lk. 800 pegawai rendah.

Dalam tahun 1932 djumlah anggota perkumpulan-perkumpulan serikat sekerdja pegawai Negeri mendjadi kurang, karena akibat penghematan diberbagai djabatan: tetapi sebaliknya penghematan dan pemotongan gadji itu, serta maksud Pemerintah mengadakan potongan pensiun, mendjadi dorongan keras untuk terus memperkuat aksi dan ini semua menjebabkan aksi serikat sekerdja tidak mendjadi lemah. P.V.P.N. terus menentang tindakan-tindakan penghematan. Sudah tentu anggota-anggota (organisasi-organisasi)sendiri masing-

msing mengadakan aksi djuga. Penntangan P.B.S.T. dilakukan dalam kongresnja (jang ke-5) di Bandung dalam kongres ini djuga diputuskan mulai 1 Djuli 1932 akan mendjadi anggota dari Internationale Transportarbeiders Federatie (I.T.F.). Aksi P.G.H.B. diadakan dalam kongresnja Djanuari 1933, waktu itu nama perkumpulan diubah mendjadi Persatuan Guru Indonesia (P.G.I.) badan ini waktu itu mempunjai 163 tjabang dengan 19.000 anggota.

31 Desember 1933 – 1 Djanuari 1934 P.V.P.N. mengadakan kongres tahunan di Surabaja, dalam kongres ini perhatian terutama ditudjukan kepada peraturan-peraturan Pemerintah, dibuat dalam bulan Djuni 1933, jang mengenai serikat sekerdja pegawai Negeri. Peraturan-peraturan ini memuat, bahwa pegawai Negeri tidak boleh mendjadi anggota sesuatu serikat sekerdja, djika didalam pengurusnja tidak ada paling sedikit satu pegawai Negeri. Dan anggota pengurus pegawai Negeri ini sebelum menerima djabatannja sebagai pengurus serikat sekerdja, harus menerangkan bahwa ia djuga sebagai anggota pengurus serikat sekerdja itu akan selalu memperingati dan mempertahankan kepentingan Pemerintah djadjahan, dan ia akan menentang propaganda dan aksi jang dapat merugikan tata tertib dan suasana baik di kalangan pegawai Negeri (keterangan setia pada Pemerintah).

Kongres mentjela persempitan masuk mendjadi anggota serikat sekerdja dan paksaan memberi keterangan setia itu.

P.P.P.H. (Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia) dalam kongresnja jang ke-20 bulan Djuli 1933 di Jogjakarta merundingkan lagi penghematan oleh Pemerintah jang begitu besar nama perkumpulan diganti lagi dengan nama jang dulu P.P.P.B. (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera).

2–6 Djanuari 1934 P.G.I. jang telah mempunjai 20.000 anggota terbesar di 175 tjabang mengadakan kongresnja jang ke-23 di Surabaja; soal pemitjaraan ialah terutama kedudukan para guru berhubung dengan krisis dan penghematan jang begitu hebat.

Djuli 1934 Persatuan Guru Bantu (P.G.B.) mengundurkan diri dari P.G.I. karena P.G.I. dianggap kurang tegas dan giat mempertahankan kepentingan golongan guru bantu: P.G.B. menyalahkan sikap P.G.I. bahwa dengan berlakunya peraturan gadji baru, golongan guru bantu sangat djatuh di kebelakangan dalam kedudukannya dan gadjihnja.

Perkumpulan-perkumpulan guru lainnja tetap terus bersatu dalam P.G.I. jaitu P.G.A.S. (Persatuan Guru Ambachts-school), V.O.B. (*Volksonderwijzersbond*), O.K.S.B. (*Oud Kweekscholieren Bond*), P.N.S. (*Perkumpulan Normaalscholl*) dan H.K.S.B. (*Hogere Kweekschoolieren Bond*).

Dalam tahun 1934 ini djabatan-djabatan mendapat "penghargaan baru" ini (semua gadji turun, hanja jang satu lebih banyak dari pada jang lain): P.V.P.N. sebagai badan persatuan mendapat kritikan dari pers nasional berupa kritik P.G.B. terhadap P.G.I. tadi, jaitu tjelaan sikapnja terlalu lemah terhadap tindakan-tindakan Pemerintah memperketjil djumlah pegawai dalam djabatan-djabatan dan penghematan-penghematan lainnja.

20 – 22 April 1935 P.V.P.N. mengadakan kongres ke-4 di Djakarta, mengingat pada keadaan, maka dengan sendirinja terutama hal tindakan-tindakan krisis dan peraturan gadji baru jang mendjadi pembijtjaraan. Rapat-rapat protes dalam tahun ini djuga diadakan oleh masing-masing perkumpulan serikat sekerdja. Djumlah anggota P.V.P.N. selama tahun 1935 mendjadi kurang (8.000) dan achir tahun ini berdjumlah 22.600.

Kongres P.V.P.N. ke-5 di Semarang achir bulan Mei 1936 antara lain memutuskan: 1. Karena protes jang diadakan dalam tahun 1935 menentang "gadji kedaerahan" tidak ada buahnja, sikap Pemerintah Hindia Belanda tidak berubah, maka P.V.P.N ingin berhubungan langsung dengan Parlemen di Negeri Belanda, agar di sana dapat diadakan penentangan terhadap peraturan gadji ini;

2. Mengirimkan utusan ke kongres kaum buruh di Tokio.

Djumlah anggota P.V.P.N. pada penghabisan tahun 1936 dari semua (13) perkumpulan jang bergabung tinggal tidak lebih dari 20.690.

P.P.P.B. (pegawai pegadaian) dalam kongresnja di Jogjakarta Pebruari 1936 mengambil sikap jang hampir bersamaan dengan P.V.P.N. diputusnja: bahwa terhadap peraturan "gadji kedaerahan" dan peraturan "pekerdja bulanan" tidak akan mengadakan protes-protesan lagi, tetapi mengambil djalan "dokumentasi dan petisi". Dengan "dokumentasi" dimaksudkan mengumpulkan bukti-bukti jang njata, didjadikan buku-buku ketjil jang lalu dikirimkan kepada badan-badan Pemerintah di Indonesia dan Negeri Belanda, dan djuga kepada pers. Di Eropa bat hal ini akan diminta bantuan dari International Verbond van Vakverenigen. "Petisi" akan dimadjukan dengan djalan mengumpulkan tandatangan pegawai pegadaian jang lalu akan dikirimkan kepada Parlemen di Negeri Belanda dan kepada Dewan Rakyat (*Volksraad*).

Kongres P.G.I. ke-25 tanggal 25–29 Nopember 1936 di Madiun, menentang maksud Pemerintah untuk memindahkan urusan pengadjaran dari tangan pemerintah Pusat ketangan Pemerintah Daerah, berhubung kurang perlengkapan dan terbatasnja keuangan Pemerintah Daerah itu; dichawatirkan sebagai akibatnja: kemunduran pengadjaran.

Dalam kongresnja jang ke-6 tanggal 25–26 Desember 1937 di Solo, P.V.P.N. mengambil 2 mosi. Jang pertama menolak "B.B.L. 1938" (peraturan gadji baru lagi jang mengganti peraturan bar dari 1934) dengan alasan, bahwa peraturan itu didasarkan pada kulit (bangsa) dan buat beberapa djabatan rendah "peraturan kedaerahan" (jang mengadakan perbedaan dalam pokok gadji untuk masing-masing daerah) masih terus dilangsungkan. Mosi kedua mendesak agar ditjabat peraturan "buruh bulanan" dan "pekerdja biasa" (dua golongan ini tidak bisa mendjadi pegawai tetap). Djumlah anggota achir 1937 naik lagi sampai 22.386 (13 perkumpulan).

Djuga serikat sekerdja pegawai masing-masing, diantaranya P.P.B.B. dalam kongresnja ke-23 di Jogja (Mei 1937) dan P.P.S.T. jang berkongres di Djakarta April 1937, seperti biasa membitjarakan soal-soal gadji ini. P.G.I. dalam kongresnja jang ke-26 (12–17 Nopember 1937 di Bandung) memperingati berdirinja tjukup 25 tahun, sedang kongres itupun mengeluarkan pengharapan supaya diadakan kewadajiban beladjar umum (leerplicht).

Nopember 1938 P.G.I. berkongres (jang ke-27) di Malang, diambilnja 2 mosi, satu tentang gadji-gadji baru dan lainnja tentang penjerahan urusan pengadjaran kepada Pemerintah Daerah, penjerahan ini (untuk kepentingan pengadjaran) seharusnya didahului oleh perbaikan tjara memilih (*kiesstelsel*) dan perbaikan perhubungan keuangan Daerah terhadap Negeri.

Dalam kongresnja jang ke-8, diadakan di Bandung 29–31 Djanuari 1939 P.V.P.N. mengambil putusan seperti berikut:

Terhadap peraturan gadji:

- a. "B.B.L. 1938" tidak memberi kepuasan kepada pegawai Negeri bangsa Indonesia, sebab antara gadji-gadji masih banjak jang tidak mentjukupi untuk hidup sederhana.
- b. perbedaan gadji antara pegawai tinggi, menengah dan rendah masih sangat besar.

Terhadap "peraturan buruh bulanan" dan "pekerdja biasa":

- a. Peraturan ini timbul dalam waktu krisis, waktu keadaan memaksa sekali.
- b. Sebetulnja tidak ada batas jang djelas antara pegawai Negeri, buruh bulanan dan pekerdja biasa.
- c. Peraturan-peraturan ini harus selekas mungkin ditjabut dan keadaan sebelum krisis, waktu pegawai Negeri rendahan dapat diangkat mendjadi pegawai tetap, harus diadakan lagi.

Terhadap gadji minimum:

- a. banyaknya pengangguran, adanja nafsu dikalangan kaum madjikan untuk memberi upah serendah-rendahnja tidak adanja gerakan serikat sekerdja jang tersusun kuat, itu semuanja menjebakkan kaum madjikan leluasa berbuat semaunja dalam menetapkan gadji buruh partikulir, oleh sebab itu upah dibuat sangat rendah.
- b. berhubung dengan jang tersebut di atas, upah kaum buruh Pemerintah jang termasuk dalam peraturan "pekerdja biasa", jakni upah jang didasarkan pada upah ditempat masing-masing, djuga rendah sekali.
- c. oleh karena itu perlu selekas mungkin diadakan peraturan gadji minimum untuk buruh partikulir.

Terhadap peraturan-peraturan sosial:

- a. tidak adanja "undang-undang sosial" (*sociale wetgeving*) berarti tidak adanja perlindungan bagi kaum buruh pada umumnja. Lebih-lebih buruh partikulir sama sekali tergantung kepada madjikannja.
- b. "undang-undang sosial" memberi pegangan, baik pada madjikan baik pada buruh;
- c. undang-undang sosial dapat menjingkirkan pertentangan antara kapital dan buruh, pertentangan jang tidak diingini oleh P.V.P.N.

Terhadap lama waktu bekerdja:

- a. untuk mendjaga djangan sampai kaum buruh partikulir bekerdja terlalu lama, harus diadakan perbatasan;
- b. perbatasan lama waktu bekerdja untuk kesehatan buruh memang sangat dibutuhkan; peraturannja harus dibuat dengan mengingati keadaan-keadaan di Indonesia.

Terhadap fonds anak jatim pegawai Negeri bangsa Indonesia :

- a. alasan-alasan jang dikemukakan oleh Pemerintah menerangkan apa sebabnja belum diadakan fonds anak jatom pegawai Negeri Indonesia, bukanlah halhal jang tidak boleh dihindarkan;
- b. mengingat rasa keadilan, mengadakan fonds ini tidak boleh ditangguhkan lagi.

Terhadap pasal (6) bis undang-undang Hukum Pidana: menjatakan bahwa sama sekali bukanlah maksud gerakan serekat sekerdja untuk mengadakan pemogokan, malahan mengakui pula perlunja larangan mogok dipelbagai perusahaan (misalnja di perusahaan kereta api dan rumah sakit, tetapi P.V.P.N. mengharap pasal ini ditjabut karena susunan kata-katanja kurang terang dan bersifat sangat luas; ini mempermudah mengartikan dan memakainja tidak betul.

Dalam tahun 1939 itu djuga, Dr. Sukiman (pemimpin P.I.I., djuga ketua perkumpulan pegawai pegadaian P.P.P.B.) pergi ke Geneva sebagai penasehat N.V.V. (Nederlands Verbond van Vakverenigen) dalam konperensi buruh internasional; dalam perdjalanannya ini ia mempergunakan kesempatan atas nama P.P.P.B. dan P.G.I. mengundjungi Menteri Djadjahan di Den Haag memajukan permintaan perbaikan kedudukan buat pegawai Negeri Indonesia pada umumnja dan untuk pegawai pegadaian dan guru chususnja. Djuga dimintanja perhatian tentang lama waktu bekerdja dan perbedaan menurut kulit dalam djabatan pegadaian, dan djuga peraturan buruh bulanan dan pekerdja biasa jang sangat tidak memuaskan itu bagi orang-orang jang terkena.

31 Mei 1939 P.V.P.N. memperingati hari lahirnja tjujukup 10 tahun. Dalam konperensinja pada 25 Pebruari 1940 federasi ini memutuskan mengadakan aksi, di mana-mana pada satu hari, supaja permintaan agar mendapat tambahan oleh karena kemahalan lekas terkabul.

Kongres P.P.S.T. tanggal 11–15 September 1941 di Semarang berpendapat perlu ditetapkan: ¹⁾

1. upah minimum sehari dalam djabatan kereta api dan trem hendak f 0,50 banjaknja;
2. dalam waktu 28 hari sekurang-kurangnja diberi 4 hari mengaso, sedang upah tetap penuh dibajar;
3. satu hari kerdja paling lama 8 djam ;
4. peraturan dendaan dihilangkan dari peraturan hukuman pegawai;
5. kepada pegawai termasuk dalam peraturan M.D.R. (Maand en Dagloners Reglement) dalam satu tahun diberikan waktu beristirahat 12 hari;
6. Badan Pendamaian dihilangkan, diganti dengan "Badan pengamat-amat soal perburuhan antara pegawai kereta api dan trem;
7. diadakan "Badan Penjelesaian" (untuk memeriksa dan mengurus perselisihan);
8. didirikan suatu "Hakim Pengadilan buat pegawai Negeri";
9. peraturan pertanggungan diwaktu tua buat buruh partikulir jang bergadji sekurang-kurangnja f 25.—

Sebelum itu, yakni pada tanggal 18 Mei 1941 pengurus besar perkumpulan ini dalam rapatnja telah memutuskan untuk menjokong pendirian P.V.P.N. tentang terlaksanaja "upah ukuran pasifik" (Pacific loonpeil) buat semua kaum buruh dan minta bantuan segenap kaum buruh dan pergerakan rakjat, sukalah berdjuaug buat hal ini.

Ketua serikat sekerdja pegawai kereta api jang besar ini, Mr. Hindromartono, dalam tahun itu pergi ke konperensi bu-

1) Pasal-pasal ini seperti djuga pasal-pasal dalam kongres P.V.P.N. 1939 disebutkan disini untuk memberi pemandangan tentang keinginan-keinginan jang tersimpan dalam dada perkumpulan-perkumpulan serikat sekerdja pegawai Negeri dalam tahun-tahun itu.

ruh internasional di New York²⁾ sebagai penasehat perwakilan Negeri Belanda.

Pada akhir masa pergerakan rakjat jang diuraikan diatas, P.V.P.N. didalamnja mempunyai 18 organisasi, yakni: Perhimpunan Pegawai Spoor dan Tram (P.P.S.T.), Persatuan Guru Indonesia (P.G.I.), Vereniging van Indonesische personeel bij de Irrigatie, Waterstaat en Waterschappen (V.I.P.I.W.) Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumi putera (P.P.P.B.), Landelijke Inkomsten Bond (L.I.B. Kadaster Bond, Perserikatan Kaum Sekerdja Boschwezen (P.K.S.B.) V.A.M.O.L.A. Pegawai Mijnbouw (P.M.B.), Persatuan Kaum Verplegers (sters) dan Vroedvrouwen (P.K.V.I.), P.P.A.V.B. Midpost, Opiumregie, P.P.T.R. V.O. L.T.A. P.M.M.B., P.P.P. dan O.R.B.H.B. Jumlah anggota perkumpulan-perkumpulan ini semuanya ada lk. 42.000.

Tetap tidak masuk dalam P.V.P.N. ialah perkumpulan-perkumpulan serikat sekerdja pegawai "pemegang pemerintahan" jaitu golongan pegawai pangreh pradja Indonesia (P.P.B.B., V.A.I.B. dan Bond van ongediplimeerden), pegawai polisi Indonesia, serdadu Indonesia dan serdadu Indonesia angkatan laut. Organisasi serdadu angkatan laut rusak bubar sesudah pemberontakan tahun 1932 dikapal pendjeladjah "de Zeven Provinciën dan di kapal-kapal perang lain; pemberontakan ini disebabkan oleh perselisihan hal gadji (diadakan potongan gadji jang amat berat).

2) Kembali bulan Maret 1942, tepat sebelum Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada tentara Djepang.

RIWAJAT K.E.I. DENGAN RINGKAS

BOUWBUREAU "SOEGIRMAN"

Ontwerpen.

Uitvoeren.

Taxaties.

Verstrekt Adviezen op

Woninggebied.

Molenvliet West 89,

Telf. Bt. 1183.

Pada tanggal 3 Juli 1940 karena koerang poeas dengan keadaan perekonomian bangsa Indonesia, berkoempoellah beberapa toean-toean jalah ttn. Soeroso, Soebardi, Soeradi, Soegirman, Soedibio dan pengarang ini, ditempat petjenongan 50 oentoek memperbitjarakan keadaan perekonomian itoe dan oentoek mentjari djalan bagaimanakah dapat memperbaiki keadaan itoe. Pada malam hari itoe sebagai boeah pembijtaraan didirikan soeatoe perkoempoelan oentoek membangkitkan dan memadjoekan perekonomian Indonesia, menoeoet fatsal 3 dari anggaran dasarnja, dengan djalan apaoen djoega asal djangan melanggar wet.

Di rapat pada tanggal 10 Juli perkoempoelan diberi nama Kemadjoean Ekonomi Indonesia dan terpilih mendjadi pemimpin jalah pengarang ini.

Kloear dan masoek anggauta. Moela-moela K.E.I. tidak mengadakan propaganda hanja di kalangan anggauta sendiri K.E.I. dibitjarakan sedikit-sedikit, tetapi di boelan April jang lalu di soerat kabar Pemandangan dimoeat advertentie dari K.E.I. dan advertentie itoe roepa-roepanja berhasil djoega, djika kita melihat angka-angka masoek dan kloernja anggauta.

Pekerdjaan K.E.I. sampai sekarang ini boeah pekerdjaan dari K.E.I. beloem ternjata dan memangpada waktoe K.E.I. baroe berdiri berhoeboeng dengan sedikitnja anggauta-anggau-

ta, keadaan peperangan dan banjarknja pekerdjaan pengarang ini sebagai pemimpin dari "De Bataviasche" dan hanja Tn. Soebardi sebagai pembantoe, pekerdjaan K.E.I. tidak dikerdjakan sebagai semestinja. Hanja pada tanggal 13 Agustus tahoen jang laloe karena permintaan pengerooes K.E.I. di Club Indonesia di Kramat diadakan lezing oleh Toean Teko dari Economische Zaken dengan pertoendjoekan lantaarnplaatjes.

Di boelan Januari tahoen ini pengerooes dibantoe selain dari toean Soebardi djoega oleh toean-toean Soebadio dan Soedardjo dansedapat-dapatnja pada tiap-tiap malam kamis kita berempat berkoempoel dikantor di Petjenongan oentoek membitjarakan keperloean dan pekerdjaan perkoempoelan. Oleh rapat jang diadakan pada tanggal 5 Januari tahoen ini dipoatoeskan soepaja mendirikan soeatoe bank oentoek anggauta K.E.I. dengan modal sendiri dan pengerooes sendiri. Jang boleh membeli aandeel hanja anggauta-anggautadari K.E.I.

Berita dari Kemadjuan Ekonomi Indonesia
No. 5, April-Mei, 1941, Tahoen I, hal. 3.

KETERANGAN DARI D.M.G. KOCH @

Bagian I :

”Segala rupa peladjaran, jang diperoleh dari sekalian pengalaman, selama Fock memerintah sebagai Wali Negara digantikan oleh Jhr. de Graeff, diperhatikan dengan sungguh-sungguh Persatuan segala gerakan-gerakan nasional makin hidup, makin njata. Di dalam Madjelis Volksraad persatuan nampak pula dari pada berdirinja Fraksi Nasional pada tanggal 27 Djanuari 1930, jang diketuai oleh Moh. Hoesni Thamrin dan mempunjai anggota-anggota sebagai berikut: Oetojo, Dwidjosewojo, Datoek Kajo, Mochtar, Nja Arif, Soeankoepon, Pangeran Ali, Soeradi dan Soeroso. Fraksi itu mendjadi musuh politik dari pada federasi ”Vaderlanse Club”, suatu gabungan orang-orang Belanda kolonial”.

Bagian II :

”Dr. Moeliapun memperingatkan kepada ketjil hatinja kaum intelek. Otto Iskandardinata mengatakan pula, bahwa kemasgulan hati kaum terpeladjar telah memuntjak dan ber-bahaya. Thamrin mentjela tak adanja pengetahuan tentang budi pekerti rakjat. *Suroso* memperingatkan ”datangnja bandjir, jang mengantjam akan menghantjurkan semua”.

@) Dikutip dari: D.M.G. Koch, *Menuju Kemerdekaan Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia sampai 1942*, (Terjemahan Abdoel Moeis), Jajasan Pembangunan, Djakarta, 1951, (Bagian I, hal. 133; bagian II, hal. 150).

KETERANGAN DARI ALI SASTROAMIDJOJO, S.H. @)

Bagian I :

"Saya pun terpilih dengan kelebihan suara yang meyakinkan dalam pemilihan ini. Dan denan demikian aktivitas "parlementer" saya meningkat, artinya meliputi seluruh daerah Jawa Timur. Di dalam Dewan Propinsi itu saya menyuarakan pendirian politik Gerindo yang titik beratnya terletak pada kepentingan rakyat kecil. Dalam hal ini pendapat saya sering sesuai dengan pendirian pak Suroso, yang waktu itu juga menjadi anggota Dewan Propinsi Jawa Timur. Ia mewakili golongan nasionalis yang tergabung dalam Parindra. Tetapi ia pun ternama sebagai pemimpin organisasi-organisasi pegawai pegawai negeri yang tergabung dalam "Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri" (P.V.P.N.).

Pak Suroso saya kenal sebagai pemimpin yang sederhana tetapi besar pengaruhnya karena ketekunan dan ketertibannya di dalam menjalankan tugas. lagi pula pak Suroso adalah seorang jujur dan kompeten di dalam membela kepentingan rakyat dan pegawai negeri. Di dalam perdebatan di Dewan Propinsi Jawa Timur ia selalu bertitik tolak dari kepentingan rakyat kecil pula. Hal ini nampak sekali di dalam perdebatan mengenai anggaran propinsi. Oleh karena menyolok sekali bahwa susunan anggaran belanja itu selalu menguntungkan kaum modal Belanda, maka pak Suroso dengan caranya yang khas, yaitu berbahasa Belanda berlogat Jawa Timur dan penuh dengan kecaman-kecaman yang jitu dan tajam ia sering berhadapan tidak saja dengan anggota-anggota Belanda wakil-wakil kepentingan kaum modal, tetapi juga wakil-wakil pamongpraja yang kepentingannya sejajar dengan kepentingan kaum modal Belanda itu."

@) Dikutip dari Ali Sastroamidjojo, *Tonggak-tonggak di Perjalnanku*, Kinta, Jakarta, 1974, (Bagian I, hal. 119; bagian II, hal. 125).

Bagian II :

”Akan tetapi pergerakan kemerdekaan nasional tidak terhenti oleh karenanya. Semua kesempatan yang masih terbuka segera dipergunakan. Dari sebab itu aksi politik berpindah ke sidang-sidang Volksraad, yang sebagai badan resmi masih bekerja terus. Di dalam itu anggota-anggota bangsa kita dari golongan nasionalis sangat giat dengan mengajukan usul-usul mosi yang maksudnya untuk mendesak pemerintah Belanda mengadakan perubahan-perubahan di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia.

Tokoh-tokoh nasionalis yang menonjol pada waktu itu ialah Thamrin Sukardjo Wirjopranoto, Sutardjo Kartohadikusumo, R.P. Suroso dan Moh. Yamin. Buat pertama kali dalam sejarah Volksraad dibentuk suatu fraksi baru dengan tujuan ”Indonesia Merdeka”. Hal ini ditegaskan oleh R.P. Suroso ketika ia mengumumkan terjadinya gabungan antara G.N.I. (golongan Nasional Indonesia) yang dipimpin Moh. Yamin dan F.R.A.N.I (Fraksi Nasional Indonesia) yang dipimpin Moh. Husni Thamrin.

KETERANGAN DARI DJEND. MAJ. T.B. SIMATUPANG *)

Di Ngawen saya mengadakan pembicaraan yang panjang lebar dengan Menteri Kasimo, yang tinggal di Ngawen bersama-sama Djenderal Major Suhardjo dan saudara-saudara Prawoto Mangkusasmito, R.P. Suroso dan Zainul Arifin. Menteri Kasimo adalah Menteri Persediaan Makanan Rakyat pada waktu itu. Pak Suroso adalah pegawai tinggi pada Kementerian Dalam Negeri pada waktu itu. Sewaktu zaman Volksraad dia termasuk djago-djago tua kita.

Masih ada tjeritera jang saja dengar dari mereka tentang suatu kedjadian waktu rombongan Menteri Kasimo itu menjeberangi djalan besar Surakarta-Patjitan, tentu dalam keadaan gelap diwaktu malam. Menuut tjeritera tadi, maka dalam perdjalan itu pak Suroso, jang telah landjut usianja lagi pula agak sakit-sakitan telah terdjerumus dalam sebuah selokan jang tjukup dalam. Beliau dengan hati jang tabah berdiri tegak kembali dan berdjalan terus. Artinja beliau menira bahwa ia sedang berdjalan terus. Akan tetai dengan tidak disadari olehnja pak Suroso sebetulnja telah brputar seratus delapanpuluh deradjat tatkala beliau djatuh dan berdiri tegak kembali. Oleh sebab itu pak Suroso jang mengira baha dia berdjalan terus setelah berdiri tegak, sebetulnja sedang berdjalan kembali kearah tempat berangkat. Beliau merasa heran betul, tatkala beliau tiba pada suatu kampung jang tidak asing baginja, yakni desa dari mana rombongan berangkat. Kok, kembali lagi", terdengar dari mulut beliau. Saja tidak tahu apakah saja harus ketawa waktu saja mendengar tjeritera ini. Memang lutju djuga kedengarannja, akan tetapi disamping itu saja merasa terharu mendengar pengalaman dari orang tua jang telah sakit-sakitan itu dalam perang rakjat ini. Sesudah Djokdjakarta ditinggalkan oleh Belanda, maka pak Suroso harus dirawat selama beberapa waktu dirumah sakit.

*) T.B. Simatupang, *Laporan Dari Banaran Kisah Pengalaman seorang Pradjurit selama Perang Kemerdekaan*, Pembangunan, Djakarta, 1960, hal. 81.

PERSIDANGAN DEWAN RAKYAT *)

Tahoen Persidangan 1940 – 1941

Sidang hari Senen, 28 Oktober 1940

Ketoea : Mr. J.A. Jonkman

Pengawas Pemerintah Jang Istimewa Atas Perhoeboengan- Perhoeboengan Boeroeh

Pada poekoel 11 Ketoea memboeka sidang oemoem dari Dewan Rakjat dan mempersilahkan secretaris membatjakan soerat-soerat jang masoek.

Kemoedian jang dibitjarakan ialah rantjangan ordonantie oentoek mengadakan pengawasan jang istimewa dari pihak pemerintah atas perhoeboengan antara kaoem madjikan dan boeroeh. Hal ini perloe sekali berhoeboeng dengan peri hal keadaan jang loear biasa pada waktoe ini.

Baik ditribune oemoem, maepoen ditribune jang gereserveerd kelihatan beberapa orang jang menaroeh perhatian dan minat pada pembitjaraan tentang soal tersebut diatas.

Toen Suroso (Nat. Fractie)¹ membitjarakan tindakan-tindakan jang akan dilakoekan teroetama berhoeboengan dengan kaoem boeroeh Indonesier, terhadap kaoem boeroeh mana sikapnja kaoem madjikan tidak mesti manis dan baik Seperti menerangkan sebab apa organisatie-organisatie dari kaoem boeroeh Indonesier particulier tidak dapat hidoep. Kerap kali pemoeka-pemoekanja dipetjat dari djabatannja, soedah tentoe tidak dari sebab ia mendjadi pemimpinakan tetapi sebab-sebab lainnja. Menoeroet seperti oemoemnja kaoem boeroeh Indonesia tidak mempoenjai hak jang tetap. Mesti

*) Dikutip dari madjalah: Soeara Parindra, No. 10, Oktober 1940 Tahoen ke V, hal. 161-2.

1) Di dalam persidangan ini bapak R.P. Suroso adalah pembicara ke 2, sedang pembicara pertama ialah Toean Kolman, dari golongan Economie.

ada sadja sebab oentoekek memetjat mereka dari djabatannja. Bagaimanakah kita dalam hal ini akan dapat mengetahui? Seperti takoet bahwa commissie dalam ini tidak akan dapat mentjapai toedjoeannja. Betoel ada adtikel 1603 B.W. akan tetapi beloem pernah kedjadian bahwa seorang kaoem boeroeh mendapat haknja dari adanja artikel tadi.

Artikel tadi tjoema mempoenjai arti boeat kaoem boeroeh Eropah, meskipoen disini tidak dikatakan tentang adanja perbedaan adanja perbedaan bangsa. Dalam praktijknja tuin-employe Indonesier itoe tidak ada. (Toean Smit: Ada).

Toean Soeroso: Ia barangkali tiga orang dari 5.000 employe. Maka dari itoe seperti mendesak soepaja sekarang diadakan atoeran-atoeran tidak sadja boeat bangsa Eropah akan tetapi djoega boeat Indonesier. (Protest keras dari Pengoeasa Pemerintah toan Enthoven).

Toean Soeroso tetap dalam pendapatannja dan menganggap penting oentoekek mendirikan Departement van Sociale Zaken. Seperti menjesal bahwa poetoesan jang terakhir dise rahkan kepada Directeur Justitie, dan ia mengharap soepaja atoeran-atoeran dirobah dan memperbaiki hak commissie. Adanja sekarang ini menoeroet seperti moengkin boeat kaoem madjikan oentoekek menjoekekarkan pekerdjaan commissie, (seperti tidak maoe menggunakan perkataan "menghalang-halangi"). Pendeknja adanja atoeran-atoeran ini akan dapat timboel kedjadian-kedjadian jang aneh dari pihak jang menjetudju. (Pengoesa Pemerintah toean Enthoven: sebab apa?).

Toean Suroso: Moengkin djuga, meskipoen saja tidak mengetahui sebab-sebabnja (hadirin sama ketawa). Lagi poela dapat djuga nanti Directeur Justitie menjetoedjoei pendapatan mereka jang tidak setoedjoe itu. (Penguasa Pemerintah toean Enthoven: Apakah jang tidak setoedjoe itoe mesti tidak benar pendapatannja?).

Toean Suroso tidak menjangkal kemoengkinan tadi, akan tetapi tetap berpendapat moengkin adanja kedjadian-kedjadian

jang aneh. Maka dari itoe minta adanja tanggoengan seperloenja. Seperti djoega menganggap perloe oentoek memperkenalkan personeel dari peroesahaan-peroesahaan negeri dengan atoeran-atoeran tadi. Achirnja seperti berpendapat bahwa semoea kedjadian haroes diberitahoekan kepada commissie. Lagi poela atoeran-atoeran tadi haroes diperkenankan djoega pada bekas kaoem boeroeh dan kaoem boeroeh harian. Terhadap koeli harian ini pendapatan seperti bertentangan dengan pendapatan toean Kolman.

VOLKSRAAD @)

Djoemlah wakil rakjat jang dipilih dari tempat-tempat jang terseboet di P.K. lembaran ke II pada tanggal 1 Joeli 1937, djika ditambah jang sama di benoemd oleh G.G. maka kita mendapat 60 orang anggota dan seorang Voorzitter jang diangkat oleh Sri maha Radja.

Maka sesoedahnja mereka datang berkoempoel di Gedong Dewan Rakjat, anggota tadi sama bergolong golongan mengadakan perkoempoelan sendiri-sendiri dengan werkprogram jang diboeat azas bekerdjja. Golongan-golongan itoe diseboet didalam bahasa Europa fractie (bagian dengan memakai kepala jang diseboet voorzitter dari fractie-fractie.

Di Volksraad sekarang kita mendapat 9 fracties. Barangkali tidak ada salahnja djikalau saja menjeboetkan nama-namanya anggota-anggota Volksraad di dalam fractienja.

VIII. Bangsa Indonesia

Nationale Fractie Voor. M.H. Thamrin.

Anggota-anggotanja:

1. *R.P. Suroso* di Modjokerto
 2. R. Wirjopranoto, advocaat di Malang
 3. R.A.A. Koesoemo Oetojo, gep. Regent di Betawi
 4. R. Otto Iskandardinata, part. onderwijzer Bandoeng
 5. Boestam Depati Soeka Diradja, pasiran di Palembang
 6. Abdoel Rasid, part. arts, di Tapanuli
 7. Jahja gelar Datoek Kajo, pens. Demang Kota Gedang Sumatera.
-
-

@) Dikutip dari surat kabar *Persaan Kita*, Saptoe, 3 Joeli, 1937.

MENJAMBOET VOLSKRAAD BAROE *)

Oleh: Redacteur Kita di Soerabaja

Angkatan-angkatan jang diloear doegaan oemoem

Soesoenan Volksraad jang pada tanggal 6 Mei 1939 telah lengkap adalah seperti berikoet:

Bangsa Indonesia: 1. Abdoel Rasjid, 2. R.Ng. Djojo Achmad Hoedojo, 3. Mr. M. Harmani, 4. R. Otto Iskandardinata, 5. drs. Herman Kartowisastro, 6. B.W. Lapien (Baroe), 7. Moehtar bin Praboe Mangkoenegoro (Baroe), 8. N.F.G. Mogot, 9. R. Prawoto Soemidilogo, 10. L.L. Rehatta, 11. Abdoel Firman gelar Maharadja Soangkopon, 12. R.A.A. Mochammad Moesa Soeriakarta Legowo (baroe), 13. R.P. Soeroso, 14. M. Soetardjo, 15. Mr. Tadjoeidin Noer (baroe), 16. M.H. Thamrin, 17. R.A.A. Iskandar Tirtokoesoemo (baroe), 18. R. Soekardjo Wirjopranoto, 19. Mr. Moh. Yamin.

*) Dikutip dari madjalah *Nidaoesj-Sjabab*, No. 4, Mei 1939, tahun I, hal. 60.



R. Pandji Soeroso : Saya lebih merasa berat berjuang sewaktu menjadi Gubernur Jawa Tengah daripada Komisariat Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Dialog (Majalah Populer), No. 15, 20 Desember 1978
4 Januari 1979, hal. 32

Perjuangan Menegakkan Kemerdekaan

**PEMERINTAH DARURAT R.I.
ANTARA ADA DAN
DITIADAKAN.**

Oleh : Mohamadnoer.

Tanggal 22 Desember 1978 yang akan datang ini, genap 30 tahun "Pemerintah Darurat Republik Indonesia" (PDRI) lenyap dari pandangan kita, sejak diproklamirkan pada tanggal 22 Desember 1948, tiga hari sesudah Belanda melancarkan agresinya yang ke II. Memang cukup lama, Tiada lagi orang mengingatnya, bahkan mengungkap-ungkapnya orang telah mulai enggan. Malah mungkin bukan tidak ada pula suara-suara yang ingin menutup-nutupinya, seakan-akan Pemerintah Darurat RI itu "tidak ada" atau "tidak perlu diadakan".



Pandji Soeroso

Tinggal 3.483 Orang Perintis Kemerdekaan

Jakarta, Kompas.

Tahun 1980-an, Perintis Kemerdekaan Indonesia akan tinggal beberapa saja, mengingat jumlah mereka sampai Desember 1976 hanya 3.483 orang ditambah 2.658 janda. Padahal usia mereka umumnya cukup lanjut.

Hal ini dikemukakan pimpinan Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan Indonesia, R. Panji Soeroso (85 tahun) kepada pers di Cendana kemarin. Ia bersama wakilnya, Soediro (66 tahun) dan Maskun Sumadireja melaporkan kepada Presiden Soeharto soal-soal sekitar Perintis Kemerdekaan RI, termasuk kabar-kabar mengenai terjadinya pemalsuan keanggotaan di beberapa daerah.

Dikatakan, dari jumlah yang ada sekarang, sepertiga telah mencapai usia 70 tahun ke atas, sedang dua-pertiga lainnya antara 65-70 tahun. "Yang di bawah 60 tahun tidak ada," kata Soediro.

Soeroso yang meskipun jalannya perlu di "papah", tapi tampak masih lancar dalam memberi keterangan. Ia mengemukakan sejak tahun 1959, tercatat 26.000 permohonan untuk disahkan sebagai Perintis Kemerdekaan. Tapi selama 18 tahun ini, yang diterima karena memenuhi syarat hanya 9.791 orang, sedang 16.209 ditolak.

Dari jumlah yang diterima itu, kini lebih dari 5.000 telah meninggal, sehingga tinggal 3.483 orang "yang riil masih hidup dan menerima tunjangan resmi".

Ia menambahkan, kini masih terdapat 300 permohonan yang sedang diproses. "Tapi saringan kini tambah ketat, sehingga kalau ada yang sampai ditolak, apa boleh buat dan hendaknya jangan sampai sakit hati", katanya.

Perintis Kemerdekaan RI adalah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan sebelum 17 Agustus 1945. Mulai 1 April nanti, setiap Perintis Kemerdekaan akan memperoleh tunjangan Rp. 50.000/bulan, sedang jandanya Rp. 25.000,—. Kini mereka masing-masing sebulannya hanya menerima Rp. 25.000 dan Rp. 12.500,—

SUMBER DARI JABAR.

Menurut R.P. Soeroso, pimpinan Perintis Kemerdekaan kini masih meneliti kabar adanya sekitar 300 anggota palsu seperti pernah diumumkan Menteri Sosial HMS Mintaredja beberapa waktu berselang. Ia mengakui di Sumatera Barat dan Jawa Barat memang tampak ada hal-hal yang kurang beres dalam keanggotaan tersebut.

Badan Pertimbangan telah mengirim Soediro dan Murwoto ke Sumbar, sedang untuk Jabar diteliti oleh Maskun Sumadirdja dan Rohadi.

"Apa hasil penelitian itu, nanti akan kami umumkan kepada para. Sehingga para Perintis yang benar-benar bonafid akan tentram hatinya. Sebab sejak tersiar kabar adanya pemalsuan itu, banyak di antara Perintis yang khawatir dicurigai pandangan masyarakat", demikian Soeroso.

Ia menjelaskan, dalam persoalan ini sebenarnya Badan Pertimbangan tidak dapat berbuat banyak. Sebab tugasnya adalah menampung dan meneliti permohonan. Kemudian mengesahkan keanggotaan yang bersangkutan jika benar-benar memenuhi syarat. "Tapi tentunya dengan kepercayaan semuanya dilakukan dengan jujur", katanya.

Soeroso yang pernah memimpin Parindra (Partai Indonesia Raya) pada jaman penjajahan Belanda dulu itu menambahkan, ketidak-jujuran memang dapat terjadi. Dalam hal ini ia menunjuk umumnya adalah para calo yang melakukannya. Dan kalau terjadi di daerah-daerah, pemalsuan memang lebih mudah dilakukan (rb).

Senin, 18 Mei 1981 Merdeka Halman VIII

R.P. Suroso Meninggal Dunia Karena Penyakit Tua.



R.P. Soeroso

Jakarta, Minggu

Raden Pandji Suroso, 88 tahun, Bapak Koperasi Pegawai Negeri, Sabtu pukul 10.00 meninggal dunia di Jakarta karena penyakit tua.

Almarhum dilahirkan 3 Nopember 1893 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Jabatannya yang terakhir ialah Ketua Umum IKPN (Induk Koperasi Pegawai Negeri). Jabatan yang dipegangnya selama 30 tahun lebih itu diserahkan kepada Sumitro Djojohadikusumo dalam rapat anggota IKPN tanggal 15 dan 16 Desember 1980 di Jakarta.

Presiden Soeharto mengangkat almarhum sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri pada ulang tahun IKPN ke-25 Nopember 1979.

Sejak 1913 almarhum bekerja sebagai pegawai kantor pengairan Probolinggo kemudian juga pernah menjadi pemimpin majalah Perserikatan Sekerja dari pegawai irigasi (pengairan).

Pada 1912 - 1914 ia merangkap Pemimpin Redaksi Surat kabar Kemajuan Hindia di Surabaya dan dari tahun 1912 hingga 1942 dia menjabat ketua vakcentral persatuan pegawai negeri dan vakcentral sarekat sekerja partikelir.

Tahun 1924 - 1942 ia menjabat anggota dewan rakyat pemerintah Hindia Belanda dan menjadi Badan Pekerja dari Dewan ini dan pada tahun 1945 - 1949 ia menjabat anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai wakil dari Parindra (Partai Indonesia Raya).

Pada 1949 oleh pemerintah darurat dibentuklah komisiariat DPRI di Jawa dan almarhum diangkat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri.

Tahun 1950-1951 ia menjabat sebagai Menteri Perburuhan pada Kabinet Natsir dan selama 1951 - 1952 ia menjabat sebagai Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Sukiman Suwirjo.

Tahun 1952-1953 ia jadi Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Wilopo 1953-1955 ia menjabat sebagai Menteri Sosial pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan 1955-1956 sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada Kabinet Burhanuddin Harahap.

Sampai sekarang almarhum masih menjabat selaku Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan serta Ketua Yaya-

san Fatmawati yang mendirikan rumah sakit Fatmawati di Cilandak Jakarta.

Almarhum telah menerima beberapa penghargaan dari pemerintah Indonesia antara lain Bintang Mahaputra Adhi Pradana dan Bintang Gerilya. (Ant) Co.

SENIN WAGE 18 MEI 1981 (14 REJEB 1913).

Suara Hatinurani Rakyat.

Rd. Panji Suroso Meninggal Dunia.

Jakarta, Sabtu.

RADEN Panji Suroso (88 tahun) Bapak Koperasi Pegawai Negeri, Sabtu pukul 10.00 meninggal dunia di Jakarta karena penyakit tua.

Almarhum dilahirkan 3 Nopember 1893 di Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Jabatan terakhir Ketua Umum IKPN (Induk Koperasi Pegawai Negeri). Jabatan yang dipegangnya selama 30 tahun lebih itu diserahkan kepada Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam rapat anggota IKPN tanggal 15 dan 16 Desember 1980 di Jakarta.

Presiden Soeharto mengangkat almarhum sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri pada ulang tahun IKPN ke 25 Nopember 1979.

Sejak 1913 almarhum bekerja sebagai pegawai kantor pengairan Probolinggo kemudian juga pernah menjadi pemimpin majalah Perserikatan Sekerja dari pegawai irigasi (pengairan).

Pada 1912-1914 ia merangkap Pemimpin Redaksi surat kabar Kemadjoean Hindia di Surabaya dan dari tahun 1912 hingga 1912 menjabat ketua vakcentral persatuan pegawai negeri dan Vaksentral serekat sekerja partikelir.

Tahun 1924-1942 ia menjabat anggota dewan rakyat pemerintah Hindia Belanda dan menjadi Badan Pekerja dari Dewan ini dan pada tahun 1945 - 1949 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai wakil dari Parindra (Partai Indonesia Raya).

Pada 1949 oleh pemerintah darurat dibentuklah komisi-riat DPRI di Jawa dan almarhum diangkat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri.

Tahun 1950-1951 ia menjabat Menteri Perburuhan pada Kabinet Natsir dan selama 1951-1952 menjabat Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Sukiman Suwirjo.

Tahun 1952-1953 Ia jadi menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Wilopo, 1953-1955 Menteri Sosial pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I dan 1955 - 1956 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada Kabinet Burhanuddin Harahap.

Sampai sekarang almarhum masih menjabat Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan serta Ketua Yayasan Fatmawati yang mendirikan rumahsakit Fatmawati di Cilandak Jakarta.

Almarhum telah menerima beberapa penghargaan dari pemerintah Indonesia antara lain Bintang Mahaputra Adhi Pradana dan Bintang Gerilya.

Jenazah almarhum dimakamkan di Mojokerto (Jawa Timur) hari Minggu kemarin. (Ant.).

WAKIL ANGKATAN TUA

Tokoh pejuang tua, Raden Panji Soeroso, pagi Sabtu kemarin meninggal dunia di Jakarta dalam usia 80 tahun. Ia dapat dikatakan tokoh terakhir dari Angkatan 1908 dan wakil terakhir dari angkatan tua para pejuang nasional yang masih sempat hidup hingga bagian terakhir abad ke-20 ini.

R.P. Soeroso adalah tipe pejuang nasional yang tekun, gigih dan hidup dalam ukuran kehidupan Rakyat. Sebagaimana para pejuang angkatan tua. Ia berjuang tanpa pamrih tetapi aktif mengambil bagian dan mengikuti seluruh derap perjuangan bangsa dari zaman ke zaman. Dan ia termasuk bahagia karena dapat menyaksikan buah-buah perjuangan Rakyat itu dengan segala kepahitan dan kemanisannya. Hasil puncaknya ialah terbentuknya Republik Indonesia dan tercapainya kemerdekaan Rakyat dari belenggu penjajahan.

Hingga akhir hayatnya R.P. Soeroso masih berjuang dan berada di tengah-tengah perjuangan masyarakat. Ia menjabat Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) dan ketua sebuah Rukun Tetangga (RT) di wilayah Menteng, Jakarta. Ia juga duduk dalam kepengurusan beberapa organisasi sosial.

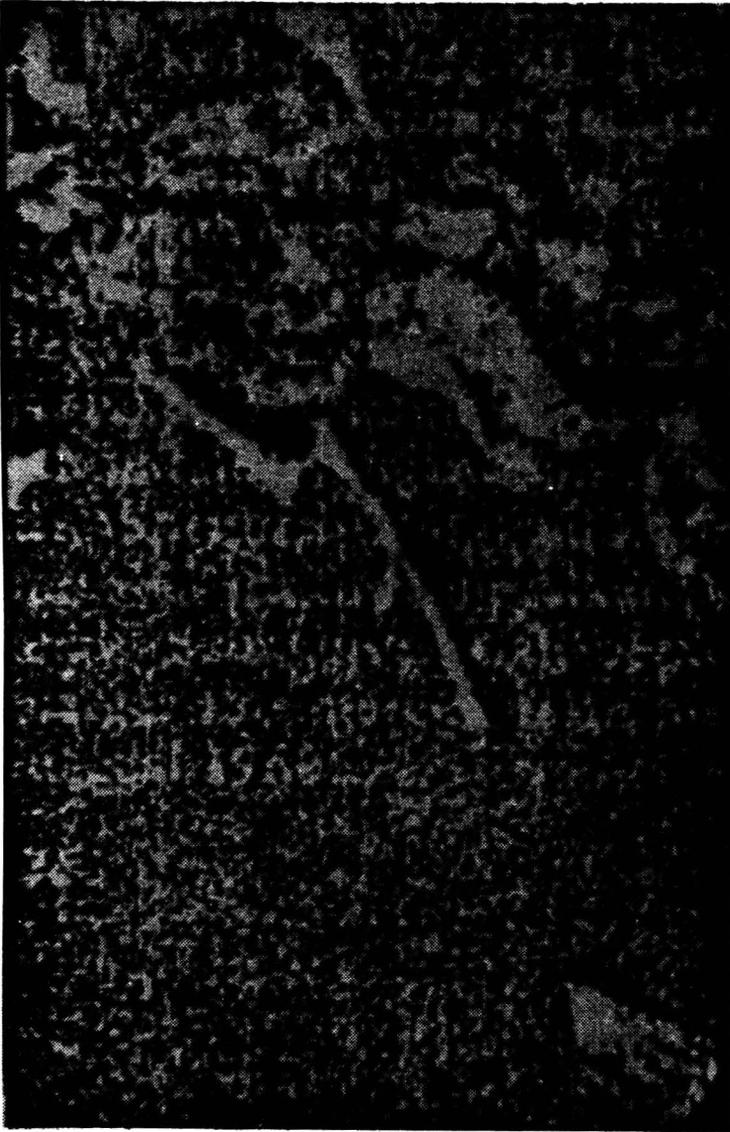
Jarang memang Indonesia memiliki tokoh yang ulet seperti R.P. Soeroso, Ia pejuang, organisator, wartawan, pengabdian masyarakat, tokoh kebangsaan seorang aktivis hingga akhir hayatnya. Ia tetap memiliki antusiasme seorang yang selalu berjuang untuk kepentingan umum dan kebaikan umum. Ia seorang yang konsekwen.

Meskipun R.P. Soeroso bukan seorang yang militan ia adalah anggota penting dari angkatan pendobrak, seorang loyalis perjuangan kemerdekaan dalam kata, sikap dan perbuatan. Ia seorang patriot yang teguh dan tanpa cacat. Citra ini Inherentent padanya, sama seperti pada tokoh-tokoh pelopor perjuangan nasional lainnya.

Bila orang sering berbicara tentang "kesalahan" angkatan tua. Umur R.P. Soeroso adalah contoh murni tentang tidak tepatnya ditanggulangi. Malah sebaliknya, angkatan tua adalah lambang dari Integritas politik dan Integritas moral yang utuh, aktivitas paripurna, kesederhanaan, kerendahan dalam mengabdikan dan kerendahan dalam mengabdikan integritas jiwa yang lapang menghadapi pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Pribadi yang ikhlas berkorban dan sedia menderita untuk meluaskan apa yang agung. Inilah citra semasadan angkatan pendahulu kita.

Pada saat ini bangsa ini sedang menyadari kembali diri dalam pertumbuhannya yang kompleks itu penuh tantangan. Berpulanginya tokoh seperti R.P. Soeroso dalam alam demikian dapat mendorong kembali orang memalingkan diri untuk berpaling sejenak bahwa dalam riwayat hidup pun tokoh terakhir dari angkatan tua ini ada butir-butir nilai yang dapat dijadikan suri teladan dan cerminan bagi generasi kini dan akan datang, tentunya seorang yang berjuang bagi bangsa dan masyarakatnya.

Mudah-mudahan amal bakti pejuang tua ini mendapat ridho Allah SWT dan semoga ia mendapat tempat disisi-Nya.



Almarhum R.P. Soeroso

POKOK & TOKOH

DESEMBER 1948, Surakarta diserang Belanda. Tokoh-tokoh yang kebetulan ada di sana, antara lain Kasimo, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dan R. Pandji Soeroso, pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri, mengungsi ke lereng Gunung Lawu. Dari situ mereka menyeberangi jalan Surakarta Pacitan, menuju Ngawen.

Dalam kegelapan, tiba-tiba Soeroso (ketika sakit-sakitan) terjerumus ke dalam selokan yang cukup dalam. Tapi ia segera bangkit lagi. Tibalah ia di sebuah kampung yang sudah dikenalnya. "Kok kembali lagi?" cetusnya terheran-heran. Ternyata, dalam gelap, ia berjalan, kembali ke tempat semula.

"Saya tidak tahu apakah saya harus ketawa waktu mendengar cerita itu," tulis T.B. Simatupang dalam buku *Laporan dari Banaran* yang memuat kisah tersebut. Yang pasti, "jago tua" yang diceritakannya itu telah meninggal dunia akhir pekan lalu. Di rumah kediamannya di Jalan Kerawang, Menteng, Jakarta, dalam usia 86 tahun.

Tokoh koperasi yang 1960 mendirikan Ikatan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) dan jadi ketua umumnya sampai tahun lalu - digantikan Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo - itu meninggalkan 8 anak. Semuanya telah berkeluarga. Ibu mereka telah meninggal 1968.

November 1979, Soeroso memperoleh bintang penghargaan dari Presiden Suharto dan diangkat sebagai "Bapak Koperasi Pegawai Negeri". Kecuali itu ia banyak pula memperoleh bintang tanda jasa.

Mendiang adalah Gubernur Jawa Tengah yang pertama. Juga beberapa kali menjadi menteri selama 1950-1956 - antara lain menteri perburuhan, menteri sosial dan menteri PUTI. Jenazahnya dimakamkan di Mojokerto, 17 Mei.

MUTIARA 243 27 Mei - 9 Juni 1981

IN MEMORIAM RADEN PANJI SUROSO

SELAMAT JALAN
BAPAK KOPERASI PEGAWAI NEGERI



SAYA tertegun dan menundukkan kepala ketika membaca sebuah judul kecil di *Sinar Harapan* terbitan Sabtu, 16 Mei 1981: "Raden Panji Suroso Meninggal Dunia". *Inna lillahi wainna ilaihi rojiun*. Salah seorang putra Indonesia terbaik telah kembali ke hadapannya, menyusul ribuan para pendahulunya.

Sungguhpun saya sempat termenung, tapi berita meninggalnya Raden Panji Suroso – seorang Perintis Kemerde-

kaan dan Tokoh Pendiri Koperasi Indonesia – pada pagi tanggal 16 Mei 1981, taklah begitu mengejutkan saya. Dalam usianya yang menjelang 88 tahun, almarhum memang sudah sangat uzur. Penyakit yang sudah beberapa tahun diidapnya memang sangat menyiksa hidupnya. Jalannya saja sudah dipapah kiri-kanan. Pendengaran dan penglihatannya sudah sangat berk urang. Dan sebagaimana kebanyakan orang tua lainnya, ia pun sangat pelupa. Namun kesederhanaan, semangat kerja dan dedikasinya yang demikian besar terhadap kesejahteraan sosial pegawai negeri Indonesia yang dituangkan lewat kerja kerasnya di dunia koperasi, sangat mengesankan.

”Saya mengurus koperasi ini untuk kesejahteraan Sosial pegawai negeri dan kemanusiaan. Sebenarnya saya sudah minta berhenti. Tapi saya dilarang berhenti, kecuali saya sudah bisa mencari pengganti yang sama seperti saya”, ujar R.P. Suroso kepada saya awal April 1980 lalu. Ketika itu ia memang belum berhasil mencari-cari penggantinya sebagai Ketua Umum IKPN (Induk Koperasi Pegawai Negeri), dan baru pada Desember 1980 kedudukan itu dilimpahkan kepada Prof. Sumitro Djojohadikusumo, bekas Menteri Keuangan dan Menteri Riset. Almarhum R.P. Suroso sendiri menduduki jabatan itu sejak Maret 1950 (ketika itu masih disebut Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia, dan pada tahun 1960 diubah namanya menjadi IKPN).

Awal perkenalan saya dengan tokoh yang pada tanggal 26 Nopember 1979 secara resmi diangkat oleh Presiden Suharto sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri ini memang cukup unik. Tanpa bekal sedikit pun tentang alamat orang tua ini, saya bertekad mewawancarainya sebagai proful dalam rangka Hari Koperasi tahun lalu untuk *Mutiara*. (Namun wawancara itu terus terulur-ulur lebih dari sebulan, dan tidak aktual lagi kalau dikaitkan dengan hari Koperasi.

Setelah beberapa hari kesasar, tepat azan magrib mengema dari Masjid Sunda Kelapa' saya tiba di rumahnya. Namun

beliau sedang sakiit dan tak dapat diganggu. Beberapa hari kemudian ketika saya kembali lagi ia sudah agak sembuh dan sudah berangkat ke kantor. Siangnya saya kembali, namun beliau sudah terlanjur tidur. Lewat suster yang menjaganya saya dapat surat untuk berjumpa pada sore harinya. Namun kembali tak bisa ditempat karena sakitnya kambuh lagi. Oleh putrinya yang berusia tak kurang dari 60 tahun waktu itu semula saya sangka isterinya). Saya diminta datang saja lain waktu. Dan begitulah kendati sudah berkali kali datang saya belum sempat bertemu muka. Usaha untuk menemui di kantornya juga mengalami beberapa kali kegagalan. Deadline sudah lewat seminggu. Namun saya pantang menyerah dan suatu hari saya sempat bicara langsung dengannya lewat telepon. Suaranya berat dan perlahan. Tapi janji yang diucapkan langsung memang tak meleset. Esoknya saya menemuinya di rumahnya. Jalan krawang no. 2.

Selesai dipapah oleh suster dan cucunya. R.P. Suroso minta ditinggalkan berdua saja dengan saya. Minum dulu tehnya” ujanya menyilakan dengan bibir yang gemetar.

”Ke sini mendekat, anak muda.” ujanya sambil memasang kecamatannya. Saya duduk dekat dekat di sampingnya, dan ia memperhatikan wajah saya seperti orang menyelidik.

”Siapa namamu?” Saya menyebut nama saya, namun ia tak dapat menangkap dengan jelas. Saya terpaksa bicara dekat telinganya. Ia mengangguk-angguk tanda menangkap kata-kata saya. Lalu ia bertanya lagi: ”Mau tanya apa?”

”Saya mau tahu riwayat hidup Bapak. Bapak sebagai tokoh Koperasi, sebagai bekas Menteri, sebagai pejuang dan sebagainya”.

Hehehehe hehehehe” beliau terkekeh-kekeh mendengar pertanyaan saya. ”Itu panjang sekali, anak muda. Tak mungkin selesai.” Dan akhirnya saya memang beberapa kali bolak-balik untuk mewawancarainya. Maklum ia sudah banyak lupa dan cepat lelah.

Mogok Dan Dipecat

Ternyata daripada bicara tentang koperasi. R.P. Suroso lebih senang bicara tentang masa mudanya. Sebagai anak kelahiran Sidoarjo 3 November 1983. R.P. Suroso terhitung berpikiran maju dan pemberani. Dalam usia 15 tahun ia masuk perkumpulan Budi Utomo. "Waktu itu (tahun 1908 – FP) Budi Utomo di buka merupakan perkumpulan politik. melainkan perkumpulan kesenian dan sosial," ujarnya. "Ketika itu pemuda berkumpul untuk belajar tari-tarian, main wayang orang, melukis dan sebagainya. Juga olah raga seperti sepak bola, berenang dan olah raga lainnya. Tapi ini khusus untuk bumiputra saja, yakni orang Indonesia. Dan saya satu-satunya yang dari Kweeksechool".

Di Kweekschool Sidoarjo (sekolah Belanda, semacam sekolah dasar 6 tahun) R.P. Suroso sebenarnya termasuk yang disenangi guru-gurnya. Namun suatu hari, sebulan lagi akan ujian penghabisan, ia diusir oleh Kepala Sekolahnya. Kejadiannya begini. Kepala Sekolah itu terkenal sangat anti-pribumi. Ia memperlakukan murid Kweekschool yang pribumi dengan tidak adil dan sangat menghina. "Misalnya ketika makan, taplak untuk orang bumiputra dicopoti dan dibuang. Alasannya, orang Indonesia tidak perlu pakai taplak", ungkap R.P. Suroso menjelaskan. Juga dalam pelajaran diberi perhatian yang berbeda. Akhirnya Suroso muda tak tahan lagi. Ia memimpin pemogokan dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Akhirnya sang Kepala Sekolah mengalah. Murid-murid dipanggil kembali dan dikumpulkan. Mereka semua diberi hukuman, tapi Suroso yang dianggap biang keladi pemogokan itu tanpa ampun dipecat secara tidak hormat.

Pemecatan ini bukan menyurutkan semangatnya, melainkan membangkitkan semangat perlawanannya. Ia berangkat ke Surabaya untuk belajar jurnalistik. Kendali kemudian Suroso mendapat panggilan untuk kembali ke sekolahnya

dan kesalahannya dimaafkan, namun ia sudah tak lagi menghiraukan. Semangat menentang Belanda semakin berkobar-kobar. Melalui pengetahuan jurnalistiknya ia mulai menulis menyerang pemerintah kolonial, walaupun secara halus.

Dalam keadaan terdesak, manusia cenderung untuk berkompromi. Maka pada tahun 1913 ketika ia diminta oleh Ir. Feber, seorang insinyur sipil jurusan pengairan (sipil basah) yang mengurus irigasi, untuk menjadi Mantri Boekhouder (Pemegang Buku) ia menjadi ragu. Hati kecilnya menentang, namun ia butuh hidup dan pada waktu itu Belanda sedang berkuasa. Akhirnya dengan hati berat ia menerima jabatan itu.

Perang batin terus berkecamuk. Dan akhirnya ia tak tahan dan keluar. Segera ia masuk Sarekat Islam (SI). Dan pada tahun 1915 ia diangkat menjadi Presiden SI untuk Probolinggo dan Kraksan, Jawa Timur

”Pada waktu itu saya lebih kurang berusia dua puluh satu tahun”, ungkapnya kepada saya dalam salah satu pertemuan April 1980. ”Sekalipun saya semuda itu toh dapat juga saya memimpin rakyat di daerah itu yang penduduknya kebanyakan suku Mandura. Hal itu karena saya mendapat kepercayaan dari mereka”.

”Saya bersama anggota pengurus SI menitik beratkan kegiatan pada Gerakan Nasional dan perbaikan ekonomi rakyat. Pengurus SI di Probolinggo mendirikan dua buah toko untuk kebutuhan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Tiap hari penuh pembeli. Tetapi tak lama sejak itu toko-toko Cina menurunkan harga barang barangnya menjadi lebih murah dari toko SI. Mereka berjubel ke toko Cina, dan akhirnya toko SI tak mampu bersaing dan gulung tikar. Lalu setelah itu toko-toko Cina menaikkan harga lagi. Mereka mempunyai dana yang kuat. Maka tak heran kalau hingga kini mereka bisa menguasai perdagangan kita”.

Kendati dengan wajah yang menampakkan kelelahan. R.P. Suroso waktu itu Seakan ia sedang mengalami kembali

masa yang diceritakannya. Kemampuan almarhum semasa hidupnya memang tak perlu diragukan. Berpuluh-puluh tahun ia bertahun mengabdikan dirinya memimpin IKPN.

Begitu Republik Indonesia diproklamasikan, R.P. Suroso langsung diangkat oleh Bung Karno sebagai Gubernur Jawa Tengah yang pertama merangkap Residen Kedu. Jabatan ini pada masa pergolakan bukanlah jabatan yang enak. Peluru berdesing dan darah masih menyembur setiap hari. Peristiwa Gunung Tidar tak pernah ia lupakan. Jepang masih bersenjata. Belanda sudah menyusup dan rakyat tanpa senjata melawan dengan kemarahan yang berkobar-kobar.

Sebelum kemerdekaan ia aktif di PPKI, dan setelah kemerdekaan ia juga duduk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tahun 1948 menjadi Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah Departemen Dalam Negeri. Ia kemudian aktif sebagai penasihat Sutan Sjahrir. Lalu sejak berdiri pada tahun 1954 sampai akhir hayat. R.P. Suroso mengetuai Yayasan Fatmawati (dahulu Yayasan Ibu Sukarno).

Lebih dari enam kali menjabat menteri, Pertama, Menteri Perburuahan dalam Kabinet Mohammad Natsir, 1950. Selanjutnya ditahun 1951 sebagai Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman. Di tahun 1952 dalam jabatan yang sama, cuma dari Kabinet Wilopo. Dan tahun berikutnya oleh Wilopo ia diberi kedudukan Menteri Sosial. Dan jabatan ini bertahan, kendati kabinet pada tahun berikutnya dipimpin oleh Ali Sastromidjojo. Tahun 1956 dia diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim pada Kabinet Burhanuddin Harahap.

”Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuahan dari Menteri Perburuahan Wilopo, pemogokan buruh Perkebunan Belanda yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu belum dapat diselesaikan. Dalam tempo hanya 7 hari saya dapat menyelesaikan masalah itu secara baik (mendapat kenaikan upah dan tambahan jatah pangan), dan para buruh terus bekerja

lagi”, ungkap R.P. Suroso mengenai pengalamannya pertama kali menjadi menteri.

Sekarang R.P. Suroso telah dipanggil menghadap Dia yang Maha Kuasa. Putra Indonesia penyandang 6 bintang, yakni Bintang Mahaputra, Adhi Pradana Kelas II, Bintang Gerilya. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan R.I., Satya Lencana Karya Satya Kelas I, Satya Lencana Perang Kemerdekaan dan Satya Lencana Pembangunan, telah meninggalkan kita semua.

Namun cita-citanya menyejahterakan masyarakat kita lewat koperasi tetap hidup abadi.

Pasal 33 ayat 1, UUD '45 berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Inilah yang mendasari berdirinya koperasi di Indonesia. "Namun pasal ini baru berlaku untuk orang-orang desa....." ungkap almarhum R.P. Suroso dalam suatu percakapannya di kantor IKPN, Jl. Gondangdia Lama.

Sekarang sudah lebih baik lagi perkembangan koperasi. Di desa sudah ada KUD dan BUD, apalagi listrik dan koran sudah masuk desa, tutur almarhum. Juga koperasi sudah masuk sampai Irian Jaya dan Timor Timur. "Orang desa tidak mudah dipimpin, jadi harus telaten. Dan kesejahteraan mereka harus dipikirkan. Juga pendidikan sekolah perlu sehingga mereka mengerti apa kegunaan koperasi, alasnya.

"Kemakmuran rakyat hanya bisa dicapai lewat koperasi, karena lewat koperasi baru demokrasi ekonomi bisa ditegakkan," tandasnya lagi. Almarhum memang begitu saya yakin dengan ucapannya, terbukti ia tetap setia berbakti di IKPN. Pada tahun 1957 ia pensiun sebagai pegawai negeri. Dan sejak itu almarhum memang mengandalkan uang pensiunnya sebagai sumber nafkah, karena honornya di IKPN tidak cukup.

Kalau pada awal tulisan saya katakan saya tertegun, ini bukan semata-mata karena ia seorang tokoh yang hebat. Na-

mun ada yang lebih mendasar dari itu. Sebagai manusia ia menghargai kegigihan saya untuk mewawancarainya, karena ia pun pernah bekerja sebagai wartawan. Bahkan memimpin Harian *Kemajuan Hindia* di Surabaya pada tahun 1922 sampai 1925. (Harian ini gulung tikar karena selalu defisit).

Dalam hari-harinya yang diselubungi penyakit ketuaannya, ia bersedia bercerita panjang lebar tentang riwayat hidupnya. Namun sampai akhir hayatnya, saya tak sempat mempublikasikan tulisan tersebut. Saya telah menyia-nyiakan kepercayaan seorang tua yang begitu jujur dan sederhana. Saya tak pernah lagi sempat meminta maaf kepadanya.

Selama jalan Pak Panji Suroso, Selamat jalan Mahaputra Indonesia.

Farchad Poeradisastra

25 TAHUN



**INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI
(IKPN)
SELURUH INDONESIA**

**IKPN JAKARTA
1979**

KATA PENGANTAR

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden R.I. dan Wakil Presiden R.I. kepada para Pembesar dan para Saudara-Saudara yang mempunyai minat untuk memperkembangkan koperasi atas dasar U.U.D. 1945 pasal 33 ayat 1 untuk menuju suatu kemakmuran yang merata bagi Negara Indonesia sebuah buku kecil yang memberi sedikit gambaran tentang Koperasi Pegawai Negeri selama seperempat abad, yang selanjutnya akan disusul dengan sebuah buku yang berisi lebih luas tentang gerak dan usaha-usaha Induk Koperasi Pegawai Negeri bagi kesejahteraan para anggotanya.

Ketua Umum
Induk Koperasi Pegawai Negeri

(R.P. Suroso)



Bapak R. Panji Soeroso sesaat setelah menerima Bintang Mahaputra Adhi Pradana Kelas II dari bapak Presiden R.I. Suharto tanggal 14 Agustus 1974 dan Bintang penghargaan lainnya : 1. Bintang Gerilya, 2. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Indonesia, 3. Satya Lencana Karya Satya Karya Kelas I, 4. Satya Lencana Perang Kemerdekaan dan 5. Satya Lencana Pembangunan.

Selintas Perjalanan Hidup
BAPAK RADEN PANDJI SUROSO
DALAM PENGABDIANNYA KEPADA GERAKAN
K O P E R A S I

Bapak Pandji Suroso dilahirkan pada tanggal 3 Nopember 1893 di Sidoardjo Surabaya.

Sudah dari usia yang masih muda beliau telah memasuki dunia politik dan pergerakan kemerdekaan nasional.

Dalam tahun 1908 menjadi anggota Budi Utomo sebagai murid Kweekschool. Waktu itu Budi Utomo belum mempunyai tujuan politik.

Dalam tahun 1912 menjadi anggota Serikat Islam. Dalam tahun 1915 menjadi Presiden Serikat Islam di Probolinggo dan Kraksaan.

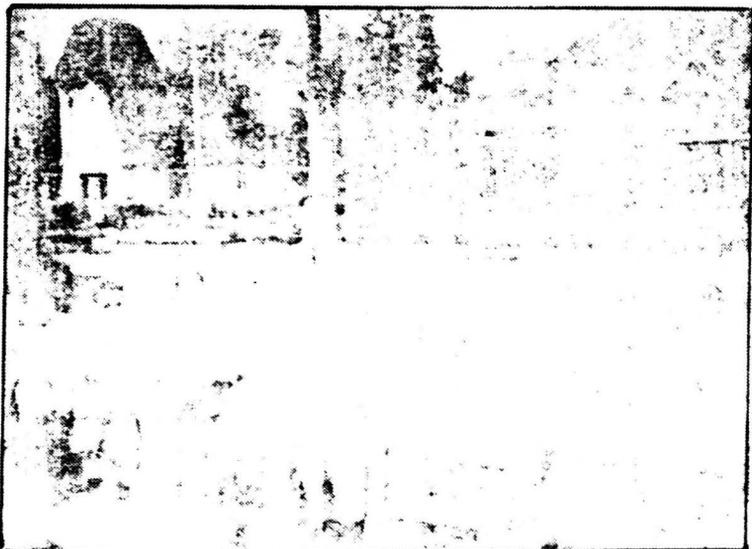
Sebagai Anggota Pengurus Serikat Islam usaha dititik beratkan pada Gerakan Nasional dan perbaikan ekonomi Rakyat.

Pengurus SI dalam kota Probolinggo mendirikan dua buah toko untuk kebutuhan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Tiap hari penuh pembeli. Tapi tidak lama sejak itu toko-toko Cina menurunkan harga barang-barangnya lebih murah dari harga barang-barang toko S.I. dan karenanya pembeli berjubel di toko Cina. Akhirnya toko S.I. tidak dapat bertahan dan terpaksa ditutup. Lalu toko-toko Cina kembali menaikkan harga barang-barangnya.

Pada tahun 1950 beliau menjadi anggota D.P.R. Kemudian non aktif sebagai anggota karena diangkat menjadi Menteri, mulai bulan September 1950 sampai bulan Maret 1956 beliau menjabat:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Moh. Natsir
2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr Sukiman

3. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo.
 4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo.
 5. Menteri Sosial dari Kabinet Ali Sastroamidjojo.
 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harahap.
- 6a. Merangkap Menteri Dalam Negeri a.i. untuk selama 1 tahun.



Bapak R. Pandji Suroso sedang memberikan wejangan pada pertemuan antara Pengurus PKPN-PKPN seluruh Indonesia di Bandung pada tahun 1958.

Terutama dalam periode selama menjabat Menteri, perhatian beliau ditujukan pada perbaikan kehidupan golongan si kecil, terutama tenaga buruh. Disebabkan kegiatan dalam lingkungan buruh kecil beliau mendapatkan perhatian tentang peranan gerakan koperasi sebagai badan penolong golongan yang lemah yang sangat terpuak sekali karena keadaan ekonomis dimasa itu.

Atas prakarsa beliau koperasi dianjurkan untuk dibentuk diantara Pegawai Negeri, Beliauupun mendesak agar Pemerintah Pusat membantu kehidupan Pegawai Negeri dengan memberikan barang dan uang.

Perjuangan sebagai Menteri Sosial melahirkan berdirinya K.P.N.-K.P.N. di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mempersatukan usaha dan memudahkan bantuan terlebih dahulu dibentuk Badan Koordinasi, dengan Bapak Pandji Suroso menjabat Ketua. Guna meningkatkan usaha maka pada tanggal 19 sampai dengan 22 Nopember 1958 di Bandung diadakan Kongres untuk mendirikan Gabungan P.K.P.N. Seluruh Indonesia dimana Bapak Pandji Suroso diangkat menjadi Ketua.

Pada tahun 1961 Gabungan P.K.P.N. berubah menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia, dimana Bapak Pandji Suroso tetap menjabat sebagai Ketua. Juga demikian setelah Gabungan Koperasi ini berubah menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri.

Dalam bulan Maret 1966 sampai dengan Maret 1973 diangkat menjadi anggota M.P.R.S. sebagai wakil Gerakan Koperasi.

Dalam bulan Mei 1966 menjadi Ketua I Gerakan Koperasi Indonesia.

Dalam bulan Juli 1973 dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, dan tidak menjabat lagi semenjak tahun 1977.

Hingga sekarang beliau masih menjabat Ketua Umum IKPN SI hasil pemilihan Rapat Anggota tahun 1977.

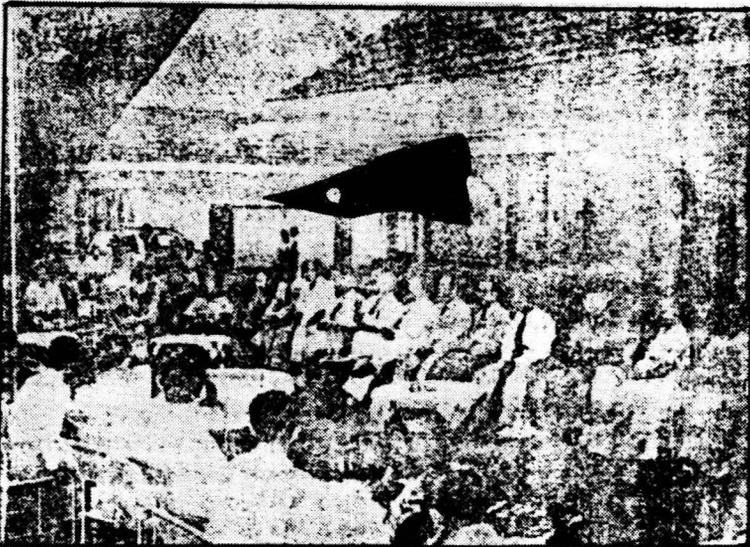
**SEKILAS
25 TAHUN
RIWAYAT INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI**

I. PERSIAPAN PEMBENTUKAN I.K.P.N.

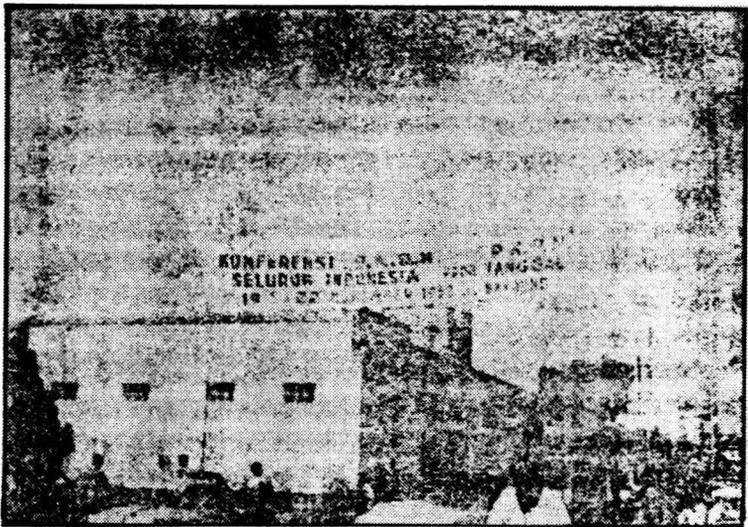
Mulai tahun 1950 sudah dirasakan adanya kenaikan biaya hidup serta gejala-gejala mulai merosotnya pendapatan nyata.

Nilai barang ekspor menurun yang mengakibatkan pendapatan dari ekspor ikut berkurang. Sebaliknya pengeluaran untuk barang impor menjadi semakin tinggi.

Dalam tahun 1952 sampai dengan 1955 negara kita menghadapi kerisis keuangan, yaitu terjadinya inflasi yang hampir saja tak terkendalikan. Nilai rupiah sangat merosot, sedang nilai tukar dollar A.S. meningkat menjadi 4 kali nilai resminya.



Pertemuan ramah tamah antara PKPN-PKPN seluruh Indonesia di rumah Bapak R. Hasan Nata Permana Jalan Ganesa 3 Bandung tahun 1958.



Tempat berlangsungnya Konferensi PKPN-PKPN seluruh Indonesia pada tanggal 19 Nopember s/d 22 Nopember 1958 di Hotel Homan Bandung.

Harga barang-barang sangat meningkat, dari harga index (100) menjadi (379).

Melihat keadaan perekonomian yang tidak stabil itu, maka timbul keinginan dari sebagian golongan pekerja untuk memperbaiki taraf penghidupan mereka. Usaha ini harus sejajar dengan usaha-usaha perbaikan perekonomian umum yang dijalankan oleh Negara.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh ialah dengan mendirikan Koperasi-Koperasi termasuk Koperasi Pegawai Negeri, yang pada waktu itu sudah mulai mendapat perhatian Pemerintah.

Pada pertemuan tahun 1952 pada beberapa Kementerian dan Kantor-kantor Pemerintah mulai didirikan Koperasi Pegawai Negeri.

Pada tanggal 12 Juni 1952 di Jakarta didirikan Pusat Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya.

Untuk pemeratakan pendirian Koperasi Pegawai Negeri diseluruh Indonesia, sebagai wadah yang lebih meringankan beban hidup para Pegawai Negeri, maka Menteri Sosial RI – R.P. Suroso, menyurati para Gubernur diseluruh Indonesia agar berkenan memberikan bantuannya mendirikan Koperasi Pegawai Negeri. Sebagai hasil dari Surat Menteri Sosial tersebut berdirilah Koperasi-Koperasi Pegawai Negeri di Surabaya, Semarang, DI Yogyakarta, Bandung, Makasar dan Medan.

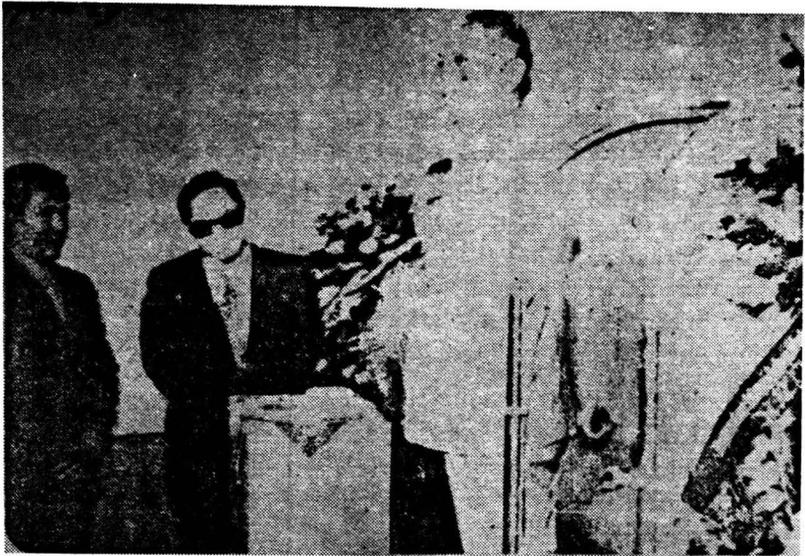
Melihat pertumbuhan Koperasi Pegawai Negeri di beberapa Kota Besar di seluruh Indonesia, maka pada tanggal 22 Nopember 1954 keluarlah Surat Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo No. 34146/54 (Surat edaran No. 18/RI/1954) tentang Pemberian Fasilitas Koperasi Pegawai Negeri, seperti berikut:

**KABINET PERDANA MENTERI
REPUBLIC INDONESIA
JAKARTA**

No.	: 34146/54	Jakarta, 22 Nopember 1954
Hal	: Koperasi Pegawai Negeri.	Kepada Yth. Para Menteri di Jakarta

**SURAT EDARAN
No.: 18/RI/1954**

Berhubung dengan putusan Sidang Dewan Menteri ke-75 yang tercantum dalam surat Kabinet Perdana Menteri tanggal 22 September 1954 Nomor: 26700/54, bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk lebih membantu penyelenggaraan Koperasi Pegawai Negeri dengan usaha-usaha yang tertentu,



Pemberian nama sepeda "TURANGGA" disusul dengan penekanan tombol oleh Bapak Presiden R.I. Suharto tanda pembukaan resmi Pabrik Sepeda "Turangga".



Pengguntingan Pitaoleh Ibu Tien Suharto pada peresmian Pembukaan Pabrik Sepeda "Turangga" tanggal 12 Juli 1974 jam 09.00 WIB.

maka oleh Menteri Sosial pada tanggal 2 bulan ini telah diadakan pertemuan dengan Ketua Koperasi Pegawai Negeri atau persiapannya dari tiap-tiap Propinsi, dimana ikut hadir atas undangan Menteri Sosial dengan persetujuan Menteri Perekonomian, Kepala-kepala U.B.M. Jawatan Koperasi, Jawatan Perekonomian, Umum dan Jawatan Perdagangan dari Jawatan Perdagangan dari Kementerian Perekonomian.

Pada rapat ini diberi penjelasan lebih lanjut tentang maksud Pemerintah menganjurkan pendirian Koperasi Pegawai Negeri tentang cara-cara mendirikan koperasi itu, dengan bantuan Jawatan Koperasi dan betapa caranya untuk lekas mendapatkan Badan Hukum tentang mendapatkan uang pinjaman dari Bank Indonesia, tentang mendapatkan barang-barang yang lebih murah, tentang mendapatkan alat-alat ruangan dan transport barang-barang.

Untuk mendapatkan bahan-bahan murah itu tidak ada jalan lain, kecuali Pemerintah memberikan prioritas kepada Koperasi Pegawai Negeri supaya mendapat bahan-bahan dengan harga pokok, yaitu:

1. Beras, langsung dapat dibeli dari Y.U.B.M.
2. Rokok, langsung dari BAT dan dipandang sama haknya dengan agen.
3. Gula, langsung dari NIVAS dan disamakan haknya dengan anggota PPGI.
4. Tekstil, langsung dari Importir dan disamakan haknya dengan grosir.
5. Minyak tanah, langsung dari B.P.M.
6. Sabun, margarine, dan sebagainya langsung dari UNI-LEVER.

Para Kepala Jawatan Perekonomian Umum, Perdagangan dan Kepala YUBM telah sanggup untuk membantu dan mengatur untuk mendapatkan barang-barang tersebut di atas.

Dengan jalan memberi harga pokok kepada Koperasi Pegawai Negeri ini, diharapkan pula dapat menekan harga pasar,

karena sebagian daya beli dari pasar dipindahkan ke Koperasi, sehingga akhirnya harga bahan-bahan di pasar itu turun dan masyarakat tertolong.

Bagi pengangkutan buah-buahan ke gudang Koperasi sesuatu instansi dapat menggunakan alat-alat pengangkutan Pemerintah yang ada pada instansi itu dengan tidak perlu membayar sewanya.

Tentang ruangan untuk penyimpanan/pembagian bahan-bahan diperbolehkan pula memakai salah satu ruangan pada tiap-tiap Kantor Pemerintah asal saja, tidak mengganggu jalannya pekerjaan sehari-hari.

Selanjutnya dari Kepala-kepala Jawatan setempat diharapkan bantuannya untuk turut mengawasi dan memberi petunjuk bagi kelancaran jalannya Koperasi Pegawai Negeri antara lain memotong gaji pegawai untuk pembelian barang-barang dan Kepala Jawatan Kepala Koperasi Pusat, diminta supaya Kepala Jawatan Koperasi di tiap-tiap Propinsi, diberi instruksi untuk turut membimbing dan mengawasi administrasi Koperasi tersebut di daerahnya masing-masing.

Saya minta para Menteri suka memperhatikan apa yang tersebut di atas dan supaya memerintahkan kepada Kepala-kepala Jawatan Pusat di daerah untuk membantu Koperasi Pegawai Neeri itu dengan sebaik-baiknya.

Apabila masih perlu didapatkan keterangan lebih lanjut tentang Koperasi itu, diharap Saudara suka berhubungan langsung dengan Menteri Sosial.

Perdana Menteri
ttd.

(Mr. ALI SASTROAMIDJOJO)

maka akan dirasakan terlalu berat sekali, jika untuk mengurusnya dikerjakan orang-orang bukan pegawai yang harus dibayar sebagai "Full time Job" tenaga.

Maka dari itu dalam rapatnya ke-102 tanggal 24 Maret 1955 Pemerintah sebagai bantuan kepada Koperasi-koperasi pegawai negeri tersebut telah memutuskan untuk memberikan pembebasan dari pekerjaannya (tidak dari jabatannya) kepada pegawai-pegawai pada tiap-tiap Kementerian/Jawatan untuk bekerja sepenuhnya mengurus keperluan koperasi pegawai negeri.

Pembebasan dari pekerjaannya itu hanya diberikan kepada seorang pegawai saja untuk waktu selama-lamanya satu tahun mulai tanggal 1 April 1955.

Sesuai dengan Surat Edaran kami tanggal 26 Pebruari 1955 nomor 3/RI/1955 (Surat No. 4828/55), tentang pembebasan pegawai negeri untuk membantu Pusat Organisasi Serikat Sekerja maka dalam pembebasan pegawai negeri untuk mengurus keperluan koperasi pegawai negeri ini, hendaknya pula kepentingan Jawatannya, dalam arti kata pegawai yang duduk dalam pekerjaan vital tidak diperkenankan dibebaskan dari pekerjaannya.

Demikian dan hendaknya putusan Dewan Menteri dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PERDANA MENTERI

ttd.

(Mr. ALI SASTROAMIDJOJO)

Dalam pada itu, di beberapa Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia sudah pula terbentuk Pusat Koperasi Pegawai Ne-

geri (PKPN) Propinsi yang beranggotakan KPN—KPN yang berada di Dinas/Jawatan/Instansi.

Untuk menangani kepentingan para PKPN Tingkat Propinsi tersebut maka perlu adanya suatu pemusatan kegiatan di Tingkat Nasional, maka sejalan dengan anjuran Pemerintah dan atas inisiatif dari Bapak R.P. Suroso yang pada waktu itu menjadi Menteri Sosial/Menteri Urusan Pegawai, pada tahun 1955 dibentuklah suatu pemusatan dengan nama "Badan Koordinasi PKPN-PKPN Seluruh Indonesia" yang pengesahan Badan Hukumnya diperoleh dari Menteri Kehakiman dengan Akte Badan Hukum tanggal 26 Mei 1956 No. J.A.5/41/21, berdasarkan "Algemeene Regeling op de Cooperative Vereeniging" yang dikenal dengan nama "Ordonantie 11 Maart 1933" (Staatsblad No.: 108).

II. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 79/1958 sebagai pengganti Undang-Undang Koperasi No. 179/1949, maka kedudukan Koperasi mendapat tempat yang lebih layak, dan sehubungan dengan itu berdasarkan Keputusan Konperensi PKPN Seluruh Indonesia yang diadakan di Bandung pada tanggal 21 Nopember 1958, Badan Koordinasi PKPN Seluruh Indonesia diganti namanya menjadi: "Gabungan PKPN Seluruh Indonesia" dengan mengubah Anggaran Dasarnya yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 79/1958.

Berhubung dengan Undang-undang No. 79/1959 tersebut masih didasarkan pada Undang-undang Dasar Sementara Tahun 1950, maka setelah Dekrit Presiden Tahun 1959 tentang berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945, oleh Pemerintah dipandang perlu untuk mengeluarkan P.P. No. 60/1959 tentang perkembangan Gerakan Koperasi, sehingga Pemerintah berperan lebih aktif untuk menumbuhkan, mendorong, membimbing, mengawasi dan melindungi perkembangan Gerakan Koperasi pada umumnya.

Berdasarkan PP No. 60/1959 tersebut Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri menjadi sebagai berikut:

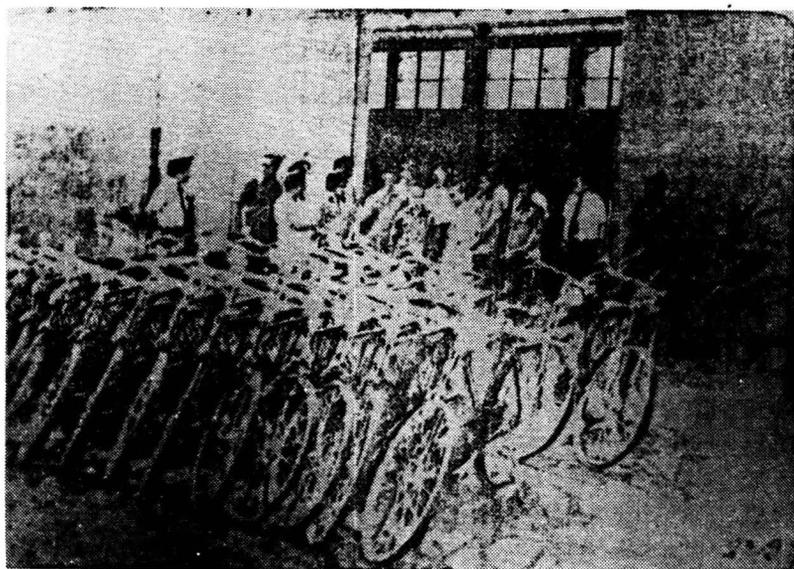
- a) PKPN Tingkat Propinsi, menjadi "GKPN Tingkat Propinsi".
- b) KPN-KPN yang mempunyai Daerah Kerja Kabupaten/Kotamadya, menjadi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Kabupaten/Kotamadya yang beranggotakan KPN-KPN yang berada di Dinas/Jawatan/Instansi/Kantor.
- c) Gabungan PKPN Seluruh Indonesia, menjadi "Induk Koperasi Pegawai Negeri" Seluruh Indonesia yang beranggotakan GKPN/PKPN Tingkat Propinsi di seluruh Indonesia, jelasnya:
 - a. Induk Koperasi Pegawai Negeri di Tingkat Nasional.
 - b. Gabungan Koperasi Pegawai Negeri di Tingkat Propinsi.
 - c. Pusat Koperasi Pegawai Negeri di Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
 - d. Primer Koperasi Pegawai Negeri berada di Dinas/Jawatan/Instansi/Kantor.

Dalam rangka mengisi kegiatan Koperasi, Pemerintah mengulurkan tangan lagi dengan mengeluarkan Ketetapan Koperasi sebagai Penyalur Bahan Pokok keperluan rakyat yang dituangkan dalam PP No. 140/1961, sungguhpun hal ini akhirnya terlalu memanjakan Koperasi, sehingga Koperasi itu tidak mempunyai inisiatif lain untuk mencari sumber income baru.

Masa suram bagi Gerakan Koperasi terjadi sekitar tahun 191–1962 di zaman Orde Lama, dimana Gerakan Koperasi oleh Pemerintah pada waktu itu diarahkan untuk menjadi alat revolusi dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia, disamping merupakan suatu Organisasi Ekonomi. Kita masih ingat pada waktu itu terjadinya "Nasakomisasi" Kepengurusan Koperasi yang berjalan sampai meletusnya G 30 S/PKI, sehingga kejadian ini menjadi sejarah hitam bagi Gerakan Koperasi Indonesia.



Sebagian dari kerangka-kerangka Sepeda Turangga sedang diteliti oleh Bung Hatta.



Hasil Produksi terakhir Pabrik Sepeda "Turangga" siap dipasarkan.



R.A.T. I.K.P.N. Tahun Buku 1974 tanggal 27 – 27 Juli 1975 di PUS-DIKOP Jakarta, dihadiri oleh utusan GKPN/PKPN Tingkat Propinsi Seluruh-Indonesia.



Rapat Badan Koordinasi PKPN Seluruh Indonesia di Bandung. Tampak para utusan tengah mendengarkan pidato pembukaan.

Inflasi yang melanda negara kita sejak awal tahun 1966 dimana terjadi penggantian "uang lama" dengan "uang baru" dengan kurs resmi 1000 lawan 1 pada akhir tahun 1965, maka keadaan Koperasi pada umumnya menjadi lumpuh, sebagai akibat politik zaman Orde Lama, dimana hasrat untuk menyimpan hilang sama sekali.

Luka parah yang terjadi dikalangan Gerakan Koperasi sulit untuk segera disembuhkan. Pada umumnya orang sudah tidak percaya lagi pada Koperasi. Kegiatan Koperasi antara lain dalam Penyaluran Bahan-bahan Pokok boleh dikatakan tidak ada, sehingga dengan demikian Koperasi di semua tingkatan di seluruh Indonesia mengalami kehancuran yang sulit untuk dipulihkan.

Menyadari bahwa situasi kemuraman Gerakan Koperasi yang seperti ini perlu secepatnya diatasi, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang Koperasi yang dikeluarkan di zaman Orde Lama (Undang-Undang No. 14/1965).

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1967 tersebut di atas, sejak awal tahun 1968 pihak Direktorat Jenderal Koperasi mulai mengadakan penelitian, antara lain dengan melakukan pendaftaran kembali Koperasi-Koperasi yang masih ada untuk dibina sehingga dapat menyesuaikan Anggaran Dasar dengan Undang-Undang No. 12/1967.

Tapi amat disayangkan, sampai batas berakhirnya waktu penyesuaian pada bulan Juni 1969, banyak Koperasi yang tidak mampu/sanggup mengadakan penyesuaian, sehingga akhirnya jumlah Koperasi sangat jauh berkurang.

Di samping hal tersebut di atas, faktor kekurangan Modal Usaha yang sudah jauh susut akibat dari penggungtingan uang, juga kegairahan untuk ber-Koperasi di kalangan Pegawai Negeri sudah boleh dikatakan tidak ada lagi, sehingga Pejuang-Pejuang Koperasi yang masih ada pada waktu itu sudah pessi-

mis, apakah mereka masih mampu untuk menghidupkan Koperasi seperti sediakala.

Di dalam situasi yang sangat kritis ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas perjuangan Bapak R.P. Suroso, Ketua Umum IKPN, Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal Suharto berkenan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1969, yang menetapkan sebagian dari potongan gaji Pegawai Negeri untuk Modal Koperasi yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1970.

Modal yang berasal dari potongan gaji Pegawai Negeri tersebut yang secara bertahap dihimpun oleh IKPN itu, pada tahun 1970 mulai disalurkan kepada GKPN/PKPN di daerah-daerah, khusus untuk usaha-usaha di KPN-KPN.

Dengan adanya modal ini, maka Koperasi Pegawai Negeri dari tahun ke tahun mulai berkembang lagi.

III. KEGIATAN IKPN.

1. Bidang Organisasi/Idial.

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, berkat dikeluarkannya Undang-Undang No. 12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia termasuk IKPN beserta Anggota-anggotanya di daerah-daerah sudah mulai merehabilitasikan dirinya kembali.

Sedikit demi sedikit dan dengan sudah payah serta kerja keras, maka kepercayaan dan minat masyarakat termasuk Pegawai Negeri terhadap Koperasi dapat dipulihkan.

Dalam pada itu, IKPN beserta para Anggota-anggotanya telah pula menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang No. 12/1967.

Jumlah anggota IKPN dewasa ini adalah 24 GKPN/PKPN Tingkat Propinsi yang tersebar diseluruh Indonesia dengan 200 PKPN, 4.327 KPN dan 523.729 Anggota Perorangan/Pegawai Negeri.



Rapat Badan Koordinasi PKPN Seluruh Indonesia di Bandung. Tampak para utusan tengah mendengarkan pidato pembukaan.



Rapat Pengurus Badan Koordinasi PKPN-PKPN Seluruh Indonesia bulan Nopember 1958. Tampak Bapak R. Pandji Suroso sedang memberi sambutan.



Sebagian Pengurus Gabungan PKPN-PKPN bergambar bersama sebelum Rapat dibuka.

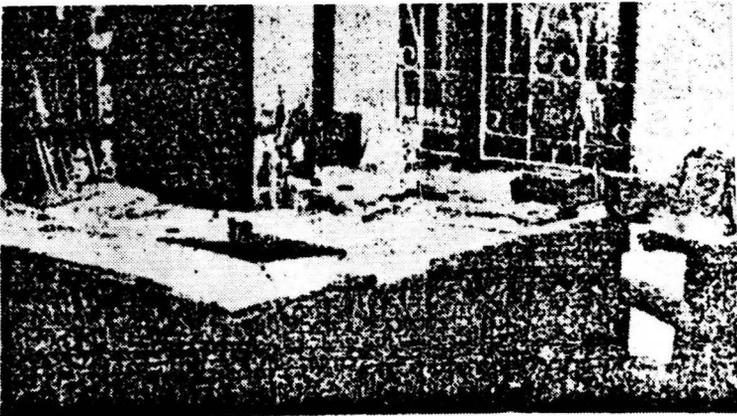
Pengurus Badan Koordinasi PKPN-PKPN Seluruh Indonesia sedang mendengarkan dengan tekun laporan dari Panitia Rapat.



Suasana Rapat Tahunan Anggota IKPN Seluruh Indonesia tahun kerja 1964 pada tanggal 26 s/d 28 Juli 1965 di Jakarta.



Ruang Kerja Bapak R. Pandji Suroso Ketua Umum IKPN di rumah beliau jalan Krawang no. 4 Jakarta ini merupakan Kantor IKPN yang pertama.



2. Bidang Keuangan/Permodalan.

Modal IKPN yang dipupuk dengan susah payah dari Simpanan para Anggota-anggotanya sejak periode Badan Koordinasi/Gabungan PKPN Seluruh Indonesia/dan IKPN sebesar Rp. 35.000.000,- akibat dari "Pengguntingan uang" pada akhir tahun 1965, nilainya hanya menjadi Rp. 35.000,- sehingga melumpuhkan semua kegiatan IKPN.

Berkat adanya Keputusan Presiden No. 36/1969, IKPN memperoleh modal sebesar ± Rp. 125.000.000,- di samping memperoleh kredit dari TASPEN dan BRI, maka IKPN setapak demi setapak dapat mulai merehabilitasikan Koperasi Pegawai Negeri sehingga mampu kembali memulai usaha-usahanya. Dengan adanya Keputusan Presiden No. 22/1970 sebagai penyempurnaan dari Keputusan Presiden No. 36/69 penambahan modal untuk IKPN berjalan terus sampai akhir tahun 1974, di mana Keputusan Presiden No. 22/1970 "dicabut" dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 56/1974 sehingga IKPN melakukan kegiatannya hanya dengan modal yang telah terhimpun sampai dengan akhir tahun 1974, yaitu sebesar Rp. 2.236.400.984,85 yang perinciannya, adalah sebagai berikut:

Tahun 1969.....	Rp.	125.869.752,05
Tahun 1970.....	Rp.	297.685.442,39
Tahun 1971.....	Rp.	296.038.364,85
Tahun 1972.....	Rp.	311.667.045,01
Tahun 1973.....	Rp.	443.517.145,67
Tahun 1974.....	Rp.	771.872.223,37
Tahun 1975.....	Rp.	9.751.001,51
Jumlah :		<u>Rp. 2.236.400.984,85</u>

Jumlah modal tersebut di atas di samping digunakan oleh IKPN sendiri, antara lain dalam rangka pendirian dan pembiayaan pengelolaan Pabrik Sepeda "Turangga" juga disalurkan/dipinjatkan melalui SPH kepada daerah-daerah sebagai modal

usaha GPKN/PKPN/KPN yang perinciannya dapat dilihat pada daftar terlampir. Karena penyaluran modal ke daerah-daerah tersebut statusnya sebagai pinjaman melalui ikatan SPH, maka sudah sewajarnya jika modal ex pinjaman tersebut pada suatu ketika dikembalikan kepada IKPN sebagai penanggung-jawab dari Modal ex Keppres No. 36/1969 jo No. 22/1970 tersebut, oleh GPKN/PKPN di daerah-daerah yang permodalannya sudah berkembang sedemikian rupa dari hasil pengelolaan Kredit ex Keppres tersebut selama ini.

Sampai tutup buku akhir 1978 Modal ex Keppres yang tadinya sebesar Rp. 2,3 milyar, kini sudah berkembang menjadi ± Rp. 3,5 milyar yang berada di Induk, Gabungan/PKPN Tingkat I, Pusat-pusat dan Primer-primer di seluruh Indonesia.

3. Bidang Usaha

Atas dasar pertimbangan urgensi penggunaan modal (capital) dan ketrampilan (technology), maka kegiatan di Bidang Usaha dibagi dalam beberapa jenis dan tingkatan, yang disesuaikan dengan kemampuan daya dan dana dari masing-masing tingkat organisasi, yaitu:

- a). Unit Usaha Tingkat Nasional (INDUK);
- b). Unit Usaha Tingkat Propinsi (GKPN);
- c). Unit Usaha Tingkat Kabupaten/Kotamadya (PKPN);
- d). Unit usaha Tingkat Primer (KPN).

Usaha-usaha Koperasi Pegawai Negeri meliputi berbagai jenis, antara lain:

- a). Industri dan Pengolahan:
Up. Pabrik Sepeda "Turangga" IKPN di Tangerang.
- b). Perdagangan :
Pengeluaran Gula Pasir dan Tepung Terigu (dari BULOG), Beras Pegawai Negeri dan Beras M.O. (Market Operation), Pompa Bensin dan Minyak Tanah, Apotik, Alat-alat Elektronika, Mesin Jahit, Textil kualitas sedang dan Batik, dan sebagainya.

- c). Pengangkutan:
Up. Armada Pengangkutan Beras, Pengangkutan Minyak Tanah, Pengangkutan Barang-barang Dagangan lain.
- d). Simpan Pinjam dan Perkreditan:
1. Simpan Pinjam untuk Pegawai Negeri Perorangan guna penambahan modal usaha pribadi masing-masing, up. penjahitan, bengkel sepeda, bengkel lampu petromax, dan sebagainya.
 2. Perkreditan untuk investasi atau penambahan modal pengembangan sesuatu usaha (Proyek Daerah) GKPN (Propinsi), PKPN (Kabupaten/Kotamadya) atau KPN (Kantor/Dinas/Jawatan).
- e). Pertokoan:
Penjualan barang-barang kelontong dan barang-barang konsumsi keperluan hidup sehari-hari, seperti gula, kopi, minyak goreng, mentega, susu, sabun cuci, sabun mandi, sikat gigi, tapal gigi, dan sebagainya.
- f). Perumahan:
Up. Pilot Proyek Perumahan Pegawai Negeri di Bintaro (Jakarta), Rumah Tumbuh di Sumatera Barat, Riau, NTT, Rumah Pegawai di Sidrap (Sulawesi Selatan) dan Kalimantan Selatan.
- g). Pengelolaan Usaha :
Sejauh mungkin dilaksanakan dengan sistim "Manager" (Professional Manager), dengan maksud agar supaya Unit-unit Usaha Koperasi Pegawai Negeri dilaksanakan secara efisien dan efektif dengan mengetrapkan prinsip harga dan pelayanan yang wajar (Reasonable Price Policy dan Active Serving Policy), sehingga pada saatnya Koperasi Pegawai Negeri dapat mengambil peranan yang ikut menentukan dalam Kebijakan Pemantapan Ekonomi Nasional (National Economic Stabilisation Policy).

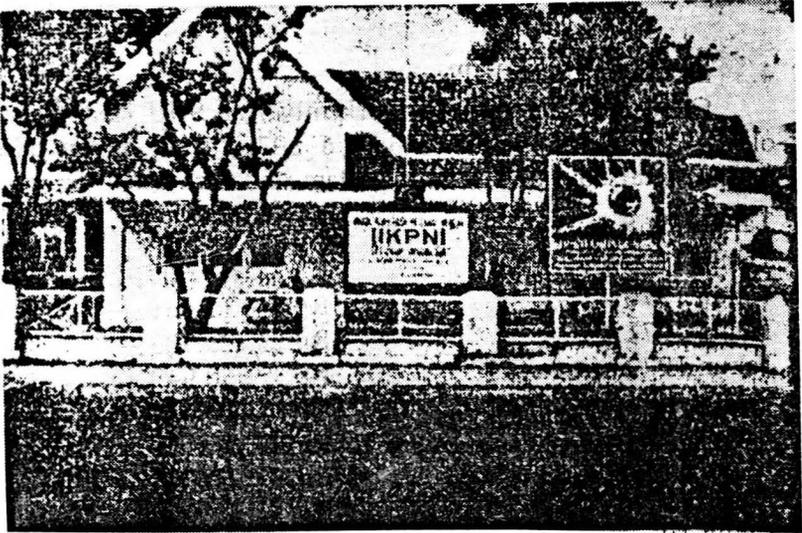
4. Sisa Hasil Usaha IKPN

Guna untuk mengetahui perkembangan SHU yang diperoleh IKPN selama tahun 1968 s/d 1978, dapat dilihat dari data-data tersebut di bawah ini (dalam ribuan rupiah):

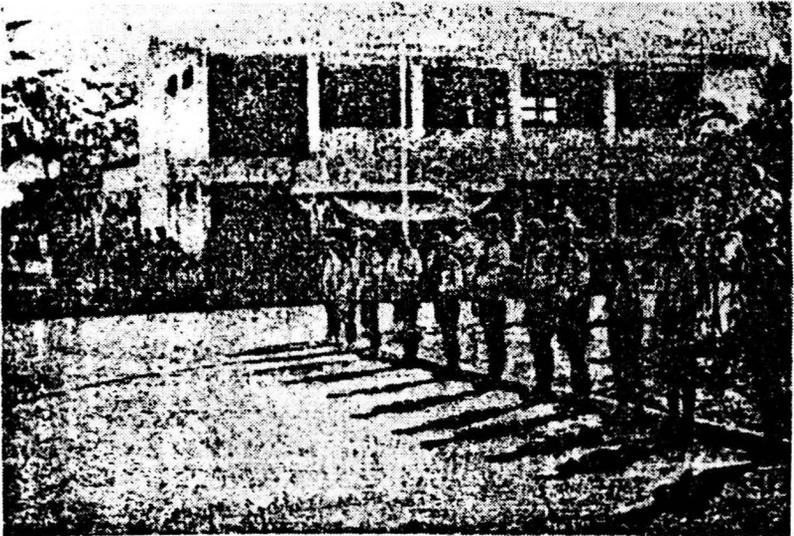
Tahun 1968.....	Rp.	126,-
Tahun 1969.....	Rp.	1.609,-
Tahun 1970.....	Rp.	11.461,-
Tahun 1971.....	Rp.	25.782,-
Tahun 1972.....	Rp.	50.942,-
Tahun 1973.....	Rp.	50.654,-
Tahun 1974.....	Rp.	40.139,-
Tahun 1975.....	Rp.	12.918,-
Tahun 1976.....	Rp.	23.058,-
Tahun 1977.....	Rp.	23.681,-
Tahun 1978.....	Rp.	15.581,-

Pabrik Sepeda IKPN di Batuaceper Kabupaten Tangerang Jawa Barat yang diresmikan oleh Bapak Presiden R.I. Soeharto pada tanggal 12 Juli 1974.





Gedung/Kantor IKPN di jalan Gondangdia Lama No. 21 Jakarta yang sekarang.



Gedung/Kantor Pabrik Sepeda "Turangga" di Jalan Daan Mogot KM 20 Batu Ceper Kabupaten Tangerang Jawa Barat.



Bapak Dirjenkop Ir. Ibnu Sudjono (no. 2 dari kanan) sedang membicarakan sesuatu dengan Bapak H.A. Malik Miraza Sekretaris IKPN (no. 1 dari kanan) pada hari peresmian paberik sepeda Turangga tanggal 12 Juli 1974.



Hasil produksi setengah jadi dari paberik sepeda Turangga. Tampak Bung Hatta sedang meninjau paberik tersebut.

HARAPAN-HARAPAN IKPN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1978 serta hasil Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia pada tanggal 19 s/d 24 Pebruari 1979 di Jakarta telah di-tanggapi dengan baik oleh sementara Gubernur di daerah di dalam pembentukan, pembinaan dan pengawasan Koperasi Pegawai Negeri untuk mana IKPN mengucapkan terima kasihnya.
2. Mudah-mudahan dengan bantuan para Gubernur/Bupati dan Wali Kota diharapkan para pegawai negeri semuanya masuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri melalui dinas/jawatan/kantornya masing-masing.
3. Di dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai anggota Koperasi agar Koperasi Pegawai Negeri dapat berkembang dengan baik diharapkan juga bantuan Kepala-kepala Dinas/Jawatan/Kantor untuk mengatur cara pemotongan gaji dari pegawai negeri untuk membayar kewajibannya kepada koperasi.
4. Begitu juga diharapkan agar kepada pegawai negeri yang menjadi Pengurus/Badan Pemeriksa Koperasi Pegawai Negeri diberikan izin:
 - 4.1. Untuk mengurus koperasinya
 - 4.2. Untuk memeriksa
 - 4.3. Untuk menyelenggarakan RAT
 - 4.4. Untuk mengunjungi RAT baik di Pusat maupun di daerah, tanpa mengurangi haknya sebagai pegawai negeri antara lain mengenai kedudukan dan kenaikan pangkatnya dan sebagainya.
5. Sebagai unsur pembantu/partner Dolog setempat dan penyalur beras untuk pegawai negeri di beberapa daerah yang dipercayakan kepada PKPN-PKPN agar Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian susut beras di dalam pelaksanaannya agar pegawai negeri benar-benar menerima hak jatahnya 10 kg per jiwa netto.

6. Diharapkan agar kepada Koperasi Pegawai Negeri diberikan juga Hak Pemilikan Tanah dalam Status Hukum, Hak Milik sebagaimana halnya dengan Koperasi Pertanian oleh Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeeri.

INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)
Jalan Gondangdia Lama No. 21
Jakarta

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)
tentang
PEMBENTUKAN PANITYA PERINGATAN 25 TAHUN IKP
Nomor: 15/Org-Peng/79
PENGURUS INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)

- Menimbang** : – bahwa Pengurus Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) dalam rapatnya tanggal 1 Maret 1979 telah memutuskan untuk memperingati 25 Tahun berdirinya Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN).
- bahwa telah diadakan tukar pendapat antara Pengurus IKPN dengan para bekas Pengurus IKPN dan tokoh-tokoh Koperasi Pegawai Negeri lainnya pada tanggal 7 Juni 1979.
 - bahwa dipandang perlu dibentuknya Panitia Peringatan 25 tahun Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) guna memper lancar pelaksanaan peringatan tersebut.
- Mendengar dan** : – Saran-saran dan pendapat di dalam pertemuan tukar pendapat antara
- Memperhatikan** : – Pengurus PKPN dengan para bekas Pengurus IKPN dan tokoh-tokoh Koperasi Pegawai Negeri lainnya.
- Mengingat** : – Anggaran Dasar IKPN Pasal 8 :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : – Mengingat Saudara NURSALIM RENDUSARA – Ketua I PKPN-JR sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan 25 Tahun Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN).
- Kedua : – Menunjuk Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) Jakarta Raya sebagai Pelaksana Penyelenggara Peringatan tersebut yang pelaksanaannya dikaitkan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Tahun Buku 1978.
- Ketiga : – Dalam persiapan sampai dengan pelaksanaan peringatan tersebut, Ketua Panitia Penyelenggara senantiasa melakukan konsultasi dengan Pengurus Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) dan agar dalam waktu singkat dapat membuat rencana pembiayaan perayaan peringatan tersebut dan mengajukannya kepada Pengurus Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN).
- Keempat : – Segala biaya keperluan peringatan yubiliun IKPN ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) tahun 1979.
- Kelima : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal dieluarkannya Surat Keputusan ini.
Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Juni 1979

A.n. Pengurus

Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN)

Ketua Umum,

Sekretaris I,

(R.P. Suroso)

(H.A. Malik Miraza)

Tembusan kepada:

1. Yth. Semua Anggota Pengurus IKPN
2. Yth. Semua Anggota Badan Pemeriksa IKPN
3. Yth. Semua Pengurus GKPN/PKPN Setingkat
4. Arsip.

INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)
Jalan Gondangdia Lama No. 21
Jakarta

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)
tentang
PEMBENTUKAN PANITYA REDAKSI BUKU
KENANG-KENANGAN 25 TAHUN IKPN
Nomor: 16/Org-Peng/79
PENGURUS INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)

- Menimbang : — bahwa dipandang perlu membentuk Panitia Redaksi sehubungan dengan akan diterbitkan Brosir dan Buku Kenang-Kenangan 25 Tahun Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) untuk menyusun isi dari Brosir dan Buku Kenang-Kenangan tersebut.
- Mendengar : — Saran-saran dan pendapat di dalam pertemuan tukar pendapat antara Pengurus IKPN dan para bekas Pengurus IKPN dan tokoh-tokoh Koperasi Pegawai Negeri lainnya pada tanggal 7 Juni 1979.
- Mengingat : — Anggaran Dasar IKPN Pasal 8 :

M E M U T U S K A N :

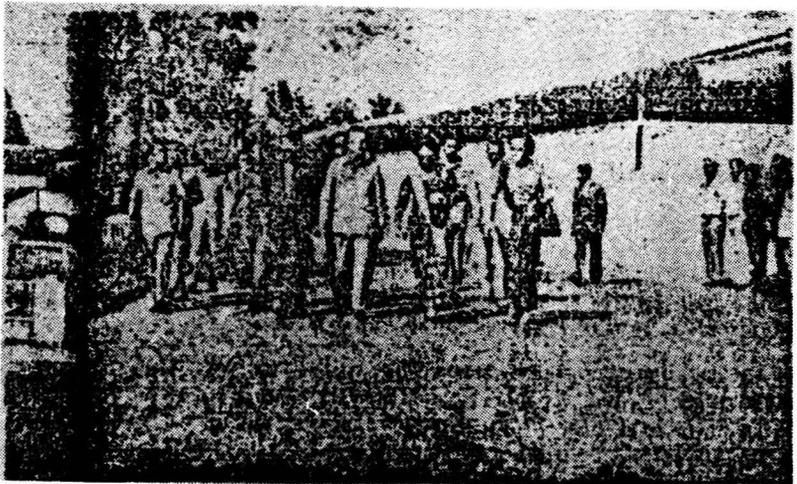
- Menetapkan :
Pertama :

Mengangkat para anggota Panitia Redaksi yang personaliannya adalah sebagai berikut:

1. R. HASAN NATAPERMANA — Sebagai Ketua merangkap Anggota

- 2. KAMARALSYAH, SH – Sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota
- 3. H.A MALIK MARIZA – Sebagai Sekretaris I merangkap Anggota
- 4. MARIYUN SUDIROHADI-PROJO – Sebagai Sekretaris II merangkap Anggota
- 5. Drs. A.S. RODJA – Sebagai Anggota.

- Kedua : Tugas Panitia adalah sebagai berikut:
1. Dalam Jangka Pendek mempersiapkan brosur tentang sejarah IKPN selama 25 tahun sejak berdirinya yang akan diedarkan pada Hari Ulang Tahun ke XXV.
 2. Dalam Jangka Panjang menyusun suatu Buku Dokumenter secara lengkap tentang perkembangan IKPN sejak berdirinya.
- Ketiga : Segala biaya untuk keperluan penerbitan Brosir dan Buku Kenang-Kenangan tersebut



Bapak Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto beserta rombongan sedang meninggalkan ruangan paberik sepeda Turangga.

dibebankan kepada Anggaran Belanja Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Tahun 1979.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini. Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Surat Keputusan ini dikirim/disampaikan kepada masing-masing Anggota untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Juni 1979

A.n. Pengurus

INDUK KOPERASI PEGAWAI

Jakarta, 9 Juni 1979

A.n. Pengurus

INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI
(IKPN)

Ketua Umum,

Sekretaris I

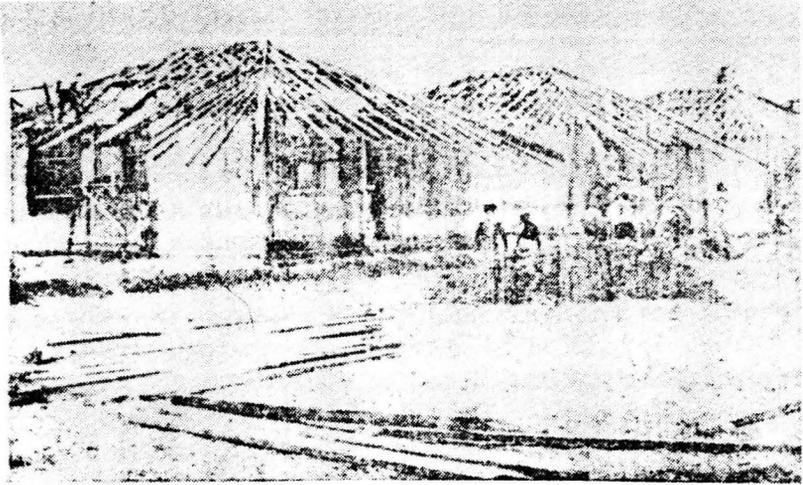
(R.P. Suroso)

(H.A. Malik Mariza)

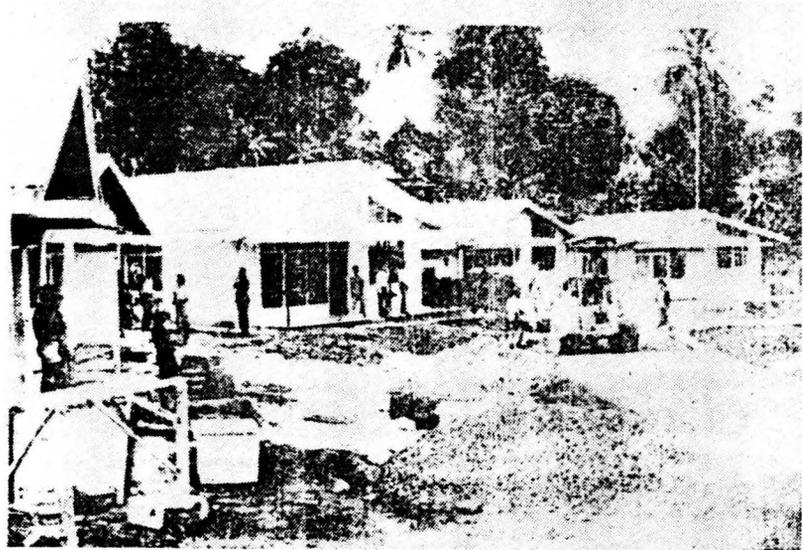
Tembusan kepada :

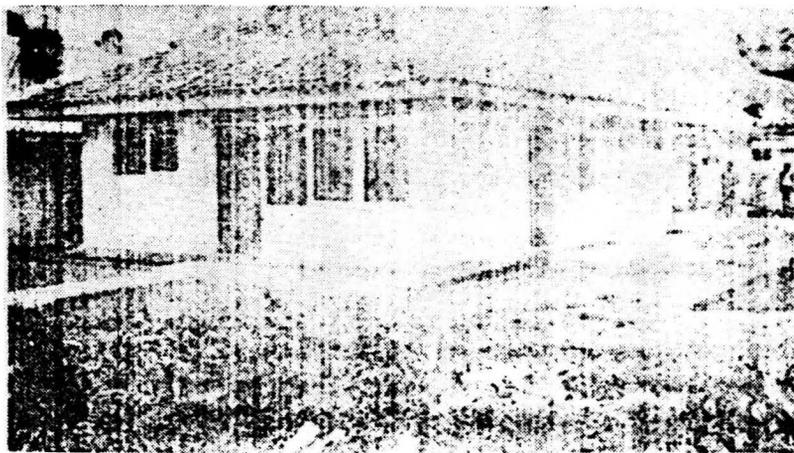
1. Yth. Semua Anggota Pengurus IKPN
2. Yth. Semua Anggota Badan Pemeriksa IKPN
3. Yth. Semua Pengurus GKPN/PKPN Setingkat
4. Arsip.

Pekerjaan pembangunan rumah T. 70 IKPN di desa Bintaro Jakarta Selatan, pada tahun 1975.



Pekerjaan pembangunan rumah T. 70 persil C-24 di Blok C Bintaro Jakarta Selatan dalam taraf penyelesaian.





Salah satu contoh dari rumah T. 70 IKPN yang sudah selesai dibangun.

Peresmian Kompleks Perumahan IKPN di Bintaro Jakarta Selatan oleh Bapak Menteri Nakertranskop Prof. Dr. Subroto pada tanggal 3 Januari 1975. Tampak para hadirin sedang menadahkan tangan memanjatkan do'a selamat kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.



Lampiran XX

DAFTAR ANGGOTA I.K.P.N. PER 31 DESEMBER 1977
(URUTAN BERDASARKAN/SESUAI DENGAN BUKU DAFTAR ANGGOTA I.K.P.N.)

LAMPIRAN No. I/ORG/1977

No.	NAMA LENGKAP GKPN/PKPN	BADAN HUKUM		PKPN	KPN	PER-ORANGAN	JUMLAH PEGAWAI NEGERI*)			KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL				PUSAT	DAERAH	JUMLAH	
1.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) ACEH	2245/12-1967	15-2-1969	7	91	8.313	18.743*	5.889	24.632	*) Data BAKN 29-1-1976
2.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) SUMATERA UTARA	7266/12-1967	14-10-1968	13	184	21.512	57.160	24.138	81.298	
3.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) RIAU	8222/12-1967	17-2-1968	5	73	6.617x)	17.284	3.990	21.274	
4.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) SUMATERA BARAT	8186/12-1967	27-4-1968	12	112	7.976	35.617	4.732	40.349	
5.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) SUMATERA SELATAN	8929/12-1967	10-12-1969	6	56	5.884x)	21.453	14.534	35.987	
6.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) JAWA BARAT	845/A-12/67	12-12-1968	22	613	77.160	167.497	63.884	231.381	
7.	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) JAKARTA RAYA	1016/A-12/67	14-11-1968	-	159	65.335x)	112.626	31.869	144.495	TINGKAT PROPINSI
8.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) JAWA TENGAH	4425/12-1967	4-8-1968	31	1.049	104.835	204.447	39.912	244.359	
9.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) D.I. YOGYAKARTA	8228/12-1967	28-7-1968	5	155	26.244	29.000	16.442	45.442	
10.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) JAWA TIMUR	6839/12-1967	9-11-1968	32	866	101.944x)	180.253	49.734	239.987	
11.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) BALI	8126/12-1967	17-12-1968	8	101	6.797x)	17.322	3.930	21.252	
12.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) KALIMANTAN SELATAN	7794/12-1967	17-12-1968	6	104	7.598	19.849	5.726	25.575	
13.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) KALIMANTAN TENGAH	8785/12-1967	17-12-1968	7	37	600	8.093	2.511	10.604	BELUM MELUNASI SP
14.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) KALIMANTAN BARAT	8181/12-1967	29-12-1968	3	42	3.903	9.244	6.354	15.598	
15.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) SULAWESI UTARA	1651/BH-1970	20-10-1970	5	72	8.464x)	27.479	6.908	34.387	
16.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) SULAWESI SELATAN	7347/12-1967	19-6-1968	23	277	23.825x)	61.264	11.569	72.833	
17.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) SULAWESI TENGGARA	008/BH/XX-69	5-8-1969	4	78	6.288x)	6.043	3.324	9.367	
18.	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) MALUKU	4654/XXII-76	18-11-1968	-	9	1.000x)	14.768	2.258	17.026	TINGKAT PROPINSI
19.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) LAMPUNG	75/BH/XV/75	10-6-1975	3	31	1.986x)	10.245	12.328	22.573	BELUM MELUNASI SP
20.	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) JAMBI	176/BH/XV/67	17-7-1975	-	25	3.297	8.202	4.512	12.714	TINGKAT PROPINSI
21.	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) NUSA TENGGARA BARAT	241/BH/XXI	27-1-1975	6	104	6.511x)	12.533	5.802	18.335	
22.	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) NUSA TENGGARA TIMUR	309/BH/XIV	20-7-1977	-	61	6.158	13.818	15.272	29.088	TINGKAT PROPINSI
23.	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) BENGKULU	BELUM BERBADAN HUKUM		-	?	3.407	4.763	2.103	6.866	TK. PROP - BLM TER- DAFTAR DLM BUKU DLM MELUNASI SP
	GABUNGAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI (G.K.P.N) KALIMANTAN TIMUR	8030/12-1967	3-12-1968	3	32	2.738	5.771	6.287	12.050	IDEM
	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) SULAWESI TENGAH	131/BH/XIX	12-6-1978*	7	?	?	6.354	5.343	11.697	BELUM ANGGOTA
	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) IRIAN JAYA	BELUM BERBADAN HUKUM		?	?	?	7.730	11.075	18.805	BELUM ANGGOTA
	PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI (P.K.P.N) TIMOR TIMUR	BELUM BERBADAN HUKUM		?	?	?	?	?	?	BELUM ANGGOTA
				199	4.373	511.838	1.077.556	360.426	1.437.982	

KETERANGAN: PAKAI TANDA *) = TIDAK ADA PERUBAHAN JUMLAH ANGGOTA PERORANGAN DALAM TAHUN 1977.

Jakarta, 31 Desember 1977
INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (IKPN)

REKAPITULASI PIUTANG EX KEPPRES

No.		SALDO PIUTANG KREDIT EX KEPPRES NO. 36/1969 JO NO. 22/1970 DI TIAP - TIAP DAERAH / PROPINSI PER 31 DESEMBER 1978			
		G.K.P.N.	PKPN-PKPN	PRIMER-K.P.N.	JUMLAH
1.	DAERAH ISTIMEWA ACEH	4.000.000,-	6.750.000,-	9.159.607,95	19.909.607,95
2.	PROPINSI SUMATERA UTARA	12.500.000,-	13.900.000,-	14.654.000,-	41.054.000,-
3.	PROPINSI SUMATERA BARAT	11.500.000,-	6.600.000,-	8.810.500,-	26.910.500,-
4.	PROPINSI RIAU	8.500.000,-	2.100.000,-	5.958.500,-	16.558.500,-
5.	PROPINSI BENGKULU	-	500.000,-	1.500.000,-	2.000.000,-
6.	PROPINSI JAMBI	-	-	4.082.500,-	4.082.500,-
7.	PROPINSI SUMATERA SELATAN	10.000.000,-	3.398.000,-	3.180.500,-	16.578.500,-
8.	PROPINSI LAMPUNG	2.000.000,-	3.300.000,-	4.150.000,-	9.450.000,-
9.	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA	-	72.500.000,-	39.089.000,-	111.589.000,-
10.	PROPINSI JAWA BARAT	60.000.000,-	36.250.000,-	111.076.000,-	207.326.000,-
11.	PROPINSI JAWA TENGAH	24.000.000,-	59.250.000,-	66.990.000,-	150.240.000,-
12.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	10.600.000,-	2.250.000,-	16.262.500,-	29.112.500,-
13.	PROPINSI JAWA TIMUR	35.500.000,-	40.000.000,-	43.441.000,-	118.941.000,-
14.	PROPINSI BALI	2.600.000,-	2.847.310,-	6.984.590,-	12.431.900,-
15.	PROPINSI KALIMANTAN BARAT	6.000.000,-	1.000.000,-	1.660.000,-	8.660.000,-
16.	PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	2.500.000,-	-	1.942.500,-	4.442.500,-
17.	PROPINSI KALIMANTAN SELATAN	2.990.000,-	-	12.930.500,-	15.920.500,-
18.	PROPINSI KALIMANTAN TIMUR	1.000.000,-	-	60.000,-	1.060.000,-
19.	PROPINSI SULAWESI UTARA	3.800.000,-	3.850.000,-	6.357.000,-	14.007.000,-
20.	PROPINSI SULAWESI TENGAH	-	750.000,-	1.156.500,-	1.906.500,-
21.	PROPINSI SULAWESI TENGGARA	2.000.000,-	1.500.000,-	3.686.500,-	7.186.500,-
22.	PROPINSI SULAWESI SELATAN	28.500.000,-	6.895.000,-	9.310.500,-	44.705.500,-
23.	PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT	-	5.200.000,-	4.655.000,-	9.855.000,-
24.	PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR	2.465.000,-	1.000.000,-	196.500,-	3.661.500,-
25.	PROPINSI MALUKU	-	1.950.000,-	-	1.950.000,-
		230.455.000,-	271.790.310,-	377.293.697,45	879.539.007,95

Jakarta, 31 Desember 1978

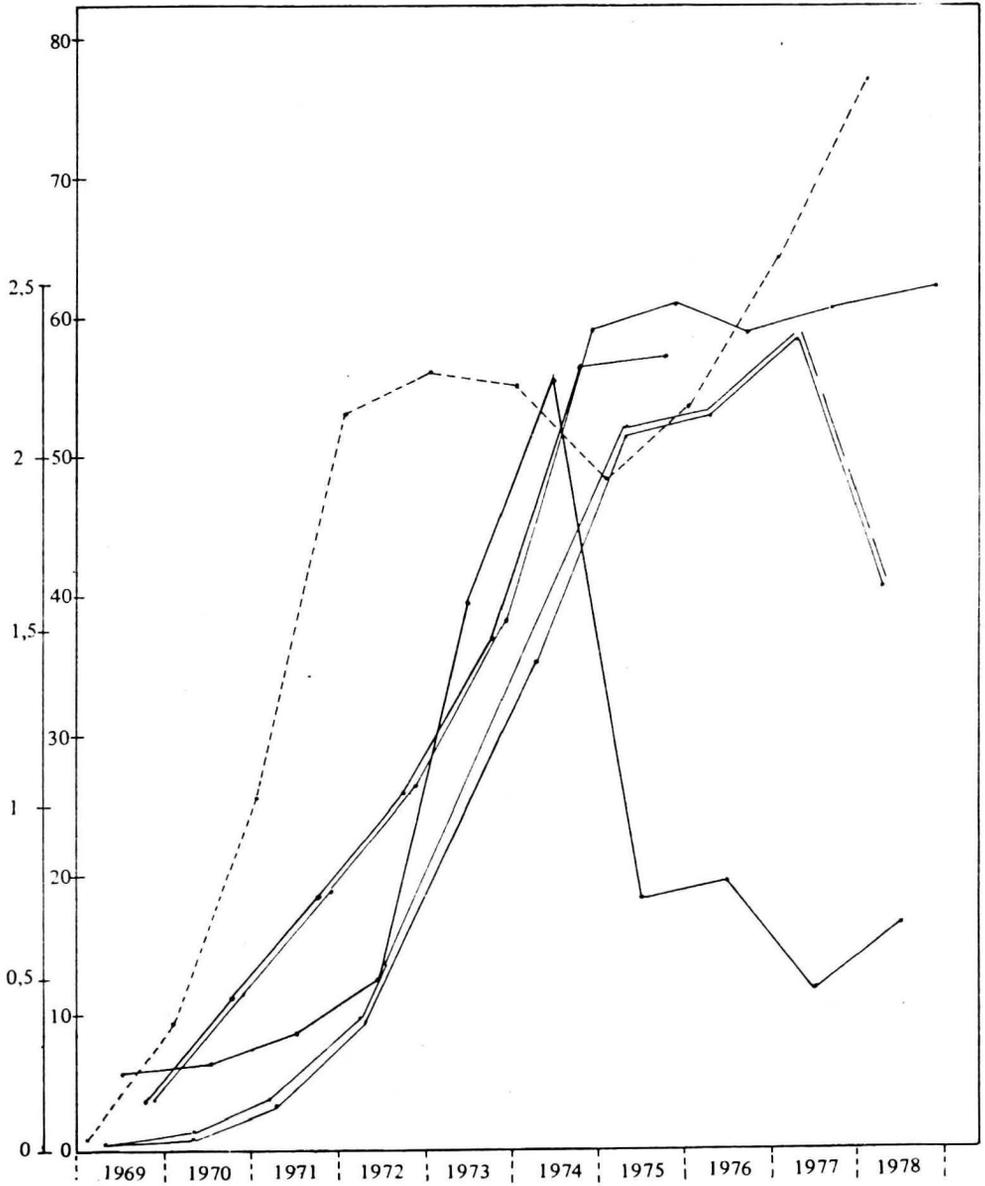
An. PENGURUS INDUK KOPERASI PEGAWAI NEGERI (I.K.P.N.)

Ketua Umum,
ttd.
(R.P. SUROSO)Sekretaris I,
ttd.
(H. BAD. MALIK MIRAZA)Bendahara I,
ttd.
(SOEGIARTO)

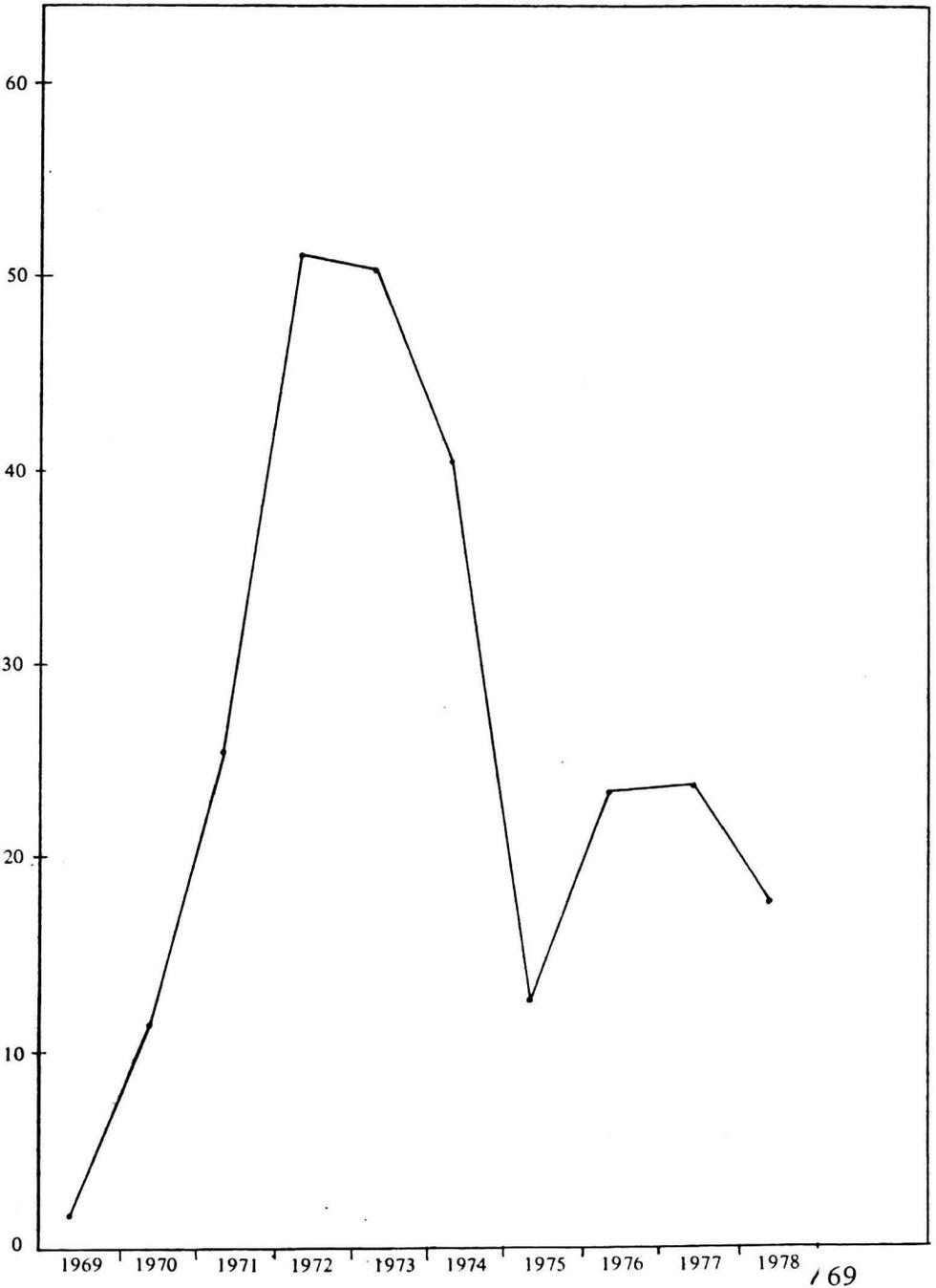
Lampiran XXII

GRAFIK PERMODALAN IPKN TAHUN 1969 S/D 1978

Yang terdiri dari :
 Simpanan Anggota } Dalam Jutaan Rupiah
 Dana-dana }
 Cadangan }
 Ex. Potongan Gaji Peg. Neg. (KEPPRES No. 22/70) } Dalam Milyar Rupiah
 Harga seluruhnya dalam Milyar Rupiah



**GRAFIKA SISA HASIL USAHA IKPN
DALAM JUTAAN RUPIAH
Dari Tahun 1969 s/d 1978**



BAB III

CATATAN ATAS BAHAN-BAHAN DOKUMEN TENTANG DIRI RADEN PANJI SUROSO

Bahan-bahan dokumentasi yang kami peroleh tentang diri beliau dapat dikategorikan pada: 1) sumber pribadi dari beliau sendiri dan yang 2) yang berasal dari surat kabar atau majalah, serta yang 3) yang berasal dari buku-buku, baik berupa buku sejarah maupun dari oto biografi.

Dari bahan-bahan yang kami peroleh melalui kategori yang pertama adalah yang berbentuk ketikan beliau yang kemudian disalin oleh Proyek IDSN. Bahan-bahan ini berisi keterangan tentang pelbagai pekerjaan beliau dan pendidikan beliau. Catatan itu bersifat kronologis disertai catatan-catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa yang dianggapnya "penting". Bahan yang diperoleh dari kategori kedua juga tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau sebagai orang pergerakan. Sedang dari bahan-bahan dari kategori ketiga kita peroleh dari buku yang bersifat otobiografis yang ditulis oleh orang yang mengenal beliau dari sejak periode pergerakan nasional; dan otobiografis itu ditulis oleh orang yang berbeda sikap dengan beliau, yaitu orang pergerakan yang berasal tidak dari golongan nasionalis kanan, dari mana beliau digolongkan, melainkan dari golongan nasionalis non kooperasi.

Pertanyaan yang perlu dijawab sehubungan dengan bahan-bahan yang diperoleh itu, ialah sampai seberapa jauh tingkat kredibilitas bahan-bahan tersebut, artinya dapatkah keterangan-keterangan yang berasal dari ketiga kategori bahan tersebut dipercaya, dilihat dari sudut sejarah?

Tentu pertanyaan itu tidaklah mudah dijawab. Tetapi untuk jawaban itu tentu diperlukan patokan-patokan tertentu. Dalam hubungan itu, maka bahan-bahan pada kategori

pertama dan ketiga salah satu patokan yang dijadikan alat penilai ialah "kejujuran" dari penulis dan pemberi bahan itu. Dengan demikian ini berarti bahwa kejujuran dari Bapak R.P. Suroso di dalam memberikan catatan-catatan kegiatannya sebagai orang pergerakan dapat dipercaya, karena integritas dirinya yang sangat tinggi. Beliau adalah orang yang selalu "sederhana"³ dan tidak mau menonjolkan diri dan juga adalah seorang "jujur dan kompeten di dalam membela kepentingan rakyat dan kaum pegawai negeri".⁴

Sekarang tentang penilaian yang bersumber dari penulis otobiografi dengan catatan-catatan singkat atas diri bapak R.P. Suroso. Otobiografi yang dimaksud disini ialah yang ditulis oleh Bapak Ali Sastroamidjojo dengan judul: *Tonggak-Tonggak Di Perjalananku*, dan yang diterbitkan oleh P.T. Kinta di Jakarta. Di dalam buku yang ditulisnya itu Bapak Ali Sastroamidjojo telah memberikan catatan-catatan singkat tentang "pribadi" tertentu di dalam kaitan-kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukannya, baik selama masa pergerakan nasional maupun setelah kemerdekaan. Salah seorang yang dicatatnya ialah Bapak R.P. Suroso. Bapak Ali Sastroamidjojo telah memberikannya terhadap Bapak R.P. Suroso sebagai, di samping sederhana dan jujur sebagaimana yang telah kami kutip pada halaman terdahulu, juga adalah salah seorang tokoh nasionalis yang menonjol pada waktu itu. Tentang ini ada baiknya jika kita kutipkan secara lengkap kata-kata Ali Sastroamidjojo:

"Tetapi pergerakan kemerdekaan nasional tidak terhenti oleh karenanya. Semua kesempatan yang masih terbuka segera dipergunakan. Oleh sebab itu aksi politik berpindah ke sidang-sidang Volksraad, yang sebagai badan resmi masih bekerja terus. Di badan anggota-anggota

3) Ali Sastroamidjojo, *op. cit.* hal. 119.

4). *Ibid*

bangsa kita dari golongan nasionalis sangat giat dengan mengajukan usul-usul mosi yang maksudnya untuk mendesak Pemerintah Belanda mengadakan perubahan-perubahan di dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Tokoh-tokoh nasionalis yang menonjol pada waktu itu ialah Thamrin R.P. Suroso buat pertama kali di dalam sejarah Volksraad dibentuk suatu fraksi baru dengan tujuan "Indonesia Merdeka".⁵

Kejujuran sorang Ali Sastroamidjojo memberikan penilaiannya terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan di atas itu, termasuk terhadap diri Bapak R.P. Suroso, dapatkah keterangan tersebut di atas dipercaya?

Untuk menjawabnya tentu kita perlu melihat Bapak Ali Sastroamidjojo sebagai seorang yang berasal dari periode Pergerakan nasional; tetapi beliau tidak berasal dari golongan nasionalis kanan, melainkan dari golongan nasionalis, non-kopoperator. Dengan demikian dilihat dari segi bentuk kegiatannya, Ali Sastroamidjojo dianggap lebih radikal dan sebagai akibatnya beliau tidak jarang berhadapan dengan pemerintah kolonial sebagai terdakwa. Dengan demikian beliau berasal dari sisi lain daripada sisi tempat Bapak R.P. Suroso berdiri.

Kalau kita memperhatikan isi buku otobiografi Bapak Ali Sastroamidjojo secara keseluruhan maka terdapat kesan bahwa beliau telah menulis kegiatan-kegiatannya secara cukup "apa adanya"; terdapat kesan tidak ada maksud untuk menonjolkan diri dan menonjolkan orang lain, walaupun orang itu berbeda azas perjuangannya. Dalam kerangka inilah kami beranggapan bahwa catatan-catatannya terhadap tokoh-tokoh tertentu di dalam bukunya, termasuk terhadap diri Bapak R.P. Suroso, cukup mempunyai kredibilitas yang bernilai tinggi.

5). *Ibid.*, hal. 124-5.

Untuk catatan sumber dari surat kabar dan majalah dapat diberikan keterangan sebagai berikut.

Apa yang dikemukakan di dalam surat kabar itu adalah berupa kegiatan-kegiatan yang dicatat. Jadi hal-hal yang bersifat faktual dapat diketahui pula. Tentu kita harus membedakannya dengan keterangan yang bersifat penilaian atau opini. Karena itu, dari surat kabar dan majalah inipun dapat diperoleh keterangan-keterangan historis yang patut dan dapat dipercaya.

Demikianlah beberapa catatan tentang bahan-bahan yang menjadi sumber penilaian terhadap diri Bapak R.P. Suroso dalam rangka kedudukannya – yang diberikan oleh masyarakat luas bangsanya – *tokoh nasional*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian penutup ini kami ingin menyatakan bahwa pasti dokumen-dokumen yang terkumpul dan tersalin, terfoto-kopi pada tulisan ini masih *sangat terbatas*; karena itu sangat wajar jika disebutkan "dokumen-dokumen terbatas" tentang diri beliau. Tentu, dengan demikian untuk waktu-waktu yang akan datang, masih sangat perlu penelitian lebih lanjut untuk pengumpulan bahan-bahan dokumentasi tentang diri beliau. Hal yang demikian ini tidak saja perlu untuk kepentingan yang berkaitan dengan kehendak untuk menjadikannya sebagai *tokoh nasional* yang patut diberikan penghargaan *pahlawan nasional*, melainkan juga karena kebutuhan kita akan pengumpulan dokumentasi tentang diri tokoh-tokoh pergerakan nasional kita dalam rangka menyimak lebih dalam buah-buah pikiran mereka untuk kepentingan pembangunan bangsa, sekarang dan yang akan datang.

Penyimak buah-buah pikiran yang dimaksud, akan dirasa makin perlu, jika kita melihat perkembangan di sekeliling kita. Pengaruh yang demikian kuat dari arus, dari apa yang disebut *modernisasi*, mengharuskan diri kita, sebagai bangsa, untuk mencari "penghempang" dari pelbagai akibat buruk dari arus modernisasi itu. Dari pencaharian kita dari buah-buah pikiran para pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk dari R.P. Soeroso dan mereka yang seangkatan dengan beliau, kemungkinan kita akan dapat menemukan buah-buah pikiran yang berguna untuk itu. Setidak-tidaknya, kita dapat memperoleh pelbagai bahan-bahan perbandingan untuk menemukan arah yang "lebih tepat" bagi perkembangan kita sebagai bangsa, kini dan juga yang akan datang.

Berdasarkan dokumentasi yang berhasil dikumpulkan di sini, dari diri R.P. Soeroso, agaknya kita semua dapat meny-

mak diri beliau tentang *sikap konsistensinya* di dalam perjuangannya. Khususnya di dalam perjuangannya untuk menciptakan suatu kondisi kehidupan bagi pegawai negeri. Buah dari konsistensi pemikirannya itu ialah apa yang kini dikenal dengan *Koperasi Pegawai Negeri*. Dalam pelbagai bentuknya, mereka yang termasuk pegawai negeri tentu telah pernah menikmati "sesuatu" dari koperasi buah perjuangan beliau itu.

Berfikir, bertindak konsisten, pasti merupakan kebutuhan yang makin terasa penting di dalam pertumbuhan dari kita, sebagai bangsa, ditengah-tengah arus modernisasi, dikemudian hari. Tetapi berfikir, bertindak konsisten bukanlah suatu pekerjaan mudah. Ia hanya akan dapat dilakukan oleh "manusia berwatak".—



Bapak R.P. Soeroso sedang memberikan sambutan pada rapat IKPN

**SINGKATAN RIWAYAT HIDUP
RADEN PANDJI SUROSO**

1. Nama : **Raden Pandji Suroso.**
2. Lahir : **Tanggal 3 Nopember 1893 di Sidoarjo Surabaya - Jawa Timur.**
3. Bangsa : **Indonesia**
4. Agama : **Islam**
5. Pendidikan : **Sekolah Dasar Kelas I dan Kweek-school 6 Tahun di Probolinggo (Jawa Timur).**
6. Kawin : **Kawin.**
7. Anak : **8 orang anak; 4 Laki-laki dan 4 Perempuan.**
8. **Jabatan/dan kegiatan dalam masyarakat;**
 - a. **Dalam tahun 1908 menjadi anggota Budi Utomo masih menjadi murid Kweekschool. Waktu itu Budi Utomo masih belum mempunyai tujuan Politik.**
 - b. **Dalam tahun 1912 menjadi anggota Serikat Islam (S.I).**
 - c. **Dalam tahun 1912 duduk di kelas 6 Kweekschool dan ujian terakhirnya kurang 1 Bulan, dikeluarkan dari Sekolah tersebut, karena memimpin pemogokan murid seluruh Sekolah yang tidak puas dengan beleid Direktur Sekolah tersebut seorang Belanda yang menghina Bangsa Indonesia.**
 - d. **Ke Surabaya belajar Jurnalistik.**
 - e. **Dalam tahun 1915 menjadi Presiden S.I. di Probolinggo dan Kraksaan.**
Pada waktu itu saya beusia ± 21 tahun sekalipun saya muda itu toh dapat juga memimpin rakyat di daerah itu yang penduduknya termasuk suku Madura. Hal itu karena saya mendapat kepercayaan mereka.

Saya bersama anggota pengurus S.I. menitik beratkan pada Gerakan Nasional dan Perbaikan Ekonomi rakyat. Pengurus SI dalam kota Probolinggo mendirikan dua buah toko untuk kebutuhan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Tiap hari penuh pembeli. Tetapi tidak lama sejak itu toko-toko Cina menurunkan harga barang-barangnya lebih murah dari harga barang-barang dari toko S.I. dan karenanya pembeli berjubel di toko Cina. Akhirnya toko S.I. tidak dapat bertahan dan terpaksa ditutup. Lalu toko-toko Cina kembali menaikkan harga barang-barangnya. Terdengar khabar untuk biaya saingan orang-orang Cina mempunyai dana cukup kuat yang dilangsungkan hingga sekarang dan golongan Cina dapat menguasai seluruh perdagangan kita.

Perang Dunia I Politis dan Ekonomis dapat dibilang tidak mempengaruhi Negara kita, mungkin karena Negeri Belanda pada waktu itu tetap netral. Diangkat menjadi Mantri Boekhouder Kantor Irigasi di Probolinggo.

- f. Dalam tahun 1916 dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai B.O.W. seluruh Indonesia.

Dalam tahun 1917 dipilih menjadi anggota Gemeenteraad Probolinggo. Dalam kedudukan itu lalu membela nasib pemilik barung-warung di pinggir jalan supaya tidak dibongkar dan berhasil.

Di dalam daerah Gemeente yang hanya mengenal penduduk bangsa Belanda, maka kepentingan penduduk pribumi tidak diperhatikan, malah mereka lalu terjepit.

Saya sebagai anggota Dewan Gemeente terus meneruskan membela kepentingan pribumi. Penerangan Listrik, Air minum, jalan-jalan kampung dan sebagainya yang besar artinya bagi orang kecil memerlukan perjuangan yang tanggung.

- g. Dalam tahun 1918 menjadi Commissaris Centraal Bestuur S.I. Kira-kira antara tahun 1917 dan 1918

Dr. F. Douwesdekker keliling Jawa untuk Indische Pursai datang di rumah minta saya memegang Ketua I.P. daerah Probolinggo, tetapi saya tolak karena saya masih menjabat Ketua S.I.

- h. Dalam tahun 1919 pindah ke Mojokerto (Jawa Timur) tetap menjadi Ketua P.B. V.I.P. B.O.W. Berhenti menjadi Mantri Boekhouder Irigasi. Menjadi Presiden S.I. Kabupaten Mojokerto dan tetap menjabat Com. C.B.S.I.
- i. Dalam tahun 1921 menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Mojokerto. Memimpin pemogokan pegawai Pabrik Gula yang jumlahnya 12 buah milik orang Belanda dan menghasilkan perbaikan nasib mereka itu. Pemogokan itu sebagai penjajagan kekuatan lawan. Selama tahun 1912 s/d 1923 berusaha memperbaiki nasib kaum tani. Dalam Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang saya berhasil sehingga peraturan mengenai desa mengenai pembagian tanah pertanian kepada orang tani menjadi lebih mantap dan orang-orang tani dapat menghadapi Pabrik-pabrik Gula yang menyewa tanah menjadi kuat. Sistim Komunal bezit met Afwisselende andelen menjadi Komunal bezit met vaste andelen jadi bagian tani adalah tetap, tidak ganti berganti. Hargasewa tanah sawah menjadi naik. Pemeliharaan tanah sawah karena menjadi bagian petani tetap, tidak ganti berganti menjadi giat dan menambah hasil tanaman.
- j. Dalam tahun 1922 dipilih menjadi Ketua Vakcentraal Ke III yaitu Persatuan Vakbonden Hindia (P.V.H.). Dalam bulan Mei 1923 V.S.T.P. (Perserikatan Pegawai Sepur dan Tram) mengadakan pemogokan dengan alasan karena Sdr. Semaun, Ketua VSTP ditangkap. Sebagai Ketua Vakcentraal P.V.H. Saya berusaha memenangkan pemogokan itu, tetapi tidak berhasil karena

saya dilarang ke luar kota yang saya tempati, sehingga saya tidak dapat menghubungi - Lain-lain Perserikatan Pegawai/Buruh dan Pemerintah Belanda berhubung dengan alasan V.S.T.P. mengadakan pemogokan itu atas dasar politik lalu bertindak juga atas dasar Politis, menambah artikel 161 bis dan ter dari menambah artikel 161 bis dan ter dari Srafwetboek untuk dapat menangkapi pengurus V.S.T.P. dan oleh karena itu pemogokan hancur.

Pengalaman yang amat pait itu tentulah menjadi pelajaran untuk bertindak berhati-hati dengan perhitungan yang setepat mungkin. Gerakan buruh yang menghebat menjadi pemogokan untuk mendapatkan perbaikan nasib lalu diverpolitik, sehingga lawan mudah mendapatkan alasan memukul dengan alasan yang sesungguhnya bukan pada tempatnya dan pemogokan itu tidak dapat simpatik masyarakat karena pemogokan oleh Pengurus VSTP di-verpolitik yaitu karena Semaun ditangkap. Dalam tahun 1922 - 1925 memimpin Surat Kabar Harian Kemajuan Hindia di Surabaya. Ditutupnya penerbitan sesudah 4 tahun karena pendapatan tidak dapat menutup pengeluaran disebabkan uang langganan masuknya hanya \pm 50%, sedang pendapatan dari Iklan pedagang-pedagang Pribumi amat sedikit sekali. Pada samping itu pedagang-pedagang non pribumi (umumnya Cina dan Eropa tidak mau memasang iklan dalam Harian dari Bangsa pribumi). Dalam tahun 1924 diangkat menjadi Anggota Volksraad. Pada pidato saya yang pertama kali di muka Sidang Volksraad tahun 1924 saya mengkritik beleid Pemerintah Hindia Belanda dan menolak maksud Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Pajak Landrente di Sumatera Barat. Hasil pidato saya itu ialah Gubernur General Fock marah kepada saya dan tidak mau mengundang saya untuk perkenalan, tetapi berhasil pajak Landrente tidak jadi

dimasukkan ke Sumatera Barat. Berhubung dengan itu di Padang diadakan Rapat Umum dengan mengambil keputusan antara lain saya diberi gelar "Datuk" dan disampaikan kepada saya dengan telegram. Untuk memperkenalkan betapa sikap dan kegiatan para anggota Volksraad berasal dari kaum perjuangan baik kiranya saya uraikan sedikit disini.

Sejak dalam Volksraad dalam tahun 1927 dibentuk sebuah fraksi *dengan tujuan mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia*, dengan sebagai anggota-anggotanya; R.A.A. Kusumo Oetojo, M.H. Thamrin, R.P. Suroso, Soangkupon, Otto Iskandar Dinata, Sukardjo Wirjopranoto, Dr. Rasjid dan Wiwoho dengan diketuai oleh M.H. Thamrin, maka Volksraad menarik perhatian dari kaum terpelajar.

Tiap-tiap masa Sidang dengan susunan anggota baru membawa mutasi anggota, karena ada anggota tidak lagi menjadi anggota Volksraad. Para anggota yang berhenti dalam masa Sidang ialah antara lain Mr. Moh. Jamin, Datok Kayo, Idi, Mr. Tadjudin Nur. Pada masa Sidang tahun 1941 Sdr. M.H. Thamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941 dan diganti oleh Sdr. R.P. Suroso sebagai Ketua Fraksi hingga tahun 1942.

Dan diganti oleh Sdr. R.P. Suroso sebagai Ketua Fraksi hingga tahun 1942. Tahun Jepang masuk waktu terakhir itu anggota Fraksi Nasional adalah R.A.A. Kusumo Utoyo, Otto Iskandardinata, Soangkupon, Dr. Rasjid, Sukardjo Wirjopranoto, Wiwoho, Mochtar Prabunegoro, Ir. Moh. Noer dan R.P. Suroso sebagai Ketua Fraksi.

Tugas anggota Fraksi Nasional tidak dibatasi. Mereka bebas untuk berbicara mengenai Politik, Ekonomi, Sosial, Soal-soal Local dan sebagainya. Pidato-pidato mereka tidak saja dihadapkan Pemerintah Belanda tetapi juga untuk penyuluhan masyarakat. Pidato-pidato

mereka itu dapat perhatian besar dari kalangan intelektual. Jika orang bilang Fraksi Nasional menjadi populer kiranya tidak keliru. Untuk mengambil keputusan penting harus atas dasar keputusan rapat Fraksi. Sekalipun Fraksi Nasional bertujuan Indonesia merdeka penuh, Fraksi itu toh memberi kebebasan kepada anggotanya untuk mengambil sikap terhadap petisi Sutardjo, yang moderat. Anggota Fraksi Nasional yang menolak petisi Sutardjo, karena berpendapat petisi itu menghambat perjuangan kemerdekaan. Buku yang berisi pidato-pidato anggota Fraksi Nasional yang diucapkan dalam bahasa Indonesia amat laku dijual. Rupanya Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai anggapan bahwa para anggota Fraksi Nasional mempunyai pengaruh cukup besar, maka karena itu pada waktu tentara Jepang telah ada di Semenanjung Malaka (sekarang Malaysia) Dr. Idenburg dan Mr. Sastromuljono diutus Gubernur Jenderal Tjarda untuk mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota Fraksi Nasional ada di Jogjakarta. Pada pertemuan dari pihak Fraksi-fraksi yang sempat hadir Sdr. R.P. Suroso, Otto Iskandardinata, Wiwoho dan Sukardjo Wirjopranoto. Pada pertemuan itu Dr. Idenburg mengajak Sdr.-sdr. tersebut untuk mengadakan suatu pertemuan bersama yang berisi Rakyat Indonesia bersama-sama Belanda menghadapi Jepang. Perundingan dari pagi hingga malam tidak dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh Dr. Idenburg, sehingga Mr. Sastromuljono menjadi jengkel dan membentak dengan kata-kata dalam bahasa Belanda terhadap anggota Fraksi; De heren moeten maar zeggen ja of nee (Tuan-Tuan bilang saja ya atau tidak). Hasilnya bubar perundingan tidak membawa hasil yang diharapkan oleh pihak Belanda. Dr. Idenburg dipandang orang sebagai diplomat yang ulung, maka karena itu anggota-anggota Fraksi bersikap hati-hati sekali, sehingga Dr. Idenburg gagal dengan misinya.

Tidak lama lagi Jepang masuk Indonesia tanpa perlawanan Belanda, tentara Belanda menyerah. Beberapa hari sebelum Jepang mendarat di Jawa, Residen Surabaya minta datang saya di kantornya. Saya datang juga dan dimintai kesediaan saya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Belanda untuk menghadapi Jepang. Saya secara diplomatik menjawab baik.

Dalam tahun 1929 dipilih menjadi Ketua Vaksentraal ke IV yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (P.V.P.N.) dan dalam tahun 1938 merangkap menjadi Ketua Vaksentraal. Buruh Partikelir, yang sebelum Perang Dunia ke II, karena tidak dapat menahan tekanan kaum majikan.

Pada waktu berunding dengan Salaris-Commisi Damme Wakil Vakcentraal PVPN dan Vakbonden-Vakbonden. Pegawai Negeri Anggota PVPN meninggalkan rapat karena usul PVPN supaya peraturan gaji Pegawai Negeri tidak dibeda-bedakan tinggi rendahnya beralasan Belanda totok, Belanda Peranakan dan Bumiputera, tetapi hanya satu jenis untuk semua, oleh Salaris Commisi ditolak.

Sementara itu PVPN berusaha mendapatkan hak-hak kedudukan sebagai Pegawai untuk supaya tidak mudah mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah atau pejabat-pejabat yang bersangkutan. Vakcentraal P.V.P.N. telah dapat bekerjasama dengan N.V.V. (Nederlands Vak Verbond) dan menjadi anggota I.V.V. (Internasional Vak Verbond) pernah diundang ke Konggres I.V.V. di London dan di Wina hanya dapat kirim utusan seorang ke Wina karena tidak mempunyai biaya cukup.

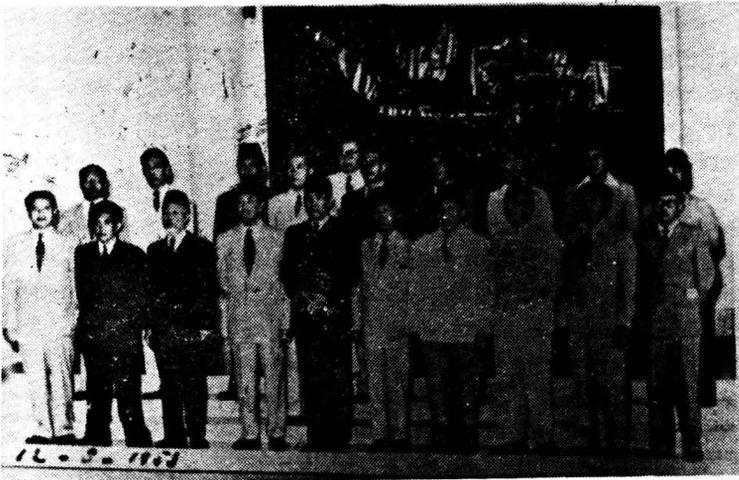
Dalam tahun 1922 s/d 1925 memimpin Surat Khabar Harian KEMAJUAN HINDIA di Surabaya. Dalam tahun 1932 berhenti menjadi Presiden S.I. Mojokerto karena Organisasi itu bubar. Lalu masuk menjadi ang-

gota P.B.I. (Persatuan Bangsa Indonesia) dipimpin Dr. Soetomo di Surabaya.

Dalam tahun 1935 terjadi fusi dari Budi Utomo, P.B.I. Sumatera Bond dan lain-lain menjadi satu Partai yaitu Partai Indonesia Raya (PARINDRA). Saya menjadi Ketua Parindra cabang Mojokerto dan duduk dalam Dewan Pimpinan Pengurus Besar bagian Politik dan Ekonomi bersama Sdr. M.H. Thamrin, R.A.A. Kusumo Oetojo dan Sukardjo Wirjopranoto.

- p. Dalam tahun 1936 s/d Jepang masuk terpilih berkali-kali menjadi anggota Regentschpraad Mojokerto.
 - q. Dalam tahun 1937 s/d Jepang masuk menjadi anggota Propinsi Jawa Timur.
 - r. Dalam tahun 1938 terpilih menjadi Loco-burgermeester Gementee Mojokerto.
9. Pada waktu Jepang masuk, masih tetap menjadi Ketua Perhimpunan Pegawai BOW, Ketua Vaksentraal PVPN dan masih tetap menjadi anggota Regentschpraad Mojokerto, Propinsi Jawa Timur dan Volksraad. Pada waktu Jepang mendarat di Jawa bulan Maret 1942, dalam Karesidenan Surabaya selama \pm 10 hari tidak ada Pemerintahan bala tentara Jepang mungkin masih sibuk untuk kepentingan perangnya sedang pejabat Pemerintah Hindia Belanda tidak berani menjalankan tugasnya mungkin dilain-lain daerah juga begitu. Heran saya bahwa dalam keadaan begitu tidak ada gangguan keamanan.
- Mungkin waktu itu seluruh penduduk berada dalam keadaan ragu-ragu dan menunggu sehingga tidak ada yang sadar dan brpikiran untuk menjalankan sesuatu.
10. Pada waktu penjajahan Jepang:
Selama penjajahan Jepang semua Partai Politik dan Organisasi lain-lain dibekukan.

- a. Oleh Empat Serangkai saya diminta tetap bekerja di daerah dan ditunjuk:
1. Sebagai Ketua Putera Daerah Malang (Jawa Timur) dan
 2. Duduk dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta.
- Yang membawa keheranan saya bahwa selama saya menjadi Ketua PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) mendapat kepercayaan dari Sutjokan Malang Jenderal Tanaka mengenai kedudukan Pegawai Pamong Pradja seluruhnya yang berarti baik buruknya mereka itu diserahkan kepada saya. Dan selama itu tidak seorangpun pegawai Pamong Praja yang mengalami sesuatu kesulitan dari pihak Jepang Khususnya Ken Pei Tai.



Bapak R.P. Soeroso bergambar bersama menteri-menteri Kabinet Ali - Wongso dengan Presiden Soekarno di Istana Merdeka

- b. Menjadi Ketua Hokokai gantinya Putera di Malang.
- c. Menjadi anggota Tjo Sangi-in di Jakarta.
- d. Dalam bulan Pebruari 1943 Bung Karno datang di Malang atas nama Empat Serangkai minta saya supaya

suka menjadi Sutjokan Kedu yang diangkat oleh Pemerintah Jepang untuk dapat menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia dapat menjalankan Pemerintahan. Permintaan itu saya terima dan selama memegang jabatan Sutjokan saya mengambil kesempatan tiap-tiap waktu mengumpulkan Lurah-Lurah Desa dari Kabupaten-Kabupaten untuk membesarkan semangat kebangsaan mereka itu dan memimpin dinas-dinas Pemerintahan Pertanian dan Pendidikan dan Pekerjaan Pamong Praja. Tiap ada pengumuman pengumpulan beras atau padi untuk bala tentara Jepang daerah saya dan daerah Sutjokan Bojonegoro Bapak Suryo dan Daerah Jakarta Sdr. Sutardjo termasuk yang amat jelek. Memang tidak kami adakan pengumpulan padi. Pada suatu tempo di Jawa Tengah diadakan Konperensi Para Sutjokan dari Jawa Tengah di Semarang dipimpin oleh Sutjokan Semarang.

Pada waktu saya ajukan soal-soal mengenai Pemerintahan Pamong Praja tetapi tidak mendapat jawaban apa-apa. Menurut keterangan seorang pegawai Jepang yang mengikuti saya pergi ke Konperensi menerangkan bahwa sesungguhnya Sutjokan-Sutjokan Jepang itu tidak mengerti apa-apa tentang Pemerintahan. Hal tersebut di atas saya laporkan kepada Bung Karno.

- e. Menjadi wakil Ketua Dokuritsu Jumbi Kio Sakai (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sedang yang menjadi Ketuanya Sdr. Dr. Radjiman.

11. Sesudah Proklamasi Republik Indonesia:

- a. Oleh Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah merangkap Residen Kedu. Pada waktu itu saya mendengar khabar bahwa Sekutu menetapkan mengenai Indonesia dejure dipegang Sekutu dan de facto diserahkan kepada Jepang. Dalam keadaan semacam itu siapa saja Bangsa Indonesia se-

bagai pemegang kekuasaan di pusat maupun di daerah harus berani mengabaikan keputusan Sekutu itu. Saya merasa gembira sekali bahwa mental para Republikein Indonesia bersikap yang sedemikian itu. Memang tidak mudah tetapi harus kita jalankan. Sebagaimana saya alami sebagai Gubernur Jawa Tengah di mana Jakarta belum kedatangan Inggris, Jawa Tengah telah didatangi sebagai wakil Sekutu seorang Perwira Angkatan Udara Inggris Wing Komando Tull yang mengurus keamanan orang-orang Belanda dll. Ia tidak saja beroperasi di Semarang tetapi meluas sampai ke Jogja, Solo dan sebagainya. Di mana ada Kamp tahanan Belanda. Untuk menghadapi Perwira tersebut harus berani dan bijaksana. Di samping itu ada seorang Belanda mengaku Kepala PMI Belanda datang menjumpai seorang pejabat Jepang untuk mengatur PMI di daerah Magelang dengan mengumpulkan orang-orang bekas Knil ± 400 orang untuk menjadi perawat. Rupanya sekalipun Jepang disertai kekuasaan de Vacto karena sudah kehilangan semangat karena kekalahan Jepang tidak berani menolak permintaan orang Belanda itu. Untunglah saya dapat mengetahui dengan segera dan 400 orang perawat bekas Knil itu saya bubarkan sedang Belandanya yang menjadi pemimpin meninggalkan Magelang dengan segera. Di samping itu perang syaraf oleh Sekutu dilancarkan di Jawa Tengah dan yang harus melayani perang syarat itu saya sebagai Gubernur siang malam senantiasa ada tilpun yang menerangkan bahwa tentara Sekutu sudah masuk di daerah sana atau di daerah sini. Selain itu macam-macam ancaman tentang kemungkinan penyerbuan Sekutu. Dapat dikatakan bahwa saya selaku Gubernur Jawa Tengah hampir tidak bisa tidur setiap malam. Untung benar bahwa rakyat Kedua membantu saya dalam menjalankan kewajiban yang sangat berat itu. Rupa-rupa kejadian tiap-

tiap hari yang sulit dan berbahaya saya bersama-sama rakyat dapat mengatasinya. Pada samping itu saya masih mundur mandir ke Jakarta untuk menyelesaikan rencana Undang-Undang Dasar dan lain-lain.

Pada suatu hari ada pegawai Staf Wing Komando Tull dari Semarang datang ke Magelang menjumpai saya untuk minta tolong supaya saya mengoreksi pidato Wing Komando Tull yang akan dibaca di muka Radio di Solo (Solo) pada esok siang. Dalam pidato itu terdapat soal-soal politik yang saya coreti, dan saya kasi tahu bahwa W.K. Tull tugasnya mengurus tawanan Belanda. Esok harinya saya sengaja mendengarkan pidato Radio W.K. Tull dan ternyata kalimat-kalimat yang saya coreti tidak dibaca olehnya. Dengan tindakan ini yaitu memenuhi anjuran saya rupanya T. Tull sebagai wakil Sekutu mengakui Republik Indonesia de Jure dan De Facto. Menjadi anggota K.N.I. Pusat sejak dibentuknya atas permintaan delegasi dari Solo dalam tengah-tengahnya saya menjalankan konsolidasi Pemerintahan Jawa Tengah dipindah dalam bulan Oktober 1945 menjadi Komisaris Tinggi untuk Solo dan Jogjakarta sebagai wakil Pemerintah RI dan berkedudukan di Solo. Jabatan baru ini tidak kurang beratnya dari pada waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Tiap-tiap malam juga hampir tidak dapat tidur karena menerima laporan orang-orang bule. Rupanya ada golongan satu sama lain saling culik menculik sampai sampai Ibu Sunan juga diculik.

Tentang jalannya Pemerintahan Daerah Kasunan, Mangkunegaran, Kasultanan dan Paku Alaman pada waktu itu KNI Daerah menjalankan Pemerintah Legislatif maupun Excecutif, hal mana bukanlah berada pada tempat yang sewajarnya. Maka karena itu di antara KNI Daerah Surakarta yang diketuai oleh Sdr. Kusumodiningrat dan Sri Sunan Ke XII dan Sri Mang-

kunegoro Ke VIII saya usahakan untuk membagi tugas yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatif. Sedangkan Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan Excektip. Kedua pihak menerima pembagian tugas itu. Tetapi sayang beberapa hari kemudian saya menerima surat dari para penasehat Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro, bahwa yang akan menjalankan Pemerintahan Excektif ialah para Patih dari kedua raja itu. Pendirian itu ditolak oleh KNI Daerah dan dari Daerah lalu membentuk Presidium untuk Excektif. Diri saya ditunjuk sebagai ketua Presidium. berhubungan dengan itu Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro tetap non Aktip dan hingga sekarang.

Di Jogyakarta usaha saya dengan mengadakan pertemuan di antara KNI Daerah yang diketuai oleh Sdr. Moh. Soleh dan Sri Sultan ke IX dan Sri Paku Alam ke XI berhasil baik, yaitu pembagian tugas dapat diatur sewajarnya yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatif sedangkan Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan Excektif dan dapat langsung sebagai kepala Daerah yang turun temurun menurut Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948. Rencana U.U. No. 22/1948 saya yang membuatnya.

Salah satu kejadian selama saya berada di Magelang sebagai Gubernur RI yang pertama yang tidak dapat saya dan rakyat Magelang dan sekitarnya melupakannya ialah insiden menaikan Bendera Merah Putih kita oleh para Pemuda dengan pimpinan Patih Judadibrata dari Kantor Gubernur. Pada waktu itu Jepang oleh Sekutu masih diberi kekuasaan De Facto dan masih melarang mengibarkan Sang Merah Putih menurut kemauan rakyat Indonesia. Rakyat sebelumnya sudah berkumpul begitu banyak di Gunung Tidar karena telah mendengar akan terjadinya pengibaran Bendera kita itu bertambah detik bertambah banyak rakyat

yang datang, tetapi Jepang masih menghalang-halangi maksud itu sehingga keadaan menjadi panas sampai siang hari rakyat berduyun-duyun dari sekitar kota Jogja karena terjadi tembakan dari pihak Jepang hingga dua pemuda kita jatuh menjadi korban. Rakyat menjadi marah sekali dan akan menyerang Jepang tetapi Jepang segera masuk dalam markas besarnya. Saya menerima laporan itu segera saya datang dan memberi nasehat kepada rakyat supaya tenang dan tidak menyerbu markas besar Ken Pe Tai yang siap dengan senjata lengkap yang dapat membuat korban besar di kalangan rakyat dan saya terangkan bahwa saya terus pergi ke Jenderal Tanaka untuk menghukum Ken Pe Tai yang bertindak kejam itu dan Jenderal Tanaka waktu itu sanggup memenuhi permintaan saya.

Di tengah-tengah kesibukan kerja menerima khabar dari Gubernur Jawa Tengah bahwa seorang Jenderal Inggris akan datang ke Solo untuk melihat keadaan tahanan orang Belanda. Tetapi yang datang bukan seorang Jenderal tetapi Wing Komando Tull yang telah saya kenal waktu saya menjabat Gubernur Jawa Tengah. Oleh karena saya mendengar bahwa Sekutu akan mengirim tentara pendudukan ke Solo saya tanya kepadanya apakah maksud itu akan dilaksanakan, sesungguhnya hal itu tidak perlu (saya katakan). Wing Komando Tull menerangkan hal itu tergantung kepada keadaan tahanan Belanda. Ternyata tidak ada tentara pendudukan di Solo berbeda dengan janji W.K. Tull waktu saya menjabat Gubernur Jawa Tengah yang berjanji tidak akan kirim tentara pendudukan ke Magelang. Tetapi nyatanya setelah saya pindah ke Solo ia kirim juga sehingga menimbulkan pertempuran antara tentara Sekutu dengan tentara Nasional kita. Pada waktu sebelum pertengahan tahun 1946 karena saya merasa amat capik tenaga dan fikiran, maka saya minta

Presiden Sukarno supaya saya dipindah ke luar daerah Solo dan dikabulkan dipindahkan menjadi Gubernur Jawa Timur sedang Gubernur Jawa Timur Sdr. Surjo dipindah ke Solo tetapi beliau di Solo tidak dapat menjalankan pemerintahan karena Komandan TNI Jenderal Sutarto mengadakan Pemerintahan Militer.

Sdr. Surjo lalu kembali ke Jawa Timur menjumpai saya dan menerangkan apa yang telah terjadi di Solo. Saya jawab saya tidak berkeberatan kembali ke Solo dan kesemuanya akan saya laporkan kepada Presiden. Lalu saya kembali ke Solo dan ada di Solo mendengar bahwa semalamnya Sdr. St. Syahrir Perdana Menteri diculik orang. Atas seruan Presiden Sdr. Syahrir dilepaskan oleh penculik. Jabatan Komisaris tinggi dihapus dan saya ditempatkan di Departemen sebagai Gubernur diperbantukan. Di Solo jabatan Komisaris Tinggi diganti jabatan Residen. Pada Departemen Dalam Negeri saya disertai memimpin urusan Minoritas dan menjadi Kepala Bagian Urusan Minoritas Pemerintah Daerah pada permulaan tahun 1948. Diangkat menjadi Panitia gaji Pegawai Negeri juga merangkap kepala urusan pegawai. Diangkat menjadi penasehat St. Syahrir dalam perundingan antara Wk. Republik Indonesia dan Wk. Pemerintahan Belanda Tn. Schmer Horn. Diminta oleh Wk. Presiden Bung Hatta untuk membuat Rencana Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Propinsi, Kabupaten dan Kota. Rencana Undang-Undang itu diterima oleh B.P. KNI Pusat menjadi U.U. No. 22/1948 saya akui bahwa U.U. itu belum sempurna tetapi telah dapat menciptakan sila-silanya tata kerja Pemerintahan Daerah yang pada waktu itu masih dalam keadaan dipengaruhi oleh pertikaian antara R.I. dan Sekutu (Belanda).

Sekira tanggal 26 Juli 1947 saya diminta oleh Menteri Dalam Negeri pergi ke kota Malang (Jawa Timur) un-

tuk membuat rukun kembali Panglima TNI Sudjaki dengan Residen Malang Mr. Sunarko. Saya datang dengan Kereta Api dari Jogja ke Blitar sekira pukul 7 malam dan bermalam di Blitar, lalu pada pagi harinya tanggal 27 Juli 1947 jam 5 pagi saya berangkat ke Malang dengan Kereta Api. Saya kira saya sampai di kota Malang paling lambat jam 9 pagi, tetapi ternyata pada perjalanan ke Malang Kereta Api sering berhenti karena terlihat pesawat pemburu Belanda mengintai, sehingga baru jam 4 siang dapat mendekati Stasiun Kota Lama. Tetapi sekonyong-konyong Kereta Api berada di tengah sawah dan tidak jauh dari Stasiun lalu berhenti. Masinis dan pembantunya turun lari, para penumpang melihatnya dan juga melihat pesawat pemburu Belanda berputar-putar di atas kota maka semua penumpang ikut turun menyembunyikan diri di sedapat-dapatnya di tengah sawah. Saya sendiri dan beberapa orang penumpang tidak ikut turun dari kereta api. Dan ternyata dua pesawat pemburu Belanda menyerang kita tetapi yang ditembaki bukan kereta penumpang tetapi lapangan di kanan kiri Kereta Api. Sesudah serangan itu saya dan beberapa orang yang tinggal dalam Kereta penumpang cepat-cepat ke luar dan menuju ke Stasiun. Betapa nasib penumpang yang ada di tengah sawah saya tidak tahu.

Dengan jalan kaki sekira jam 5 lebih (sore) saya menuju masuk kota untuk datang di rumah Residen. Sementara itu dentuman senjata dari pihak Belanda yang akan menyerbu kota Malang dari jurusan Utara (Singosari) bertambah detik bertambah dekat. Sekira jam 7 malam saya datang di rumah Residen, tetapi rumahnya kelihatan sudah terbakar. Residen Mr. Sunarko dikeluarkan pergi ke luar kota. Lalu saya mencari Panglima Sudjaki, tetapi mendapat khabar juga sudah ke luar kota. Sementara itu tentara Belanda telah men-

dekati kota. Bersama-sama orang banyak yang akan mengungsi ke arah Selatan saya ikut menuju ke Selatan tetapi lalu masuk di rumah Klinik Dr. Surodjo. Saya tinggal disitu sampai pagi hari. Pada malam harinya saya melihat api asal dari bumi hangus yang membuat rasa prihatin saya. Pada pagi harinya sekira pukul 9 saya terpaksa dengan berjalan kaki meninggalkan kota Malang menuju ke Kepanjen. Lalu saya terus pada sore harinya naik Kereta Api dari Kepanjen ke Blitar. Di Kereta Api saya dapat tempat di Kereta Barang duduk bersama-sama pengungsi-pengungsi yang dulunya dari Surabaya lalu meninggalkan Malang. Mereka itu masih bisa bersenda gurau dengan tertawa terbahak-bahak. Antara lain berkata;

Nah, sekarang kita kembali lagi ke Surabaya melalui Blitar, kata-kata itu di dengar oleh lain-lainnya dengan tertawa ramai sekali./

Jadi rupanya mereka itu tidak berputus asa. Saya datang di Blitar pada malam hari dan esok harinya saya terus kembali ke Jogjakarta dan melaporkan apa yang telah saya alami dan hasilnya.

Selanjutnya saya merencanakan Undang-Undang Pembentukan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Demikian juga tentang hak medebewind dan otonomi Pemerintahan Daerah. Semuanya setelah diterima B.P. KNIP dan menjadi Undang-Undang.

Selama clash ke-II saya ikut menjalankan pemerintahan gerilya dan diangkat menjadi anggota Pemerintahan Darurat RRI di Jawa untuk urusan dalam negeri bersama-sama Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri P.M.N. Kasimo dan Menteri Agama K.H. Mashur untuk memimpin pemerintahan gerilya.

Hal-hal yang penting yang saya jalankan sebagai Pimpinan Urusan Dalam Negeri antara lain mengangkat Sdr. Milono, pensiun Residen Pati yang juga ikut gerilya sebagai Residen Pati lagi berhubungan pada waktu itu Residen Pati kembali masuk ke kota ikut Belanda.

Karena Gubernur Jawa Barat Sdr. Sewaka ditangkap Belanda lalu Sdr. Ir. Okar saya angkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Demikian juga serta Gubernur Jawa Timur Dr. Murdjani juga ditangkap Belanda, saya angkat menjadi gantinya sebagai Gubernur Jawa Timur Sdr. Samadikun.

Untuk bahan makan TNI, Tentara Pelajar dan sebagainya saya adakan rapat-rapat dengan para Lurah di mana kami bertempat sementara untuk supaya para petani suka menyerahkan 10% dari hasil tanaman padinya dan mereka sama memenuhi.

Kami bergerilya dari tanggal 18 Desember 1948 hingga akhir Juni 1949. Pada akhirnya clash ke-II dan lalu masuk kota Yogyakarta.

Daerah gerilya yang penting yaitu dari Tawangmangu ke timur sampai Ngrambe, Madiun, tidak bisa terus ke timur karena di gNgrambe sudah dihadang tentara Belanda.

Hubungan ke daerah-daerah ke Jawa Timur dan Jawa Barat dilaksanakan dengan kurier Tentara.

Pada waktu perundingan antara Mr. Roem dan van Rooyen di New York saya menerima dari Jakarta salinan rapat pemimpin-pemimpin perkebunan Belanda Jawa Barat dan Sumatera Selatan bersama-sama Wakil Jenderal Spoor.

Di rapat itu sebagai Wakil Perkebunan Belanda itu sama mengeluh karena Tentara Belanda yang menjaga kebun-kebun sama ditarik, karena itu mereka merasa sangat kuatir.

Wakil Jenderal Spoor menjawab bahwa tindakan menarik tentara itu perlu karena waktu tentara Belanda masuk ke pedalaman tidak kelihatan tentara R.I. tetapi tahu-tahu semua tentara R.I. muncul dimana-mana.

Pada waktu saya membaca itu merasa sayang sekali bahwa Mr. Room tidak mengetahui bahwa kedudukan tentara kita kuat. Jika tahu tentunya bersikap lebih keras menghadapi van Rooyen dan dapat menghasilkan perundingan yang lebih menguntungkan bagi Republik kita.

Dalam akhir bulan Juni 1949 sehabis clash ke-II masuk kota Yogyakarta, kembali menjabat Gubernur dpb. Menteri Dalam Negeri untuk Urusan Pemerintahan Daerah dan menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.

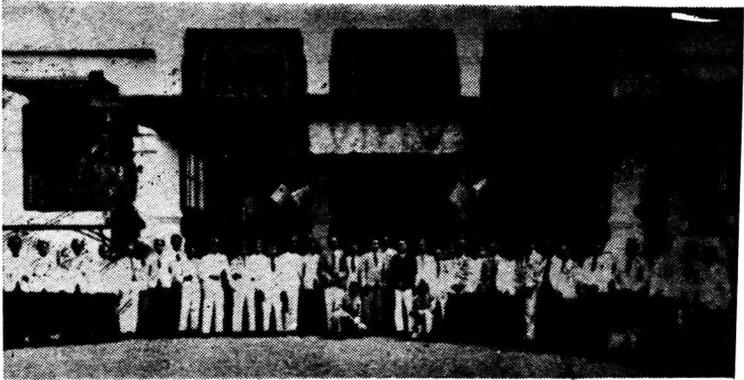
Di dalam kota Yogyakarta tinggal mondok di rumah saudara saya dan saya sekeluarga makan dari dapur umum. Rumah saya di Solo, waktu Belanda masuk kota, terus rumah saya dirampok dan keluarga saya diusir, ke luar, hingga hidupnya amat sengsara selama saya gerilya. Oleh Pemerintah disertai membuat rencana U.U. Pokok Pemerintahan Daerah yang diterima baik oleh B.P. KNIP dan menjadi U.U. Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948 sebagai tersebut di atas. Selanjutnya seperti tersebut di atas merencanakan U.U. Pembentukan Propinsi-Propinsi, Kota-Kota dan Kabupaten-Kabupaten seluruh Jawa dan diterima oleh B.P. KNIP menjadi Undang-Undang.

Tetapi saya belum dapat bekerja karena sakit bronchitis amat keras sehingga dalam perjalanan pulang dari gerilya saya memakai tandu. Syukur alhamdulillah dalam tempo ± 1 bulan dapat sembuh kembali dan bekerja. Waktu di rumah sakit Presiden dan Wakil Presiden sama-sama datang melihat keadaan saya. Sekalipun saya masih sakit dalam R.S. dapat merasa-

kan kegembiraan hati saya bahwa pada waktu itu delegasi Indonesia berangkat ke Negei Belanda untuk berunding dengan Belanda (Rondetafel Conferensi) untuk penyerahan Kemerdekaan Indonesia pada Republik kita.

Dalam bulan Desember 1949 Partai Indonesia Raya (PARINDRA) dihidupkan kembali dan saya dipilih menjadi Ketua Partai.

Sekalipun hidup kembalinya PARINDRA terlambat masih dapat sambutan baik dari daerah-daerah di mana kaum Parindristen memang menunggu-nunggu hidup kembalinya PARINDRA. Mereka itu baik yang berada di Jawa maupun di luar Jawa segera mendirikan CABANG PARINDRA.



Pengurus besar dan utusan-utusan

Anggota PARINDRA pada umumnya orang-orang terpelajar, oleh karena PARINDRA mengutamakan orang-orang yang cakap, jujur dan suka membela kepentingan rakyat.

PARINDRA sengaja tidak mengadakan massa oleh karena bertujuan pada Pemilihan Umum untuk anggota-anggota Lembaga Perwakilan Rakyat diadakan sistim

memilih orang, calon dari Partai-partai Politik yang ikut Pemilihan Umum, bukannya memilih gambar partai seperti misalnya pada pemilihan umum di Inggris.

Pada Pemilihan Umum tahun 1955 ternyata masih dijalankan sistem lama yaitu memilih gambar. Dengan begitu PARINDRA kalah dari pemilihan, karena tidak mempunyai massa anggota.

Dalam tahun 1954 mendirikan Yayasan untuk kemajuan kesehatan anak-anak, terutama yang menderita sakit paru-paru. Saya membangun gedung-gedung untuk rumah sakit tersebut di atas tanah seluas 44 HA di desa Cilandak Selatan dari tahun 1954 hingga tahun 1958. Selesai bangunan-bangunan itu saya lalu berusaha mendapatkan kredit untuk membeli alat-alat Rumah Sakit yang diperlukan, tetapi tidak berhasil. Lalu saya serahkan kepada Departemen Kesehatan dipakai untuk Rumah Sakit Pemerintah. Yayasan yang saya Ketuai mula-mula bernama "Ibu Sukarno" lalu pada lahirnya Orde Baru diganti nama "YAYASAN FATMAWATI" dan Ketua tetap saya.

Dalam tahun 1967 Departemen Kesehatan mengajak Yayasan Fatmawati bekerja sama untuk pimpinan R.S. Fatmawati sesuai dengan prinsip Pemerintah yaitu partisipasi rakyat sebesar mungkin untuk usaha kesehatan. Untuk kerja sama itu lalu diadakan "PIAGAM KERJA SAMA" antara Departemen Kesehatan dan Yayasan. Pengawasan sehari-hari diserahkan kepada Dewan Direksi terdiri dari 2 orang wakil Departemen Kesehatan dan 2 orang wakil Yayasan. Diusahakan Rumah Sakit Fatmawati dapat dikeheer seluruhnya oleh Yayasan.

Dalam bulan Januari 1950 saya diminta Menteri Dalam Negeri supaya pergi ke Solo bersama-sama Sek-

jen. Departemen Dalam Negeri untuk menjumpai Sri Sunan Pakubuwono ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII untuk menjelaskan maksud Pemerintah membentuk daerah istimewa Surakarta yang terdiri dari Kasunanan dan Mangkunegaran, seperti halnya Yogyakarta menurut U.U. No. 22/1948, Sri Sunan dan Mangkunegoro menjadi Kepala Daerah ke I dan ke II.

Fihak Sri Sunan tidak berkeberatan tetapi fihak Sri Mangkunegoro minta tetap bisa masing-masing berdiri sendiri. Sesudahnya berunding saya terangkan dapat juga tetap berpisah tetapi dasarnya pemerintahan daerah menurut U.U. Pemerintahan Daerah No. 22/1948 harus. Tetapi Penasehat dari Sunan dan Mangkunegoro minta berapa kekuasaan self bestuur dulu masih dapat diteruskan misalnya pengangkatan Wedana. Saya terangkan bahwa tugas-tugas Kepala Daerah telah ditetapkan dalam U.U. No. 22/1948 tersebut di atas. Apa yang diminta para Penasehat itu di luar ketentuan U.U. tersebut. Kedua Penasehat yang bersangkutan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu pembicaraan tidak kami lanjutkan dan kami kembali pulang dan melaporkan hasil pembicaraan pada Menteri Dalam Negeri.

Karena hasil pembicaraan kami dengan kedua Raja tersebut maksud membentuk Propinsi Daerah Istimewa Surakarta tidak dilanjutkan.

Dalam tahun 1950 menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lalu non aktif karena diangkat menjadi Menteri.

Dalam bulan September 1950 s/d Maret 1956 berturut-turut menjabat Menteri dari Negara Kesatuan R.I. yaitu:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Moh. Nasir,
2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman,

3. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo,
 4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo,
 5. Menteri Sosial dari Kabinet Alisastroamidjojo,
 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harahap.
- 6.a Merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim selama 1 tahun.

Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuhan dari Menteri Perburuhan Wilopo pemogokan buruh Perkebunan Belanda yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu belum dapat diselesaikan.

Dalam tempo \pm 7 hari pemogokan itu dapat saya selesaikan dengan baik, (mendapat kenaikan upah & tambahan jatah pangan) para karyawan terus bekerja lagi.

Untuk kepentingan penyelesaian secara damai pada masa selanjutnya saya bentuk sebuah Panitia Penyelesaian Perselisihan Pekerja (P-4) di Pusat dan di daerah-daerah dan hingga sekarang berfungsi dengan memuaskan.

Pada waktu saya memegang Kementerian Sosial untuk melancarkan datangnya orang-orang transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa maka saya mengambil percobaan untuk membuka hutan secara mekanis bagi para transmigran. Sebagai pangkal kerja saya ambil satu tempat di Metro untuk tempat Pimpinan dari Bagian Dinas Transmigrasi. Tempat itu karena sekitarnya terdapat banyak binatang gajah, maka tempat itu saya beri nama Kota Gajah yang sekarang menjadi ramai. Di tempat itu saya tempatkan sebuah bengkel service dan reparasi traktor-traktor yang dipakai untuk membuka hutan. Rupanya usaha saya itu diketahui oleh rakyat di Jawa yang memang ingin pindah ke luar Jawa. Maka karena itu transmigran spontan jumlahnya

banyak sekali dengan biaya sendiri. Dengan begitu biaya mekanisasi pembukaan hutan dapat respan berupa tidak mengeluarkan biaya transmigran dari Jawa ke luar Jawa.

Dalam bulan Maret 1956 saya dipilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia.

Badan ini diganti namanya menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) pada tahun 1960. Dan saya tetap menjadi Ketua hingga sekarang.



Bapak R.P. Soeroso didampingi Bapak R. Maryun Sudirohadiprodjo sedang mengamati Souvenir bersama Bapak Presiden Soeharto di Istana Merdeka

Dalam bulan September 1959 dipilih menjadi Ketua Umum dari Dewan Koperasi Indonesia, hingga dibubarkan oleh Menteri Koperasi Ahmadi pada bulan Maret 1961.

Menteri Ahmadi mendirikan Centraal Kooperasi dimana KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia) dan diketuai sendiri.

Karena koperasi ditujukan sebagai alat politik maka koperasi menjadi mundur sekali, sehingga pada lahirnya ORDE BARU gerakan koperasi telah menjadi lumpuh tidak ada daya apa-apa.

Dalam bulan Agustus 1958 diangkat oleh Presiden R.I. menjadi Anggota Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia hingga sekarang dan seterusnya saya ditunjuk juga menjadi Wakil Ketua.

Dalam tahun 1961 oleh Presiden R.I. diangkat menjadi Ketua merangkap Anggota dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi daerah dengan tugas menyusun Rencana U.U. Pokok tentang Pemerintahan Daerah, meninjau kembali perimbangan keuangan dan menyusun rancangan Pemerintahan Desa yang berhak otonomi. Tugas selesai dalam tahun 1962.

Dalam bulan Maret 1966 s/d Maret 1973 diangkat menjadi Anggota MPRS sebagai Wakil Gerakan Koperasi.

Dalam bulan Mei 1966 dipilih menjadi Ketua I Gerakan Koperasi Indonesia.

Dalam bulan Juli 1973 dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.

Telah bertahun-tahun saya menjabat Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam Kelurahan Menteng (Jakarta Raya).

Jabatan-jabatan ini adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang terendah yang menarik bagi saya karena saya dapat berbuat amal bakti karena Allah.

Menerima tanda penghargaan (Bintang/Lencana)
dari Pemerintah R.I. :

1. BINTANG MAHA PUTERA ADHI PRADANA.
2. BINTANG GERILYA.
3. BINTANG PERINTIS KEMERDEKAAN R.I.
4. LENCANA SATYA KARYA KL. I.
5. LENCANA KEMERDEKAAN.
6. LENCANA PEMBANGUNAN.

Jakarta, 12 April 1975.

(R.P. SUROSO).

LAMPIRAN II

RIWAYAT HIDUP RADEN PANDJI SOEROSO

1. Nama : **Raden Pandji Soeroso**
2. Lahir/Tempat : **Tanggal 3 Nopember 1895 di Porong Karesidenan Surabaya Jawa Timur.**
3. Bangsa : **Indonesia.**
4. Agama : **Islam.**
5. Pendidikan : **Sekolah Rakyat Kl. I dan Kweek-school 6 tahun di Probolinggo (Jawa Timur).**
6. Kawin : **Kawin**
7. Anak : **8 orang 4 laki-laki dan 4 wanita.**
8. Jabatan/Functie dalam masyarakat :
 - a. Dalam tahun 1908 menjadi anggota Budi Oetomo, masih menjadi Kweekschool. Waktu itu Budi Oetomo masih belum mempunyai tujuan politik.
 - b. Dalam tahun 1912 menjadi Anggota Serikat Islam (SI).
 - c. Duduk di Kl. 6 Kweekschool dan ujian penghabisan kurang 1 bulan, dikeluarkan dari Sekolah tersebut, karena memimpin pemogokan murid-murid seluruh sekolah yang tidak puas dengan beleid Direktur Sekolah tersebut. (Tahun 1912).
 - d. Ke Surabaya belajar Journalistik.
 - e. Dalam tahun 1915 menjadi Presiden S.I. di Probolinggo.
 - f. Dalam tahun 1916 dipilih menjadi Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai B.O.W. seluruh Indonesia.
 - g. Dalam tahun 1918 menjadi Commisaris Central Bestuur S.I.

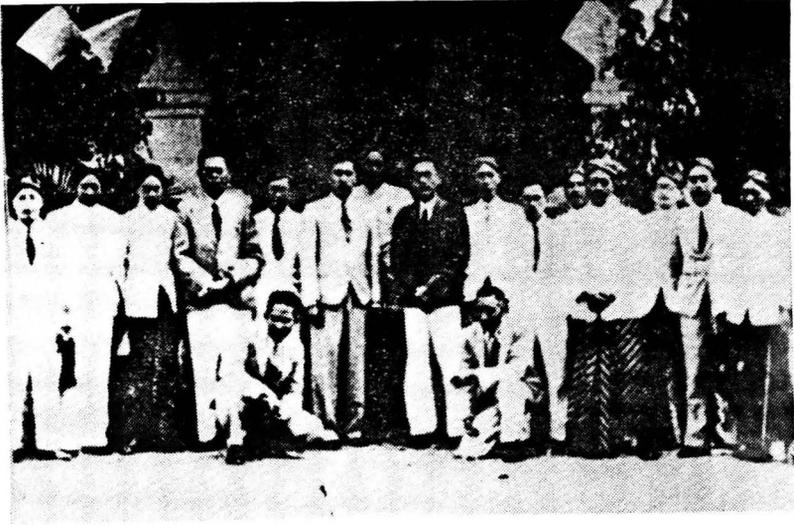
- h. Dalam tahun 1919 pindah ke Mojokerto (Jawa Timur), tetap menjadi Ketua P.B., P.I.P. B.O.W., menjadi Presiden S.I. Kabupaten Mojokerto dan tetap menjabat Comisaris C.B.S.I.
- i. Dalam tahun 1921 dipilih menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Kabupaten Mojokerto. Memimpin pemogokan pegawai pabrik gula dan menghasilkan perbaikan nasib mereka itu.
- j. Dalam tahun 1922 dipilih menjadi Ketua Vakcentraal ke III yaitu Persatuan Vakbonden Hindia. Dalam bulan Mei 1923 V.S.T.P. (Perserikatan Pegawai Sepur dan Tram mengadakan pemogokan dengan alasan karena Sdr. Samaun Ketua VSTP ditangkap. Sebagai Ketua Vakcentraal P.V.H. saya berusaha memenangkan pemogokan itu, tetapi tidak berhasil, karena saya dilarang ke luar kota yang saya tempati, sehingga saya tidak dapat menghubungi lain-lain Perserikatan pegawai/buruh dan Pemerintah Belanda berhubungan dengan alasan VSTP mengadakan pemogokan itu lalu bertindak atas dasar Politis. Menambah artikel 161 bis dan ter dari strafwetboek untuk dapat menangkapi pengurus VSTP dan oleh karena itu pemogokan hancur
- k. Dalam tahun 1929 dipilih menjadi Ketua Vakcentraal ke IV yaitu Persatuan Vakbonden akcentr. Buruh Partikelir, yang bubar sebelum perang Dunia ke II karena tidak dapat menahan tekanan-tekanan kaum majikan.
- l. Dalam tahun 1922 - 1924 memimpin surat kabar Harian KEMAJUAN HINDIA di Surabaya.
- m. Berhenti menjadi Presiden SI Mojokerto, karena organisasi itu bubar. Lalu dipilih ketua Cabang PARINDRA Mojokerto dan duduk dalam D.P. PARINDRA bagian Politik.
- n. Dalam tahun 1917 terpilih menjadi Anggota Gemeenteraad Probolinggo.

- o. Dalam tahun 1924 diangkat menjadi Anggota Volksraad di Jakarta dan dari tahun 1927 sampai dengan Jepang masuk terpilih terus menerus menjadi anggota Volksraad.
 - p. Daam tahun 1936 sampai dengan Jepang masuk terpilih berkali-kali menjadi Anggota Regentshappraad Mojokerto.
 - q. Dalam tahun 1937 sampai dengan Jepang masuk menjadi anggota Propinsi Jawa Timur.
 - r. Dalam tahun 1938 terpilih menjadi anggota Locoburgermeester Gemeente Mojokerto.
9. Pada waktu Jepang masuk masih tetap menjadi Ketua Perhimpunan Pegawai BOW Ketua Vakcentraal P.V.P.N. dan tetap menjadi Anggota Regentchappraad Mojokerto, Propinsi Jawa Timur dan Volksraad. Dalam Volksraad menjadi anggota fraksi Nasional yang bertujuan: Los van Nederland, dan sesudah M.H. Thamrin meninggal mengganti beliau menjadi Ketua Fraksi tersebut hingga Jepang masuk.
10. **Pada waktu penjajahan Jepang:**
 Selama penjajahan Jepang semua partai politik dan organisasi lain-lain dibekukan.
- a. Oleh Empat Serangkai saya diminta tetap bekerja di daerah dan ditunjuk sebagai Ketua PUTERA daerah Malang (Jawa Timur) dan duduk dalam pusat Barisan Pelopor di Jakarta.
 - b. Menjadi Ketua Hokokai gantinya Putera di Malang.
 - c. Menjadi Anggota Tjo Sangi-in di Jakarta.
 - d. Dalam bulan Pebruari 1945 dengan persetujuan Empat Serangkai oleh Pemerintah Jepang diangkat menjadi Sotjokan Kedu di Magelang.
 - e. Menjadi Wakil Ketua Dokoritsu Zumbi tai (Panitia Persiapan Kemerdekaan) sedang yang menjadi Ketua Dr. Radiiman.

11. Sesudah Proklamasi Republik Indonesia:

- a. Oleh Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah merangkap Residen Kedu.
 - b. Menjadi Anggota KNI Pusat sejak dibentuknya.
 - c. Dalam bulan Oktober 1945 dipindah menjadi Komisararis Tinggi untuk Solo dan Yogyakarta, sebagai Wakil Pemerintah RI dan berkedudukan di Solo.
 - d. Dalam tahun 1946 Jabatan Komisararis Tinggi dihapuskan, lalu ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri untuk Bagian Urusan Minoritet dan menjadi Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah pada permulaan tahun 1948.
 - e. Menjadi Ketua Panitia Gaji Pegawai Negeri.
 - f. Tetap menjadi Kepala Bagian Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri merangkap menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.
12. a. Selama Clash ke II diangkat menjadi Anggota Pemerintahan Darurat RI di Jawa untuk URUSAN DALAM NEGERI bersama-sama Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprodjo, Menteri PMR Kasimo dan Menteri Agama K.H. Masjkur untuk memimpin Pemerintahan gerilya.
- b. Dalam akhir bulan Juni 1949 sehabis Clash II masuk kota Yogyakarta, kembali menjabat Gubernur dpb. Menteri Dalam Negeri untuk urusan Pemerintahan Daerah dan menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai.
 - c. Oleh Pemerintah disertai membuat rencana UU Pokok Pemerintahan Daerah yang diterima baik oleh B.P., KNIP. menjadi Undang-Undang.
13. Dalam bulan Desember 1949 menjadi Ketua Dewan Partai PARINDRA hingga PARINDRA membubarkan diri tahun 1959.

14. Dalam tahun 1950 menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lalu non aktif karena diangkat menjadi Menteri. Dalam bulan September 1950 sampai dengan bulan Maret 1956 berturut-turut menjabat:
 - Menteri Perburuhan dari Kabinet Moh. Natsir
 - Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Sukiman
 - Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo.
 - Menteri Sosial Pegawai dari Kabinet Wilopo.
 - Menteri Sosial Pegawai dari Kabinet Ali Sastroamidjojo S.H.
 - Menteri Pekerjaan Umum dari Kabinet Burhanuddin Harahap.
 - Menteri Dalam Negeri ad interim.
15. Dalam bulan Maret 1956 dipilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia. Badan ini kemudian diganti menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) seluruh Indonesia (dan tetap diketuai beliau hingga tahun 1981).
16. Dalam Bulan September 1959 dipilih menjadi Ketua I (UMUM) dari Dewan Koperasi Indonesia (DKI) hingga dibubarkan oleh Menteri Koperasi Achmadi.
17. Dalam bulan Agustus 1958 diangkat oleh Presiden RI menjadi Anggota Badan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia.
18. Dalam taun 1961 diangkat oleh Presiden menjadi Ketua merangkap anggota dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan tugas menyusun rancangan UU Pokok tentang Pemerintahan Daerah, meninjau kembali perimbangan keuangan dan menyusun rancangan pemerintahan desa yang berhak otonomi. Tugas selesai dalam tahun 1962.
19. Dalam bulan Maret 1966 diangkat menjadi Anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sebagai wakil dari gerakan Koperasi.



Bapak R.P. Soeroso bersama-sama Pengurus PERINDRA dan utusan Daerah

20. Dalam bulan Mei 1966 dipilih menjadi Ketua I dari Gerkopin.

Sedikit untuk perhatian.

- I. Semasa Pemerintahan peralihan Jepang ke Republik Indonesia, dan waktu saya mulai menjabat Gubernur Jawa Tengah merangkap Residen Kedu, berhasil membubarkan cabang MPI Belanda yang secara diam-diam dengan penguasa Jepang didirikannya dalam kota Magelang dengan \pm 400 orang juru rawat bekas serdadu Knil, yang pada hahekatnya adalah kamuplase dari persiapan kekuatan bersenjata untuk menyerang Republik.
- II. Pada masa menjabat Komisaris Tinggi Surakarta dan Yogyakarta telah berusaha menertibkan pemerintahan daerah Surakarta dan Yogyakarta. Pada waktu itu KNI Daerah menjalankan pemerintahan Legislatip maupun Executip, hal mana bukanlah berada pada tempat yang sewajarnya.

Maka karena itu di antara KNI daerah Sukarta, yang diketuai oleh Sdr. Kusumodiningrat dan Sri Sunan ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII saya usahakan untuk membagi tugas yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatip.

Sedang Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan Executip, kedua pihak menerima pembagian tugas itu. Tetapi sayang beberapa hari kemudian saya menerima surat dari para penasehat Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro, bahwa yang akan menjalankan Pemerintahan executip ialah para patih dari kedua raja itu. Pendirian ini ditolak oleh KNI Daerah dan KNI Daerah lalu membentuk sebuah Presidium untuk executip. Berhubung dengan itu Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro tetap aktif dan hingga sekarang.

Di Yogyakarta usaha saya dengan mengadakan pertemuan diantara KNI Daerah yang diketuai oleh Sdr, Moh. Saleh dan Sri Sultan Ke IX dan Sri Paku Alam Ke XI berhasil baik, yaitu pembagian tugas dapat diatur menurut sewajarnya yaitu KNI Daerah menjalankan Legislatip sedang Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan executip dan dapat langsung sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang turun temurun menurut UU-Pokok Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1948.

III. Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuhan dalam bulan September 1950 SARBUPRI sedang mengadakan pemogokan menuntut kenaikan upah dan perbaikan jatah pangan. Diikuti oleh 700.000 orang buruh perkebunan. Dalam tempo ± 1 Minggu pemogokan itu dapat saya selesaikan dengan baik, buruh mendapat kenaikan upah dan perbaikan jatah pangan.

Untuk kepentingan penyelesaian secara damai pada masa selanjutnya saya bentuk Panitia Penyelesaian Perseelisihan Pekerja (P-4) di Pusat dan di daerah-daerah yang hingga sekarang masih berfungsi.



IV. Menerima bintang-bitang dari Pemerintah antara lain:

1. Bintang Mahaputra Adhi Pradana Kl. II.
2. Bintang Gerilya
3. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Satya Lencana Karya Satya Kl. I.
5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I.
6. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II.
7. Satya Lencana Pembangunan.

Pada tahun 1979 oleh Bapak Presiden Suharto dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Diketahui:

R.P. Soengeng

**CATATAN-CATATAN SINGKAT RIWAHAT HIDUP
RADEN PANJI SOEROSO**

1. **N a m a** : **Raden Panji Soeroso - Tjondronegoro**
2. **L a h i r** : **Tanggal 3 November 1895 di Sidoardjo-Porong Jawa Timur.**
3. **Bangsa** : **Indonesia**
4. **Agama** : **Islam.**
5. **Pendidikan** : **Sekolah Dasar, Sekolah Dasar No. 1 (eerste Volkschool) dan Kweekschool 6 tahun di Probolinggi (Jawa Timur).**
6. **K a w i n** : **Kawin dengan R.A. Soekarsinah.**
7. **A n a k** : **8 orang, 4 laki-laki dan 4 wanita.**
8. **Jabatan dan kegiatan dalam masyarakat:**
 - a. *Dalam tahun 1908 menjadi anggauta Budi Utomo, masih menjadi murid Kweekschool. Waktu itu Budi Utomo masih belum mempunyai tujuan politik.*
 - b. *Dalam tahun 1912 menjadi anggauta Serikat Islam (SI)*
 - c. *Dalam tahun 1912 duduk di kelas 6 Kweekschool dan ujian penghabisan kurang satu bulan, dikeluarkan dari sekolah tersebut karena memimpin pemogokan murid-murid seluruh sekolahan yang tidak puas dengan beleid Direktur Sekolah tersebut, seorang Belanda yang menghina Bangsa Indonesia.*
 - d. *Ke Surabaya belajar Journalistik.*
 - e. *Dalam tahun 1916 menjadi Presiden S.I. di Probolinggo dan Kraksaan. Pada waktu itu saya berusia kurang lebih 21 tahun. Sekalipun saya semuda itu toch dapat juga memimpin rakyat di daerah itu yang penduduknya termasuk suku madura. Hal itu karena saya bersama anggauta Pengurus S.I. menitik beratkan pada gerakan Nasional dan perbaikan ekonomi rakyat. Pengu-*

rus S.I. dalam kota Probolinggi mendirikan dua buah toko untuk kebutuhan rakyat sehari-hari dengan harga murah. Tiap hari penuh pembeli, tetapi tidak lama sejak itu toko-toko Cina menurunkan harga-harga barang tokonya lebih rendah lagi dari harga toko S.I., dan karenanya pembeli berjubel-jubel ke toko-toko Cina. Toko S.I. tidak dapat bertahan, terpaksa ditutup. Lalu toko-toko Cina menaikkan kembali harga-harga barang tokonya. Ternyata, bahwa untuk biaya saingan, orang-orang Cina mempunyai dana cukup kuat, yang dilangsungkan hingga sekarang, sehingga golongan Cina dapat menguasai seluruh perdagangan kita. *Perang Dunia I, Politis dan Ekonomis dapat dikatakan tidak mempengaruhi Negara kita, mungkin karena Negeri Belanda pada waktu itu tetap netral.* Diangkat menjadi Mantri Boekhouder Kantor Irigasi di Probolinggo.

- f. Dalam tahun 1916 dipilih menjadi *Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai B.O.W. seluruh Indonesia.* Pada tahun 1917 *dipilih menjadi anggauta Gemeenteraad Probolinggi.* Dalam kedudukan itu saya membela nasib pemilik warung-warung di pinggir jalan supaya tidak dibongkar, dan berhasil. Di dalam daerah Gemeente yang hanya mengenal penduduk bangsa Belanda, kepentingan pribumi tidak diperhatikan, malahan mereka menjadi terjepit. Saya sebagai anggauta Dewan Gemeente terus menerus membela kepentingan pribumi, untuk penerangan listrik, air minum, jalan-jalan kampung dan sebagainya yang sangat besar artinya bagi orang kecil. ini memerlukan perjuangan yang tangguh.
- g. Pada tahun 1918 menjadi *Commissaris Central Bestuur S.I.* kira-kira antara tahun 1917 dan 1918 *Dr. F. Douwes Dekker* keliling Jawa untuk *Indiesche Partij*, datang di rumah *minta saya memegang Ketua I.P.* daerah Probolinggo, tetapi saya tolak karena saya masih menjabat Ketua S.I.

- h. Pada tahun 1919 pindah ke Mojokerto (Jawa Timur) tetap menjadi Ketua PB. V.I.P.B.O.W. Berhenti menjadi Mantri Boekhouder Irigasi. Menjadi Presiden S.I., Kabupaten Mojokerto dan tetap menjabat Com. CB. S.I.
- i. Pada tahun 1921 menjadi Ketua Personil Pabrik Bond (Fabrieks Bond) daerah Mojokerto. Saya memimpin pemogokan Pegawai Pabrik Gula yang jumlahnya 12 buah, semua milik orang Belanda, yang menghasilkan perbaikan nasib mereka itu. Pemogokan ini sebagai *penjajagan kekuatan lawan*. Selama tahun 1921–1923 saya berusaha memperbaiki nasib kaum tani. Dalam Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang saya berhasil, sehingga peraturan mengenai desa, mengenai pembagian tanah pertanian kepada orang tani menjadi mantap sehingga orang tani dapat menghadapi Pabrik-pabrik Gula yang menyewa tanah dan menjadi kuat. Sistem Komunal bezit met *vaste* bandelen. Jadi bagian tani adalah tetap, tidak ganti berganti, menjadi giat dan menambah hasil tanaman.
- j. Pada tahun 1922 dipilih menjadi Ketua Vakcentraal yang ke III yaitu Persatuan Vakbonden Hindia (P.V.H), dalam bulan Mei 1923 V.S.T.P. (Perserikatan Pegawai Sepur dan Tram) mengadakan pemogokan dengan alasan karena Saudara Semaun, Ketua V.S.T.P. ditangkap. Sebagai Ketua Vakcentraal P.V.H., saya berusaha memenangkan pemogokan itu, tetapi tidak berhasil, karena saya dilarang keluar kota yang saya tempati, sehingga saya tidak dapat menghubungi lain-lain perseorangan pegawai/buruh dan Pemerintah Belanda sehubungan dengan alasan V.S.T.P. mengadakan pemogokan itu, lalu atas dasar politis, Pemerintah Hindia Belanda menambah artikel 161 bis dan ter dari Strafwetboek untuk dapat menangkapi Pengurus V.S.T.P. dan oleh karena itu pemogokan menjadi hancur. Penga-

laman yang amat pahit itu, tentulah menjadi pelajaran untuk bertindak berhati-hati dengan perhitungan yang setepat mungkin.

Gerakan buruh yang menghebat menjadi pemogokan untuk mendapatkan perbaikan nasib, lalu di-verpolitik, sehingga lawan mudah mendapatkan alasan memukul dengan alasan yang sesungguhnya bukan pada tempatnya, sehingga pemogokan itu tidak mendapatkan simpati dari rakyat. Karena pemogokan oleh Pengurus V.S.T.P. di verpolitik, alasan karena Semaun ditangkap

Pada tahun 1922 - 1924, saya memimpin surat kabar harian *Kemajuan Hindia* di Surabaya. Ditutupnya penerbitan setelah 2 tahun, karena pendapatan yang tidak dapat menutup pengeluaran disebabkan uang langganan masuknya hanya \pm 50%, sedang pendapatan dari iklan pedagang-pedagang pribumi amat sedikit sekali, dan pedagang-pedagang non-pribumi (umumnya Cina dan Bangsa Eropa) tidak mau memasang iklan dalam harian dari bangsa Indonesia pribumi.

Pada tahun 1924 diangkat menjadi anggota Volksraad, dan pada pidato saya yang pertama kali di muka Sidang Volksraad 1924 tersebut saya mengkritik beleid Pemerintah Hindia Belanda dan menolak maksud Pemerintah mengadakan pajak Landrente di Sumatera Barat. Hasil pidato saya itu, mengakibatkan Gubernur General Fock marah kepada saya dan tak mau mengundang saya untuk perkenalan, tetapi akhirnya usaha saya berhasil dan *pajak landrente tidak jadi dimasukkan ke Sumatera Barat*. Berhubung dengan itu di Padang diadakan Rapat Umum dengan mengambil keputusan antara lain, bahwa saya diberi Gelar "Datuk" yang disampaikan kepada saya dengan telegram. Untuk memperkenalkan betapa sikap dan kegiatan para anggota Volksraad berasal dari kaum perjuangan baik kiranya saya uraikan sedikit di sini.

Sejak dalam Volksraad pada tahun 1927 dibentuk sebuah Fraksi dengan tujuan *mencapai kemerdekaan penuh Indonesia* dengan sebagai anggauta-anggaunya adalah:

1. R.A.A. Koesoemo Oetoyo
2. M.H. Thamrin
3. R.P. Soeroso
4. Soangkupon
5. Otto Iskandarinata
6. Sukardjo Wirjopranoto
7. Dr. Rasjid
8. Wiwoho.

Dengan diketuai oleh M.H. Thamrin, maka Volksraad menarik perhatian dari kaum terpelajar. Tiap-tiap masa Sidang dilakukan dengan susunan anggauta baru, selalu membawa mutasi dari anggauta, karena ada yang tidak lagi menjadi anggauta Volksraad. Para anggauta yang berhenti pada masa-masa Sidang ialah antara lain: Mr. Moh. Yamin, Datuk Kayo, Idi, Mr. Tadjuddin Nur. Pada masa Sidang tahun 1941, Saudara M.H. Thamrin wafat pada tanggal 11 Januari 1941 dan diganti oleh R.P. Soeroso sebagai Ketua Fraksi hingga tahun 1942, yaitu tahun di mana Jepang masuk. Waktu terakhir itu anggauta Fraksi Nasional adalah: R.A.A. Koesoemo Oetojo, Otto Iskandarinata, Soangkupon, Dr. Rasjid, Sukardjo Wirjopranoto, Wiwoho, Muchtar Prabunegoro, Ir. Moh. Noer dan R.P. Soeroso sebagai Ketua Fraksi.

Tugas anggauta Fraksi Nasional tidak dibatasi, mereka bebas berbicara mengenai politik, ekonomi, sosial, soal-soal lokal dan sebagainya. Pidato mereka tidak saja dihadapkan pada Pemerintah Belanda, tetapi juga untuk penyuluhan masyarakat. Pidato-pidato mereka itu dapat perhatian besar dari kalangan Intelektuil. Jika orang mengatakan, bahwa Fraksi Nasional menjadi

populer, kiranya tidak keliru. Untuk mengambil keputusan penting harus atas dasar keputusan rapat Fraksi. Sekalipun Fraksi Nasional bertujuan Indonesia Merdeka Penuh, Fraksi itu toch memberikan kebebasan kepada anggautanya untuk mengambil sikap terhadap petisi Sutardjo, yang moderat. Anggauta Fraksi Nasional menolak petisi Sutardjo karena berpendapat, bahwa petisi itu menghambat perjuangan kemerdekaan. Buku yang berisi pidato-pidato anggauta Fraksi Nasional yang diucapkan dalam bahasa Indonesia amat laku dijual. Rupanya Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai anggapan, bahwa para Anggauta Fraksi Nasional mempunyai pengaruh cukup besar. Karena itu pada waktu tentara Jepang telah menguasai Semanjung Malaka (Sekarang Malaysia), *Dr. Idenburg dan Mr Satromuljono diutus Gubernur Jenderal Tjarda untuk mengadakan pertemuan dengan anggauta-anggauta Fraksi Nasional yang ada di Jogjakarta. Pada pertemuan dari pihak Fraksi yang sempat datang hadir, yaitu R.P. Soeroso, Otto Iskandardinata, Wiwoho dan Sukardjo Wirjopranoto.*

Pada pertemuan itu, Dr. Idenburg mengajak untuk mengadakan suatu pengumuman bersama, yang berisi mengajak Rakyat Indonesia bersama-sama Belanda menghadapi Jepang. Perundingan dari pagi hingga malam tidak dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh Dr. Idenburg, sehingga Mr. Sastromuljono menjadi jengkel dan membentak dengan kata-kata dalam bahasa Belanda terhadap anggauta-anggauta Fraksi: "De heren moeten maar zeggen: Ya of nee" (Tuan-tuan bilang saja, ya atau tidak). *Hasilnya bubar*, perundingan tidak membawa hasil yang diharapkan oleh pihak Belanda. Dr. Idenburg dipandang orang sebagai diplomat ulung, maka karenanya anggauta-anggauta Fraksi bersikap

hati-hati sekali, *sehingga Dr. Idenburg gagal dengan misinya.*

Tidak lama lagi Jepang masuk Indonesia tanpa perlawanan Belanda, tentara Belanda menyerah. Beberapa hari sebelum Jepang mendarat di Jawa. Residen Surabaya meminta saya datang di Kantornya. Saya datang juga dan dimintai kesediaan saya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda untuk menghadapi Jepang. Secara diplomatis, saya hanya menjawab baik (goed).

Pada tahun 1929, saya dipilih menjadi Ketua Vakcentraal yaitu Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (P.V.P.N.) merupakan Vakcentraal ke IV dan dalam tahun 1938 merangkap menjadi Ketua Vancentraal Buruh Partikelir, yang bubar sebelum Perang Dunia ke Dua, karena tidak dapat menahan tekanan kaum majikan. Pada waktu berunding dengan Salaris Commisie Damme, Wakil-wakil Vakcentraal P.V.P.N. dan Vakbonden Pegawai Negeri, para Anggauta P.V.P.N. meninggalkan rapat karena usul P.V.P.N. supaya peraturan gaji Pegawai Negeri tidak dibeda-bedakan tinggi rendahnya dengan beralasan Belanda totok, Belanda Peranakan dan Bumi Putera, tetapi hanya satu jenis untuk semua. Oleh Salaris Commisie ditolak usul tersebut.

Sementara itu P.V.P.N. berusaha mendapatkan hak-hak kedudukan sebagai Pegawai untuk supaya tidak mudah mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah atau pejabat-pejabat yang bersangkutan. Vakcentraal P.V.P.N. telah dapat bekerja sama dengan N.V.V. (Nederlands Vak Verbond). Pernah diundang ke Konggres I.V.V. karena telah menjadi anggauta I.V.V. (International Vak Verbond), di London dan Wenen (Wina). Hanya dapat mengirimkan utusan

seorang ke Wenen karena tidak mempunyai biaya yang cukup.

Pada tahun 1922 - 1924 saya memimpin Surat *Khabar Harian "Kemajuan Hindia"* di Surabaya. Pada tahun 1932 berhenti menjadi Presiden S.I. di Mojokerto, karena organisasi itu bubar. Lalu masuk menjadi anggota P.B.I. (Persatuan Bangsa Indonesia) Pimpinan Dr. Soetomo di Surabaya. *Dalam tahun 1935 terjadi fusi dari Buti Utomo, P.B.I., Sumatera Bond, dan lain-lain untuk menjadi satu partai yaitu Partai Indonesia Raya (PARINDRA).*

Saya menjadi *Ketua Parindra cabang Mojokerto dan duduk dalam Dewan Pimpinan Pengurus Bagian Politik dan Ekonomi.* Bersama-sama Saudara M.H. Thamrin, R.A.A. Koesoemo Oetojo dan Sukardjo Wirjopranoto.

- p. Pada tahun 1936 s/d Jepang masuk, terpilih berkali-kali menjadi anggota *Regentchapraad Mojokerto.*
 - q. Pada tahun 1937 s/d Jepang masuk juga menjadi anggota *Dewan Propinsi Jawa Timur.*
 - r. Pada tahun 1938 terpilih menjadi *"Loco-burgermeester Gemeente Mojokerto"*.
9. Pada waktu Jepang masuk, masih berkedudukan sebagai Ketua Perhimpunan Pegawai B.O.W., Ketua Vakcentraal P.V.P.N. dan masih tetap menjadi anggota *Regentschapraad Mojokerto, Propinsi Jawa Timur dan Volksraad.*

Pada waktu Jepang *mendarat di Jawa bulan Maret 1942*, dalam Karesidenan Surabaya selama ± 10 hari tidak ada Pemerintahan bala tentara Jepang, mungkin karena masih sibuk untuk kepentingan perangnya, sedang pejabat-pejabat Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi berani menjalankan tugasnya, mungkin dilain-lain daerah juga begitu dan yang mengherankan saya, bahwa dalam keadaan begitu

tidak terdapat gangguan keamanan, disebabkan mungkin waktu itu *seluruh penduduk* berada dalam keadaan ragu-ragu dan menunggu, sehingga tidak ada yang sadar dan berpikiran untuk menjalankan sesuatu.

10. Pada waktu penjajahan Jepang:

Selama penjajahan Jepang, *semua partai politik dan organisasi lain dibekukan.*

- a. Oleh *Empat Serangkai* saya diminta tetap bekerja di daerah dan ditunjuk:
 1. Sebagai *Ketua PUTERA daerah Malang* (Jawa Timur) dan
 2. Duduk dalam *Pusat Barisan Pelopor di Jakarta*. Yang membawa keheranan saya, bahwa selama menjadi Ketua PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) saya mendapat kepercayaan dari Sucikan Malang, yaitu Jenderal Tanaka mengenai kedudukan pegawai Pamong Praja seluruhnya, yang berarti, bahwa baik buruknya keadaan mereka itu terserah kepada saya dan juga menjadi tanggung jawab saya. Dan selama itu tidak seorangpun pegawai Pamong Praja yang mengalami sesuatu kesulitan dari pihak Jepang, khususnya Kem Pe Tai.
- b. Menjadi *Ketua Hokokai, sebagai gantinya PUTERA di Malang.*
- c. Menjadi *anggota Cuo Sang-in di Jakarta.*
- d. Dalam bulan *Pebruari 1943 Bung Karno datang di Malang* atas nama Empat Serangkai, minta pada saya supaya bersedia menjadi *Syucokan daerah Kedu* yang diangkat oleh Pemerintah Jepang dengan maksud untuk dapat menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia dapat menjalankan pemerintahan. Permintaan ini saya terima dan selama memegang jabatan Syucokan, saya mengambil kesempatan tiap-tiap waktu untuk mengumpulkan Lurah-lurah Desa dari Kabupaten-kabupaten, untuk membesarkan semangat kebangsaan me-

reka itu dan memimpin dinas-dinas pemerintahan, pertanian, pendidikan dan pekerjaan Pamong Praja. Tiap ada pengumuman pengumpulan beras atau padi untuk bala tentara Jepang maka daerah saya, daerah Syucokan Bojonegoro, Saudara Soerjo dan daerah Jakarta, Saudara Sutardjo, termasuk yang amat jelek. Memang sengaja tidak kami adakan pengumpulan padi. Pada suatu waktu di Jawa Tengah diadakan rapat para Syucokan daerah Jawa Tengah di Semarang dipimpin Syucokan Semarang. Pada waktu itu saya ajukan mengenai soal-soal Pemerintahan Pamong Praja, tetapi tidak mendapatkan jawaban apa-apa.

Menurut keterangan seorang pegawai Jepang yang mengikuti saya ke rapat, diterangkan, bahwa sebenarnya Syucokan-syucokan Jepang itu tidak mengerti apa-apa tentang masalah Pemerintahan. Hal ini saya laporkan kepada Bung Karno.

- e. Diangkat menjadi Wakil Ketua Dokuritsu Jumbi Tai (Panitia Persiapan Kemerdekaan), sedangkan yang menjadi Ketua adalah saudara Dr. Radjiman.

11. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

- a. Masih menjabat Residen Daerah Kedu lalu oleh Presiden R.I. saya diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah (merupakan yang pertama di samping tetap menjabat Residen Kedu).

Pada waktu itu disampaikan berita, bahwa fihak Sekutu menetapkan mengenai Indonesia bahwa "de jure" dipegang fihak Sekutu dan "de facto" diserahkan pada fihak Jepang. Sehingga dalam keadaan semacam itu siapapun pun bangsa Indonesia sebagai pemegang kekuasaan baik di pusat maupun di daerah harus berani mengabaikan keputusan fihak Sekutu tersebut. Saya sangat gembira, bahwa mental para Republikein Indonesia telah bersikap yang sedemikian itu. Hal itu me-

mang tidak mudah, tetapi harus berani kita jalankan. Sebagaimana yang telah saya alami sebagai Gubernur Jawa Tengah, bahwa sewaktu Jakarta belum kedatangan fihak Inggris, di Jawa Tengah telah kedatangan wakil dari fihak Sekutu ialah seorang Perwira Angkatan Udara Inggris bernama Wing Commander Tull, yang bermaksud untuk mengurus keamanan orang-orang Belanda. Ia tidak hanya beroperasi di Semarang, tetapi meluas sampai ke Jogja, Solo dan lain-lain tempat di mana terdapat kamp-kamp tahanan Belanda (internings kampen). Untuk menghadapi Perwira tersebut harus berani di samping bijaksana. Di samping itu ikut serta seorang Belanda yang mengaku dari PMI Intern. (mengaku Kepala Red Cross Belanda) dan menemui seorang Pejabat fihak Jepang dengan maksud untuk mengatur Palang Merah Internasional (PMI) di daerah Magelang, lalu mengumpulkan orang-orang bekas KNIL sebanyak ± 400 orang untuk dijadikan perawat. Rupanya sekalipun fihak Jepang disertai kekuasaan "de facto" tetapi karena sudah kehilangan semangat berhubung kekalahannya, fihak Jepang tidak berani menolak permintaan orang Belanda tersebut. Untunglah dapat saya ketahui maksud dan tujuan orang Belanda tersebut, lalu dengan segera ke-400 orang bekas KNIL yang akan menjadi perawat tersebut saya instruksikan untuk dibubarkan, dan orang Belanda yang menjadi pemimpin itu untuk meninggalkan Magelang dengan segera. Di samping itu perang syaraf oleh fihak Sekutu dilancarkan ke daerah Jawa Tengah dan yang harus menghadapi perang syaraf itu adalah saya sebagai Gubernur. Siang dan malam selalu mendapat telepon yang menerangkan bahwa tentara Sekutu sudah masuk di daerah sana atau daerah sini. Selain itu juga bermacam-macam ancaman tentang kemungkinan penyerbuan fihak Sekutu. Dapat dikatakan bahwa saya sebagai

Gubernur Jawa Tengah hampir tidak bisa tidur setiap malam. Untung benar, bahwa Rakyat daerah Kedu sangat membantu saya dalam menjalankan kewajiban yang berat itu, sehingga setiap kejadian yang sulit dan berbahaya dapat saya atasi bersama-sama rakyat. Di samping itu saya masih juga mundur-mandir ke Jakarta untuk ikut serta menyelesaikan rencana UUD 45 dan lain-lain. Pada suatu hari datang seorang pegawai Staf Wing Cdr. Tull ke Magelang dari Semarang untuk menemui saya dengan maksud agar saya bersedia mengoreksi pidato W. Cdr. Tull yang akan dibacakan di muka radio di Solo pada esok naya, sore. Dalam pidato yang saya baca itu terdapat soal-soal politik yang *saya coreti* dan saya beri tahu bahwa Tull bertugas hanya mengurus tahanan Belanda saja lain tidak. Keesokan harinya saya sengaja mendengarkan pidato Tull dan ternyata kalimat-kalimat yang saya coreti tidak dibaca olehnya. *Dengan tindakan ini, yaitu memenuhi anjuran saya Tull sebagai wakil fihak Sekutu mengakui Republik Indonesia "de jure" dan "de facto"*.

Saya juga menjadi anggauta KNI Pusat sejak dibentuknya dan atas permintaan delegasi dari Solo dalam saya sedang tengah-tengahnya menjalankan konsolidasi Pemerintahan Jawa Tengah, saya ditetapkan dan dipindahkan dalam bulan Oktober 1945 menjabat sebagai Komisaris Tinggi RI untuk daerah kerajaan Surakarta dan Jogjakarta (kedua vorsten landen), sebagai wakil Pemerintah RI dan berkedudukan di Solo. Jabatan baru ini tidak kurang beratnya dari pada waktu menjabat Gubernur Jawa Tengah. Antara lain bahwa hampir tiap malam tidak dapat tidur karena selalu menerima laporan kejadian penculikan yang berlatar politik. Rupanya ada golongan-golongan yang satu sama lain saling culik menculik.

Tentang jalannya pemerintahan di daerah Kasunanan, Mangkunegaran, Kasultanan dan Pakualaman pada waktu itu ditetapkan KNI Daerah menjalankan pemerintahan legislatif maupun executif hal mana adalah tidak pada tempat sewajarnya. Karena itu antara KNI Daerah Surakarta yang diketuai oleh Sdr. Kusumodiningrat dan Sri Sunan XII dan Sri Mangkunegoro VIII saya usahakan untuk membagi tugas, yaitu KNI Daerah menjalankan legislatif, dan Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro menjalankan executif. Kedua pihak menerima pembagian tugas itu, tetapi amat sayang beberapa hari kemudian saya menerima surat dari para penasehat baik dari Sri Sunan maupun Sri Mangkunegoro bahwa yang akan menjalankan pemerintahan executif ialah para Patih dari kedua raja tersebut. Pendirian itu ditolak oleh KNI Daerah dan pihak KNI Daerah lalu membentuk sebuah Presidium untuk sebagai badan executif. Diri saya ditunjuknya sebagai Ketua dari Presidium tersebut. Berhubung dengan itu maka Sri Sunan dan Sri Mangkunegoro menjadi non aktif hingga sekarang.

Di Daerah Jogjakarta usaha saya mengadakan pertemuan di antara KNI Daerah yang diketuai oleh Sdr. Moh. Saleh dan Sri Sultan IX dan Sri Paku Alam IX berhasil baik dengan pembagian tugas yang dapat diatur sewajarnya, KNI Daerah menjalankan legislatif sedang Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan executif dan dapat langsung sebagai Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Turun-temurun sesuai U.U. Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948, RUU No. 22/1948 tersebut saya yang menyusun).

Di tengah-tengah kesibukan bekerja, diterima berita dari Gubernur Jawa Tengah bahwa ada seorang Jenderal Inggris yang akan datang di Solo untuk melihat keadaan tahanan orang Belanda. Ternyata yang

datang bukanlah seorang Jenderal, melainkan Wing Cdr. Tull yang telah saya kenal sewaktu saya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah yang lalu. Oleh karena saya mendengar bahwa pihak Sekutu bermaksud akan mengirimkan tentara pendudukan ke Solo, saya tanyakan padanya apakah maksud itu benar akan dilaksanakan, yang saya katakan bahwa sesungguhnya hal itu tidak perlu. Oleh Wing Cdr. Tull diterangkan bahwa hal itu tergantung bagaimana keadaan tahanan Belanda di daerah Solo. Ternyata tidak sampai ada "tentara pendudukan" yang dikirimkan ke Solo, berbeda dengan janjinya sewaktu saya masih menjabat Gubernur Jawa Tengah di mana W. Cdr. Tull telah berjanji untuk tidak akan mengirimkan "tentara pendudukan" ke Magelang tetapi dalam kenyataannya setelah saya dipindahkan ke Solo, ia telah mengirimkan juga sehingga menimbulkan pertempuran antara tentara Sekutu dengan Tentara Nasional kita.

Pada waktu sebelum pertengahan tahun 1946, karena saya merasa amat lelah baik tenaga maupun fikiran, maka saya mengajukan kepada Presiden Sukarno agar saya dapat dipindahkan ke daerah lain yang kemudian dikabulkannya dan dipindahkan menjadi *Gubernur Jawa Timur*, sedangkan *Sdr. Soerjo yang menjabat Gubernur Jawa Timur dipindahkan ke Solo*, tetapi *beliau di Solo tidak dapat menjalankan pemerintahan karena Komandan Tentara yaitu Jenderal Sutarto telah melaksanakan pemerintahan militer*. *Sdr. Soerjo lalu kembali ke Jawa Timur* menjumpai saya dan menerangkan apa yang terjadi di Solo. Saya lalu menjawab bahwa saya *tidak berkeberatan kembali ke Solo*, yang kesemuanya akan saya laporkan kepada Presiden. Saya kembali ke Solo dan mendengar bahwa pada malamnya *PM St. Sjahrir telah diculik orang*. Atas seruan Presiden Soekarno, *sdr. St. Sjahrir dilepaskan para penculik*.

Jabatan Komisaris Tinggi RI dihapus, dan saya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri sebagai Gubernur diperbantukan. Di Solo kedudukan diganti dengan jabatan Residen.

Pada waktu clash ke I pertengahan bulan Juli 1947 sewaktu dalam perjalanan dengan kereta api menuju ke kota Malang dari jurusan Blitar tepatnya sesudah kota Kepanjen *mengalami serangan udara fihak Belanda* yang berbarengan dengan diserbunya Kota Malang. Kereta api yang penuh penumpang mengalami kebakaran, jatuh korban. Selamat dari serangan tersebut, tetapi tidak dapat meneruskan perjalanan ke Malang, bertemu dengan para pejuang yang menyingkir dari kota. Rumah keluarga di kota Malang mengalami kerusakan akibat bumi hangus, yang juga digunakan sebagai salah satu dapur untuk bekal makan para pejuang yang mempertahankan kota. Tidak berhasil untuk dapat menemui isteri lalu kembali ke Jogjakarta.

Pada Kementerian Dalam Negeri saya *diserahi memimpin Urusan Minoritas dan menjadi juga Kepala Bagian Urusan Pemerintahan Daerah pada permulaan tahun 1948*. Setelah itu diangkat *Setelah itu diangkat tahun 1948*. Setelah itu diangkat *menjadi Ketua Gaji Pegawai Negeri*, juga merangkap *menjadi Kepala Kantor Urusan Pegawai*. Setelah itu diangkat *menjadi Penasehat St. Sjahrir dalam perundingan antara Wakil Republik Indonesia dan Prof. Schermerhorn dari fihak Wakil Belanda*. Diminta oleh Wakil Presiden Bung Hatta *untuk menyusun Rencana Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah; Propinsi, Kabupaten dan Kota*. Rencana U.U. tersebut kemudian diterima oleh BP. KNIP Pusat dan menjadi *U.U. No. 22/1948*. Saya akui bahwa U.U. tersebut belum sempurna, tetapi telah dapat menciptakan silah-silahnya, tata kerja pe-

merintahan daerah yang pada waktu itu masih dalam keadaan dipengaruhi oleh pertikaian antara RI kita dan Sekutu (Belanda). Selanjutnya saya mendapat tugas menyusun Undang-Undang Pembentukan Propinsi, Kabupaten dan Kota. Demikian juga tentang hak Medebewind dan otonomi pemerintahan daerah. Kesemuanya telah dapat diterima oleh BP KNIP menjadi Undang-undang. Selama clash ke II saya ikut menjalankan pemerintahan gerilya dan diangkat *menjadi anggota pemerintahan darurat RI di Jawa untuk Urusan Dalam Negeri*, bersama Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri PMN Kasimo, Menteri Agama K.H. Maskur dan Menteri Dalam Negeri Dr. Soekiman yang selang beberapa waktu kembali masuk kota Jogjakarta.

Ikut bersama P.D.R.I. Jawa adalah Sdr. Zainul Arifin, Jenderal Mayor Soehardjo Hardjowardojo (Irjen Pertahanan) dan Jenderal TB Simatupang. Rute yang ditempuh adalah Solo, Tawangmangu, Nrambe (sekitar G. Lawu) Karangpandan, Bayat, Cawas, Ngawen, Karangmojo (daerah G. Kidul).

Hal-hal yang penting yang saya jalankan sebagai pimpinan Urusan Dalam Negeri, antara lain *mengangkat Sdr. Milono*, pensiun Residen Pati lagi berhubung pada waktu itu Residen Pati kembali masuk ke kota untuk ikut Belanda. Karena Gubernur Jawa Barat Sdr. Sewaka ditangkap Belanda lalu Sdr. Ir. Ukar saya angkat menjadi Gubernur Jawa Barat. Begitu juga Gubernur Jawa Timur Dr. Murdjani ditangkap Belanda, saya angkat menjadi penggantinya Sdr. Samadikun. Untuk kebutuhan bahan makanan TNI, Tentara Pelajar dan sebagainya, saya adakan rapat-rapat dengan para pamong desa dan camat di mana kami bertempat sementara untuk supaya para petani mau menyumbangkan 10% dari hasil tanaman padinya dan mereka bersedia.

Kami bergerilya dari tanggal 18 Desember 1948 hingga akhir Juni 1949. Hubungan antar daerah di Jawa dilakukan dengan kurir Tentara.

Pada waktu dilakukan *perundingan antara Mr. Roem dan Van Royen di New York*, saya menerima dari Jakarta salinan rapat pemimpin-pemimpin perkebunan Belanda di Jawa Barat dan Sumatera Selatan bersama-sama wakilnya Jenderal Spoor.

Di dalam rapat itu, para wakil Perkebunan Belanda itu mengeluh karena tentara Belanda yang menjaga kebun-kebun ditarik, karena itu mereka merasa sangat kuatir, wakil dari Jenderal Spoor menjawab, bahwa tindakan menarik tentara itu perlu karena waktu tentara Belanda masuk ke pedalaman tidak kelihatan tentara Republik Indonesia, tetapi tahu-tahu semua tentara Republik Indonesia muncul di mana-mana.

Pada waktu saya membaca itu merasa amat sayang sekali, bahwa Mr. Roem tidak mengetahuinya, bahwa kedudukan tentara kita kuat. Jadi tahu tentunya dapat bersikap lebih keras menghadapi Van Royen dan dapat menghasilkan perundingan yang lebih menguntungkan bagi Republik kita.

Dalam akhir bulan Juni 1949, sehabis clash ke II masuk kota Jogjakarta. Kembali menjabat Gubernur diperbantukan Menteri Dalam Negeri Urusan Pemerintahan Daerah dan menjadi Kepala Urusan Pegawai. Di dalam Kota Jogjakarta tinggal mondok di rumah saudara, saya dan keluarga makan dari dapur umum. Rumah saya di Solo, waktu Belanda masuk kota, terus mencari saya tidak ketemu, lalu rumah saya dirampok dan keluarga saya diusir ke luar hingga hidupnya amat sengsara selama saya bergerilya. Oleh Pemerintah diserahi menyusun Rencana Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah yang diterima baik oleh BP. KNIP dan

menjadi Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 22/1948 sebagai tersebut di atas. Selanjutnya seperti tersebut di atas menyusun Undang-Undang Pembentukan Propinsi-Propinsi, Kota-kota dan Kabupaten-Kabupaten seluruh Jawa dan diterima oleh BP KNIP menjadi Undang-Undang.

Tetapi saya belum dapat bekerja karena sakit bronchitis yang amat keras sehingga dalam perjalanan pulang dari gerilya saya memakai tandu. Syukur Alhamdulillah dalam tempo ± 1 bulan dapat sembuh kembali dan bekerja. Waktu di Rumah Sakit Presiden dan Wakil Presiden telah datang melihat keadaan saya.

Sekalipun saya masih sakit dalam Rumah Sakit dapat merasakan kegembiraan hati saya, bahwa pada waktu itu delegasi Indonesia berangkat ke Negeri Belanda untuk berunding dengan Belanda (Ronde Tafel Konferensi) untuk penyerahan Kemerdekaan Indonesia pada Republik kita. Dalam *bulan Desember 1949 Partai Indonesia Raya (PARINDRA) dihidupkan kembali dan saya terpilih menjadi Ketua Partai.*

Sekalipun hidup kembalinya PARINDRA terlambat, masih dapat sambutan dari daerah-daerah di mana kaum Parindrasten memang menunggu-nunggu hidup kembalinya PARINDRA. Mereka itu baik yang berada di Jawa maupun yang berada di luar Jawa segera mendirikan Cabang PARINDRA.

Anggauta PARINDRA pada umumnya terpelajar, oleh karena PARINDRA mengutamakan orang-orang cakap, jujur dan suka membela kepentingan rakyat.

PARINDRA sengaja tidak mengadakan anggauta-anggauta masa oleh karena bertujuan pada Pemilihan Umum, untuk Anggauta-anggauta Lembaga Perwakilan Rakyat diadakan sistim memilih orang, calon dari

Partai-partai politik yang ikut Pemilihan Umum, bukannya memilih gambar partai, seperti misalnya Pemilihan Umum di Inggris.

Pada Pemilihan Umum 1955 ternyata masih dijalankan sistim lama, yaitu memilih gambar. Dengan begitu PARINDRA kalah dari pemilihan, karena tidak mempunyai masa anggauta.

Dalam tahun 1954 mendirikan Yayasan untuk kemajuan kesehatan anak-anak terutama yang menderita sakit paru-paru. Saya membangun gedung-gedung untuk Rumah Sakit tersebut di atas tanah seluas 44 HA di desa Cilandak Selatan dari tahun 1954 hingga tahun 1958. Selesai bangunan-bangunan itu saya berusaha mendapatkan kredit untuk membeli alat-alat Rumah Sakit yang diperlukan, tetapi tidak berhasil. Lalu saya serahkan kepada Departemen Kesehatan untuk dipakai sebagai Rumah Sakit Pemerintah.

Yayasan yang saya Ketuai mula-mula bernama "Tbu Sukarno" lalu lahirnya Orde Baru diganti "Yayasan Fatmawati" dan Ketua tetap saya.

Dalam tahun 1967 Departemen Kesehatan mengajak Yayasan Fatmawati bekerja sama untuk pimpinan Rumah Sakit Fatmawati sesuai dengan prinsip Pemerintah yaitu partisipasi rakyat sebesar mungkin untuk usaha kesehatan. Untuk kerja sama itu lalu diadakan "Piagam kerja sama" antara Departemen Kesehatan dan Yayasan. Pengawasan sehari-hari diserahkan kepada Dewan Direksi terdiri dari 2 orang wakil Departemen Kesehatan dan 2 orang wakil Yayasan. Diusahakan Rumah Sakit Fatmawati dapat dibeheer seluruhnya oleh Yayasan.

Dalam bulan Januari 1950 saya diminta oleh Menteri Dalam Negeri supaya pergi ke Solo bersama-sama Sekjend. Departemen Dalam Negeri untuk menjumpai

Sri Sunan Paku Buwono ke XII dan Sri Mangkunegoro ke VIII untuk menjelaskan maksud Pemerintah membentuk Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari Kasunanan dan Mangkunegaram seperti halnya Jogjakarta menurut Undang-Undang No. 22/1948, Sri Sunan dan Mangkunegoro menjadi Kepala Daerah ke I dan ke II.

Pihak Sri Sunan tidak keberatan, tetapi pihak Mangkunegoro minta tetap bisa masing-masing berdiri sendiri. Sesudah berunding saya terangkan, dapat juga tetap berpisah, tetapi dasarnya pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No. 22/1948, Tetapi penasehat dari Sunan dan Mangkunegoro minta beberapa kekuasaan zelfbestuur dulu masih dapat diteruskan, misalnya pengangkatan Wedana, saya terangkan, bahwa tugas-tugas Kepala Daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 22/1948 tersebut di atas.

Apa yang diminta oleh para penasehat yang bersangkutan itu di luar ketentuan Undang-Undang tersebut. Kedua penasehat tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu pembicaraan tidak kami lanjutkan dan kami kembali pulang melaporkan hasil pembicaraan pada Menteri Dalam Negeri.

Karena hasil pembicaraan kami dengan kedua Raja tersebut maksud membentuk Propinsi Daerah Istimewa Surakarta tidak dilanjutkan.

Dalam *tahun 1950 menjadi Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat*, lalu *non aktip* karena diangkat menjadi Menteri.

Dalam bulan *September 1950 sampai dengan 1956* berturut-turut menjadi Menteri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Moh. Nasir.
2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman

3. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Wilopo
 4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo
 5. Menteri Sosial dan Kabinet Ali Sastroamidjojo
 6. Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harapap.
- 6a. Merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim selama 1 tahun.

Pada waktu menerima jabatan Menteri Perburuhan dari Menteri Perburuhan dari Negara Federal Republik Indonesia Saudara Wilopo, pemogokan buruh Perkebunan Belanda yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu belum dapat diselesaikan. Dalam tempo lebih kurang 7 hari dapat saya selesaikan dengan baik, (mendapat kenaikan upah & tambahan jatah pangan) para karyawan terus bekerja lagi. Untuk kepentingan penyelesaian secara damai pada masa selanjutnya saya bentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Pekerja (P-4) di pusat dan di daerah dan hingga sekarang berfungsi dengan memuaskan.

Pada waktu saya memegang jabatan Menteri Sosial, untuk melancarkan datangnya orang-orang transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa, maka saya mengadakan percobaan untuk membuka hutan secara mekanis bagi para transmigran. Sebagai pangkal kerja, saya ambil suatu tempat di Desa Metro untuk tempat pimpinan dari bagian Dinas Transmigrasi. Tempat itu karena sekitarnya banyak terdapat binatang gajah, maka tempat itu saya beri nama *KOTA GAJAH* yang sekarang menjadi ramai. Di tempat itu saya tempatkan sebuah bengkel service dan reparasi traktor-traktor yang dipakai untuk membuka hutan. Rupanya usaha saya itu diketahui oleh rakyat di Jawa yang memang ingin pindah ke luar Jawa. Maka karena itu transmigran spontan jumlahnya banyak sekali dengan biaya sendiri. Dengan begitu

biaya mekanisasi pembukaan hutan dapat respons yang berupa tidak mengeluarkan biaya transmigran dari Jawa ke luar Jawa.

Dalam bulan maret 1956 saya dipilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia.

Badan ini diganti namanya menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) pada tahun 1960. Dan saya tetap menjadi Ketuanya.

Dalam bulan September 1959 dipilih menjadi *Ketua Umum dari Dewan Koperasi Indonesia*, hingga dibubarkan oleh Menteri Ahmadi pada bulan Maret 1961.

Menteri Ahmadi mendirikan *Centraal Koperasi* dinamai KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia) dan diketuai sendiri.

Pada bulan Oktober 1960 mengunjungi Kongres Perumahan di kota Paris, terus ke kota Lausanne (Swiss) mengunjungi Kongres Koperasi sedunia, lalu terus ke Jerman Barat untuk mengunjungi Kongres Koperasi di Masburg. Dalam bulan Maret 1961 datang di Jerman Timur dan Cekoslovakia dalam rangka Gerakan Koperasi untuk meninjau perkembangan Perkoperasian di Negara tersebut.

Karena Koperasi ditujukan sebagai alat politik, maka Koperasi menjadi amat mundur sekali, sehingga pada lahirnya ORDE BARU gerakan Koperasi menjadi lumpuh tidak ada daya apa-apa. Dalam bulan *Agustus 1958 diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Anggauta Pertimbangan Penghargaan Perintis Kemerdekaan Indonesia* hingga sekarang dan seterusnya saya ditunjuk menjadi Wakil Ketua.

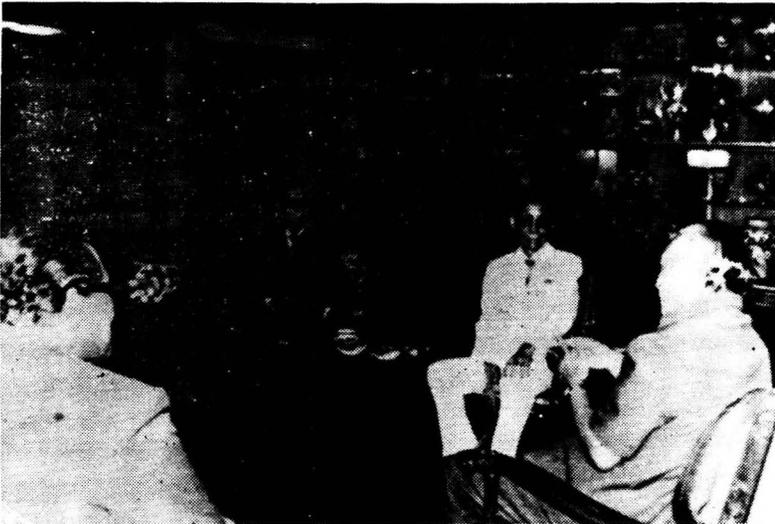
Dalam tahun 1961 oleh Presiden Republik Indonesia diangkat menjadi Ketua merangkap anggauta

Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah dengan tugas menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah, meninjau kembali perimbangan keuangan dan menyusun rancangan Pemerintahan Desa yang berhak Otonomi. Tugas selesai dalam tahun 1962.

Dalam bulan Maret 1966 sampai dengan Maret 1973 diangkat menjadi Anggota MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) sebagai wakil Gerakan Koperasi. Dalam bulan Mei 1966 dipilih menjadi Ketua I Gerakan Koperasi Indonesia.

Dalam bulan Juli 1973 dipilih menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia.

Telah bertahun-tahun saya menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dalam wilayah Kelurahan Menteng (R.T. 003 dan R.W. 04 Kelu-



Bapak R.P. Soeroso didampingi Bapak R. Maryun dan Prof.Dr. Soemitro menghadap Bapak Presiden Soeharto.

rahan Menteng Kecamatan Meteng Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya).

Jabatan-jabatan ini adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang terendah yang menarik bagi saya karena saya dapat berbuat amal bakti karena Allah.

Menerima tanda penghargaan (Bintang/Lencana) dari Pemerintah Republik Indonesia antara lain yaitu:

1. Bintang Mahaputera Adhi Pradana - 14 Agustus 1974.
2. Bintang Gerilya
3. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Satya Lencana Karya Satya Kl. I.
5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I
6. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II
7. Satya Lencana Pembangunan.

Pada tahun 1979 dikukuhkan oleh Bapak Presiden Suharto sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Jakarta, 14 Juli 1981

Yang menurun

SOEBAGIO

ttd.

R.P. SOEROSO

Jakarta, 8 Juni 1981

Yth. Kepada
Bapak Suharto
Presiden Republik Indonesia
di -

Perihal : Bapak R.P. Suroso
 almarhum

JAKARTA.

Lamp. : 1 berkas.

Dengan hormat,

Bersama ini pertama-tama perkenankanlah kami mengucapkan selamat Ulang Tahun Bapak yang ke 60.

Kami berdo'a agar Bapa oleh Tuhan Yang Maha Esa dikurniakan panjang usia dan kebahagiaan beserta kesehatan sehingga Bapak dapat meneruskan cita-citanya untuk kebahagiaan Nusa dan Bangsa Indonesia.

Demikian pula kepada keluarga Bapak kami mengucapkan selamat dan bahagia atas ulang tahun Bapak yang ke 60.

Di samping itu perkenankanlah kami yang sejak tahun 1952 terus menerus mendampingi Bapak R.P. Suroso hingga wafatnya tanggal 16 Mei 1981 sudah hampir 30 tahun maka perkenankanlah kami menghaturkan isi hati kami kepada Bapak mengenai perjuangan Bapak R.P. Suroso.

Untuk mempersingkat menjelaskan perjuangan Bpapak R.P. Suroso almarhum bersama ini kami haturkan riwayat hidup beliau dan sebuah buku 25 tahun Peringatan Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Seluruh Indonesia, di dalam buku mana Bapak R.P. Suroso dalam kata pengantarnya yang terakhir sebelum wafatnya yang ditujukan kepada Bapak Presiden R.I. mohon perhatian kepada Bapak atas perkembangan Koperasi atas dasar U.U.D. 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berarti sampai akhir hayatnya Bapak R.P. Suroso terus-menerus memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kami menghaturkan surat ini kepada Bapak atas pesanan terakhir dari beliau dan sesungguhnya pada tanggal 5 Mei 1981 Bapak R.P. Suroso masih berkehendak akan menghadap Bapak di Istana Merdeka atau di Jalan Cendana akan tetapi pada waktu itu beliau merasa masih belum kuat setelah menjalani operasi mata di Rumah Sakit Mata AINI Kuningan Jakarta sebulan yang lalu dan bermaksud akan menunda menghadap Bapak pada tanggal 25 Mei 1981 akan tetapi belum sampai tercapai maksudnya pada tanggal 16 Mei 1981 jam 07.30 WIB beliau telah dipanggil kembali oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Seluruh keluarga yang ditinggalkan menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Bapak R.P. Suroso pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 1981 malam jam 21.00 di tempat kediaman Bapak R.P. Suroso jalan Krawang No. 2 Jakarta Pusat.

Kami dengan surat ini menghaturkan kepada Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia yang selalu menaruh perhatian terhadap perjuangan Bapak R.P. Suroso sehingga Bapak selalu menerima Bapak R.P. Suroso jika menghadap Bapak di Istana negara, di Istana Merdeka dan di Jalan Cendana. Yang terakhir Bapak menerima Bapak R.P. Suroso bersama dengan Bapak Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo pada tanggal 14 Januari 1981 bersama kami di tempat kediaman Bapak di Jalan Cendana No. 8 Jakarta Pusat.

Adapun Bapak R.P. Suroso dimakamkan di Mojokerto di tempat pemakaman keluarga adalah menjadi keinginan dari Bapak R.P. Suroso sendiri sebelum beliau meninggal karena kata-kata beliau sebagai berikut: "Kalau saya meninggal saya tidak mau ditanam di Kalibata, sebab di situ saya akan kesepian tetapi di Mojokerto bisa kumpul dengan Ibunya dan lain-lain famili, jadi bisa omong-omongan."

Apa yang dipesankan Bapak tersebut telah disampaikan

pada putro-ayahnya dan akhirnya terlaksana dimakamkan di Mojokerto dengan upacara negara.

Kami menyampaikan keinginan dari keluarga Bapak R.P. Suroso oleh karena almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga di Mojokerto apakah sekiranya berhubungan dengan jasa-jasanya Bapak R.P. Suroso almarhum sungguhpun tidak dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata dapat diabadikan jasa-jasanya sebagai:

"PAHLAWAN NASIONAL"

Demikian yang kami merasa berkewajiban untuk menghaturkan langsung kepada Bapak, oleh karena kami akan merasa berdosa jika hal tersebut tidak kami haturkan kepada Bapak sebagai pendamping Bapak R.P. Suroso sejak tahun 1952 hingga meninggalnya.

Kami mohon maaf, jika kami dalam hal ini Bapak anggap lancang karena kami langsung menghaturkan hal tersebut kepada Bapak. Pada akhirnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak.

Hormat kami,

(R. MARIYUN SUDIROHARIPRODJO)



Dengan kursi roda bapak R.P. Soeroso sedang dibantu untuk menuju ruang sidang rapat koperasi.



Bapak R.P. Soeroso sedang terbaring sakit dan dikunjungi salah seorang putranya DR. R.P. Soejono, Direktur Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN RIWAYAT HIDUP BAPAK R.P. SUROSO

Kami mencoba menyusun bahan-bahan sepanjang ingatan kami selama kami mengabdikan Bapak R.P. Suroso sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1952 kami bekerja di Departemen Sosial (dulu Kementerian Sosial) Republik Indonesia di Jakarta sebagai Kepala Bagian Sekretariat dan pada waktu itu Bapak R.P. Suroso menjadi Menteri Sosialnya.
2. Dari sejak saat itu kami mendapat kepercayaan dari Bapak R.P. Suroso untuk mendampingi beliau secara langsung, sehingga kami mengetahui betul perjuangan Bapak R.P. Suroso sebagai Menteri Sosial R.I. dan sebagai pemimpin masyarakat.
3. Segera setelah menjadi Menteri Sosial R.I. yang berkantor di Jl. Nusantara 36 (sekarang Jl. H. Ir. Djuanda 36) Bapak R.P. Suroso memikirkan bahwa Kantor Kementerian Sosial yang pada waktu itu berupa Gedung lama yang menurut istilah beliau seperti Gudang garam perlu segera diperbaiki dan Gedung di Jl. Nusantara 36 tidak cukup untuk menampung para pegawai dari Jakarta dan yang datang dari Yogyakarta, sebab pada waktu itu Kementerian Sosial R.I. di Yogyakarta harus digabungkan dengan Kementerian Sosial RIS yang ada di Jakarta, setelah RIS hilang menjadi Republik Indonesia.
4. Segera oleh Bapak R.P. Suroso diusahakan tambahnya Kantor untuk memperluas Gedung Kementerian Sosial di Jl. Nusantara 36 dan dibelinya Gedung di Jati Petamburan No. 4 untuk dijadikan Kantor Jawatan Sosial.
5. Kemudian Gedung Jl. Nusantara 36 dirombak dan dijadikan Gedung bertingkat 2, bagian depannya, sehingga tidak seperti Gudang Garam lagi.

6. Tidak hanya Bapak R.P. Suroso memikirkan perluasan Kantor Kementerian Sosial saja dengan diperluas Gedung lagi di Jalan Jati Petamburan No. 4 tetapi beliau juga memikirkan Perumahan bagi para Pegawainya, maka dibangun rumah-rumah dinas untuk para pegawainya di:

- a. Jelambar 15 rumah
- b. Setia Budi 10 rumah
- c. Cipinang 12 rumah
- d. Keb. Baru 4 rumah.

juga Balai-Balai Peristirahatan untuk Pegawai Negeri yang ada di Ciambuluit Bandung diperbaiki dan dibangun lagi Balai Peristirahatan Kementerian Sosial di Ciloto Puncak.

7. Pada waktu Jawatan Gedung-Gedung Negeri membikin rumah-rumah untuk Pegawai Negeri di Kebayoran Baru, di Pejompongan dan juga di lain-lain Daerah setelah rumah-rumah tersebut ditempati oleh para Pegawai Negeri maka sebagai Menteri Sosial beliau mengusulkan agar rumah-rumah yang dibangun oleh Jawatan Gedung-Gedung Negeri dapat diangsur oleh para Pegawai Negeri yang menghuninya dan usul tersebut disampaikan kepada Bapak Menteri Keuangan R.I. yaitu Bapak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang pada waktu itu menjadi Menteri Keuangan R.I. sehingga usulnya dapat dibahas dalam Sidang Kabinet dan akhirnya menjadi Peraturan Pemerintah yang memutuskan bahwa rumah-rumah Negeri tersebut dapat diangsur dalam waktu 5 tahun.

8. Tetapi keputusan Pemerintah tersebut belum dilaksanakan oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan kebetulan sekali pada waktu ada perombakan Kabinet Bapak R.P. Suroso menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan pada saat itu Peraturan Pemerintah yang mengatur angsuran pembelian rumah Negeri dijalankan sehingga mulai tahun 1955 para Pegawai Negeri yang menempati rumah-rumah Negeri dapat

membeli rumah-rumahnya dengan mengangsur dalam waktu 20 tahun dan dapat melunasi dalam waktu 5 tahun.

9. Hingga beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri dan memimpin Gerakan Koperasi sampai detik terakhir sebelum beliau meninggal pada tanggal 16 Mei 1981, beliau tetap berjuang untuk mendapatkan modal dari Pemerintah melalui Koperasi Pegawai Negeri untuk membangun rumah-rumah bagi Pegawai Negeri dengan jalan jangka panjang melalui Tabungan oleh Pegawai Negeri dan jangka pendek mendapatkan modal agar Pegawai Negeri yang sudah mempunyai tanah atau sudah mempunyai rumah yang kecil bisa diberikan modal untuk membangun rumahnya di atas tanahnya sendiri atau memperbaiki dan memperluas rumahnya yang sudah ada, berhubung dengan tambahnya anggota keluarga dengan pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri yang diangsur.
10. Di samping Bapak R.P. Suroso memikirkan perumahannya bagi Pegawai Negeri yang kami sebutkan di atas beliau juga memikirkan keperluan-keperluan lain sebagai Pegawai Negeri beserta anggota keluarganya.
11. Untuk keperluan tersebut maka beliau sejak tahun 1952 mulai menggerakkan pembentukan-pembentukan Koperasi Pegawai Negeri di tiap-tiap Kantor mulai dari Pusat sampai di Daerah-daerah. Dan hal tersebut direstui oleh Pemerintah dengan keluarnya Surat Edaran kepada para Menteri dari Perdana Menteri RI tanggal 22 Nopember 1954 No. 34146/54 mengenai Pembentukan Koperasi Pegawai Negeri dan Koperasi Pegawai Negeri bisa dapat bahan-bahan pokok dari YUBM, BAT, NIVAS, BPM dan UNILEVER.
12. Di samping itu ada surat Edaran lagi dari Perdana Menteri RI kepada para Menteri tanggal 7 April 1955 No. 9190/55 yang membebaskan para Pegawai Negeri untuk keperluan Koperasi Pegawai Negeri.

13. Perjuangan Bapak R.P. Suroso untuk kesejahteraan Pegawai Negeri terus berlangsung hingga dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1969 dan No. 22 tahun 1970 Koperasi Pegawai Negeri mendapat modal dari Potongan Gaji Pegawai Negeri sehingga dengan modal tersebut Gerakan Koperasi Pegawai Negeri dapat berkembang terus. Dan modal dari Keppres tersebut di atas yang berjalan mulai tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 selama 5 tahun Gerakan Koperasi Pegawai Negeri memperoleh modal sekitar Rp. 2¼ milyar, yang hingga kini berputar terus sebagai usaha Simpan Pinjam, Pembangunan Proyek-Proyek Daerah untuk keperluan Pegawai Negeri, mendirikan Pagrik Sepeda Turangga yang pada tahun 1974 diresmikan oleh Bapak Presiden RI, dan untuk lain-lain keperluan guna kesejahteraan Pegawai Negeri dan modal tersebut tidak berkurang tetapi terus berkembang.
14. Bapak R.P. Suroso juga sejak tahun 1952 pada waktu menjadi Menteri Sosial memikirkan kesehatan masyarakat, maka pada tahun 1952 beliau sebagai Menteri Sosial dan Ketua Yayasan Dana Bantuan telah membeli tanah 44 HA di Cilandak Kebayoran Baru dengan harga yang sangat murah dengan cita-cita di atas tanah tersebut dapat didirikan Rumah Sakit, karena beliau pada waktu itu sudah mulai memikirkan bahwa Jakarta akan menjadi padat dan tanah akan menjadi mahal, maka untuk perluasan Rumah Sakit perlu didirikan agak jauh dari kota, maka dibelinya tanah tersebut.
Atas usaha beliau didirikan Yayasan Ibu Sukarno dan beliau duduk sebagai Penasehatnya, dan atas usaha beliau bisa dikumpulkan modal pada tahun 1953 sekitar Rp. 28 juta dan di atas tanah yang 44 HA itu dapat didirikan Rumah Sakit yang diberi nama Rumah Sakit Ibu Sukarno yang pada tahun 1968 Yayasan Ibu Sukarno menjadi Yayasan Fatmawati yang diketuai oleh Bapak R.P. Suroso dan Rumah Sakit Ibu Sukarno menjadi Rumah Sakit Fatmawati.

Hingga sekarang Yayasan Fatmawati masih terus berdiri dan diketuai oleh Bapak R.P. Suroso sampai meninggalnya beliau tanggal 16 Mei 1981. Dan Rumah Sakit Fatmawati masih terus berkembang hingga sekarang.

15. Perjuangan beliau terakhir ini ialah untuk mendapatkan Keputusan dari Menteri Kesehatan untuk menjadikan Rumah Sakit Fatmawati menjadi Rumah Sakit Swasta bersubsidi dan untuk hal ini masih dalam perjuangan.
16. Rumah Sakit Fatmawati dalam master plane-nya 20 tahun akan menjadi Rumah Sakit besar yang modern untuk dapat menampung 1.000 tempat tidur. Karena tanahnya luas meliputi 44 HA, maka Rumah Sakit Fatmawati bisa menjadi Rumah Sakit yang terbesar di Jakarta mungkin di Seluruh Indonesia.
Jadi Bapak R.P. Suroso sudah - sejak tahun 1952 melihat jauh mengenai kesehatan masyarakat.
17. Di dalam memperjuangkan nasib para Perintis Kemerdekaan beliau sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan telah berjuang sampai Gedung Pola di Pegangsaan Timur no. 56 menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan yang diresmikan oleh Bapak Presiden Suharto.
18. Malahan pada tanggal 5 Mei 1981 beliau akan menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan tentang usahanya sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan. Akan tetapi karena beliau masih dalam keadaan sakit karena baru saja menjalani operasi mata di Rumah Sakit mata AINI di Kuningan Jakarta, maka beliau menunda untuk menghadap Presiden pada tanggal 25 Mei 1981, akan tetapi pada tanggal 16 Mei 1981 beliau telah meninggal dunia dan pada malamnya jam 21.00 Bapak Presiden dan Ibu Tien Suharto telah datang melayad di tempat kediaman beliau di Jalan Krawang No. 2 Jakarta. Dan sebelumnya pada jam 19.30 Bapak Wakil Presiden dan Ibu Adam Malik juga memerlukan datang melayad.

Demikian yang dapat kami sumbangkan sebagai bahan-bahan untuk penyusunan Riwayat Hidup Bapak R.P. Suroso selama kami mendampingi beliau dari tahun 1952 hingga wafatnya tanggal 16 Mei 1981.

Jakarta, 2 Juni 1981.

ttd.

(MARYUN SUDIROHADIPRODJO)

P E R S R E L E A S E

Pada hari Selasa tanggal 16 Desember 1980 dalam Rapat Anggota Induk Koperasi Pegawai Negeri yang diselenggarakan di WISMA HASTA Senayan Jakarta yang dihadiri oleh Wakil-wakil dari Gabungan Koperasi Pegawai Negeri dari Propinsi-Propinsi Daerah Tingkat I Seluruh Indonesia dan dari fihak Pemerintah hadir Bapak Menteri Perdagangan dan Koperasi dan Menteri Dalam Negeri dan dari Direktur Jenderal Koperasi beserta Stafnya Bapak R.P. Suroso Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri menyatakan pengunduran diri dari Ketua Umum IKPN karena sudah memimpin IKPN sejak berdirinya lebih dari 30 tahun.

Pada bulan Nopember 1979 IKPN telah memperingati HUT-nya yang ke 25 di Balai Sidang Senayan Jakarta, di mana Bapak Presiden R.I. beserta Ibu Tien Suharto hadir. Pada kesempatan tersebut Bapak Presiden telah mengangkat Bapak R.P. Suroso menjadi Bapak Koperasi Pegawai Negeri.

Bapak R.P. Suroso adalah Tokoh Nasional yang telah beberapa kali menjabat menteri sebagai Menteri Perburuhan, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan mendapat penghargaan dari Pemerintah R.I. berupa:

1. Bintang Mahaputra Ahli Pradana,
2. Bintang Gerilya,
3. Satya Lencana Perintis Kemerdekaan Indonesia,
4. Satya Lencana Karya Satya Kelas I,
5. Satya Lencana Perang Kemerdekaan,
6. Satya Lencana Pembangunan.

Kini beliau berusia 87 tahun pada tanggal 3 Nopember 1979 kini telah lanjut usianya tidak memungkinkan lagi beliau bisa aktif lagi menjalankan tugasnya sebagai Ketua

Umum IKPN sungguhpun sebagai pejuang beliau tetap gigih dalam perjuangan untuk memimpin Gerakan Koperasi Pegawai Negeri pada khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya.

Di samping beliau menjadi Ketua Umum IKPN, beliau adalah Ketua Badan Pertimbangan Perintis Kemerdekaan, Ketua Yayasan Fatmawati yang mendirikan Rumah Sakit Fatmawati di Cilandak Jakarta Selatan di atas tanah seluas 44 HA yang pada tahun 1952 beliau yang membelinya pada waktu masih menjadi Menteri dan Ketua Yayasan Dana Bantuan. Tanah 44 HA itu beliau beli dengan harga murah sekali dengan cita-cita didirikan Rumah Sakit, dan cita-cita itu telah terjadi di atas tanah itu beliau dirikan Rumah Sakit Fatmawati yang kini menjadi Rumah Sakit yang luas di Jakarta Selatan.

Dalam usia yang sudah lanjut itu beliau tetap memimpin usaha-usaha itu semua. Tetapi beliau telah pula mendidik kader-kadernya untuk dapat menggantikan beliau nanti. Kini dengan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum IKPN atas permintaan dari beberapa anggota IKPN beliau diminta untuk memilih gantinya sebagai Ketua Umum IKPN sebab penggantinya itu diminta oleh para anggota tersebut juga seorang tokoh Nasional. Dan yang tahu hal itu hanya beliau.

Beliau telah mencari-cari dan akhirnya menemukan dan orangnya yaitu Bapak Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo seorang Ahli Ekonomi yang terkenal di Indonesia dan dunia Internasional dan pernah beberapa kali menjabat Menteri di Republik Indonesia. Bapak Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang kini menjabat Penasehat Ahli Pribadi Bapak Presiden R.I. menyanggupi untuk menggantikan Bapak R.P. Suroso sebagai Ketua Umum asal dipilih oleh para Anggota IKPN yang kini sedang Rapat di Jakarta. Bapak Presiden telah menyetujui pencalonan Bapak Prod. DR. Sumitro Djojohadikusumo untuk menggantikan Bapak R.P. Suroso sebagai Ketua Umum IKPN dan Bapak Presiden mendo'akan agar dapat disetujui oleh Ra-

pat Anggota IKPN. Pada pidato pengunduran diri sebagai Ketua Umum IKPN beliau merasa berat untuk meninggalkan Induk Koperasi Pegawai Negeri yang beliau telah pimpin lebih dari 30 tahun.

Pesanan beliau adalah agar penggantinya nanti bisa meneruskan cita-cita beliau dalam mensukseskan UUD-1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila. Koperasi sebagai wahana untuk mencapai Demokrasi Ekonomi berdasarkan kegotongroyongan yang Sosialis Religius, bukan sosialis komunistis tetapi berketuhanan Yang Maha Esa (Beragama). Cita-cita yang mulia sampai kemakmuran bersama tercapai yang adil.

Sungguhpun beliau meninggalkan Organisasi IKPN tetapi beliau tetap sanggup untuk tetap ikut memikirkan kemajuan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri pada khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya. Telah lebih dari 30 tahun dalam pengabdianya pada Gerakan Koperasi mengalami suka dukanya.

Pada periode tahun 1950 hingga 1958 Gerakan Koperasi maju dibawah pembinaan Kabinet Parlementer. Pada waktu itu pada permulaan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri atas inisiatif dari Bapak R.P. Suroso sejak tahun 1952 beliau sebagai Menteri Urusan Pegawai kemudian sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Parlementer merasakan bahwa kehidupan para Pegawai Negeri yang jumlahnya sekitar 1,5 juta beserta keluarganya berjumlah sekitar 7 juta mengalami kesukaran dalam hidupnya karenatidak bisa mencukupi dengan gajinya yang diterima untuk hidup setiap bulannya, maka timbul pemikiran beliau untuk mendirikan Koperasi Pegawai Negeri di tiap-tiap Instansi Pemerintah dari Pusat sampai di Daerah-daerah.

Dengan adanya Koperasi Pegawai Negeri di Instansi-Instansi, maka para Pegawai Negeri bisa secara gotong royong memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ternyata mendapat sam-

butan baik dari kalangan Pegawai Negeri dan mulai terbentuk Primer-primer Koperasi Pegawai Negeri di Instansi-Instansi. Primer-primer Koperasi itu mulai menggabungkan diri menjadi Pusat Koperasi di Daerah-daerah Tingkat II dan mendirikan Gabungan di Tingkat Propinsi dan kemudian menggabungkan diri dalam Induk Koperasi di Pusat yang kemudian menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri. Induk Koperasi Pegawai Negeri mendapat perhatian penuh dari Pemerintah pada waktu Kabinet Parlemerter itu.

Malahan IKPN bisa mendapat pinjaman dari Bank Indonesia sekitar Rp. 250 juta dengan tidak pakai bunga untuk pembelian kain batik dan textiel untuk para anggota Koperasi Pegawai Negeri yang terdiri dari Pegawai Negeri. Uang pinjaman itu tepat pada waktunya bisa kembali dan dengan pinjaman dari Bank Indonesia itu dengan tidak pakai bunga Koperasi Pegawai Negeri bisa mempunyai modal dari hasil penjualan batik dn textiel itu. Para anggota dapat beli barang-barang dengan mengangsur beberapa bulan sehingga dengan sisa hasil usahanya Koperasi Pegawai Negeri bisa mempunyai modal. Dan Pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Pegawai Negeri yang menjadi Pengurus Koperasi untuk mengurus Koperasinya.

Begitulah majunya Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang dipimpin langsung oleh Bapak R.P. Suroso yang mendapat dukungan dari Kabiner Parlemerter pada periode 1952 sampai 1958. Pada waktu itu jumlah anggota perorangan sekitar 1,3 juta.

Tetapi pada waktu mulai berdirinya Kabinet Presidentiil pada tahun 1959, maka Gerakan Koperasi mengalami kemunduran, sebab pada tahun 1960 modal Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang di Bank-Bank dibekukan oleh Pemerintah sehingga modalnya macet.

Di samping itu Gerakan Koperasi dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi yang menjadi Ketua KOKSI (Kesatuan Or-

ganisasi Koperasi Indonesia) dan KOKSI ada di bawah penguasaan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis). Hanya Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang dipimpin Bapak R.P. Suroso tidak diawasi oleh NASAKOM. Pada waktu itu periode 1959–1965 Gerakan Koperasi pada umumnya dan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri betul-betul mendapat kesukara-kesukaran dan apalagi setelah G-30-S pada tahun 1965 lebih-lebih merosotnya keadaan Gerakan Koperasi keseluruhannya.

Induk Koperasi Pegawai Negeri mencoba teta bertahan sungguhpun sudah kehabisan modal tetapi dengan penuh kegigihan Bapak R.P. Suroso berjuang dan dapat plafond kredit dari BRI tetapi bisanya dapat kredit harus pakai jaminan dari para Anggota Pengurus.

Dengan susah payah beberapa Pusat Koperasi Pegawai Negeri, Gabungan Koperasi Pegawai Negeri bisa mendapat kredit untuk usaha-usahanya tetapi harus tepat pada waktunya mengembalikan. Akhirnya permodalan Koperasi Pegawai Negeri sangat menipis dan untung para anggota Pengurusnya betul-betul mengabdikan dengan tidak menerima imbalan jasa yang sepenuhnya dan boleh dikatakan para anggota Pengurus Gerakan Koperasi Pegawai Negeri bekerja dengan sukarela dan mencukup-cukupkan gajinya sebagai Pegawai Negeri untuk hidup sekeluarga.

Bapak R.P. Suroso merasa bertanggung jawab sebagai Ketua Umum IKPN dan dengan sangat gigih berjuang untuk mencarikan modal bagi Gerakan Koperasi Pegawai Negeri dan pada tahun 1968–1969 beliau menghadap Bapak Presiden Suharto dan mengemukakan penderitaan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang terus memperjuangkan kesejahteraan bagi para anggotanya yang terdiri dari Pegawai Negeri semua.

Pada akhirnya hal tersebut dapat difahami oleh Bapak Presiden Suharto dan Gerakan Koperasi Pegawai Negeri (IKPN, INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU dan INKOPPOL) bisa mendapat bagian dari potongan gaji Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Polisinya.

Pada tahun 1969 keluarlah KEPPRES No. 36 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dengan KEPPRES No. 22 tahun 1970. Mulai saat itu atas perjuangan gigih dari Bapak R.P. Suroso Gerakan Koperasi Pegawai Negeri termasuk ABRI dan Polisinya mendapat modal dari potongan gaji dari Pegawai Negeri sampai akhir tahun 1974.

Selama 5 tahun Gerakan Koperasi Pegawai Negeri mendapat modal. Tetapi IKPN yang dulu pada tahun 1950–1958 sudah beranggotakan sekitar 1,3 juta hampir meliputi semua Pegawai Negeri di Indonesia sejak Orde Lama hingga kini mendapat kesukaran untuk mengembalikan jumlah anggotanya. Kini jumlah Pegawai Negeri sudah hampir 2 juta tetapi yang menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri Sipil hanya 600.000 saja kurang lebih 1/3 dari jumlah Pegawai Negeri. Ini semua karena mereka masih segan masuk karena takut tindakan Pemerintah Orde Lama dulu.

Kini IKPN harus masih bekerja keras untuk menjadikan semua Pegawai Negeri menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri semua. Kini semua Instansi dan para Gubernur Kepala Daerah membantu usaha tersebut untuk mendorong agar semua Pegawai Negeri menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri.

Pada tahun 1974 pada saat akan dihentikannya KEPPRES No. 22/1970 bantuan modal untuk Koperasi Pegawai Negeri dari potongan gaji Pegawai Negeri, dari fihak Direktur Jenderal Koperasi mau mengambil modal yang dari Koperasi Pegawai Negeri yang berasal dari KEPPRES No. 36/69 dan KEPPRES No. 22/1970. Dan ini diperkuat oleh Keputusan Bersama 3 Menteri. Tetapi Bapak R.P. Suroso Ketua Umum IKPN menentang tindakan itu,, karena keputusan 3 Menteri itu tidak kuat bukan Peraturan Pemerintah. Dan berkat bantuan Bapak Presiden modal itu tetap pada Koperasi Pegawai Negeri yang dilola oleh IKPN di bawah pimpinan Bapak R.P. Suroso sehingga kini Koperasi Pegawai Negeri masih terus bisa hidup dengan modal yang didapat dari KEPPRES No. 36 tahun 1969

dan KEPPRES No. 22 tahun 1970, yang telah berakhir pada akhir tahun 1974 dengan keluarnya KEPPRES No. 56 tahun 1974 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975.

Dengan modal yang didapat selama 5 tahun itu dari sebagian dari potongan gaji Pegawai Negeri itu Koperasi Pegawai Negeri bisa memperpanjang hidupnya. Modal itu tidak cukup untuk keperluan kesejahteraan Pegawai Negeri yang jumlahnya sekarang sekitar 2 juta dengan keluarganya sekitar 10 juta jiwa.

Maka IKPN di bawah pimpinan Bapak R.P. Suroso berjoang terus untuk mendapatkan tambahan modal. Dengan modal Rp. 105 juta IKPN mencoba pada tahun 1972 untuk membikin Pilot Proyek Pembangunan Perumahan untuk Pegawai Negeri di Jakarta yaitu di atas tanah 5 HA di Desa Bintaro Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang dulu masuk daerah Kabupaten Tangerang Jawa Barat.

Di Proyek itu didirikan 188 buah rumah dari type 25, 45, 54 dan 70, yaitu type-type ciptaan Departemen Pekerjaan Umum & Tenaga, Listrik (PUTL) dan Proyek Pembangunan Perumahan IKPN untuk Pegawai Negeri itu di bawah pengawasan dari Direktur Perumahan Rakyat Departemen PUTL yaitu Bapak Ir. Sardjono yang kini menjadi Exper PBB dalam soal Pembangunan Perumahan Rakyat. Di Proyek IKPN Bintaro itu telah dibangun 188 buah rumah yang semuanya terjual habis dengan mengangsur 5 tahun oleh Pegawai Negeri di Jakarta.

Di Komplek itu oleh DKI didirikan sebuah Sekolah Dasar dari modal INPRES. Ada Mushollah yang dibangun oleh IKPN. Dari contoh Proyek Bintaro dari IKPN itu kemudian mulai berdiri PERUMNAS yang ditangani langsung oleh Pemerintah.

Dari Proyek Perumahan Bintaro dari IKPN itu di Daerah timbul Proyek Perumahan Tumbuh yang dilaksanakan oleh Gabungan atau Pusat Koperasi Pegawai Negeri. Dengan mengalirnya permintaan modal untuk Rumah Tumbuh itu melalui IKPN, maka IKPN membutuhkan Modal sekitar Rp. 1 mil-

yard. Oleh Bapak R.P. Suroso Ketua Umum IKPN pada Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1979 hal tersebut diajukan kepada Bapak Presiden R.I. dan Bapak R.P. Suroso menghadap langsung pada Bapak Presiden di Istana Merdeka dan diterima baik oleh Bapak Presiden. Kini persoalannya baru ditangani oleh Bapak Menteri Muda Perumahan Rakyat bekerja sama dengan IKPN.

Pada akhir bulan Nopember 1980 ini oleh Bapak Menteri Muda sudah dikirimkan surat kepada Kabinet untuk pendirian suatu Unit Usaha Pembiayaan/Tabungan Perumahan IKPN untuk Pegawai Negeri dengan mendapat modal awal dari Bapak Presiden.

Diharapkan pada tahun 1981 Unit Usaha Pembiayaan/Tabungan Perumahan IKPN itu bisa mulai berdiri dengan mendapatkan modal awal dari Bapak Presiden. Kalau ini bisa terlaksana ini adalah perjoangan Bapak R.P. Suroso.

Bapak R.P. Suroso Ketua Umum IKPN telah pula mendirikan Pabrik Sepeda di Tangerang yang oleh Bapak Presiden R.I. pada tanggal 12 Juli 1974 pada Peringatan Hari Koperasi diresmikan dan diberi nama Pabrik Sepeda TURANGGA IKPN.

Mengingat akan kebutuhan rakyat kecil akan alat pengangkutan sederhana, maka sepeda itu akan memenuhi kebutuhan rakyat kecil termasuk Pegawai Negeri Golongan rendah di daerah-daerah sepeda itu sangat berguna.

Pada tahun 1953 pada waktu beliau menjadi Menteri dalam Kabinet Parlementer telah mendesak pada Pemerintah agar rumah-rumah dari Jawatan Gedung-gedung Negeri bisa dibeli oleh Pegawai Negeri dalam hal ini beliau bekerja sama dengan Bapak Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo yang pada waktu itu menjadi Menteri Keuangan.

Dan usul dari Bapak R.P. Suroso itu terkabul dan mulai tahun 1955 semua rumah-rumah Negeri bisa dibeli secara mengangsur 5 tahun oleh para Pegawai Negeri. Ini sekarang diteruskan oleh PERUMNAS dengan bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara.

Sebagai Ketua Umum IKPN sejak 30 tahun lebih Bapak R.P. Suroso terus gigih berjuang untuk kesejahteraan Pegawai Negeri karena beliau yakin kalau Pegawai Negeri semua sejahtera, maka 2 juta Pegawai Negeri yang sejahtera itu menjadi kader Gerakan Koperasi untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 135 juta itu.

Pada saat itulah maka UUD 1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila akan tercapai dan Demokrasi Ekonomi bagi rakyat Indonesia akan datang dengan Koperasi sebagai wahananya yang dengan gotong royong yang Sosialis religius akan mencapai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah politiknya Bapak R.P. Suroso. Berpolitik berdasarkan UUD-1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila.

Mudah-mudahan Bapak Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo dapat menerima amanah Bapak R.P. Suroso ini dan dapat meneruskan cita-cita sebagai pengganti beliau jadi Ketua Umum IKPN.

Bapak Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo yang mendapat kepercayaan dari Bapak R.P. Suroso untuk meneruskan cita-citanya sampai tercapai UUD - 1945 Pasal 33 dengan falsafahnya Pancasila.

Kita berdoa Tuhan Yang Maha Esa akan merestuinnya.

Jakarta, 16 Desember 1980
Kepala HUMAS IKPN,

(R. Maryun Sudirohadiprodjo).

LAMPIRAN VI

M.H. THAMRIN

Alih Bahasa : Moh. Husein Shadily

DE NATIONAL FRACTIE IN DE VOLKSRAAD

Het was op 27 Januari 1930, dat ondergetekende in zijn rede bij de Algemene Beschouwingen de oprichting aankondigde van de Nationale Fractie in de Volksraad, bestaande uit een tiental Volksraads leden, t.w. de heren Koesoemo Oetoyo (Midden-Java). Dwidjosewojo (Vorstenlanden), Datoek Kajo (Westkust van Sumatra), Mochtar (Palembang), Nja Arif (Atjeh). Soangkoepon (Ooskust van Sumatra), Pangeran Ali (Borneo), Soetadi (Midden-Java). Soeroso (Oost Java) en Thamrin (West Java); de laatste op tredende als voorzitter.

Taalkundig gesproken is de benaming van fractie feitelijk minder juist; fractie betekent immers volgens Koenen's woordenboek: „verenigde aanhangers ener staatkundige partij in een vertegenwoordigend lichaam”. De aangesloten leden waren geen aanhangers van eenzelfde staatkundige partij; velen waren zelfs geen lid van een politieke vereniging; deels waren zij in de Volksraad gekomen als gevolg van een onvolkomen kiesstelsel, anderdeels weer door het benoemingsrecht van den Gouverneur-Generaal. Ook is het nog de vraag, of the volksraad voldoet aan hetandere criterium, vervat in de toelichting van Koenen, n.l. het zijn van een vertegenwoordigend lichaam.

De benaming van fractie voor de tot stand gekomen groepering ind de Volksraad is dan ook het gevolg van een geldend gebruik in de Volksraad om elke groepering in dit lichaam als zodanig te kwalificeren.

*) Dikutup dari A. Zainoel Ihsan & Pitut Soeharto, *Aku Pemuda Kemaren Di Hari Esok*, Jayasakti, Jakarta, 1981, hal. 249-253.

Het is buiten kijf, dat de Nationale Fractie in de Volksraad als een staatkundige groepering is aan te merken. Ten overloede wordt zulks bewezen door het tweetal artikelen waaruit haar politieke belijdenis valt af te lezen.

Deze luiden als volgt:

Artikel 1. De nationale fractie in de Volksraad stelt zich ten doel de zo spoedig mogelijke onafhankelijkheid van Indonesia.

Artikel 2. Zij tracht dit doel te bereiken:

- a. door te ijveren staatkundige hervormingen;
- b. door te streven naar opheffing van alle politieke, economische en intellectuele verschillen, welke het gevolg zijn van de koloniale antithese;
- c. door het aanwenden van alle daarvoor in aanmerking komende wettige middelen.

Ondanks de bondige formulering van doel en middelen van de fractie en de heterogene samenstelling van haar ledengroep — deze zijn immers vertegenwoordigers van onderscheidene delen van Indonesia — heeft de ervaring gedurende het tienjarig bestaan der fractie aangetoond, dat de fractie zowel in haar uitingen als in haar stemmingen een homogene groep is. Hoewel formele sancties tegen indisciplinaire handelingen der leden niet bestaan, is het desondanks nimmer voorgekomen, dat maatregelen genomen moesten worden tegen enig lid der fractie. Zij stemde altijd zeer gedisciplineerd behoudens de gevallen, waarbij „vrije stemming” is aangekondigd dan wel overeengekomen. De hechste fundatie van de fractie is te zoeken in het bewustzijn en in de wil der leden van te behoren tot eenzelve natieeenheid van alle Indonesiers zonder enige uitzondering, en van de noodzaak tot het vormen een eenheidsfront tegen de belagers van de Indonesische eenheids-idee.

Gaan wij de factoren na, welke tot de oprichting van de Nationale Fractie hebben geleid, dan wordt het duidelijk, dat

die oprichting een logisch gevolg is geweest van de zich voor de oprichting psychologische processen in de Indonesische politieke wereld.

In 1927 werd de Partai Nasional Indonesia door Ir. Soekarno opgericht, welke vereniging in de volgende jaren een nationaal reveil over de gehele linie der Indonesiers tot gevolg heeft gehad. Door de bezielende leiding van Ir. Soekarno werden alle tot dusver versnipperde nationale krachten tot een hechte eenheid aan een gesmeed en over de ganse Indonesische politieke line werd de wil tot concentratie met de dag groter.

In de Indonesische politieke wereld buiten de Volksraad werd de federatie van Indonesische politieke partijen (de P.P. K.I.) tot stand gebracht, waardoor het streven naar eenheid nog sterker tot uiting kwam.

Toch zou de oprichting van een nationale politieke concentratie in de Volksraad nog enige tijd op zich hebben laten wachten, indien de Regering in December 1929 niet tot een daad tegenover de Indonesische politieke wereld was overgegaan, waardoor de totstandkoming bespoedigd werd. Het was in December 1929 toen de befaamde politionele huiszoeken bij alle politieke voormannen van alle partijen over geheel Indonesia plaats vonden.*)

Hadden enkele twijfelaars voordien nog het gevoel, dat de Regering een scheiding maakte tussen „gematigde” an „ex-

*) *Noot van den Schrijver.*

Batavia 50 huiszoeken, Bandoeng 41 huiszoeken, Cirebon 24, Pekalongan 42 huiszoeken, Soekabuemi en Tjiandjoer 31 huiszoeken, Solo 11, Koedoes 6, Djocja 35 huiszoeking, Padang 2, Medan 25, Semarang 30, Tebing Tinggi aantal onbekend, Pangkalan Brandan 12, Krawang 25, Serang bij alle mensen die aan politieke doen, Garoet 20, Malang onbekend, Blitar idem, Palembang idem, Gresik 6, Buitenzorg 20, Soerabaja geschat 20, Telokbetong aantal onbekend, Bandjarmasin 5, (zie Soeloeh Ra'jat Indonesia No. 1, ddo 1. Januari 1930), Loboek Pakam en Galang bij 2 B(oedi) O(oetomo)-scholen. Tandjoeng Balan verschillende huiszoeken. Medan 25, Siantar 8 Pangkalan Brandan 12, Makasar 18, Bindjei 5 en in de omstreken 3 (zie Bat. Nwbi 31 December 1929)

(Handelingen Volksraad: zittingsjaar 1929/'30, blz, 1651).

treme” nasionalisten, de plaats gehad hebbende huiszoekingen bewezen zonneklaar dat de gedachte scheiding en onderscheiding – zo deze al bestonden – niet meer waren dan een theoretische, en dat het wantrouwen der Regering tegen de Indonesische politieke beweging zich feitelijk uitstreckte over de gehele linie zonder enig onderscheid. Nu ook de „gematigde” over een kam werde geschoren met de „extreme” elementen, was er ook voor de eersten geen aanleiding meer om geen kleur te bekennen.

FRAKSI NASIONAL DALAM VOLKSRAAD

Pada tanggal 27 Januari 1930 penulis, dalam pidato Pemandangan Umum, memaklumkan terbentuknya Fraksi Nasional dalam Volksraad yang terdiri dari sepuluh orang anggota, yaitu tuan-tuan Koesoemo Oetojo (Jawa Tengah), Dwidjosewojo (Daerah Kesultanan), Datoek Kajo (Sumatra Barat), Mochtar (Palembang), Nja Arif (Aceh), Soangkoepon (Sumatra Timur), Pangeran Ali (Kalimantan), Soetadi (Jawa Tengah), Soeroso (Jawa Timur) dan Thamrin (Jawa Barat); yang terakhir bertindak sebagai ketua.

Menurut ilmu-bahasa, pemberian nama 'fraksi' sebenarnya kurang tepat; menurut Kamus Koenen, berarti: "gabungan pengikut suatu partai politik dalam suatu badan perwakilan". Anggota-anggotanya yang tergabung bukanlah pengikut suatu partai politik yang sama; banyak di antaranya bukan pula anggota dari perkumpulan politik; sebagian masuk volksraad melalui sistem pemilihan yang tidak sempurna, selain daripada itu, ada juga yang diangkat oleh Gubernur-Jendral. Masih menjadi pertanyaan pula, apakah Volksraad memenuhi kriteria lain dalam penjelasan Koenen, yaitu perwujudan dari badan perwakilan.

Pemberian nama fraksi untuk penggolongan yang diadakan dalam Volksraad merupakan kebiasaan yang berlaku dalam Volksraad untuk menentukan jenis (qualificeren) setiap golongan yang terdapat dalam badan itu.

TIDAK dapat disangsikan lagi bahwa Fraksi Nasional dalam Volksraad merupakan penggolongan politik yang harus diperhatikan. Apalagi yang demikian telah dibuktikan oleh dua buah artikel di mana.

Ayat 1 : Fraksi Nasional dalam Volksraad bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secepat mungkin.

Ayat 2 : Mereka mencoba mencapai tujuan ini dengan:

- a. menggalakkan perubahan-perubahan politik;
- b. menuntut penghapusan segala perbedaan politik, ekonomi dan intelektual yang merupakan akibat antiese kolonial.
- c. menggunakan semua ikhtiar yang dipandang syah untuk maksud tersebut.

Walaupun tujuan dan ikhtiar fraksi dirumuskan secara ringkas dan susunan keanggotaannya yang beraneka-ragam (heterogene) – karena mereka terdiri dari wakil-wakil berbagai bagian Indonesia – pengalaman dalam usianya yang sepuluh tahun menunjukkan bahwa baik dalam ucapan maupun pemberian suara merupakan satu kelompok yang sama (homogene). Walaupun tidak ada sanksi formal terhadap tindakan-tindakan yang tidak tertib (indisciplinair), namun belum pernah terjadi bahwa seorang anggota fraksi ditindak. Mereka selalu sangat tertib memberikan suaranya, kecuali dalam persoalan di mana "sudah diberikan dan disetujui kebebasan pemberian suara". Dasar fraksi yang kokoh itu dapat dicari dalam kesadaran dan kemauan anggota-anggotanya yang merasa tergolong dalam kesatuan-bangsa yang sama tanpa terkecuali dari seluruh rakyat Indonesia dan kewajiban untuk membentuk satu front kesatuan: (eenheids front) untuk menghadapi lawan cita-cita kesatuan tersebut.

KALAU kita mengikuti faktor-faktor yang mencetuskan pembentukan Fraksi Nasional, maka akan jelas, bahwa pembentukannya itu merupakan konsekwensi logis daripada proses psikologis yang terjadi dalam dunia politik Indonesia.

Dalam tahun 1927 Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Ir. Soekarno, di mana dalam tahun-tahun berikutnya menghasilkan kebangkitan nasional segenap lapisan rakyat Indonesia. Dengan kepemimpinan Ir. Soekarno yang berpengaruh semua kekuatan nasional yang hingga saat itu terpecah-belah ditempa menjadi satu kesatuan yang kokoh dan semua barisan politik Indonesia didorong untuk berpadu yang kian hari kian bertambah besar.

Di luar kegiatan volksraad, dunia politik Indonesia membentuk federasi partai-partai politik Indonesia (P.P.P.K.I.), di mana tujuan kesatuan bertambah kuat didengung-dengungkan.

Pembentukan suatu konsentrasi politik nasional di dalam Volksraad tertunda beberapa waktu, tetapi jikalau Pemerintah tidak mengambil tindakan-tindakan terhadap dunia politik Indonesia dalam bulan Desember 1929, maka pembentukannya akan dipercepat. Dalam tahun 1929 diadakan penggeledahan rumah, yang dikenal dengan penggeledahan polisi terhadap semua pemuka-pemuka partai politik di seluruh Indonesia.*)

*) *Catatan Penulis :*

Pengeledahan rumah dilakukan di: Jakarta 50, Bandung 41, Cirebon 24, Pekalongan 42, Sukabumi dan Cianjur 31, Solo 11 Kudus 6, Jogja 35, Padang 2, Medan 25, Semarang 30, Tebing Tinggi (jumlahnya tidak diketahui), Pangkalan Brandan 12 Krawang 25, Serang (pada semua orang yang melakukan politik), Garut 20, Malang (tidak diketahui), Blitar (idem), Palembang (idem), Gresik 6, Bogor 20, Surabaya diperkirakan 20 Telokbetong (tidak diketahui), Banjarmasin 5, (lihat Soeloeh Ra'jat no. 1. ttg. 1 Januari 1930). Lubuk Pakam dan Galang pada 2 sekolah B(oedi)-O(etomo), Tangjungbalai beberapa penggeledahan-rumah, Medan 25 Siantar 8, Pangkalan Brandan 12, Makasar 18, Binjei 5 dan sekitar 3 (lihat Bat. Nwbi. 31 Desember 1929).

(Pembahasan Volksraad: tahun-sidang 1929/'30, hal. 1651).

Bila sebelumnya ada orang yang ragu-ragu masih merasakan bahwa Pemerintah membedakan nasionalis 'lunak' dan 'ekstrim', maka penggeledahan-pengeledahan rumah yang terjadi membuktikan dengan gamblang, bahwa pendapat yang memisahkan dan membedakan — walaupun ada — merupakan isapan-jempol (teori) belaka, dan bahwa kecurigaan Pemerintah terhadap pergerakan politik Indonesia pada hakekatnya meliputi seluruh lapisan tanpa perbedaan apapun. Karena sekarang unsur 'lunak' dengan unsur 'ekstrim' diperlakukan samarata, maka bagi yang pertama tidak ada lagi alasan untuk tidak mengakui warnanya.

KETERANGAN DARI :

Mr. A.K. PRINGGODIGDO*

2. PERGERAKAN SERIKAT SEKERDJA

Perpisahan perpustan pergerakan serikat sekerdja, mendjadi dua, jaitu dalam gabungan pegawai Negeri dan gabungan partikulir, terus berlangsung sesudah berdirinja P.V.P.N. (lihat hal. 104, 105).

Serikat² sekerdja pegawai negeri.

P.V.P.N. (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri) perpusatan serikat sekerdja pegawai Negeri, jang sedjak berdirinja ada dibawah pimpinan R.P. Suroso selalu hidup diluar pengaruh partai² politik dan P.V.P.N. sendiri tidak mempunjai tudjuan politik. Dengan djalan jang tenang Pusat ini beraksi untuk memperoleh perbaikan kedudukan para pegawai Negeri, menentang hal² jang merugikannja, serta djuga bertindak mengatur terhadap aksi anggotanja (organisasi²) masing². Suatu hal jang memudahkan pekerdjaan P.V.P.N. ialah ia hanja berhadapan dengan satu madjikan umum (Pemerintah) jang tidak bersikap bermusuhan terhadap P.V.P.N., oleh karena badan ini tidak „berpolitik”, dalam arti tidak meng-usik² hal pendjadjahan.

Dibawah ini kami sadjikan satu ichtisar tentang aksi² jang didjalankan oleh Badan Pusat itu dan oleh sebagian dari anggotanja, sesudah tahun 1930.

Tidak lama sesudah lahirnja P.V.P.N. maka Perserikatan Guru Hindia Belanda (P.G.H.B.) menggabungkan diri dalam

*) Dikutip dari A.K. Pringgodigdo, Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia, Pustaka Rakjat, Djakarta, 1960, hal. 167-74.

P.V.P.N. itu P.G.H.B. sendiri adalah satu gabungan¹); kemudian juga Perhimpunan Beambte Spoor dan Tram (P.B.S.T.) menggabungkan diri, sehingga jumlah anggota P.V.P.N. menjadi 13 perkumpulan dengan 29.700 anggota.

Dalam bulan Djuni 1931 P.V.P.N. memutuskan untuk menggabung dalam Internationaal Verbond van Vakverenigen (I.V.V.) Konjungtur, yang terus menerus turun, mempengaruhi keuangan Negeri dan menjebakkan Pemerintah mengumumkan niatnya akan mengadakan potongan dari gaji pegawai Negeri; oleh sebab itu dalam tahun ini aksinya yang terpenting ialah menentang kehendak Pemerintah tadi. Untuk dapat ber-djaga² lebih sempurna manakala terdjadi anggota² serikat sekerdja djatuh luar pekerjaan, maka P.V.P.N. memutuskan akan mengadakan fonds-pengangguran.

Anggota P.V.P.N. yang terbesar, yaitu P.G.H.B. (kaum guru) bulan Desember 1931 mengadakan rapat-protes, yang disertai juga oleh perkumpulan² politik Budi Utama, Pasundan, Sarekat Sumatra, Sarekat Ambon, Kaum Betawi, Persatuan Selebes. Yang dibitjarkan ialah maksud-rantjangan Pemerintah hendak mengadakan penghematan besar² an dilapang pengadjaran, yang tentu akan berakibat tidak saja guru² banyak kehilangan pekerjaannya tetapi juga menghambat kemajuan rakyat.

P.P.P.H. (pegawai pegadaian) yang juga bergabung dalam P.V.P.N. mengadakan aksi menentang niat Pemerintah untuk memperhentikan lk. 800 pegawai rendah.

Dalam tahun 1932 jumlah anggota perkumpulan² serikat sekerdja pegawai Negeri menjadi kurang, karena akibat penghematan diberbagai jabatan; tetapi sebaliknya penghematan dan pemotongan gaji itu, serta maksud Pemerintah mengadakan potongan pensiun, menjadi dorongan keras untuk terus memperkuat aksi dan ini semua menjebakkan aksi serikat se-

1) Jaitu dari 7 perkumpulan guru² dengan jumlah anggota 15.000, diantaranya ialah yang terbesar perkumpulan Volksonderwijzersbond (V.O.B.) yang mempunyai 103 cabang dan 9.000 anggota.

kerdja tidak mendjadi lemah. P.V.P.N. terus menentang tindakan² penghematan. Sudah tentu anggota² (organisasi²) sendiri masing² mengadakan aksi djuga. Penentangan P.B.S.T. dilakukan dalam kongresnja (jang ke-5) di Bandung; dalam kongres ini djuga diputuskan mulai 1 Djuli 1932 akan mendjadi anggota dari Internationale Transportarbeiders Federatie (I.T.F.). Aksi P.G.H.B. diadakan dalam kongresnja Djanuari 1933; waktu itu nama perkumpulan diubah mendjadi Persatuan Guru *Indonesia* (P.G.I.); badan ini waktu itu mempunjai 163 tjabang dengan 19.000 anggota.

31 Desember 1933 – 1 Djanuari 1934 P.V.P.N. mengadakan kongres tahunan di Surabaja; dalam kongres ini perhatian terutama ditudjukan kepada peraturan² Pemerintah, dibuat dalam bulan Djuni 1933, jang mengenai serikat sekerdja pegawai Negeri. Peraturan² ini memuat, bahwa pegawai Negeri tidak boleh mendjadi anggota sesuatu serikat sekerdja, djika didalam pengurusnja tidak ada paling sedikit satu pegawai Negeri. Dan anggota pengurus pegawai Negeri ini sebelum menerima djabatannja sebagai pengurus serikat sekerdja, harus menerangkan, bahwa ia djuga sebagai anggota pengurus serikat sekerdja itu akan selalu memperingati dan mempertahankan kepentingan Pemerintah djadjahan, dan ia akan menentang propaganda dan aksi jang dapat merugikan tata-tertib dan suasana baik dikalangan pegawai Negeri (keterangan-setia pada Pemerintah).

Kongres mentjela persempitan masuk mendjadi anggota serikat sekerdja dan paksaan memberi keterangan-setia itu.

P.P.P.H. (Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia) dalam kongresnja jang ke-20 bulan Djuli 1933 di Jogjakarta merundingkan lagi penghematan oleh Pemerintah jang begitu besar; nama perkumpulan diganti lagi dengan nama jang dulu P.P.P.B. (Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera).

2–6 Djanuari 1934 P.G.I., jang telah mempunjai 20.000 anggota terbesar di 175 tjabang, mengadakan kongresnja jang

ke-23 di Surabaya: soal pemitjaraan ialah terutama kedudukan para guru berhubung dengan krisis dan penghematan jang begitu hebat.

Djuli 1934 Persatuan Guru Bantu (P.G.B.) mengundurkan diri dari P.G.I., karena P.G.I. dianggap kurang tegas dan giat mempertahankan kepentingan golongan guru bantu; P.G.B. menyalahkan sikap P.G.I. bahwa dengan berlakunja peraturan gadji baru, golongan guru bantu sangat djatuh, dikebelakangkan dalam kedudukannja dan gadjinja.

Perkumpulan² guru lainnja tetap terus bersatu dalam P.G.I. jaitu P.G.A.S. (Persatuan Guru Ambachtsschool), V.O.B. (Volksonderwijzersbond), O.K.S.B. (Oud Kweekscholieren Bond), P.N.S. (Perkumpulan Normaalschool) dan H.K.S.B. (Hogere Kweekscholieren Bond).

Dalam tahun 1934 ini djabatan² mendapat „penghargaan-baru” ini (semua gadji turun, hanja jang satu lebih banjak dari pada jang lain): P.V.P.N. sebagai badan persatuan mendapat kritikan dari pers nasional berupa kritik P.G.B. terhadap P.G.I. tadi, jaitu tjelaan sikapnja terlalu lemah terhadap tindakan² Pemerintah memperketjil djumlah pegawai dalam djabatan² dan penghematan² lainnja.

20–22 April 1935 P.V.P.N. mengadakan kongres ke-4 di Djakarta: mengingat pada keadaan, maka dengan sendirinja terutama hal tindakan² krisis dan peraturan gadji baru jang mendjadi pemitjaraan. Rapat² -protes dalam tahun ini djuga diadakan oleh masing² perkumpulan serikat sekerdja. Djumlah anggota P.V.P.N. selama tahun 1935 mendjadi kurang (8.000) dan achir tahun ini berdjumlah 22.600.

Kongres P.V.P.N. ke-5 di Semarang achir bulan Mei 1936 a.l. memutuskan: 1. Karena protes jang diadakan dalam tahun 1935 menentang „gadji kedaerahan” tidak ada buahnja, sikap Pemerintah Hindia Belanda tidak berubah, maka P.V.P.N. ingin berhubungan langsung dengan Parlemen di Negeri Belanda, agar *disana* dapat diadakan penentangan terhadap peraturan

an gadji ini; 2. mengirimkan utusan ke-kongres-kaum-buruh di Tokio.

Djumlah anggota P.V.P.N. pada penghabisan tahun 1936 dari semua (13) perkumpulan jang bergabung tinggal tidak lebih dari 20.690.

P.P.P.B. (pegawai pegadaian) dalam kongresnya di Jogjakarta Pebruari 1936 mengambil sikap jang hampir bersamaan dengan P.V.P.N.; diputusnja: bahwa terhadap peraturan „gadji kedaerahan” dan peraturan „pekerdja-bulanan” tidak akan mengadakan protes²an lagi, tetapi mengambil djalan „dokumentasi dan petisi”. Dengan „dokumentasi” dimaksudkan mengumpulkan bukti² jang njata, didjadikan buku² ketjil jang lalu dikirimkan kepada badan² Pemerintah di Indonesia dan Negeri Belanda, dan djuga kepada pers. Di Eropah buat hal ini akan diminta bantuan dari Internationaal Verbond van Vakverenigen. „Petisi” akan dimadjukan dengan djalan mengumpulkan tandatangan pegawai pegadaian jang lalu akan dikirimkan kepada Parlemen di Negeri Belanda dan kepada Dewan Rakjat(Volksraad).

Kongres P.G.I. ke-25, tgl. 25–29 Nopember 1936 di Ma-diun, menentang maksud Pemerintah untuk memindahkan urusan pengadjaran dari tangan Pemerintah Pusat ketangan Pemerintah Daerah, berhubung kurang perlengkapan dan terbatasnja keuangan Pemerintah Daerah itu; dichawatirkan sebagai akibatnja: kemunduran pengadjaran.

Dalam kongresnja jang ke-6 tgl. 25–26 Desember 1937 di Solo, P.V.P.N. mengambil 2 mosi. Jang pertama menolak „B.B.L. 1938” (peraturan gadji baru lagi jang mengganti peraturan bar dari 1934) dengan alasan, bahwa peraturan itu didasarkan pada kulit (bangsa) dan buat beberapa djabatan rendah „peraturan-kedaerahan” (jang mengadakan perbedaan dalam pokok gadji untuk masing² daerah) masih terus dilangsungkan. Mosi kedua mendesak agar ditjabut peratturan „buruh-bulanan” dan „pekerdja-biasa” (dua golongan ini tidak bisa men-

djadi pegawai tetap). Djumlah anggota achir 1937 naik lagi sampai 22.386 (13 perkumpulan).

Djuga serikat sekerdja pegawai masing², diantaranya P.P.B.B. dalam kongresnja ke-23 di Jogja (Mei 1937) dan P.P.S.T. jang berkongres di Djakarta April 1937, seperti biasa membitjarakan soal² gadji ini, P.G.I. dalam kongresnja jang ke-26 (12–17 Nopember 1937 di Bandung) memperingati berdirinja tjukup 25 tahun; sedang kongres itupun mengeluarkan pengharapan supaja diadakan kewadjiban-beladjar umum (leerplicht).

Nopember 1938 P.G.I. berkongres (jang ke-27) di Malang; diambilnja 2 mosi, satu tentang gadji² baru dan lainnja tentang penjerahan urusan pengadjaran kepada Pemerintah Daerah; penjerahan ini (untuk kepentingan pengadjaran) seharusnya didahului oleh perbaikan tjara memilih (kiesstelsel) dan perbaikan perhubungan keuangan Daerah terhadap Negeri.

Dalam kongresnja jang ke-8, diadakan di Bandung 29–31 Djanuari 1939 P.V.P.N. mengambil putusan seperti berikut:

Terhadap peraturan gadji:

- a. „B.B.L.-1938” tidak memberi kepuasan kepada pegawai Negeri bangsa Indonesia, sebab antara gadji² masih banjak jang tidak mentjukupi untuk hidup sederhana.
- b. perbedaan gadji antara pegawai tinggi, menengah dan rendah masih sangat besar.

Terhadap „peraturan buruh-bulanan” dan „pekerdja-biasa”

- a. Peraturan ini timbul dalam waktu *krisis*, waktu keadaan memaksa sekali.
- b. sebetulnja tidak ada batas jang djelas antara pegawai Negeri, buruh-bulanan dan pekerdja-biasa;
- c. peraturan² ini harus selekas mungkin ditjabut dan keadaan sebelum krisis, waktu pegawai Negeri rendahan dapat diangkat mendjadi pegawai tetap, harus diadakan lagi.

Terhadap gadji-minimum:

- a. banjaknja pengangguran, adanja nafsu dikalangan kaum madjikan untuk memberi upah se-rendah² nja tidak adanja gerakan serikat sekerdja jang tersusun kuat, itu semuanja menjebabkan kaum madjikan leluasa berbuat semaunja dalam menetapkan gadji buruh partikulir, oleh sebab itu upah dibuat sangat rendah.
- b. berhubung dengan jang tersebut diatas, upah kaum buruh Pemerintah jang termasuk dalam peraturan „pekerdja-biasa”, jakni upah jang didasarkan pada upah ditempat masing², djuga rendah sekali.
- c. oleh karena itu perlu selekas mungkin diadakan peraturan gadji-minimum untuk buruh partikulir.

Terhadap peraturan² sosial:

- a. tidak adanja „undang-undang sosial” (sociale wetgeving) berarti tidak adanja perlindungan bagi kaum buruh pada umumnja. Lebih² buruh-partikulir sama sekali tergantung kepada madjikannja;
- b. „undang² sosial” memberi pegangan, baik pada madjikan baik pada buruh;
- c. undang² sosial dapat menjingkirkan pertentangan antara kapital dan buruh, pertentangan jang tidak diingini oleh P.V.P.N.

Terhadap lama-waktu-bekerdja:

- a. untuk mendjaga djangan sampai kaum buruh partikulir bekerja terlalu lama, harus diadakan perbatasan;
- b. perbatasan lama-waktu-bekerdja untuk kesehatan buruh memang sangat dibutuhkan; peraturannja harus dibuat dengan mengingati keadaan² di Indonesia.

Terhadap fonds anak jatim pegawai Negeri bangsa Indonesia:

- a. alasan² jang dikemukakan oleh Pemerintah menerangkan apa sebabnja belum diadakan fonds anak jatim pegawai Negeri Indonesia, bukanlah hal² jang tidak boleh dihindarkan;
- b. mengingat rasa keadilan, mengadakan fonds ini tidak boleh ditangguhkan lagi.

Terhadap pasal 161 bis undang² Hukum Pidana: menjatakan bahwa sama sekali bukanlah maksud gerakan serekat sekerdja untuk mengadakan pemogokan, malahan mengakui pula perlunya larangan-mogok dipelbagai perusahaan (misalnja di perusahaan kereta api dan rumah sakit, tetapi P.V.P.N. mengharap pasal ini ditjabut karena susunan kata² nja kurang terang dan bersifat sangat luas; ini mempermudah mengartikan dan memakainja tidak betul.

Dalam tahun 1939 itu djuga, Dr. Sukirman (pemimpin P.I.I., djuga ketua perkumpulan pegawai pegadaian P.P.P.B.) pergi ke Geneve sebagai penasehat N.V.V. (Nederlands Verbond van Vakverenigen) dalam konperensi-buruh internasional; dalam perdjalanannya ini ia mempergunakan kesempatan atas nama P.P.P.B. dan P.G.I. mengundjungi Menteri Djadjahan di Den Haag memadjukan permintaan perbaikan kedudukan buat pegawai Negeri Indonesia pada umumnja dan untuk pegawai pegadaian dan guru khususnja. Djuga dimintanja perhatian tentang lama-waktu-bekerdja dan perbedaan-menurut-kulit dalam djabatan pegadaian, dan djuga peraturan buruh-bulanan dan pekerdja-biasa jang sangat tidak memuaskan itu bagi orang² jang terkena.

31 Mei 1939 P.V.P.N. memperingati hari lahirnja tjukup 10 tahun. Dalam konperensinja pada 25 Pebruari 1940 federasi ini memutuskan mengadakan aksi, di-mana² pada satu hari, supaja permintaan agar mendapat tambahan oleh karena kemahalan lekas terkabul.

Kongres P.P.S.T. tg. 11–15 September 1941 di Semarang berpendapatan perlu ditetapkan¹) :

1. upah-minimum sehari dalam djabatan kereta-api dan trem hendak f 0.50 banjaknja;
2. dalam waktu 28 hari se-kurang² nja diberi 4 hari-mengaso, sedang upah tetap penuh dibajar;
3. satu hari-kerdja paling lama 8 djam;
4. peraturan dendaan dihilangkan dari peraturan hukuman pegawai;
5. kepada pegawai termasuk dalam peraturan 'M.D.R. (Maanden Dalgoners Reglement) dalam satu tahun diberikan waktu beristirahat 12 hari;
6. Badan-Pendamaian dihilangkan, diganti dengan „Badan pengamat² soal perburuhan antara pegawai kereta-api dan trem”;
7. diadakan „Badan Penjelesaian” (untuk memeriksa dan mengurus perselisihan);
8. didirikan suatu „Hakim Pengadilan buat pegawai Negeri”.
9. peraturan pertanggungangan diwaktu tua buat buruh partikular jang bergadji se-kurang² nya f 25.—

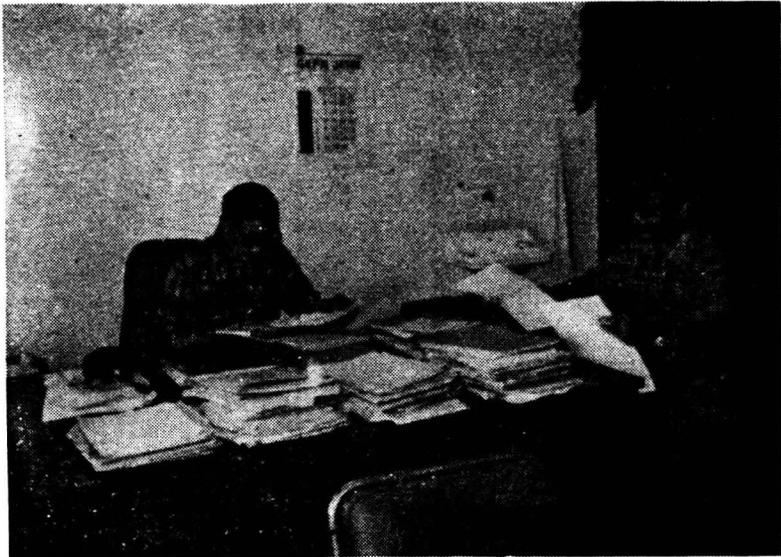
Sebelum itu, yakni pada tg. 18 Mei 1941 pengurus besar perkumpulan ini dalam rapatnja telah memutuskan untuk menjokong pendirian P.V.P.N. tentang terlaksanaja „upah-ukuran-pasifik” (Pacific loonpeil) buat semua kaum buruh dan minta bantuan segenap kaum buruh dan pergerakan rakjat, sukalah berdjuaug buat hal ini.

Ketua serikat sekerdja pegawai kereta api jang besar ini. Mr. Hindromartono, dalam tahun itu pergi kekonperensi buruh internasional di New York²) sebagai penasehat perwakilan Negeri Belanda.

- 1) Pasal² ini seperti djuga pasal² dalam kongres P.V.P.N. 1939 disebutkan disini untuk memberi pemandangan tentang keinginan² jang tersimpan dalam dada perkumpulan² serikat sekerdja pegawai Negeri dalam tahun² itu.
- 2) Kembali bulan Maret 1942, tepat sebelum Pemerintah Hindia Belanda menjerah kepada tentera Djepang.

Pada achir masa pergerakan rakjat jang diuraikan di atas, P.V.P.N. didalamnja mempunjai 18 organisasi, jakni: Perhimpunan Pegawai Spoor dan Tram (P.P.S.T.), Persatuan Guru Indonesia (P.G.I.), Vereniging van Indonesische personnel bij de Irrigatie, Waterstaat en Waterschappen (V.I.P.I.W.), Persekatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (P.P.P.B.), Landelijke Inkomsten Bond (L.I.B., Kadaster Bond, Perserikatan Kaum Sekerdja Boschwezen (P.K.S.B.), V.A.M.O.L.A., Pegawai Mijnbouw (P.M.B.), Persatuan Kaum Verplegers(sters) dan Vroedvrouwen (P.K.V.I.), P.P.A.V.B., Midpost, Opiumregie, P.P.T.R., V.O.L.T.A., P.M.M.B., P.P.P. dan O.R.B.H.B. Djumlah anggota perkumpulan² ini semuanya ada lk. 42.000.

Tetap tidak masuk dalam P.V.P.N. ialah perkumpulan² serikat sekerdja pegawai „pemegang pemerintahan” jaitu go-



Bapak R.P. Soeroso selaku Ketua Umum IKPN sedang diwawancarai oleh Sdr. Sutrisno Kutoyo dari Pusat Pen. Sejarah dan Budaya (waktu itu) Prof. DRH. R. Januar

longan pegawai pangreh pradja Indonesia (P.P.B.B., V.A.I.B. dan Bond van ongediplomeerden), pegawai polisi Indonesia, serdadu Indonesia dan serdadu Indonesia angkatan laut. Organisasi serdadu angkatan laut rusak-bubar sesudah pemberontakan th. 1932 dikawal pendjeladjah „de Zeven Provincien dan di-kawal² perang lain; pemberontakan ini disebabkan oleh perselisihan hal gadji (diadakan potongan gadji jang amat berat).

LAMPIRAN VII

Riwajat K.E.I. dengan ringkas

Pada tanggal 3 Juli 1940 karena koerang poeas dengan keadaan perekonomian bangsa Indonesia, berkoempoellah beberapa toean² jalah ttn. Soeroso, Soebardi, Soeradji, Soegirman, Soedibio dan pengarang ini, di tempat Petjenongan 50 oentoek memperbitjarakan keadaan perekonomian itoe dan oentoek mentjari djalan bagaimanakah dapat memperbaiki keadaan itoe. Pada malam hari itoe sebagai boeah pembitjaraan didirikan soeatoe perkoempoelan oentoek membangkitkan dan memadjoekan perekonomian Indonesia, menoeoeret fatsal 3 dari anggaran dasarnja, dengan djalan apapoen djoega asal djangan melanggar wet. Di rapat pada tanggal 10 Juli perkoempoelan diberi nama Kemadjoean Ekonomi Indonesia dan terpilih mendjadi pemimpin jalah pengarang ini.

Kloear dan masoek anggauta. Moela² K.E.I. tidak mengadakan propaganda hanja di kalangan anggauta sendir K.E.I. dibilitjarakan sedikit-sedikit tetapi di boelan April j.l. di soerat chabar Pemandangan dimoeat advertentie dari K.E.I. dan advertentie itoe roepa-roepanja berhasil djoega. djika kita melihat angka-angka masoek dan kloearnja anggauta.

Pekerjaan K.E.I. Sampai sekarang ini boeah pekerdjaan dari K.E.Ik beloem ternjata dan memang pada waktoe K.E.I. baroe berdiri berhoeboeng dengan sedikitnja anggauta-anggauta, keadaan peperangan dan banjaknja pekerjaan pengarang ini sebagai pemimpin dari „De Bataviasche” dan hanja Tn. Soebardi sebagai pembantoe, pekerdjaan K.E.I. tidak dikerdjakan sebagai semestinja. Hanja pada tanggal 13 Augustus ta-hoen jang laloe karena permintaan pengerooes K.E.I. di Club Indonesia di Kramt diadakan lezing oleh Toean Teko dari Economische Zaken dengan pertoendjoekan lantaarnplaatjes.

Di bolen Januari tahoen ini pengeroes dibantoe selain dari toean Soebardi djoega oleh Toean² Soedibio dan Soedarbo dan sedapat-dapatnja pada tiap² malam kemis kita berapat berkoempoel dikantor di Pertjenongan oentoek membitjarakan keperluan dan pekerdjaan perkoempoelan. Oleh rapat jang diadakan pada tanggal 5 Januari tahoen ini dipoetoeskan soepaja mendirikan soeatoe bank oentoek anggauta K.E.I. dengan modal sendiri dan pengeroes sendiri. Jang boleh membeli aandeel hanja anggauta-anggauta dari K.E.I.

Berita dari Kemadjuan Ekonomi Indonesia No. 5, April – Mei, 1941, Tahoen I, hal. 3.

R. P. SOEROSO

Perpustakaan
Jenderal Kes

920.0
AN